



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
DAN
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025-2045

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia;
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi;
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 2

RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut atas RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) RPJPD merupakan Penjabaran visi, misi yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan program prioritas pembangunan daerah.
- (2) RPJPD disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahunan yang memberikan arah serta pedoman bagi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

RPJPD berfungsi:

- a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan sasaran dan arah kebijakan prioritas program dan kegiatan yang akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b. Sebagai pedoman yang dapat dimanfaatkan bagi penyelenggara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, serta pemangku kepentingan pembangunan dalam menentukan arah pembangunan daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025, tetap berlaku sampai dengan masa perencanaannya selesai.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi

Di tetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26 Agustus 2024

BUPATI BANYUWANGI,



IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Di undangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 27 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,



H. MUJIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024 NOMOR 6
NOMOR REGISTER 173-7/2024



RPJPD

KABUPATEN BANYUWANGI

2025 - 2045





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2 DASAR HUKUM.....	I-2
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	I-5
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-6
1.5 SISTEMATIKA RANCANGAN.....	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	II-1
2.1.1 Administrasi Wilayah.....	II-1
2.1.2 Topografi.....	II-3
2.1.3 Geologi dan Jenis Tanah.....	II-4
2.1.4 Klimatologi.....	II-6
2.1.5 Hidrologi.....	II-7
2.1.6 Daya Dukung dan Daya Tampung.....	II-10
2.1.7 Penggunaan Lahan.....	II-27
2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-33
2.1.9 Kawasan Rawan Bencana.....	II-38
2.1.10 Demografi.....	II-55
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	II-61
2.2.1 Fokus Kesejahteraan Ekonomi.....	II-61
A. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	II-61
B. Angka Kemiskinan.....	II-63
C. Angka Pengangguran.....	II-66
D. Indeks Gini.....	II-69
2.2.1 Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya.....	II-71
A. Indeks Pembangunan Manusia.....	II-71
B. Indeks Pembangunan Keluarga.....	II-73
C. Indeks Perlindungan Anak.....	II-74
D. Umur Harapan Hidup.....	II-76
E. Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	II-77



F. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	II-78
G. Indeks Ketimpangan Gender	II-79
H. Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-80
2.3ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	II-81
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II-81
A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	II-81
B. PDRB per Kapita.....	II-84
C. Indeks Ekonomi Inklusif.....	II-86
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II-87
A. Indeks Pendidikan.....	II-87
B. Angka Literasi/Numerasi	II-88
C. Angka Ketergantungan.....	II-89
D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	II-91
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	II-93
A. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	II-93
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	II-96
A. Indeks Daya Saing Daerah	II-96
B. Indeks Kerukunan Umat Beragama	II-97
2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II-98
2.4.1 Pelayanan Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	II-98
A. Pendidikan.....	II-98
B. Kesehatan.....	II-99
C. Pekerjaan Umum dan Cipta Karya.....	II-103
D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-109
E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum).....	II-111
F. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Kebakaran)	II-112
G. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan)	II-114
H. Sosial	II-115
2.4.2 Pelayanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	II-116
A. Tenaga Kerja.....	II-116
B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-119
C. Pangan.....	II-120

D. Lingkungan Hidup	II-123
E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-126
F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-127
G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-129
H. Perhubungan	II-130
I. Komunikasi dan Informatika.....	II-135
J. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	II-139
K. Penanaman Modal	II-141
L. Kepemudaan dan Olahraga.....	II-143
M. Statistik	II-144
N. Persandian	II-146
O. Kebudayaan.....	II-147
P. Perpustakaan	II-149
Q. Kearsipan.....	II-150
2.4.3 Pelayanan Urusan Pilihan	II-151
A. Kelautan dan Perikanan.....	II-151
B. Pariwisata.....	II-154
C. Pertanian	II-156
D. Perdagangan.....	II-158
E. Perindustrian.....	II-160
F. Transmigrasi.....	II-161
2.4.4 Unsur Pendukung	II-162
A. Sekretariat Daerah	II-162
B. Sekretariat Dewan.....	II-165
2.4.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-166
A. Perencanaan.....	II-166
B. Keuangan.....	II-167
C. Kepegawaian	II-169
D. Pendidikan dan Pelatihan	II-171
E. Penelitian dan Pengembangan	II-172
2.4.6 Unsur Pengawas	II-174
A. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	II-174
2.4.7 Unsur Pemerintahan Umum.....	II-174
A. Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	II-174
2.5 EVALUASI RPJPD KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2005-2025	II-178

2.5.1	Evaluasi RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015.....	II-178
2.5.2	Evaluasi RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.....	II-181
2.5.3	Evaluasi RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.....	II-182
2.6	TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK	II-184
2.6.1	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi.....	II-184
2.6.2	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kabupaten Banyuwangi.....	II-188
A.	Proyeksi Kebutuhan Prasarana Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk.	II-188
B.	Proyeksi Kebutuhan Prasarana Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk	II-189
C.	Proyeksi Pengelolaan Persampahan.....	II-191
D.	Proyeksi Kebutuhan Rumah.....	II-194
E.	Proyeksi Kebutuhan Air.....	II-195
F.	Proyeksi Kebutuhan Listrik.....	II-195
2.7	PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN DAN ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	II-196
2.7.1	Arah Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kewilayahan Nasional	II-196
2.7.2	Arah Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kewilayahan Daerah Provinsi	II-201
2.7.3	Arah Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kewilayahan Kabupaten Banyuwangi.....	II-209
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	III-1
3.1	Permasalahan.....	III-1
3.2	Isu Strategis.....	III-6
3.2.1	Isu Global.....	III-6
3.2.2	Isu Nasional.....	III-10
3.2.3	Isu Regional.....	III-13
3.2.4	Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-14
3.2.5	Isu Strategis daerah.....	III-25
BAB IV	VISI DAN MISI.....	IV-1
4.1	Visi Daerah.....	IV-1
4.1.1	Sasaran Visi.....	IV-3
4.2	Misi Daerah.....	IV-5
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....	V-1

5.1	Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045.....	V-1
5.1.1	Arah Kebijakan Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial yang Unggul dan Berkeadilan.....	V-5
5.1.2	Arah Kebijakan Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berdaya Saing.....	V-8
5.1.3	Arah Kebijakan Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang bersih dan Berdampak	V-12
5.1.4	Arah Kebijakan Misi 4: Memantapkan Stabilitas Ketentraman, Ketertiban Dan Demokrasi.....	V-15
5.1.5	Arah Kebijakan Misi 5: Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya Daerah.....	V-17
5.1.6	Arah Kebijakan Misi 6: Membangun Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender.....	V-19
5.1.7	Arah Kebijakan Misi 7: Memantapkan Ketahanan Ekologi Untuk Keseimbangan Pembangunan	V-21
5.2.8	Arah Kebijakan Misi 8: Pemenuhan Infrastruktur Berkelanjutan dan Berkesinambungan	V-24
5.2	Sasaran Pokok Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045	V-27
BAB VI	PENUTUP	VI-1
6.1	TRANSISI.....	VI-1
6.2	KAIDAH PELAKSANAAN	VI-1
6.3	PENUTUP	VI-2





DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Hubungan Antar Dokumen Pembangunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi	I-6
Gambar II. 1 Peta Wilayah Kabupaten Banyuwangi	II-2
Gambar II. 2 Luas Tanah Berdasarkan Struktur Geologi Kabupaten Banyuwangi	II-5
Gambar II. 3 Persentase alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2023	II-28
Gambar II. 4 Persentase Jumlah Permohonan Pemanfaatan Ruang Yang Disetujui Karena Sudah Sesuai Dengan RTRW	II-29
Gambar II. 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi	II-30
Gambar II. 6 Persentase Keamanan Pangan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2023	II-36
Gambar II. 7 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi	II-39
Gambar II. 8 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Banyuwangi	II-45
Gambar II. 9 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banyuwangi	II-46
Gambar II. 10 Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Banyuwangi	II-47
Gambar II. 11 Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Banyuwangi	II-48
Gambar II. 12 Peta Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Banyuwangi	II-50
Gambar II. 13 Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Banyuwangi	II-51
Gambar II. 14 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Banyuwangi	II-52
Gambar II. 15 Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Banyuwangi	II-53
Gambar II. 16 Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banyuwangi	II-54
Gambar II. 17 Piramida Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023	II-58
Gambar II. 18 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi	II-60
Gambar II. 19 Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan	II-60
Gambar II. 20 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi	II-61
Gambar II. 21 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2023	II-62
Gambar II. 22 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2023	II-63
Gambar II. 23 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2023	II-64
Gambar II. 24 Garis Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi	II-64
Gambar II. 25 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2023	II-65



Gambar Il. 26 Angka Pengangguran di Kabupaten Banyuwangi.....	II-66
Gambar Il. 27 Angka Pengangguran Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023	II-68
Gambar Il. 28 Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Banyuwangi.....	II-70
Gambar Il. 29 Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023	II-70
Gambar Il. 30 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2023.....	II-72
.....	II-72
Gambar Il. 31 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023	II-73
.....	II-73
Gambar Il. 32 Umur Harapan Hidup Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004-2023	II-76
Gambar Il. 33 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2023	II-77
.....	II-77
Gambar Il. 34 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2023.....	II-78
.....	II-78
Gambar Il. 35 Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2023 ..	II-79
Gambar Il. 36 PDRB ADHK dan PDRB ADHB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2023	II-81
Gambar Il. 37 PDRB Per Kapita Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2023.....	85
Gambar Il. 38 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Wilayah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2023 (Juta Rupiah)	II-85
Gambar Il. 39 Indeks Ekonomi Inklusif di Kabupaten Banyuwangi.....	II-86
Gambar Il. 40 Indeks Pendidikan Kabupaten Banyuwangi di Tahun 2010-2022.....	II-88
Gambar Il. 41 Angka Ketergantungan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2023.....	II-90
Gambar Il. 42 TPAK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009-2023.....	II-91
Gambar Il. 43 TPAK Perempuan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2023	II-92
Gambar Il. 44 <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i> Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2023.....	II-98
Gambar Il. 45 Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.....	II-99
Gambar Il. 46 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Banyuwangi	II-100
Gambar Il. 47 Presentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Banyuwangi	II-101
Gambar Il. 48 Persentase Balita Stunting di Kabupaten Banyuwangi.....	II-102
Gambar Il. 49 Persentase Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Banyuwangi.....	II-105
Gambar Il. 50 Persentase Ketersediaan Air Irigasi di Kabupaten Banyuwangi.....	II-107
Gambar Il. 51 Persentase Ketersediaan Air Bersih di Kabupaten Banyuwangi.....	II-108
Gambar Il. 52 Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak dan Terjangkau di Kabupaten Banyuwangi	II-109

Gambar II. 53 Proporsi Rumah Tangga Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja di Kabupaten Banyuwangi	II-110
Gambar II. 54 Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani di Kabupaten Banyuwangi.....	II-111
Gambar II. 55 Cakupan Tercapainya <i>Respon Time</i> (15 Menit) Layanan Penanggulangan Kebakaran pada Wilayah Manajemen Kebakaran di Kabupaten Banyuwangi	II-113
Gambar II. 56 Persentase Penanganan Pasca Bencana di Kabupaten Banyuwangi.....	II-114
Gambar II. 57 Persentase Pelayanan PMKS di Kabupaten Banyuwangi	II-116
Gambar II. 58 Indikator Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi.....	II-117
Gambar II. 59 TPAK Perempuan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2023	II-118
Gambar II. 60 Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Banyuwangi	II-120
Gambar II. 61 Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi di Kabupaten Banyuwangi	II-121
Gambar II. 62 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Banyuwangi Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024	II-122
Gambar II. 63 Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan	II-123
Gambar II. 64 Persentase Sampah yang Dikelola di Kabupaten Banyuwangi.....	II-125
Gambar II. 65 Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di.....	II-126
Gambar II. 66 Indeks Desa Membangun di Kabupaten Banyuwangi.....	II-128
Gambar II. 67 Cakupan KB Aktif di Kabupaten Banyuwangi.....	II-129
Gambar II. 68 Usia Kawin Pertama (UKP) dibawah 21 Tahun di Kabupaten Banyuwangi .	II-130
Gambar II. 69 Jumlah Angkutan Umum di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2023.....	II-131
Gambar II. 70 Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas per 100.000 penduduk di	II-132
Gambar II. 71 <i>Volume/Capacity (V/C) Rasio Jalan di Kabupaten Banyuwangi</i>	II-133
Gambar II. 72 <i>Rasio Konektivitas Kabupaten Banyuwangi</i>	II-134
Gambar II. 73 Persentase Aplikasi e- <i>Government</i> yang Berfungsi Baik	II-136
Gambar II. 74 Persentase Aplikasi IT yang Mendukung <i>City Branding</i> dan Layanan Publik yang Berfungsi Baik di Kabupaten Banyuwangi.....	II-137
Gambar II. 75 Indeks SPBE Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2023	II-138
Gambar II. 76 Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Banyuwangi	II-140
Gambar II. 77 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ...	II-141
Gambar II. 78 Jumlah Nilai Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah) Kabupaten Banyuwangi	II-142
Gambar II. 79 Persentase Pemuda Terampil di Kabupaten Banyuwangi.....	II-143

Gambar Il. 80 Persentase Prestasi Olahraga Kabupaten Banyuwangi	Il-144
Gambar Il. 81 Indikator Urusan Statistika Kabupaten Banyuwangi.....	Il-145
Gambar Il. 82 Indikator Urusan Persandian Kabupaten Banyuwangi.....	Il-146
Gambar Il. 83 Jumlah Budaya Lokal yang Dikembangkan menjadi Daya Tarik Wlsata di Kabupaten Banyuwangi	Il-148
Gambar Il. 84 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi.....	Il-150
Gambar Il. 85 Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Banyuwangi.....	Il-153
Gambar Il. 86 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Banyuwangi	Il-153
Gambar Il. 87 Indikator Urusan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	Il-155
Gambar Il. 88 PDRB ADHK dan ADBH Sektor Pertanian Kabupaten Banyuwangi.....	Il-156
Gambar Il. 89 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya per Hektar di	Il-157
Gambar Il. 90 Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi	Il-159
Gambar Il. 91 Persentase Peningkatan Nilai Penjualan/Omzet Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyuwangi	Il-160
Gambar Il. 92 Nilai Produksi dan Investasi IKM di Kabupaten Banyuwangi.....	Il-161
Gambar Il. 93 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi.....	Il-163
Gambar Il. 94 Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP Kabupaten Banyuwangi.....	Il-164
Gambar Il. 95 Raperda yang Disahkan menjadi Perda Tepat Waktu di Kabupaten Banyuwangi	Il-165
Gambar Il. 96 Indikator Urusan Perencanaan Kabupaten Banyuwangi.....	Il-166
Gambar Il. 97 Indikator Unsur Penunjang Keuangan di Kabupaten Banyuwangi.....	Il-168
Gambar Il. 98 Persentase Pegawai yang Berkinerja Baik di Kabupaten Banyuwangi.....	Il-170
Gambar Il. 99 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Banyuwangi.....	Il-170
Gambar Il. 100 Indeks penerapan Sistem Merit di Kabupaten Banyuwangi.....	Il-171
Gambar Il. 101 Indikator Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Banyuwangi	Il-171
Gambar Il. 102 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi	Il-172
Gambar Il. 103 Peningkatan Pendidikan Politik di Masyarakat Kabupaten Banyuwangi...	Il-175
Gambar Il. 104 Terwujudnya Penanganan Konflik di Kabupaten Banyuwangi.....	Il-177
Gambar Il. 105 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banyuwangi	Il-186
Gambar Il. 106 Proyeksi Proporsi Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Banyuwangi....	Il-187
Gambar Il. 107 Aliran Sampah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021	Il-192
Gambar Il. 108 Isu Wilayah dan Sarana Prasarana dalam RPJPN 2025-2045	Il-197
Gambar Il. 109 Klasifikasi Koridor Ekonomi berdasarkan Potensi Wilayah	Il-198
Gambar Il. 110 Arah Kebijakan Pulau Jawa.....	Il-199



Gambar II. 111 Sistem Wilayah Fungsional Jawa Timur	II-200
Gambar II. 112 Arah Pembangunan Koridor Agrikultur Wilayah Tapal Kuda.....	II-201
Gambar II. 113 Peta Persebaran Pusat kegiatan Provinsi Jawa Timur	II-203
Gambar II. 114 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044	II-212
Gambar II. 115 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044	II-215
Gambar II. 116 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044....	II-216
Gambar III. 1 Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi	III-18
Gambar III. 2 Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun di Kabupaten Banyuwangi	III-19
Gambar III. 3 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Banyuwangi	III-20
Gambar III. 4 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum & Sanitasi Layak di Kabupaten Banyuwangi	III-21
Gambar III. 5 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Banyuwangi	III-23
Gambar III. 6 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Banyuwangi	III-25
Gambar IV. 1 Visi Kabupaten Banyuwangi 2025-2045	IV-2
Gambar IV. 2 Misi Kabupaten Banyuwangi 2025-2045	IV-5
Gambar V. 1 Tahapan Kebijakan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045	V-2
Gambar V. 2 Tahapan Arah Kebijakan per Misi RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045	V-5
Gambar V. 3 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Misi 1.....	V-5
Gambar V. 4 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Misi 2.....	V-9
Gambar V. 5 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Misi 3.....	V-13
Gambar V. 6 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Misi 4.....	V-15
Gambar V. 7 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Misi 5.....	V-17
Gambar V. 8 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Misi 6.....	V-19
Gambar V. 9 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Misi 7.....	V-22
Gambar V. 10 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Misi 8	V-24
Gambar V. 11 Sasaran Visi, dan Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyuwangi	V-28



DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023.....	II-2
Tabel II. 2 Persebaran Wilayah berdasarkan Ketinggian Tanah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023.....	II-4
Tabel II. 3 Luas dan Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Banyuwangi	II-5
Tabel II. 4 Nama Sungai dan Panjang di Kabupaten Banyuwangi	II-7
Tabel II. 5 Daya Dukung Ruang Tinggal Hidup.....	II-10
Tabel II. 6 Status Daya Dukung Ruang Tinggal Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi	II-12
Tabel II. 7 Proyeksi Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Banyuwangi 2022, 2025-2045.....	II-21
Tabel II. 8 Analisis Penghitungan Daya Dukung Pangan di Tiap-tiap Kecamatan Selama 20 Tahun	II-23
Tabel II. 9 Analisis Kebutuhan Air Pada Akhir Kabupaten Banyuwangi	II-24
Tabel II. 10 Penghitungan Daya Dukung Air di Tiap-tiap Kecamatan Selama 20 Tahun.....	II-26
Tabel II. 11 Penggunaan Lahan di Kabupaten Banyuwangi.....	II-27
Tabel II. 12 Potensi Penurunan Emisi Kabupaten Banyuwangi.....	II-32
Tabel II. 13 Kontribusi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor Kabupaten Banyuwangi.....	II-32
Tabel II. 14 Produktivitas dan Total Produksi Tanaman Bahan Makanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2023.....	II-33
Tabel II. 15 Tabel 2. 8 Produktivitas dan Total Produksi Sayur-Sayuran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2023.....	II-34
Tabel II. 16 Produktivitas dan Total Produksi Buah-Buahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2023	II-35
Tabel II. 17 Produktivitas dan Total Produksi Perkebunan Kabupaten Banyuwangi.....	II-36
Tabel II. 18 Populasi Hewan Ternak Tahun 2023	II-37
Tabel II. 19 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Banyuwangi	II-40
Tabel II. 20 Pemetaan Wilayah Rawan Banjir di Kabupaten Banyuwangi	II-41
Tabel II. 21 Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan.....	II-55
Tabel II. 22 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	II-57
Tabel II. 23 Jumlah Penduduk Menurut Kepercayaan yang Dianut.....	II-59
Tabel II. 24 Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022	II-74
Tabel II. 25 Hasil Capaian IPA, IPHA dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota	II-75

Tabel II. 26 Perkembangan Nilai PDRB ADHB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014-2023..	II-83
Tabel II. 27 Indikator Literasi/Numerasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2023	II-89
Tabel II. 28 Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur(IKLI) Kabupaten Banyuwangi	
.....	II-93
Tabel II. 29 IKLI Penataan Ruang di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2023	II-94
Tabel II. 30 IKLI Keciptakaryaannya di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2023.....	II-95
Tabel II. 31 IKLI Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2023.....	
.....	II-95
Tabel II. 32 IKLI Kebinamargaannya di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2023.....	II-96
Tabel II. 33 Capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Banyuwangi.....	II-96
Tabel II. 34 Ruas Jalan Menurut Statusnya di Kabupaten Banyuwangi.....	II-104
Tabel II. 35 Indikator Urusan Perpustakaan Kabupaten Banyuwangi	II-149
Tabel II. 36 Indikator Urusan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi.....	II-162
Tabel II. 37 Predikat SAKIP Kabupaten Banyuwangi	II-165
Tabel II. 38 Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015.....	II-180
Tabel II. 39 Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021	II-182
Tabel II. 40 Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026	II-183
Tabel II. 41 Proyeksi Penduduk Kabupaten Banyuwangi 2025-2045	II-184
Tabel II. 42 Proyeksi Penduduk Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Komponen Penduduk Tahun 2025-2045	II-185
Tabel II. 43 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk.....	II-189
Tabel II. 44 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk.....	II-190
Tabel II. 452 Estimasi Total Timbulan Sampah Per Tahun <i>di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2040</i>	II-193
Tabel II. 46 Kebutuhan Sarana TPS3R Kabupaten Banyuwangi dalam 20 Tahun Kedepan.....	
.....	II-194
Tabel II. 47 Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Banyuwangi 2023-2045.....	II-194
Tabel II. 48 Proyeksi Kebutuhan Air di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045	II-195
Tabel II. 49 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045	II-196
Tabel III. 1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi.....	III-2
Tabel III. 2 Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk di Kabupaten Banyuwangi Tahun 20218-2022.....	III-22
Tabel III. 3 IKA, IKL, dan Persentase Sampah yang Dikelola di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2022.....	III-24

Tabel III. 4 Penyandingan Isu Nasional, Jawa Timur, KLHS RPJPD Kabupaten Banyuwangi dengan Isu Strategis Kabupaten Banyuwangi dan Simpulan Isu strategis dari RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 – 2045.....	III-34
Tabel IV. 1 Target Sasaran Utama Visi Pembangunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045.....	IV-4
Tabel IV. 2 Linieritas Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045	IV-6
Tabel V. 1 Arah Kebijakan Transformatif Misi 1 RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045	V-7
Tabel V. 2 Arah Kebijakan Transformatif Misi 2 RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045	V-10
Tabel V. 3 Arah Kebijakan Transformatif Misi 3 RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045	V-14
Tabel V. 4 Arah Kebijakan Transformatif Misi 4 RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045	V-17
Tabel V. 5 Arah Kebijakan Transformatif Misi 5 RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045	V-19
Tabel V. 6 Arah Kebijakan Transformatif Misi 6 RPJPD Kabupaten Banyuwangi.....	V-21
Tabel V. 7 Arah Kebijakan Transformatif Misi 7 RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045	V-23
Tabel V. 8 Arah Kebijakan Transformatif Misi 8 RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045	V-26
Tabel V. 9 Sasaran Pokok dan Indikator RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045.....	-28







BAB I

PENDAHULUAN


1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional dan regional penyusunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 tidak dapat dipisahkan dan memiliki keterkaitan erat dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045. RPJPD Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk mendukung dan mengimplementasikan visi, misi, arah pembangunan, dan sasaran pokok arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045. RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 menjamin keselarasan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang 20 Tahun kedepan yang berpedoman pada RPJPN dan RPJPD

RPJPD Kabupaten Banyuwangi juga sejalan dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045. Kerjasama dan koordinasi antara tingkat kabupaten dan provinsi sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan secara menyeluruh. Pemetaan program prioritas, alokasi sumber daya, dan sinergi pembangunan antarwilayah menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan jangka panjang di tingkat regional. Linieritas dan keterkaitan antara dokumen perencanaan baik dalam dimensi Tingkat pemerintahan maupun waktu dan tahapan perencanaannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Adanya norma tersebut menegaskan secara eksplisit, bahwa dokumen pentahapan perencanaan pembangunan daerah diwajibkan adanya keseragaman dengan pentahapan dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 pada Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. RPJPD merupakan dokumen





perencanaan pembangunan Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro berwawasan dua puluh tahun dan memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Daerah, yang kemudian akan digunakan sebagai acuan oleh Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi dan program yang dituangkan dalam penyusunan RPJMD periode 5 (lima) tahunan. RPJMD kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun.

Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi secara umum dibagi menjadi dua fase utama, yaitu Rancangan Awal RPJPD dan Rancangan Akhir RPJPD. Pada tahap awal, langkah-langkah teknis telah dilaksanakan, termasuk kick-off meeting, forum perangkat daerah, dan forum konsultasi publik RPJPD. Setelahnya, proses dilanjutkan dengan penyamaan persepsi antara eksekutif dan DPRD terkait rancangan awal RPJPD, yang kemudian melibatkan konsultasi dengan gubernur untuk memastikan keselarasan visi.


Selanjutnya, setelah rancangan awal RPJPD disepakati, tahapan selanjutnya mencakup musrenbang, kesepakatan dengan DPRD, dan konsultasi gubernur tahap kedua. Proses musrenbang dan kesepakatan dengan DPRD menjadi momen penting dalam mendapatkan masukan dan dukungan stakeholders, sementara konsultasi gubernur tahap kedua menjadi langkah akhir sebelum RPJPD menjadi rancangan akhir. Dengan demikian, tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi mencerminkan kerangka partisipatif dan koordinatif yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan bersama terkait arah pembangunan jangka panjang daerah.

1.2 DASAR HUKUM


Penyusunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 merujuk pada beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);




- 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



- 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
 19. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);



- 
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana Diubah Dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123).

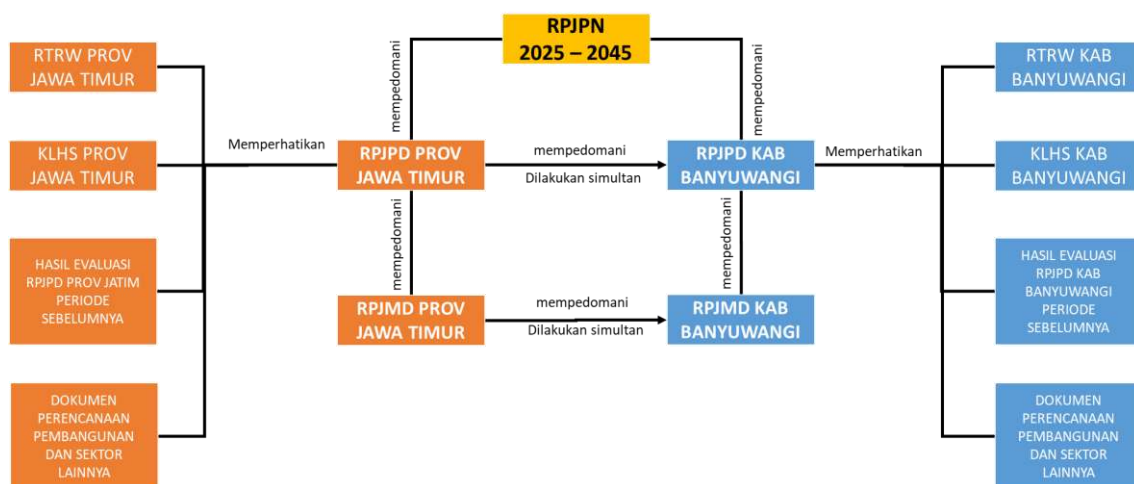
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 selaras dan berpedoman kepada RPJPN 2025-2045 terutama terkait arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator yang sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah. Penyusunannya dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN 2025-2045 serta RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045.



Penyusunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 juga memperhatikan hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya dan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Substansi Hasil Evaluasi RPJPD Periode Sebelumnya yang diperhatikan yaitu hasil capaian Pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Selain itu, memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045. Substansi KLHS yang diperhatikan yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis.

RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW dan mempedomani RTRW Provinsi Jawa Timur. Substansi RTRW yang dipedomani yaitu arah pengembangan wilayah. Keterkaitan penyusunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 sebagaimana dijelaskan di atas dengan dokumen lainnya terlihat pada gambar di bawah ini:




Gambar I. 1 Hubungan Antar Dokumen Pembangunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

Sumber: Diolah, 2023

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2045 memiliki tujuan utama dalam menciptakan suatu kerangka kerja yang komprehensif. RPJPD ini bertujuan untuk memberikan arahan yang jelas dalam mengelola dan mengarahkan pembangunan di wilayah tersebut. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi masalah-masalah utama, potensi, dan peluang pembangunan yang dapat menjadi landasan bagi kebijakan dan program pemerintah daerah.



Dokumen RPJPD ini memegang peran kunci sebagai panduan strategis bagi pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dengan memahami dinamika masalah dan peluang yang ada, pemerintah dapat merancang kebijakan, program, dan proyek yang tepat sasaran. Langkah ini diharapkan dapat memastikan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, dengan memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, RPJPD juga berperan sebagai alat untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mengkoordinasikan upaya pembangunan yang dilakukan oleh berbagai sektor dan pemangku kepentingan di Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian, penyusunan RPJPD bukan hanya sebagai sebuah dokumen rencana, melainkan sebagai instrumen strategis yang secara efektif mendukung visi pembangunan jangka panjang daerah, bertujuan untuk membawa perubahan positif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi.


Adapun tujuan utama penyusunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Mengarahkan pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan visi dan arah pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan sosial, dan pelestarian lingkungan.
2. Mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah utama yang dihadapi oleh Kabupaten Banyuwangi, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan ketahanan lingkungan.
3. Mengintegrasikan perencanaan jangka panjang di Kabupaten Banyuwangi konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sehingga pembangunan di tingkat lokal mendukung visi pembangunan nasional.
4. Mengoptimalkan potensi lokal seperti sektor Pertanian untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan diversifikasi sumber daya.
5. Memperkuat partisipasi stakeholder melalui pelibatan aktif partisipasi masyarakat, sektor swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Menyediakan panduan strategis kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan pembangunan jangka panjang, memastikan alokasi sumber daya yang efektif dan efisien.

1.5 SISTEMATIKA RANCANGAN

Dokumen Rancangan RPJPD Kabupaten Banyuwangi ini disusun dengan sistematika 6 bagian utama yaitu, berikut ini adalah penjabarannya:





BAB I Pendahuluan yang memuat setidaknya latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat setidaknya refleksi pembangunan jangka Panjang 2005-2025, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005 – 2025 , tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan yang memuat: (1) penjelasan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah; dan (2) Menjelaskan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana sesuai wilayah masing-masing berdasarkan Undang Undang tentang RPJPN 2025-2045.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis yang memuat analisis permasalahan dan pemetaan isu strategis pembangunan jangka panjang di Kabupaten Banyuwangi.

BAB IV Visi dan Misi Daerah yang memuat setidaknya (1) Visi daerah Tahun 2025-2045 dan (2) Misi daerah 2025-2045

BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok yang memuat penjabaran arah kebijakan dalam 4 (empat) periode pembangunan jangka panjang daerah yaitu (a). Arah Kebijakan Periode 2025-2029 (b). Arah Kebijakan Periode 2030-2034 (c). Arah Kebijakan Periode 2035-2039 (d). Arah Kebijakan Periode 2040-2044. Selaian itu pada bab ini juga terdapat penjelasan mengenai Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025- 2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level impact dan bersifat progresif.

BAB VI Penutup





BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

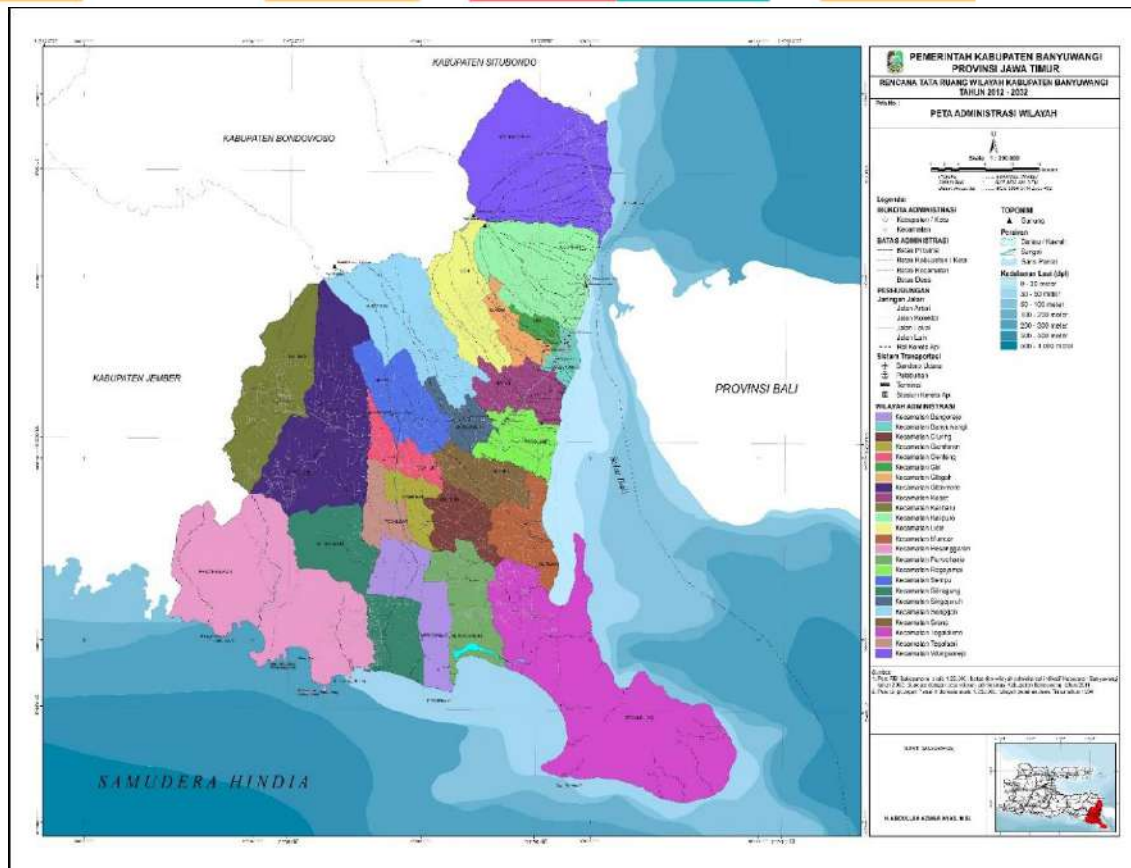
Perencanaan pembangunan setiap daerah didasarkan pada karakteristik dan fenomena yang berbeda-beda sesuai dengan potensi serta kebutuhan pembangunan di daerah tersebut. Kekayaan budaya lokal dan berbagai faktor seperti geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda dapat menjadi aset yang berharga jika dimanfaatkan dengan baik dalam konteks pembangunan daerah. Kabupaten Banyuwangi, sebagai kabupaten terbesar di Provinsi Jawa Timur, memiliki banyak potensi sumber daya, termasuk di sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perindustrian, dan kelautan. Potensi tersebut dapat dioptimalkan sebagai peluang positif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah perlu dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan potensi daerah tersebut dalam rangka memungkinkan penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal dan penetapan prioritas serta strategi yang sesuai dalam pembangunan. Pemahaman yang komprehensif terkait kondisi sektoral Kabupaten Banyuwangi diperlukan sebagai dasar yang kuat dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, yang didasarkan pada pemetaan objektif dan analisis data yang valid.

2.1.1 Administrasi Wilayah

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Lokasi Kabupaten Banyuwangi secara geografis berada di ujung Pulau Jawa pada koordinat antara 7° 43' - 8° 46' Lintang Selatan dan 113° 53' - 114° 38' Bujur Timur dan berbatasan langsung dengan Selat Bali yang menjadikan Kabupaten Banyuwangi mendapat julukan sebagai *"The Sunrise of Java"* dengan luas wilayah sekitar 3.593 KM². Topografi wilayah daratan yang dimiliki terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan, dataran rendah dengan potensi pertanian dan wilayah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Batas administratif wilayah Kabupaten Banyuwangi meliputi:

- | | | |
|----|-----------------|----------------------------------|
| a. | Sebelah Utara | : Kabupaten Situbondo |
| b. | Sebelah Timur | : Selat Bali |
| c. | Sebelah Selatan | : Samudera Hindia |
| d. | Sebelah Barat | : Kabupaten Jember dan Bondowoso |





Gambar II. 1 Peta Wilayah Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2024

Wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi terbagi dalam 189 desa/kelurahan yang tersebar dalam 25 kecamatan. Wilayah kecamatan dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak adalah Kecamatan Banyuwangi dengan 18 kelurahan dan Kecamatan Kabat dengan 14 Desa. Berikut merupakan pembagian wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi secara lebih lengkap:

Tabel II. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1	Pesanggaran	5	-
2	Siliragung	5	-
3	Bangorejo	7	-
4	Purwoharjo	8	-
5	Tegaldlimo	9	-
6	Muncar	10	-
7	Cluring	9	-
8	Gambiran	6	-

No	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
9	Tegalsari	6	-
10	Glenmore	7	-
11	Kalibaru	6	-
12	Genteng	5	-
13	Srono	10	-
14	Rogojampi	10	-
15	Kabat	14	-
16	Singojuruh	11	-
17	Sempu	7	-
18	Songgon	9	-
19	Glagah	10	2
20	Licin	8	-
21	Banyuwangi	-	18
22	Giri	2	4
23	Kalipuro	5	4
24	Wongsorejo	12	-
25	Blimbingsari	10	-
TOTAL		189	28

Sumber: Kabupaten Banyuwangi dalam Angka, 2024

2.1.2 Topografi

Topografi wilayah adalah gambaran atau deskripsi tentang bentuk dan susunan permukaan suatu wilayah atau daerah. Kabupaten Banyuwangi memiliki topografi wilayah yang variatif mulai dari pantai, dataran rendah, hingga pegunungan yang tinggi. Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya pegunungan dan bagian selatan sebagian besar dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40°, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Dataran rendah sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15°, dengan rata-rata curah hujan cukup memadai. Ketinggian tanah di Kabupaten Banyuwangi mencapai 0–2.500-meter dari permukaan laut dan berdasarkan klasifikasi Wilayah Tanah Usaha (WTU) ketinggian tersebut dibedakan atas:

Tabel II. 2 Persebaran Wilayah berdasarkan Ketinggian Tanah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023

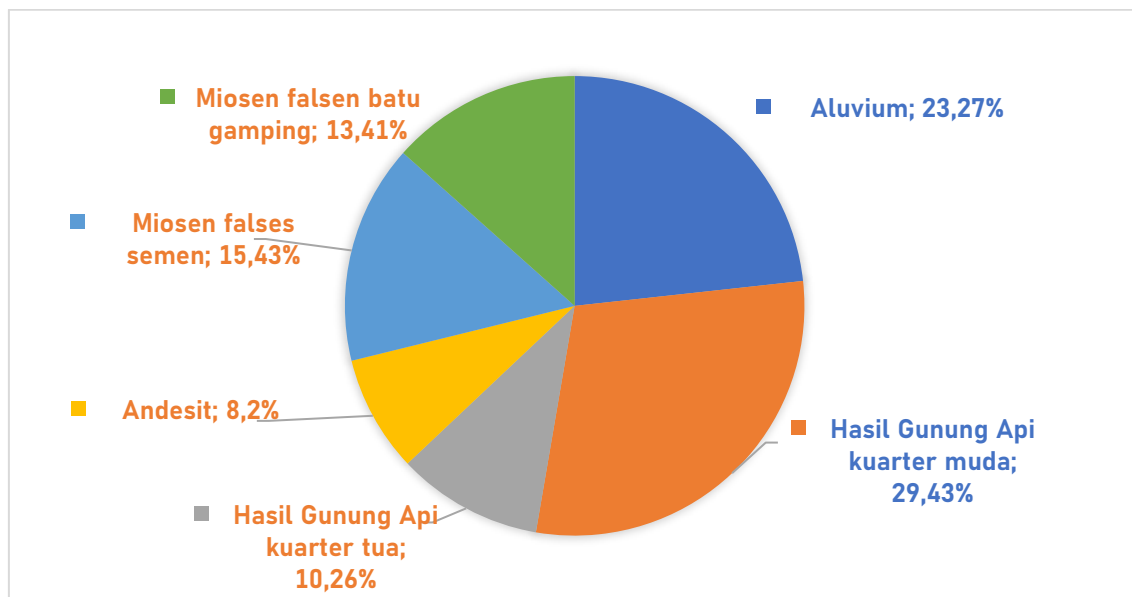
No	Ketinggian Tanah	Persebaran Wilayah
1	0 – 50 mdpl	Wilayah dengan dataran rendah, ataupun wilayah yang berada di sekitar kawasan pantai, meliputi Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Banyuwangi, Kabat, Blimbingsari, Rogojampi, Muncar, Purwoharjo, Tegaldimo, Bangorejo, Siliragung, dan Pesanggaran.
2	50 – 100 mdpl	Sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah, Licin, Kabat, Rogojampi, Srono, Cluring, Purwoharjo, Bangorejo, Siliragung dan Pesanggaran.
3	100 – 500 mdpl	Sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah Licin, Kabat, Cluring, Singojuruh, Rogojampi, Genteng, Sempu, Songgon, Glenmore, Kalibaru, Tegaldimo, Siliragung, Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Gambiran, Tegalsari.
4	500 – 1000 mpdl	Wilayah berbukit yang meliputi sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Licin, Songgon, Sempu, Glenmore, Kalibaru, Siliragung, Pesanggaran.
5	1000 – 2000 mdpl	Daerah pegunungan terletak di sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Glenmore, dan Kalibaru;
6	>2000 mdpl	Sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Glenmore dan Kalibaru.

Sumber: Kabupaten Banyuwangi dalam Angka, 2024

2.1.3 Geologi dan Jenis Tanah

Kondisi geologi merujuk pada posisi atau lokasi suatu daerah atau wilayah dalam konteks lempeng bumi. Setiap wilayah memiliki karakteristik geologi yang berbeda, dan karakteristik ini memainkan peran penting dalam pembentukan ciri khas lahan di wilayah tersebut. Jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi, yang didasarkan pada struktur

geologi, memiliki berbagai susunan atau struktur geologi yang beragam sebagaimana berikut:



Gambar II. 2 Luas Tanah Berdasarkan Struktur Geologi Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui sebagian besar luas tanah di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan struktur geologinya adalah berjenis hasil gunung api kuartir muda sebesar 29.43% dengan total luas 170.310,50 Ha, alluvium 23.27% dengan total luas 134.525,00 Ha, miosen falses semen 15.43% seluas 89.177,25 Ha, miosen falsen batu gamping 13.41% seluas 77.536,50 Ha, hasil gunung api kuartir tua 10.26% dengan luas 59,283.00 Ha dan andesit 8.20 dengan total luas 47.417,75 Ha. Sedangkan berdasarkan keadaan jenis tanahnya, Kabupaten Banyuwangi memiliki jenis tanah diantaranya podsolik, aluvium, lithosol, gambut, lathosol, dan andesit. Adapun luas dan sebaran jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Tabel II. 3 Luas dan Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Banyuwangi

Jenis Tanah	Luas		Persebaran Jenis Tanah
	Ha	Persentase (%)	
Podsolik	348,684.8	60.4	Terdapat pada seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi kecuali wilayah Kecamatan Cluring, Purwoharjo dan Muncar
Aluvium	138,490.9	24	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Wongsorejo • Kecamatan Kalipuro • Kecamatan Glagah • Kecamatan Songgon

Luas			
Jenis Tanah	Ha	Persentase (%)	Persebaran Jenis Tanah
			<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Glenmore • Kecamatan Gambiran • Kecamatan Bangorejo • Kecamatan Cluring • Kecamatan Muncar • Kecamatan Purwoharjo • Kecamatan Tegaldlimo.
Lithosol	39,031.9	6.8	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kalibaru • Kecamatan Glenmore • Kecamatan Pesanggaran
Gambut	37,433.7	6.5	
Lathosol	14,109.3	2.4	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Purwoharjo • Kecamatan Tegaldlimo
Andesit	47,417.8	8.2	

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2024

2.1.4 Klimatologi

Kabupaten Banyuwangi terletak di selatan equator yang dikelilingi oleh Laut Jawa, Selat Bali dan Samudra Indonesia dengan iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

1. Rata-rata curah hujan selama tahun 2022 sebesar 133.7 mm. Curah hujan terendah terjadi pada Bulan Juli yaitu 15.7 mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari mencapai 335.2 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 124 hari;
2. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2023 mencapai 78.11%. Kelembaban terendah terjadi pada Bulan Desember dengan rata-rata kelembaban udara sebesar 73.1%. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Februari dengan besaran 85.4%;
3. Suhu rata-rata di tahun 2023 adalah sekitar 27.11 derajat Celsius. Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada Bulan Juli sebesar 26.2 derajat celcius. Sedang tertinggi pada Bulan Mei sebesar 27.4 derajat celcius.
4. Rata-rata kecepatan angin di tahun 2023 adalah sekitar 3.86 knot. Rata-rata kecepatan angin tertinggi terjadi di bulan September sekitar 4.6 knot, sedang terendah pada bulan Februari sebesar 2.9 knot.

2.1.5 Hidrologi

Kondisi hidrologi dapat menunjukkan kondisi sumber daya air yang terdapat di wilayah perencanaan. Kabupaten Banyuwangi mempunyai potensi sumber air yang cukup banyak, pada umumnya sungai-sungai yang ada mempunyai aliran yang cukup. Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu kawasan atau area yang dikelilingi oleh beberapa titik alami yang terletak pada dataran tinggi. Titik-titik tersebut berfungsi sebagai wadah penampungan air hujan yang turun di kawasan tersebut. Fungsi utama DAS terkait dengan masalah hidrologis, yaitu sangat dipengaruhi oleh curah hujan yang turun, faktor geologi dan bentuk lahan. Fungsi hidrologis meliputi kapasitas DAS mengalirkan air, menyangga kondisi puncak hujan, mengalirkan air secara bertahap, memelihara kualitas air dan mengurangi pembuangan massa seperti longsor tanah. Berikut merupakan rincian Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir wilayah Banyuwangi:

Tabel II. 4 Nama Sungai dan Panjang di Kabupaten Banyuwangi

No	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	D.A.S Bajulmati	
	K. Maelang	7.777
	K. Tangkup	14.173
	Cr. Sono	3.652
	Cr. Badulan	3.304
2	K. Bajulmati Kanan	20.000
	D.A.S Sodong	
	Sodong	2.850
3	D.A.S Widoro Porong	
	Widoro Porong	3.478
	Patemon	3.391
4	D.A.S Curah Alas Buluh	
	Cr. Alas Buluh	2.222
5	D.A.S Selogiri	
	Selogiri	6.173
6	D.A.S Sebani	
	Sebani	2.782
7	D.A.S Paleran	
	Paleran	6.086
8	D.A.S Dani	
	Paleran	5.391
9	D.A.S Ketapang	
	Ketapang	7.826
	Secang	6.666
10	D.A.S Kali Klatak	
	Kali Klatak	15.656
	Trongsing	10.176
11	D.A.S Sukowidi	
	Kelir	14.444

No	Nama Sungai	Panjang (Km)
	Sukowidi	10.868
	Buluh	5.940
12	D.A.S K.Banyuwangi	
	K. Wilayu	
	K. Laos Ancar Kiri	10.260
	K. Banyuwangi	8.695
	K. Lele	8.434
	K. Loo	9.652
13	D.A.S Bendo	
	Bendo	15.826
	Jong Mergi	13.888
	Sobo	6.543
14	D.A.S Pakis	
	Pakis	7.043
15	D.A.S Tambong	
	Panggung	3.542
	Jambu	6.111
	Secawan	20.689
	Bungu	10.347
	Cinde	4.483
	Kedawung	10.000
	Pakuda	8.333
	Tambong	24.347
	Danti	3.913
	Temboyo	3.888
	Petung	4.750
16	D.A.S Donosuka	
	Donosuka	8.333
	Cekaitan	5.440
17	D.A.S Lungun	16.666
18	D.A.S Binau	
	Binau	21.379
	Lateng	9.565
	Rawan	13.043
	Tuban	8.974
	Bate	15.283
19	D.A.S Bomo	
	Kumbo	12.173
	Kemapak	6.111
	Mengarang	23.226
	Bomo	7.947
20	D.A.S Blambangan	
	Blambangan	22.000
	Sempu	10.010
	Pandan	20.000
	Curah Wuluh	5.674
	Genting	10.450
	Suko	16.500
	Sumbermangku	7.000

No	Nama Sungai	Panjang (Km)
	Tapan	4.000
	K. Kepisah	15.000
	Bekulo	18.000
21	D.A.S Komis	
	Komis	5.000
	Lateng	5.250
22	D.A.S Setail	
	Setail	40.100
	Jalen	19.080
	Tugung	18.000
	Jambewangi	13.500
	Curahgulung	2.500
	Kedawung	8.000
	Jaran	3.000
	Pandan	20.000
	Mangli	10.800
	Bekulo	18.000
	Suko	16.560
	Swaloh	20.000
23	D.A.S Blambangan	
	Barumanis	20.008
	Sumberbaru	8.250
	Telpon	18.250
	Cerung	3.250
	Takir	11.700
	Mangis	18.000
	Sepanjang	14.200
	Kempit	17.000
	Porolinggo	30.000
	Salam	6.000
	Wadung	13.000
	Kajar	12.580
	Pakem	4.025
	Sarbiniti	3.015
	Petung	3.100
	Kupuk	3.500
	Pinang	4.000
	Ontobugo	5.500
	Stopel	5.000
	Curah Lele	4.250
	Curah Sanepo	4.000
	Bogem	6.000
	Curah Pait	5.000
	Bero	2.500
24	D.A.S Kaligung	
25	D.A.S Sarongan	
26	D.A.S Kandangan	
	D.A.S Lembu	1.250.000
	D.A.S Trembelang	6.000

No	Nama Sungai	Panjang (Km)
	D.A.S Bangorejo	
	D.A.S Besaran	
	D.A.S Kedungrejo	8.000
	D.A.S Karang Bendo	
	D.A.S Kemut	
	D.A.S Gambiran	65.000
	D.A.S Bulu Agung	550.000

Sumber: Kabupaten Banyuwangi dalam Angka, 2024

2.1.6 Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu. Analisis daya dukung (*carrying capacity ratio*) merupakan suatu alat perencanaan pembangunan yang memberikan gambaran hubungan antara penduduk, penggunaan lahan dan lingkungan. Berikut merupakan hasil analisis dalam KLHS RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 yang terbagi dalam tiga aspek yaitu lahan, pangan dan air.

A. Daya Dukung Daya Tampung Lahan

Untuk mengetahui daya dukung lahan di Kabupaten Banyuwangi maka dilakukan analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) yang ditujukan untuk mengukur kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Melalui Asumsi yang berpedoman pada SNI 03/133/2004 dan bersumber pada Sumber: Pedoman Umum Rumah Sederhana Sehat (Nomor 403/KPTS/2002 Keputusan Menteri Kipraswil 2002 tentang RSH) diasumsikan bahwa kebutuhan jumlah lahan tinggal perpenduduk adalah $7,2\text{m}^2/\text{jiwa}$ dengan tingkat jumlah anggota keluarga dalam satu kepala keluarga adalah 60m^2 . Melalui perhitungan total luasan kebutuhan tinggal dan Jasa Ekosistem sebagai dasar kebutuhan tinggal maka perhitungan daya tampung tempat tinggal dihitung melalui perhitungan berikut:

Tabel II. 5 Daya Dukung Ruang Tinggal Hidup

Tahun	Jumlah Penduduk	Luas Standar/jiwa (m^2)	Luas Lahan per Kepala Keluarga (5 orang/kk)	Luas Kebutuhan Tinggal (A x B) (m^2)	Luas Lahan per Kepala Keluarga 5 orang/kk $[(A/5) \times C]$	Jasa Ekosistem Ruang Tinggal Sangat Tinggi (m^2)	Rasio Kebutuhan Lahan Per Penduduk (D/F)	Rasio Kebutuhan Lahan Per kepala Keluarga (E/F)
-	A	B	C	D	E	F	G	H
2022	1.731.731	7,2	60	12.468.463,2	20.780.772,0	5.280.260.000,0	0,002361	0,003936
2025	1.764.560	7,2	60	12.704.832,0	21.174.720,0	5.280.260.000,0	0,002406	0,00401
2030	1.805.325	7,2	60	12.998.340,0	21.663.900,0	5.280.260.000,0	0,002462	0,004103

Tahun	Jumlah Penduduk	Luas Standar/jiwa (m ²)	Luas Lahan per Kepala Keluarga (5 orang/kk)	Luas Kebutuhan Tinggal (A x B) (m ²)	Luas Lahan per Kepala Keluarga 5 orang/kk [(A/5) x C]	Jasa Ekosistem Ruang Tinggal Sangat Tinggi (m ²)	Rasio Kebutuhan Lahan Per Penduduk (D/F)	Rasio Kebutuhan Lahan Per kepala Keluarga (E/F)
2035	1.844.250	7,2	60	13.278.600,0	22.131.000,0	5.280.260.000,0	0,002515	0,004191
2040	1.909.577	7,2	60	13.748.954,4	22.914.924,0	5.280.260.000,0	0,002604	0,00434
2045	1.983.068	7,2	60	14.278.089,6	23.796.816,0	5.280.260.000,0	0,002704	0,004507

Sumber : KLHS RTRW Banyuwangi, 2023 Data Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, daya dukung ruang tinggal hidup dengan mengasumsikan pada luasan area yang Mendukung Jasa Ekosistem Ruang tinggal hidup berstatus tinggi dengan tingkat kebutuhan luas standar perjiwa sebesar 7,2m² dan dengan asumsi 60m² pada luas lahan per kepala keluarga sejumlah 5 orang dengan rasio kebutuhan lahan penduduk memiliki skor <1 atau mengindikasikan luas kebutuhan lebih kecil dari luas Jasa Ekosistem yang mampu disupport pada Jasa Ekosistem Kategori Luas lahan dengan Jasa Ekosistem Tinggi dengan luas 5.280.260.000m² (5280,26ha).

Secara lebih detail, berikut merupakan analisis Daya Dukung Ruang Tinggal di masing-masing kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, dimana dapat diketahui berdasarkan hasil proyeksi selama 20 tahun, jumlah penduduk di masing-masing kecamatan mengalami peningkatan. Kemudian berdasarkan hasil penghitungan rasio kebutuhan lahan per penduduk, diketahui pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Banyuwangi selama periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 nilainya <1 yang menunjukkan kebutuhan lahan lebih kecil daripada kemampuan penyediaan lahan. Hasil yang sama juga dapat dilihat dari hasil penghitungan rasio kebutuhan lahan per kepala keluarga untuk tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Banyuwangi selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 menunjukkan hasil nilai <1. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa kebutuhan lahan untuk tiap kepala keluarga lebih kecil daripada kemampuan penyediaan lahan.

Tabel II. 6 Status Daya Dukung Ruang Tinggal Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi

Kecamatan	Jumlah Penduduk					Rasio Kebutuhan Lahan Per Penduduk					Rasio Kebutuhan Lahan Per kepala Keluarga					Status Akhir (2045)
	2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045	
Pesanggaran	55.257	57.211	59.234	61.329	63.058	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008	0,00009	0,00013	0,00013	0,00013	0,00014	0,00014	Cukup
Siliragung	50.331	52.043	53.813	55.643	57.152	0,00007	0,00007	0,00007	0,00008	0,00008	0,00011	0,00012	0,00012	0,00013	0,00013	Cukup
Bangorejo	68.072	70.525	73.066	75.698	77.872	0,00009	0,00010	0,00010	0,00010	0,00011	0,00015	0,00016	0,00017	0,00017	0,00018	Cukup
Purwoharjo	71.391	73.366	75.396	77.482	79.192	0,00010	0,00010	0,00010	0,00011	0,00011	0,00016	0,00017	0,00017	0,00018	0,00018	Cukup
Tegaldlimo	68.915	71.169	73.495	75.898	77.877	0,00009	0,00010	0,00010	0,00010	0,00011	0,00016	0,00016	0,00017	0,00017	0,00018	Cukup
Muncar	139.839	143.343	146.935	150.617	153.628	0,00019	0,00020	0,00020	0,00021	0,00021	0,00032	0,00033	0,00033	0,00034	0,00035	Cukup
Cluring	80.198	83.084	86.074	89.172	91.730	0,00011	0,00011	0,00012	0,00012	0,00013	0,00018	0,00019	0,00020	0,00020	0,00021	Cukup
Gambiran	68.980	71.895	74.935	78.102	80.733	0,00009	0,00010	0,00010	0,00011	0,00011	0,00016	0,00016	0,00017	0,00018	0,00018	Cukup
Tegalsari	54.585	56.908	59.330	61.855	63.952	0,00007	0,00008	0,00008	0,00008	0,00009	0,00012	0,00013	0,00013	0,00014	0,00015	Cukup
Glenmore	77.719	80.151	82.659	85.245	87.372	0,00011	0,00011	0,00011	0,00012	0,00012	0,00018	0,00018	0,00019	0,00019	0,00020	Cukup
Kalibaru	66.871	68.649	70.474	72.348	73.882	0,00009	0,00009	0,00010	0,00010	0,00010	0,00015	0,00016	0,00016	0,00016	0,00017	Cukup
Genteng	95.915	99.519	103.258	107.137	110.345	0,00013	0,00014	0,00014	0,00015	0,00015	0,00022	0,00023	0,00023	0,00024	0,00025	Cukup
Srono	100.525	104.278	108.170	112.208	115.547	0,00014	0,00014	0,00015	0,00015	0,00016	0,00023	0,00024	0,00025	0,00026	0,00026	Cukup
Rogojampi	60.567	64.122	67.885	71.870	75.225	0,00008	0,00009	0,00009	0,00010	0,00010	0,00014	0,00015	0,00015	0,00016	0,00017	Cukup
Blimbingsari	57.522	60.898	64.472	68.257	71.443	0,00008	0,00008	0,00009	0,00009	0,00010	0,00013	0,00014	0,00015	0,00016	0,00016	Cukup
Kabat	64.114	64.822	65.539	66.263	66.849	0,00009	0,00009	0,00009	0,00009	0,00009	0,00015	0,00015	0,00015	0,00015	0,00015	Cukup
Singojuruh	52.390	54.393	56.474	58.634	60.421	0,00007	0,00007	0,00008	0,00008	0,00008	0,00012	0,00012	0,00013	0,00013	0,00014	Cukup
Sempu	87.208	91.528	96.062	100.821	104.798	0,00012	0,00012	0,00013	0,00014	0,00014	0,00020	0,00021	0,00022	0,00023	0,00024	Cukup
Songgon	59.515	62.061	64.717	67.486	69.786	0,00008	0,00008	0,00009	0,00009	0,00010	0,00014	0,00014	0,00015	0,00015	0,00016	Cukup
Glagah	37.588	38.677	39.796	40.949	41.894	0,00005	0,00005	0,00005	0,00006	0,00006	0,00009	0,00009	0,00009	0,00009	0,00010	Cukup
Licin	30.187	30.932	31.696	32.479	33.119	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00005	0,00007	0,00007	0,00007	0,00007	0,00008	Cukup
Banyuwangi	121.883	126.375	131.033	135.863	139.854	0,00017	0,00017	0,00018	0,00019	0,00019	0,00028	0,00029	0,00030	0,00031	0,00032	Cukup
Giri	32.784	33.992	35.244	36.543	37.616	0,00004	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00007	0,00008	0,00008	0,00008	0,00009	Cukup
Kalipuro	86.564	89.546	92.631	95.823	98.455	0,00012	0,00012	0,00013	0,00013	0,00013	0,00020	0,00020	0,00021	0,00022	0,00022	Cukup

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

B. Daya Dukung Daya Tampung Pangan

Daya dukung pangan merupakan salah satu parameter daya dukung lingkungan. Daya dukung pangan dilakukan dengan cara menganalisis ketersediaan pangan di suatu wilayah untuk menyediakan sumber pangan bagi penduduknya. Sumber pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia adalah beras. Swasembada beras memiliki arti kemampuan suatu wilayah untuk mencukupi kebutuhan beras bagi penduduknya tanpa perdagangan dengan wilayah lain atau mandiri. Dalam swasembada beras terdapat 2 komponen yaitu kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply). Prinsip swasembada juga dapat digunakan untuk menilai daya dukung pangan beras yaitu keseimbangan antara ketersediaan beras dan kebutuhan beras.


Ketersediaan pangan Kabupaten Banyuwangi dihitung berdasarkan produksi pertanian (padi) di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi diketahui bahwa luas kawasan pertanian sebesar 56.649,31 Ha. Dengan menggunakan asumsi produktivitas padi per hektar sebesar 6,04 ton/Ha, dan dalam 1 tahun mampu 2 kali panen, maka pada tahun perencanaan, ketersediaan pangan di Kabupaten Banyuwangi adalah 429.344,72 ton dengan kebutuhan pangan pada tahun perencanaan sebagai berikut:

Tabel II. 7 Proyeksi Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Banyuwangi 2022, 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk	Asumsi Rata-Rata Rata Ketersediaan Pangan dalam 1 tahun (ton)	Rata-Rata kebutuhan pangan perkapita/tahun (ton)	Skor Kecukupan pangan (Jumlah Kebutuhan/Jumlah Produksi)	Status Kecukupan Pangan
2022	1.731.731	429.344,72	0,1135	0,458	Mencukupi
2025	1.764.560	429.344,72	0,1135	0,466	
2030	1.805.325	429.344,72	0,1135	0,477	Mencukupi
2035	1.844.250	429.344,72	0,1135	0,488	Mencukupi
2040	1.909.577	429.344,72	0,1135	0,505	Mencukupi
2045	1.983.068	429.344,72	0,1135	0,524	Mencukupi

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

Dari hasil perhitungan, daya dukung daya tampung pangan eksisting Kabupaten Banyuwangi sebesar 0,524 atau <1 (*surplus*) artinya ketersediaan pangan eksisting Kabupaten Banyuwangi mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk pada tahun 2022. Kemudian dilakukan proyeksi pada periode 5 tahun perencanaan yakni pada tahun 2025,2030,2035,2045 juga turut dihitung dalam asumsi status daya dukung



pangan. Dan menunjukkan bahwa hingga tahun 2045 dengan asumsi rata rata produktivitas lahan sebesar 429.344,72 ton lahan padi pertahun dan pada tingkat konsumsi 0,1135ton/kapita/tahun maka hingga tahun 2045 status daya dukung pangan diasumsikan masih mencukupi.

Secara lebih detail, berikut disajikan status daya dukung pangan secara rinci di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi:



Tabel II. 8 Analisis Penghitungan Daya Dukung Pangan di Tiap-tiap Kecamatan Selama 20 Tahun

Kecamatan	Jumlah Penduduk					Kebutuhan Pangan dalam 1 Tahun (ton)					Status Kecukupan					Status 2045
	2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045	
Pesanggaran	55.257	57.211	59.234	61.329	63.058	6.271,69	6.493,47	6.723,08	6.960,82	7.157,05	0,015	0,015	0,016	0,016	0,017	Cukup
Siliragung	50.331	52.043	53.813	55.643	57.152	5.712,56	5.906,86	6.107,76	6.315,50	6.486,76	0,013	0,014	0,014	0,015	0,015	Cukup
Bangorejo	68.072	70.525	73.066	75.698	77.872	7.726,22	8.004,58	8.292,97	8.591,76	8.838,52	0,018	0,019	0,019	0,020	0,021	Cukup
Purwoharjo	71.391	73.366	75.396	77.482	79.192	8.102,83	8.327,02	8.557,41	8.794,18	8.988,30	0,019	0,019	0,020	0,020	0,021	Cukup
Tegaldlimo	68.915	71.169	73.495	75.898	77.877	7.821,91	8.077,63	8.341,72	8.614,44	8.839,02	0,018	0,019	0,019	0,020	0,021	Cukup
Muncar	139.839	143.343	146.935	150.617	153.628	15.871,74	16.269,44	16.677,11	17.094,98	17.436,81	0,037	0,038	0,039	0,040	0,041	Cukup
Cluring	80.198	83.084	86.074	89.172	91.730	9.102,51	9.430,08	9.769,45	10.121,02	10.411,37	0,021	0,022	0,023	0,024	0,024	Cukup
Gambiran	68.980	71.895	74.935	78.102	80.733	7.829,17	8.160,14	8.505,09	8.864,62	9.163,17	0,018	0,019	0,020	0,021	0,021	Cukup
Tegalsari	54.585	56.908	59.330	61.855	63.952	6.195,41	6.459,07	6.733,96	7.020,55	7.258,58	0,014	0,015	0,016	0,016	0,017	Cukup
Glenmore	77.719	80.151	82.659	85.245	87.372	8.821,15	9.097,14	9.381,77	9.675,30	9.916,72	0,021	0,021	0,022	0,023	0,023	Cukup
Kalibaru	66.871	68.649	70.474	72.348	73.882	7.589,91	7.791,68	7.998,81	8.211,45	8.385,62	0,018	0,018	0,019	0,019	0,020	Cukup
Genteng	95.915	99.519	103.258	107.137	110.345	10.886,37	11.295,37	11.719,73	12.160,04	12.524,17	0,025	0,026	0,027	0,028	0,029	Cukup
Srono	100.525	104.278	108.170	112.208	115.547	11.409,62	11.835,53	12.277,33	12.735,62	13.114,54	0,027	0,028	0,029	0,030	0,031	Cukup
Rogojampi	60.567	64.122	67.885	71.870	75.225	6.874,31	7.277,80	7.704,97	8.157,21	8.538,04	0,016	0,017	0,018	0,019	0,020	Cukup
Blimbingsari	57.522	60.898	64.472	68.257	71.443	6.528,76	6.911,95	7.317,63	7.747,12	8.108,78	0,015	0,016	0,017	0,018	0,019	Cukup
Kabat	64.114	64.822	65.539	66.263	66.849	7.276,89	7.357,33	7.438,67	7.520,90	7.587,34	0,017	0,017	0,017	0,018	0,018	Cukup
Singojuruh	52.390	54.393	56.474	58.634	60.421	5.946,23	6.173,66	6.409,78	6.654,94	6.857,80	0,014	0,014	0,015	0,016	0,016	Cukup
Sempu	87.208	91.528	96.062	100.821	104.798	9.898,07	10.388,44	10.903,09	11.443,24	11.894,56	0,023	0,024	0,025	0,027	0,028	Cukup
Songgon	59.515	62.061	64.717	67.486	69.786	6.754,90	7.043,94	7.345,35	7.659,65	7.920,75	0,016	0,016	0,017	0,018	0,018	Cukup
Glagah	37.588	38.677	39.796	40.949	41.894	4.266,26	4.389,78	4.516,88	4.647,66	4.755,00	0,010	0,010	0,011	0,011	0,011	Cukup
Licin	30.187	30.932	31.696	32.479	33.119	3.426,18	3.510,80	3.597,50	3.686,34	3.758,99	0,008	0,008	0,008	0,009	0,009	Cukup
Banyuwangi	121.883	126.375	131.033	135.863	139.854	13.833,75	14.343,61	14.872,26	15.420,40	15.873,42	0,032	0,033	0,035	0,036	0,037	Cukup
Giri	32.784	33.992	35.244	36.543	37.616	3.720,99	3.858,08	4.000,23	4.147,61	4.269,42	0,009	0,009	0,009	0,010	0,010	Cukup
Kalipuro	86.564	89.546	92.631	95.823	98.455	9.824,96	10.163,47	10.513,64	10.875,87	11.174,63	0,023	0,024	0,024	0,025	0,026	Cukup
Wongsorejo	79.058	80.732	82.442	84.188	85.612	8.973,08	9.163,13	9.357,20	9.555,39	9.716,95	0,021	0,021	0,022	0,022	0,023	Cukup

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

C. Daya Dukung Daya Tampung Air

Daya dukung daya tampung air adalah perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air di suatu wilayah untuk mengetahui apakah daya dukung air suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air wilayah tersebut tercukupi. Keadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan airnya.

Ketersediaan air dapat dihitung berdasarkan koefisien limpasan untuk setiap jenis penggunaan lahan dan luas setiap jenis penggunaan lahan, sedangkan kebutuhan air dihitung berdasarkan populasi penduduk dan kebutuhan air per kapita. Berdasarkan hasil analisis dalam dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045, ketersediaan air Kabupaten Banyuwangi adalah 284.481.132,74 m³/tahun. Sedangkan kebutuhan air di Kabupaten Banyuwangi disajikan dalam tabel berikut:


Tabel II. 9 Analisis Kebutuhan Air Pada Akhir Kabupaten Banyuwangi

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	KEBUTUHAN AIR DOMESTIK	KEBUTUHAN AIR DOMESTIK NON-DOMESTIK (20% KEBUTUHAN AIR DOMESTIK)	KEBUTUHAN AIR DOMESTIK PER JUMLAH PENDUDUK	KEBUTUHAN AIR NONDOMESTIK PER JUMLAH PENDUDUK	TOTAL KEBUTUHAN AIR M3	KETERSEDIAAN AIR	STATUS KECUKUPAN KEBUTUHAN AIR	STATUS KECUKUPAN
-	A	B	C	D	E	F	G	H	
2022	1.731.731	120	24	207.807.720	41.561.544	91.019.781.360	284.481.132.740	0,31995	CUKUP
2025	1.764.560	120	24	211.747.200	42.349.440	92.745.273.600	284.481.132.740	0,326016	CUKUP
2030	1.805.325	120	24	216.639.000	43.327.800	94.887.882.000	284.481.132.740	0,333547	CUKUP
2035	1.844.250	120	24	221.310.000	44.262.000	96.933.780.000	284.481.132.740	0,340739	CUKUP
2040	1.909.577	120	24	229.149.240	45.829.848	100.367.367.120	284.481.132.740	0,352809	CUKUP
2045	1.983.068	120	24	237.968.160	47.593.632	104.230.054.080	284.481.132.740	0,366387	CUKUP

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Keterangan : Pemakaian air diasumsikan sesuai Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya PU, 1996

Dari hasil total proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air domestik maupun non domestik kabupaten Banyuwangi dengan asumsi kebutuhan air sejumlah 120liter/orang/hari dan kebutuhan air non-domestik sebesar 24 liter/orang/hari atau 20% dari nilai Kebutuhan Air Domestik maka diperoleh angka Status kecukupan dimana status kecukupan <1 menunjukkan bahwa kebutuhan air lebih kecil dari ketersediaan sehingga mencukupi untuk kebutuhan aktivitas domestik maupun domestik. Sementara apabila status kecukupan kebutuhan air >1 maka jumlah kebutuhan masyarakat terhadap air dibanding dengan ketersediaan adalah tidak mencukupi. Dari hasil analisis Daya Dukung dan Daya tampung diproyeksikan bahwa kebutuhan air di Kabupaten Banyuwangi Hingga tahun 2045 masih mencukupi. Secara lebih detail, berikut disajikan



status daya dukung air secara rinci di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi:



Tabel II. 10 Penghitungan Daya Dukung Air di Tiap-tiap Kecamatan Selama 20 Tahun

Kecamatan	Jumlah Penduduk					Total Kebutuhan Air (M ³)					Status Kecukupan					Status Akhir
	2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045	
Pesanggaran	55.257	57.211	59.234	61.329	63.058	2.904.318.350,30	3.007.018.734,42	3.113.350.734,50	3.223.442.769,11	3.314.312.813,84	0,010	0,011	0,011	0,011	0,012	Cukup
Siliragung	50.331	52.043	53.813	55.643	57.152	2.645.395.143,60	2.735.369.575,94	2.828.404.193,25	2.924.603.077,69	3.003.912.657,66	0,009	0,010	0,010	0,010	0,011	Cukup
Bangorejo	68.072	70.525	73.066	75.698	77.872	3.577.885.185,41	3.706.791.016,00	3.840.341.130,08	3.978.702.854,24	4.092.972.879,36	0,013	0,013	0,013	0,014	0,014	Cukup
Purwoharjo	71.391	73.366	75.396	77.482	79.192	3.752.286.298,75	3.856.105.424,15	3.962.797.041,14	4.072.440.626,46	4.162.335.722,60	0,013	0,014	0,014	0,014	0,015	Cukup
Tegaldimo	68.915	71.169	73.495	75.898	77.877	3.622.196.996,29	3.740.619.245,75	3.862.913.131,45	3.989.205.230,69	4.093.205.322,18	0,013	0,013	0,014	0,014	0,014	Cukup
Muncar	139.839	143.343	146.935	150.617	153.628	7.349.944.554,35	7.534.112.714,39	7.722.895.591,04	7.916.408.815,63	8.074.704.797,91	0,026	0,026	0,027	0,028	0,028	Cukup
Cluring	80.198	83.084	86.074	89.172	91.730	4.215.223.749,20	4.366.917.968,81	4.524.071.242,94	4.686.880.027,83	4.821.335.549,07	0,015	0,015	0,016	0,016	0,017	Cukup
Gambiran	68.980	71.895	74.935	78.102	80.733	3.625.562.597,25	3.778.825.905,07	3.938.568.108,48	4.105.063.089,65	4.243.312.502,28	0,013	0,013	0,014	0,014	0,015	Cukup
Tegalsari	54.585	56.908	59.330	61.855	63.952	2.868.991.149,80	2.991.091.312,88	3.118.387.884,40	3.251.102.016,07	3.361.328.577,10	0,010	0,011	0,011	0,011	0,012	Cukup
Glenmore	77.719	80.151	82.659	85.245	87.372	4.084.932.591,63	4.212.738.559,95	4.344.543.214,95	4.480.471.664,21	4.592.270.123,53	0,014	0,015	0,015	0,016	0,016	Cukup
Kalibaru	66.871	68.649	70.474	72.348	73.882	3.514.763.040,08	3.608.198.622,80	3.704.118.073,71	3.802.587.423,35	3.883.244.322,07	0,012	0,013	0,013	0,013	0,014	Cukup
Genteng	95.915	99.519	103.258	107.137	110.345	5.041.301.271,46	5.230.701.746,28	5.427.217.951,34	5.631.117.222,89	5.799.738.500,37	0,018	0,018	0,019	0,020	0,020	Cukup
Srono	100.525	104.278	108.170	112.208	115.547	5.283.611.321,84	5.480.839.173,98	5.685.429.192,50	5.897.656.194,03	6.073.127.639,08	0,019	0,019	0,020	0,021	0,021	Cukup
Rogojampi	60.567	64.122	67.885	71.870	75.225	3.183.383.073,25	3.370.230.771,90	3.568.045.439,23	3.777.470.778,14	3.953.827.365,15	0,011	0,012	0,013	0,013	0,014	Cukup
Blimbingsari	57.522	60.898	64.472	68.257	71.443	3.023.363.813,97	3.200.811.566,81	3.388.674.111,56	3.587.562.714,85	3.755.045.981,26	0,011	0,011	0,012	0,013	0,013	Cukup
Kabat	64.114	64.822	65.539	66.263	66.849	3.369.807.350,57	3.407.060.068,04	3.444.724.608,73	3.482.805.525,31	3.513.573.140,69	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	Cukup
Singojuruh	52.390	54.393	56.474	58.634	60.421	2.753.600.567,77	2.858.919.335,13	2.968.266.298,49	3.081.795.526,88	3.175.737.431,07	0,010	0,010	0,010	0,011	0,011	Cukup
Sempu	87.208	91.528	96.062	100.821	104.798	4.583.636.887,75	4.810.715.126,74	5.049.043.062,83	5.299.178.017,98	5.508.179.147,99	0,016	0,017	0,018	0,019	0,019	Cukup
Songgon	59.515	62.061	64.717	67.486	69.786	3.128.083.709,46	3.261.933.662,22	3.401.511.022,40	3.547.060.864,39	3.667.972.298,22	0,011	0,011	0,012	0,012	0,013	Cukup
Glagah	37.588	38.677	39.796	40.949	41.894	1.975.636.798,08	2.032.837.291,60	2.091.693.907,56	2.152.254.595,60	2.201.963.185,31	0,007	0,007	0,007	0,008	0,008	Cukup
Licin	30.187	30.932	31.696	32.479	33.119	1.586.609.783,22	1.625.792.535,97	1.665.942.941,96	1.707.084.898,27	1.740.728.814,76	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	Cukup
Banyuwangi	121.883	126.375	131.033	135.863	139.854	6.406.185.170,63	6.642.292.847,16	6.887.102.556,72	7.140.935.023,21	7.350.720.443,15	0,023	0,023	0,024	0,025	0,026	Cukup
Giri	32.784	33.992	35.244	36.543	37.616	1.723.128.692,83	1.786.615.281,04	1.852.440.955,65	1.920.691.897,46	1.977.098.780,89	0,006	0,006	0,007	0,007	0,007	Cukup
Kalipuro	86.564	89.546	92.631	95.823	98.455	4.549.781.051,51	4.706.537.812,98	4.868.695.423,84	5.036.439.963,32	5.174.787.315,98	0,016	0,017	0,017	0,018	0,018	Cukup
Wongsorejo	79.058	80.732	82.442	84.188	85.612	4.155.285.833,05	4.243.294.577,17	4.333.167.342,04	4.424.943.607,54	4.499.762.204,22	0,015	0,015	0,015	0,016	0,016	Cukup

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

2.1.7 Penggunaan Lahan

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah sebesar ± **5.782,50 km²359.316 hektare** dengan berbagai potensi di dalamnya. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan dalam dua jenis penggunaan yaitu untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana berikut:

Tabel II. 11 Penggunaan Lahan di Kabupaten Banyuwangi

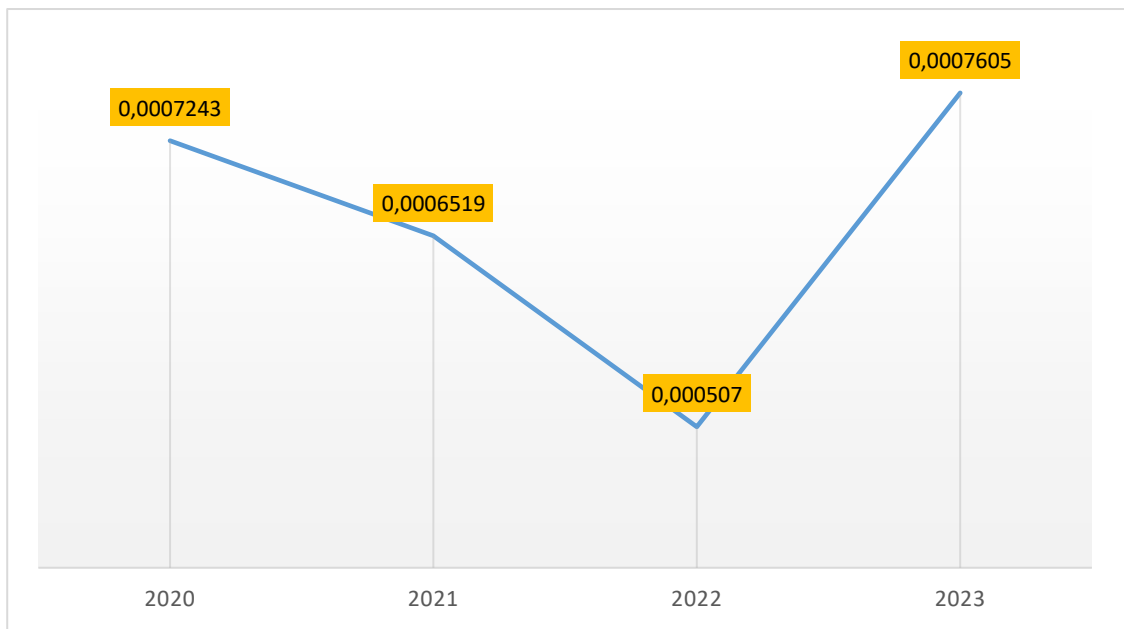
No	Penggunaan Lahan	Luas Wilayah (Ha)
1	Kawasan Lindung	
	Badan Air	597
	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	54,774
	Kawasan Perlindungan Setempat	51
	Kawasan Konservasi	62548
	Kawasan Cagar Budaya	0
	Kawasan Ekosistem Mangrove	177
	2	Kawasan Budi Daya
Kawasan Hutan Produksi		57967
Kawasan Pertanian		183255
Kawasan Perikanan		1425
Kawasan Peruntukan Industri		2.920,00
Kawasan Pariwisata		693
Kawasan Permukiman		52437
Kawasan Transportasi		250
Kawasan Pertahanan Dan Keamanan	0	

Sumber: RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044

Penggunaan lahan di Banyuwangi mencerminkan upaya yang holistik dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi. Kawasan Lindung mendominasi peta alokasi lahan, dengan Kawasan Konservasi yang meliputi 62.548 hektar dan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya seluas 54.774 hektar. Alokasi ini menegaskan komitmen daerah terhadap perlindungan ekosistem vital, termasuk badan air yang luasnya mencapai 597 hektar dan ekosistem mangrove seluas 177 hektar, yang keduanya penting bagi keberlanjutan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Sementara itu, Kawasan Budidaya juga memiliki peran sentral dalam perekonomian Banyuwangi, dengan Kawasan Pertanian yang mencakup 183.255 hektar, menggambarkan

pentingnya sektor ini bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Kawasan Hutan Produksi seluas 57.967 hektar mendukung aktivitas ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Pengembangan di sektor industri, pariwisata, dan permukiman juga terlihat dengan luas masing-masing 2.920 hektar, 693 hektar, dan 52.437 hektar, mencerminkan dinamika pembangunan yang merespon kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Pengelolaan lahan ini mencerminkan strategi pembangunan Banyuwangi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang.

Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi dan urbanisasi, terjadi perubahan signifikan dalam penggunaan lahan, terutama lahan sawah yang secara tradisional menjadi andalan sektor pertanian. Persentase alih fungsi lahan sawah di Banyuwangi meningkat seiring dengan kebutuhan akan lahan untuk permukiman dan industri. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan, serta memerlukan analisis mendalam untuk memahami dampaknya terhadap tata ruang dan ketahanan pangan di daerah tersebut. Berikut merupakan data persentase alih fungsi lahan khususnya sawah di Kabupaten Banyuwangi dalam rentang tahun 2020-2023:

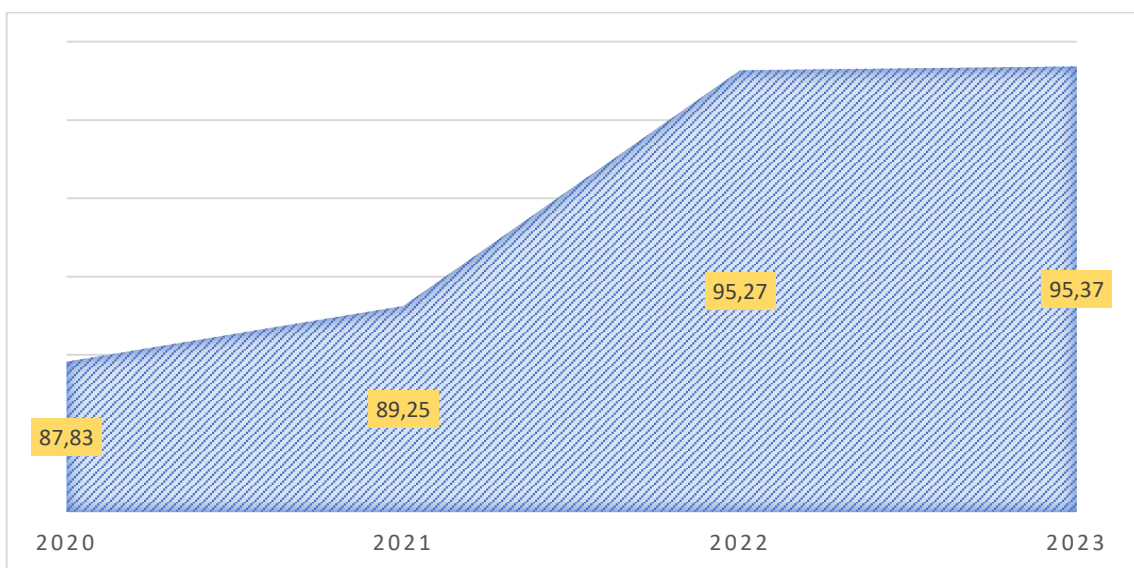


Gambar II. 3 Persentase alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2023

Sumber: Dinas PUCKPP Kabupaten Banyuwangi, 2024

Grafik di atas menunjukkan tren alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan luas permohonan pemanfaatan ruang di lahan sawah dibandingkan dengan luas total lahan sawah dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun

2020, persentase alih fungsi lahan sawah cukup tinggi dengan nilai sekitar 0,0007243, namun kemudian mengalami penurunan bertahap hingga mencapai titik terendah di tahun 2022 dengan nilai 0,000507. Penurunan ini mencerminkan adanya upaya konservasi lahan atau kebijakan yang lebih ketat terhadap alih fungsi lahan. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai nilai tertinggi dalam periode yang diamati, yaitu 0,0007605. Kenaikan ini bisa disebabkan oleh meningkatnya permintaan lahan untuk kepentingan pembangunan atau industrialisasi. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengurangi alih fungsi lahan sawah, tekanan terhadap lahan pertanian tetap tinggi, terutama dalam menghadapi dinamika pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.



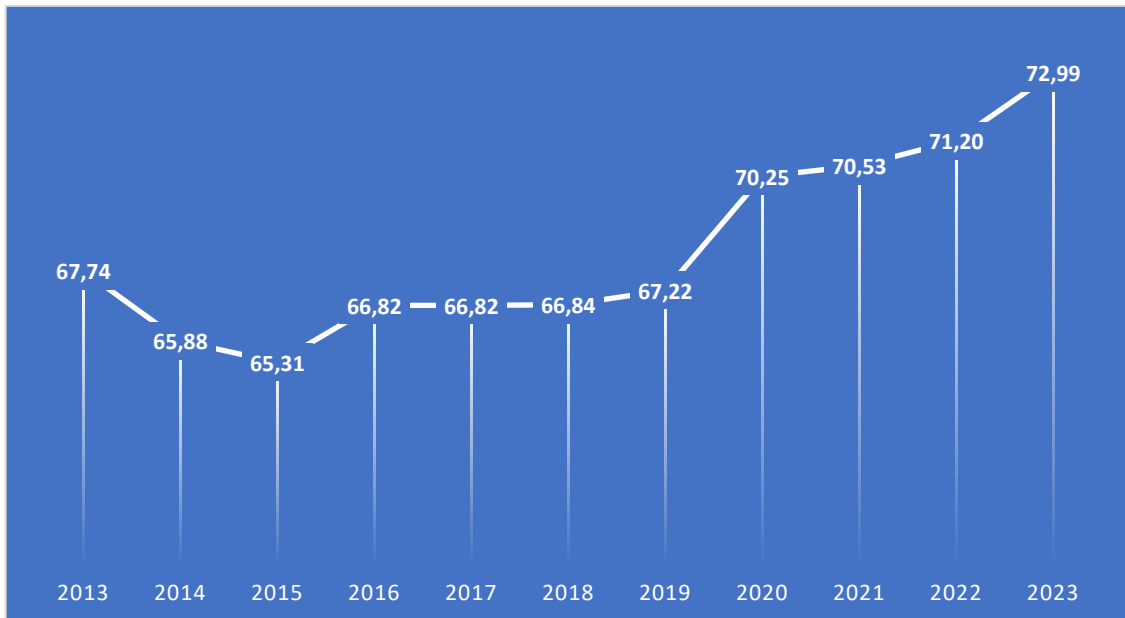
Gambar II. 4 Persentase Jumlah Permohonan Pemanfaatan Ruang Yang Disetujui Karena Sudah Sesuai Dengan RTRW

Sumber: Dinas PUCKPP Kabupaten Banyuwangi, 2024

Dalam mewujudkan penggunaan lahan yang terencana dengan baik demi menghindari potensi masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi di masa mendatang maka harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi yang berlaku. Dalam lima tahun terakhir, kondisi ini dapat direpresentasikan oleh persentase permohonan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW yang dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Dari 87,83% pada tahun 2020, persentase ini naik menjadi 95,37% pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan kepatuhan yang semakin tinggi terhadap aturan RTRW, yang berkontribusi positif terhadap penggunaan lahan yang lebih teratur dan sesuai perencanaan. Stabilitas persentase yang tinggi pada tahun 2022 dan 2023 menandakan bahwa hampir semua permohonan sudah sesuai dengan RTRW,

mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pengawasan tata ruang di Banyuwangi. Meski demikian, pengawasan yang berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap RTRW bukan hanya terjadi dalam proses perizinan, tetapi juga dalam pelaksanaannya di lapangan sehingga keseimbangan dan kualitas lingkungan hidup terjaga.


Penggunaan lahan di suatu wilayah sangat mempengaruhi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Aktivitas seperti deforestasi, urbanisasi, dan pertanian intensif dapat mengurangi tutupan vegetasi, menyebabkan polusi, degradasi tanah, dan penurunan keanekaragaman hayati, yang secara keseluruhan menurunkan kualitas lingkungan. Sebaliknya, praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan, seperti pertanian organik dan rehabilitasi lahan yang terdegradasi, dapat meningkatkan IKLH dengan cara mempertahankan kesuburan tanah, melindungi sumber daya air, dan meningkatkan keanekaragaman hayati.



Gambar II. 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, 2024

Berdasarkan gambar di atas, capaian Indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Banyuwangi dalam periode tahun 2013 hingga tahun 2023 memiliki trend data yang meningkat walaupun data terlihat cukup fluktuatif akan tetapi capaian kualitas lingkungan hidup pada akhir periode cukup meningkat tajam apabila dibandingkan dengan kondisi awal. Di tahun 2023 capaian IKLH bersumber dari data kinerja pemerintah pusat. Capaian IKLH berada di angka 72,99 sehingga meskipun trend data di atas menunjukkan angka yang meningkat akan tetapi capaian IKLH Kabupaten Banyuwangi masih berada di bawah capaian Indeks Kualitas Lingkungan



Hidup Pemerintah Pusat. Kabupaten Banyuwangi telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, termasuk rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman pohon, pengawasan terhadap polusi dari berbagai jenis usaha, dan kerja sama dengan masyarakat serta lembaga swadaya dalam pengelolaan sampah. Pengujian rutin kualitas air dan udara juga dilakukan. Selain itu, masyarakat di Desa Badean dan Desa Karangbendo dilibatkan dalam pengelolaan sampah. Inovasi seperti Mentari yaitu program menjaga mata air dan penggunaan teknologi manajemen pelayanan laboratorium lingkungan (Simpling) oleh Dinas Lingkungan Hidup mendukung pengelolaan lingkungan, termasuk operasional TPS Balak di Kecamatan Songgon yang melayani 6 kecamatan dan 33 desa dengan kapasitas 84 ton per hari.

Sebagaimana dijelaskan di atas, atas perubahan penggunaan lahan yang terjadi seperti deforestasi dan urbanisasi dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK), yang berkontribusi pada perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Deforestasi mengurangi penyerapan karbon dioksida, meningkatkan suhu global, dan mengubah pola cuaca, sementara urbanisasi meningkatkan penggunaan energi dan emisi GRK. Akibatnya, frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem, seperti badai, banjir, dan kekeringan, cenderung meningkat, memperburuk dampak perubahan iklim secara global. Emisi gas rumah kaca (GRK) merujuk pada pelepasan gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca, yaitu proses di mana radiasi inframerah dari permukaan bumi terperangkap oleh atmosfer bumi dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan. Diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sangat tinggi karena dampaknya yang signifikan terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi baik dalam mengurangi risiko bencana alam, meningkatkan kualitas udara, dan melindungi sumber daya alam yang vital seperti hutan dan air serta serta mempromosikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang melalui investasi dalam energi terbarukan dan efisiensi energi. Dengan demikian, daerah yang aktif dalam mengurangi emisi GRK dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi.

Menurut data website AKSARA milik Kementerian PPN/Bappenas, Kabupaten Banyuwangi telah melakukan 13 (tiga belas) Total Kegiatan Aksi Pembangunan Rendah Karbon yang telah dilaksanakan. Dampak dari diterapkannya kegiatan ini adalah terjadi potensi penurunan emisi di Kabupaten Banyuwangi yang ditampilkan dalam tabel berikut:



Tabel II. 12 Potensi Penurunan Emisi Kabupaten Banyuwangi

Potensi Penurunan Emisi Kabupaten Banyuwangi (Ton CO2EQ)	2019	2020	2021	2022	2023
	0,17	82,55721	107,00773	8.200,90523	8.219,971898

Sumber: <https://pprk.bappenas.go.id/aksara>, 2024

Berdasarkan tabel di atas, potensi penurunan emisi Kabupaten Banyuwangi mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan potensi penurunan emisi mengindikasikan bahwa ada peluang besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui berbagai tindakan dan kebijakan yang efektif yang mencakup peningkatan efisiensi energi, peralihan ke sumber energi terbarukan, peningkatan manajemen limbah, reboisasi, serta penerapan teknologi rendah emisi di sektor industri dan transportasi. Capaian peningkatan ini juga menunjukkan bahwa dengan komitmen dan investasi yang tepat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang pada gilirannya membantu mengurangi dampak perubahan iklim, meningkatkan kualitas udara, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Berikut merupakan kontribusi potensi penurunan emisi di Kabupaten Banyuwangi per sektor:

Tabel II. 13 Kontribusi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor Kabupaten Banyuwangi

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
Energi	0%	0%	0%	0,20%	0%
Transportasi	100%	0,19%	68,35%	0%	0%
Hutan dan Lahan	0%	99,81%	0%	0%	0%
Pertanian	0%	0%	0%	99,80%	100%
Pesisir Laut	0%	0%	0%	0%	0%
Industri	0%	0%	0%	0%	0%
Persampahan	0%	0%	31,65%	0%	0%

Sumber: <https://pprk.bappenas.go.id/aksara>, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, dalam dua tahun terakhir sektor pertanian menjadi sektor yang paling berkontribusi dalam penurunan emisi di Kabupaten Banyuwangi melalui praktik yang lebih berkelanjutan, seperti pengelolaan pupuk yang efisien, pertanian ramah lingkungan, manajemen limbah ternak, agroforestri, serta rotasi tanaman dan penutup tanah. Implementasi langkah-langkah ini tidak hanya mengurangi emisi tetapi juga meningkatkan ketahanan pangan dan menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga berkontribusi signifikan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim.

2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah adalah kemampuan suatu daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi sumber daya alam yang bervariasi, seperti pertanian, perkebunan dan peternakan sebagaimana berikut:

A. Potensi Pertanian

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Banyuwangi, hal ini dikarenakan sektor perkebunan/ pertanian sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, serta sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan penyedia lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Potensi pertanian tanaman bahan makanan terbesar di Banyuwangi adalah produksi tanaman padi. Kabupaten Banyuwangi juga termasuk dalam lumbung padi di Provinsi Jawa Timur. Produksi tertinggi adalah padi sawah sebesar 788.704 Ton dengan produktivitas sebesar 66.42 Kw/Ha, diikuti komoditi jagung sebesar 196.693 Ton meskipun mengalami penurunan sebesar -21.29% dibandingkan produksi tahun 2022, dan di posisi ketiga adalah ubi jalar dengan total produksi 18.893 Ton dengan produktivitas sebesar 224.65 Kw/Ha. Produksi tanaman bahan makanan terendah dihasilkan dari komoditi kacang hijau hanya berkisar 301 Ton, dimana capaian ini mengalami penurunan sebesar -59,92% di bandingkan tahun 2022. Potensi pertanian tanaman bahan makanan di Kabupaten Banyuwangi sangat besar, namun perkembangan potensi tersebut saat ini dan kedepan menghadapi beberapa tantangan yaitu alih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman serta industri, alih fungsi komoditas dari pertanian tanaman pangan ke pertanian hortikultura karena faktor keuntungan yang diperoleh petani hortikultura dirasa lebih besar daripada pertanian tanaman pangan.

Tabel II. 14 Produktivitas dan Total Produksi Tanaman Bahan Makanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2023

No	Jenis Tanaman	Produktivitas (Kw/Ha)		Produksi (Ton)	
		2022	2023	2022	2023
1	Padi Sawah	66.36	66.42	785.935	788.704
2	Padi Ladang	59.19	60.05	7.932	6.794

No	Jenis Tanaman	Produktivitas (Kw/Ha)		Produksi (Ton)	
		2022	2023	2022	2023
3	Jagung	68.40	68.42	249.904	196.693
4	Kedelai	20.21	20.22	9.019	12.333
5	Kacang Tanah	13.30	14.35	370	347
6	Kacang Hijau	14.33	14.33	751	301
7	Ubi Kayu	221.97	222.23	7.547	11.622
8	Ubi Jalar	224.65	224.65	18.646	18.893

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2024

Produksi sayuran di yang dihasilkan di Kabupaten Banyuwangi meliputi terong, buncis, kubis, kacang panjang, tomat, bawang merah dan cabai sebagai komoditas. Komoditas terbesar adalah pada tanaman cabai yaitu pada komoditas cabai kecil/rawit yang menghasilkan produksi 62.268 Ton pada tahun 2023. Produksi sayuran berikutnya yang dominan adalah komoditi cabai besar dengan total produksi 11.092 Ton, sedangkan kubis merupakan komoditi sayuran dengan total produksi paling rendah. Terjadi penurunan pertumbuhan produktivitas pada komoditi cabai kecil sebesar -45,57%, komoditi kubis sebesar -16,02% dan komoditi tomat sebesar -7,12% dibandingkan produktivitas tahun 2022. Secara lebih lengkap dapat dilihat dalam matriks berikut:

Tabel II. 15 Tabel 2. 1 Produktivitas dan Total Produksi Sayur-Sayuran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2023

No	Jenis Tanaman	Produktivitas (Kw/Ha)		Produksi (Ton)	
		2022	2023	2022	2023
1	Cabai Besar	78.12	78.50	10.483	11.092
2	Cabai Kecil	155.25	84.50	104.299	62.268
3	Bawang merah	100.19	105.19	5.881	8.331
4	Tomat	101.74	94.50	3.154	3.175
5	Kacang Panjang	13.30	14.35	1.398	1.372
6	Kubis	131.08	110.08	341	319
7	Buncis	94.82	94.82	1.072	958
8	Terong	147.41	147.41	3.199	3.184

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2024

Kabupaten Banyuwangi juga memiliki potensi unggulan pertanian pada produksi buah-buahan. Salah satu buah yang terkenal dan menjadi perhatian adalah buah naga.

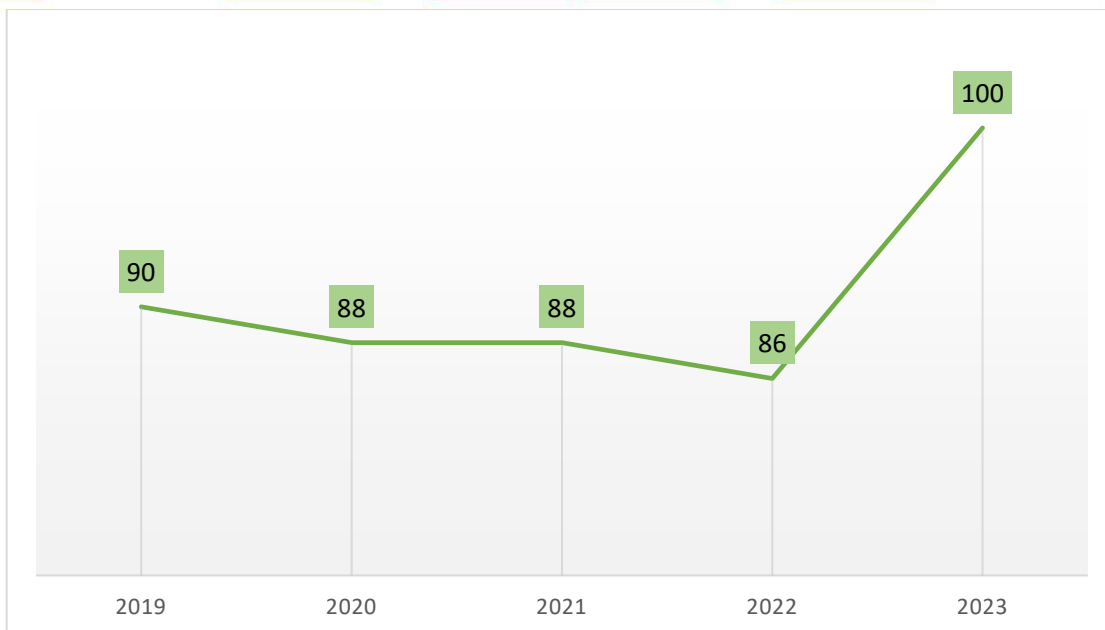
Meskipun sebenarnya kuantitas produksi tidak sebanyak buah-buahan yang lain. Produksi buah terbanyak pada tahun 2023 adalah jeruk siam sebesar 357.632 Ton, diikuti buah naga dan pisang. Sedangkan komoditi dengan total produksi terendah adalah mangga sebesar 36 To yang dipengaruhi oleh faktor buah musiman. Secara lebih lengkap dapat dilihat dalam matriks berikut:

Tabel II. 16 Produktivitas dan Total Produksi Buah-Buahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2023

No	Jenis Tanaman	Produktivitas (Kw/Ha)		Produksi (Ton)	
		2022	2023	2022	2023
1	Semangka	190.19	192	24.306	23.962
2	Melon	191.95	193	5.586	4.844
3	Manggis	99.39	100	25.363	26.330
4	Jeruk Siam	117.99	110	380.919	357.632
5	Durian	48.50	85.50	5.340	12.962
6	Mangga	38.56	35.50	39	36
7	Buah Naga	174.96	171.00	272.325	265.683
8	Rambutan	40.81	40.81	4,301,5	4.061
9	Pisang	333,54	330,00	234.822	206.382

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2024

Berdasarkan potensi pertanian di atas, potensi pertanian yang tinggi di suatu wilayah meningkatkan kemampuan untuk memproduksi pangan secara lokal, sehingga dapat memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi penduduk. Produksi pangan yang beragam dan melimpah dapat menurunkan ketergantungan pada impor, mengurangi risiko kelangkaan pangan akibat fluktuasi pasar global. Keamanan pangan di Kabupaten Banyuwangi direpresentasikan oleh persentase keamanan pangan yang mengukur sejauh mana populasi memiliki akses ke pangan yang aman, bergizi, dan cukup untuk kebutuhan mereka, mencakup ketersediaan pangan, aksesibilitas, penggunaan, dan stabilitas pasokan. Capaian persentase keamanan pangan di Kabupaten Banyuwangi selama lima tahun (2019-2023) adalah sebagai berikut:



Gambar II. 6 Persentase Keamanan Pangan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2023

Sumber: Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2024

B. Potensi Perkebunan

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan sehingga memiliki potensi sebagai penggerak ekonomi penyedia devisa, penyedia modal awal dalam pembangunan berbagai sektor, serta industri hasil hutan, hal ini menjadi sumber pertumbuhan baru perekonomian masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Komoditi perkebunan Kabupaten Banyuwangi terdiri atas beberapa tanaman seperti tebu, kopi, kakao, tembakau, kelapa dan karet. Komoditi dengan produksi terbesar di tahun 2023 adalah tebu swasta nasional sebesar 535.334 Ton, posisi kedua ditempati oleh Kelapa Kopra Rakyat dan Kelapa Deres Rakyat. Sedangkan komoditi dengan total produksi terendah adalah Kelapa Kopra Swasta Nasional. Secara lebih lengkap dapat dilihat dalam matriks berikut:

Tabel II. 17 Produktivitas dan Total Produksi Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2023

No	Jenis Tanaman	Produktivitas (Kw/Ha)		Produksi (Ton)	
		2022	2023	2022	2023
1	Tebu				
	Tebu Rakyat	732.37	732.40	4.321	4.453
	Tebu Swasta Nasional	736.96	732.94	538.271	535.334
2	Kopi				

No	Jenis Tanaman	Produktivitas (Kw/Ha)		Produksi (Ton)	
		2022	2023	2022	2023
	Kopi Rakyat	10.85	11.02	10.867	11.035
	Kopi Swasta Nasional	10.85	10.88	5.325	5.340
3	Kakao				
	Kakao Rakyat	7.90	7.91	350	350
	Kakao Swasta Nasional	7.71	7.7	3.307	3.302
4	Tembakau				
	Tembakau Rakyat	10.42	10.79	786	744
5	Kelapa				
	Kelapa Deres Rakyat	23.73	23.93	34.016	33.557
	Kelapa Deres Swasta Nasional	15.1	15.15	766	768
	Kelapa Kopra Rakyat	15.88	15.77	34.016	33.994
	Kelapa Kopra Swasta Nasional	11.12	11.42	296	303
6	Karet Swasta Nasional	10.76	10.76	4.129	4.129

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2024

C. Potensi Peternakan

Jenis ternak yang dipelihara di Kabupaten Banyuwangi sangat variative seperti sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, kelinci dan jenis unggas seperti ayam kampung, ayam petelur, ayam pendaging serta itik. Pada tahun 2023, populasi ternak tertinggi adalah ayam pendaging dengan total 5.515.714 ekor, diikuti ayam petelur sebanyak 1.383.350 ekor dan ayam kampung sebanyak 1.189.367 ekor. Secara lebih lengkap dapat dilihat dalam matriks berikut:

Tabel II. 18 Populasi Hewan Ternak Tahun 2023

Hewan Ternak	Populasi (ekor)
Sapi Potong	116.812
Sapi Perah	1.094

Hewan Ternak	Populasi (ekor)
Kerbau	1.506
Kuda	298
Kambing	143.677
Domba	126.836
Babi	274
Kelinci	8.189
Ayam Kampung	1.189.367
Ayam Petelur	1.383.350
Ayam Pedaging	5.515.714
Itik	231.850

Sumber: Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka, 2024

Selain itu, potensi sektor peternakan dapat dilihat dari produksi hasil peternakan. Pada tahun 2023, produksi daging tertinggi ditempati oleh ayam pedaging sebesar 11.226.832 yang tumbuh sebesar 67,99% dibandingkan tahun sebelumnya, posisi kedua adalah daging sapi potong sebesar 3.678,096 Ton, diikuti oleh angka total produksi sebesar ayam kampung sebanyak 476,06 Ton. Peningkatan paling signifikan terjadi pada komoditi daging babi yang naik 147,28% dibandingkan tahun 2022, sedangkan tren produksi komoditi yang menurun signifikan terjadi pada daging kerbau sebesar -90,53% serta pada daging kambing. diikuti oleh komoditi daging kambing sebesar 391,198 Ton yang turun sebesar -13,23% dibandingkan data tahun 2022.

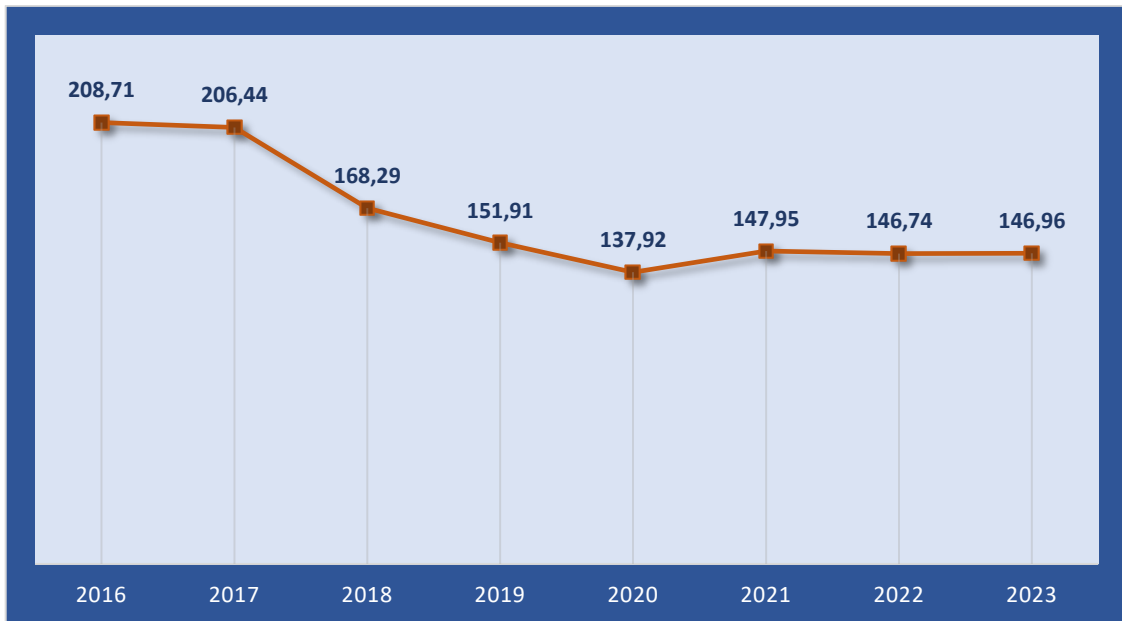
Hasil produksi peternakan selanjutnya ditunjukkan oleh komoditi susu sapi perah rakyat yang mengalami peningkatan signifikan sebesar 39,26% dari 1.181.8700 liter di tahun 2022 menjadi 1.645.626 di tahun berjalan (2023). Terakhir, hasil produksi pertanian ditunjukkan oleh produksi telur yang didominasi oleh telur ayam petelur sebesar 16,858 Ton. Kecuali hasil ayam petelur, pada tahun 2023 semua komoditi telur mengalami penurunan.

Pada sektor perikanan, produk perikanan tangkap di Kabupaten Banyuwangi tahun 2023 sebesar 49.371,6 Ton yang didominasi oleh perikanan laut sebesar 48.285 Ton. Wilayah kecamatan dengan produksi perikanan tangkap tertinggi adalah Kecamatan Muncar sebesar 32.403,9 Ton.

2.1.9 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana dijelaskan sebagai suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial,

budaya, politik, ekonomi dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Terkait dengan wilayah rawan bencana, Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah dengan potensi bencana yang cukup tinggi. seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Berikut merupakan tren penurunan indeks risiko bencana.



Gambar II. 7 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2024

Berdasarkan grafik di atas, indeks risiko bencana di Kabupaten mengalami tren yang fluktuatif yang cenderung menurun pada tahun 2016–2020, hal ini didasarkan pada H&V Tahun 2013. Sedangkan nilai IRB Tahun 2021–2023 dihitung berdasarkan nilai H&V Tahun 2021 yang mengalami *update* berkala yang menghasilkan peningkatan nilai IRB di Kabupaten Banyuwangi dan terus mengalami tren penurunan. Strategi yang digunakan untuk penurunan indeks risiko bencana adalah meningkatkan Realisasi Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana. Dalam peningkatan IKD peran dan dukungan dari pentahelix (pemerintah, masyarakat, akademisi atau pakar, dunia usaha, dan media massa) sangat penting, sehingga tidak sebatas dari peran BPBD. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021 sebesar 0,61 dengan Indeks Kapasitas sebesar 0,526 atau masuk dalam kelas sedang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih perlu meningkatkan komitmen, kebijakan pengurangan risiko bencana, serta kuantitas dan kualitas kegiatan penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak

negatif dari bencana. Secara lebih lanjut, tingkat risiko bencana Kabupaten Banyuwangi menurut jenis bencana ditampilkan dalam matriks berikut:

A. Tingkat Risiko Bencana

Tabel II. 19 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Banyuwangi

No	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas Daerah	Tingkat Risiko
1	Gempa Bumi	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Banjir	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
4	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
5	Letusan Gunungapi Ijen	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
6	Letusan Gunungapi Raung	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
7	Tsunami	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
8	Kekeringan	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
9	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa jenis ancaman bencana di Kabupaten Banyuwangi. Di Kabupaten Banyuwangi, bencana yang terkait dengan ancaman perubahan iklim meliputi banjir, banjir bandang, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Perubahan iklim meningkatkan curah hujan ekstrem, memperpanjang musim kemarau, dan meningkatkan frekuensi serta intensitas cuaca ekstrem, yang memperburuk risiko bencana ini. Bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, letusan gunungapi, dan tsunami lebih dipengaruhi oleh faktor geologis dan tidak secara langsung terkait dengan perubahan iklim. Berikut merupakan penjelasan secara lebih detail:

a) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuh batuan (definisi dan jenis bencana, BNPB. Berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat 24 kecamatan terpapar bahaya gempa bumi di Kabupaten Banyuwangi. Total potensi luas bahaya gempa bumi adalah 291.906 Ha. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah

terpapar bahaya gempa bumi di Kabupaten Banyuwangi. Total luas bahaya tersebut menentukan kelas bahaya gempa bumi di Kabupaten Banyuwangi, yaitu sedang. Kelas bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya gempa bumi.

b) Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB). Berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat 19 kecamatan terpapar bahaya tanah longsor di Kabupaten Banyuwangi. Total potensi luas bahaya tanah longsor adalah 67.842 Ha. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahayadariseluruhwilayah terpaparbahaya tanah longsordi Kabupaten Banyuwangi. Total luas bahaya tersebut menentukan kelas bahaya tanah longsor di Kabupaten Banyuwangi, yaitu tinggi. Kelas bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya tanah longsor.

c) Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2022 memiliki Indeks Risiko Bencana Banjir sebesar 16.53 atau masuk dalam kelas risiko tinggi. Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Banyuwangi tahun 2017-2022 juga menempatkan bencana banjir sebagai bencana yang sering melanda dan mendominasi di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor topografi, dimana sebanyak 17 kecamatan dari total 25 kecamatan berlokasi pada ketinggian 0 – 600 mdpl serta memiliki tiga puluh lima (35) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar dan mengalir sebagian wilayah dari daerah masing-masing kecamatan yang berupa dataran rendah dan berdekatan dengan Sungai, sehingga ketika curah hujan tinggi wilayah tersebut kerap dan rawan terjadi bencana banjir. Berikut merupakan pemetaan wilayah menurut kecamatan berdasarkan potensi ancaman banjir yang dimiliki:

Tabel II. 20 Pemetaan Wilayah Rawan Banjir di Kabupaten Banyuwangi

Kategori Ancaman Banjir	Pemetaan Wilayah
Kawasan Rawan Banjir Parah	Didominasi kawasan Banyuwangi Utara, yaitu sebagian sebageian wilayah Kecamatan Banyuwangi, Kabat, Kalibaru, Kalipuro Licin, Muncar, Pesanggaran, Rogojampi, Siliragung, dan Wongsorejo.
Kawasan Rawan Banjir Sedang	Wilayah Kecamatan Bangorejo, Blimbingsari, Cluring, Gambiran, Genteng, Giri, Glagah.

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021

d) Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi


Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi memaparkan bahwa potensi bencana gunung berapi menjadi yang paling diwaspadai. Banyuwangi memiliki beberapa gunung berapi aktif di sekitarnya, termasuk Gunung Raung dan Gunung Ijen. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi Banyuwangi memiliki potensi bahaya yang besar, seperti letusan gunung berapi, aliran lava, awan panas, lahar, dan gas beracun. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan dan penanganan bencana yang baik untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022, Kabupaten Banyuwangi memiliki skor Indeks Risiko Bencana Letusan Gunungapi sebesar 7.34 yang termasuk dalam kelas risiko sedang.

e) Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di Samudra. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami tsunami. Tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya (Puspito, 1994). Selama kurun waktu 1600-2000 terdapat 105 kejadian tsunami yang 90 persen di antaranya disebabkan oleh gempa tektonik, 9 persen oleh letusan gunung berapi dan 1 persen oleh tanah longsor (Latief dkk., 2000). Wilayah pantai di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami terutama pantai barat Sumatera, pantai selatan Pulau Jawa, pantai utara dan selatan pulau-pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku, pantai utara Irian Jaya dan hampir seluruh pantai di Sulawesi. Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022, Kabupaten Banyuwangi memiliki skor Indeks Risiko Bencana Tsunami sebesar 11.02 yang termasuk dalam kelas risiko sedang. Berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat 11 kecamatan terpapar bahaya tsunami di Kabupaten Banyuwangi. Total potensi luas bahaya tsunami adalah 9.110 Ha.

f) Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB). Berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat 24 kecamatan terpapar bahaya kekeringan di Kabupaten Banyuwangi. Total potensi luas bahaya kekeringan adalah 291.906 Ha. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya kekeringan di Kabupaten Banyuwangi. Total



luas bahaya tersebut menentukan kelas bahaya kekeringan di Kabupaten Banyuwangi, yaitusedang. Kelas bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya kekeringan.

g) Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem atau angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB). Berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat 24 kecamatan terpapar bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Banyuwangi. Total potensi luas bahaya cuaca ekstrim adalah 190.871 Ha. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Banyuwangi. Total luasan bahaya tersebut menentukan kelas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Banyuwangi, yaitu tinggi. Kelas bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya cuaca ekstrim.

h) Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrem/Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklontropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakangaris pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantaitersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebutsebagai penyebab utama abrasi (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB).

Berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat 11 kecamatan terpapar bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Banyuwangi. Total potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah 3.055 Ha. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luasbahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di KabupatenBanyuwangi. Total luas bahaya tersebut menentukan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Banyuwangi, yaitu tinggi. Kelas bahaya diperoleh dengan melihat kelasbahaya maksimal di seluruh kecamatan terpapar bahaya gelombang ekstrim dan abrasi.





i) Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB). Berdasarkan kondisi wilayahnya, terdapat 24 kecamatan terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuwangi. Total potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah 143.175 Ha. Total luas bahaya tersebut diperoleh dari penjumlahan luas bahaya dari seluruh wilayah terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuwangi. Total luas bahaya tersebut menentukan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuwangi, yaitu sedang. Kelas bahaya diperoleh dengan melihat kelas bahayamaksimal diseluruh kecamatan terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan.

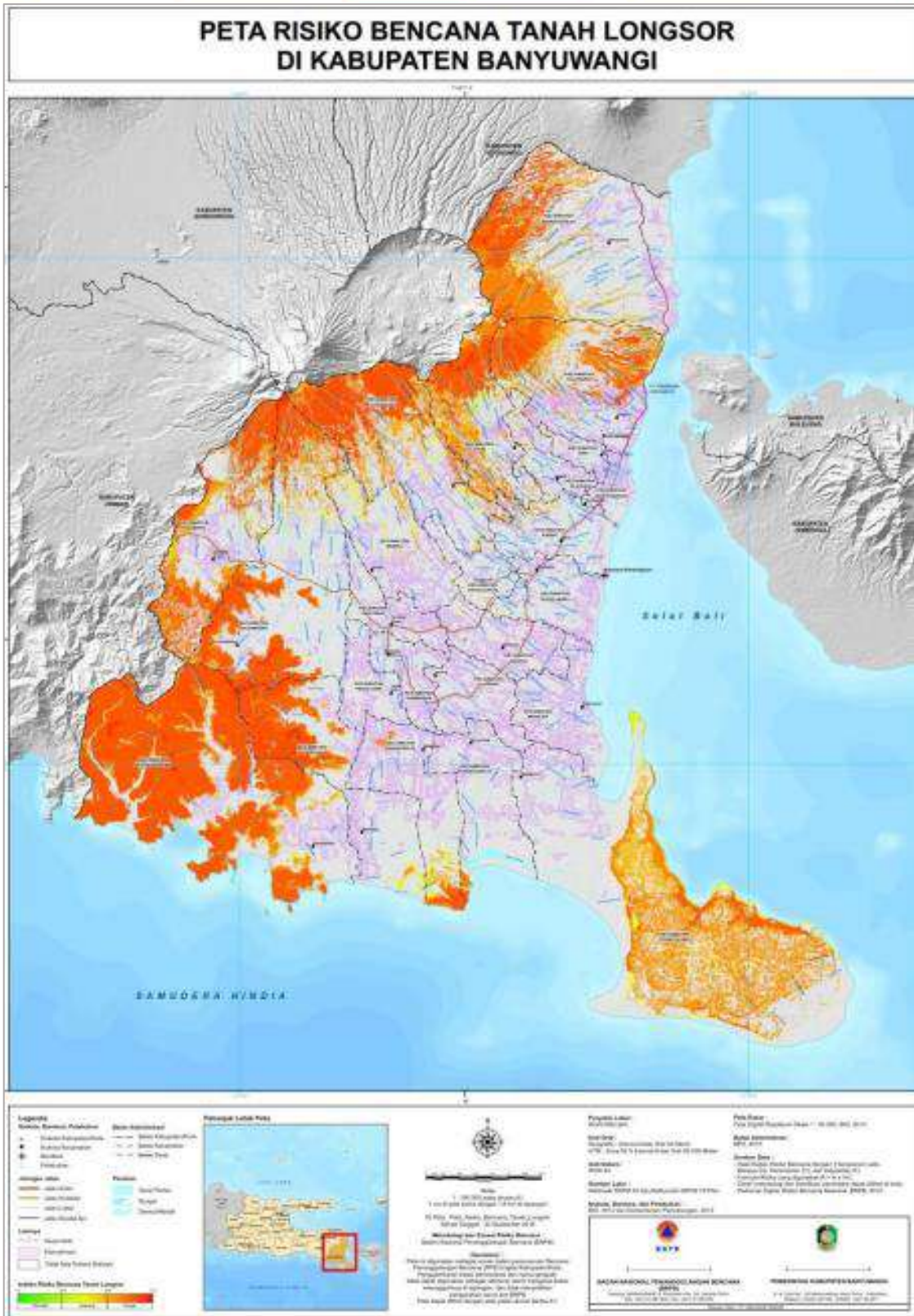
B. Peta Risiko Bencana

Peta risiko bencana merupakan peta petunjuk zonasi tingkat risiko setiap bahaya pada suatu daerah. Pemetaan tersebut dilakukan melalui hasil penggabungan antara peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas. Hasil peta risiko menyangkut setiap potensi bencana yang mengancam suatu daerah. Untuk lebih menjelaskan analisis tingkat risiko bencana di suatu daerah, maka visualisasi hasil peta telah diperhalus. Peta risiko bencana Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar II. 8 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021



Gambar II. 9 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021

PETA RISIKO BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANYUWANGI



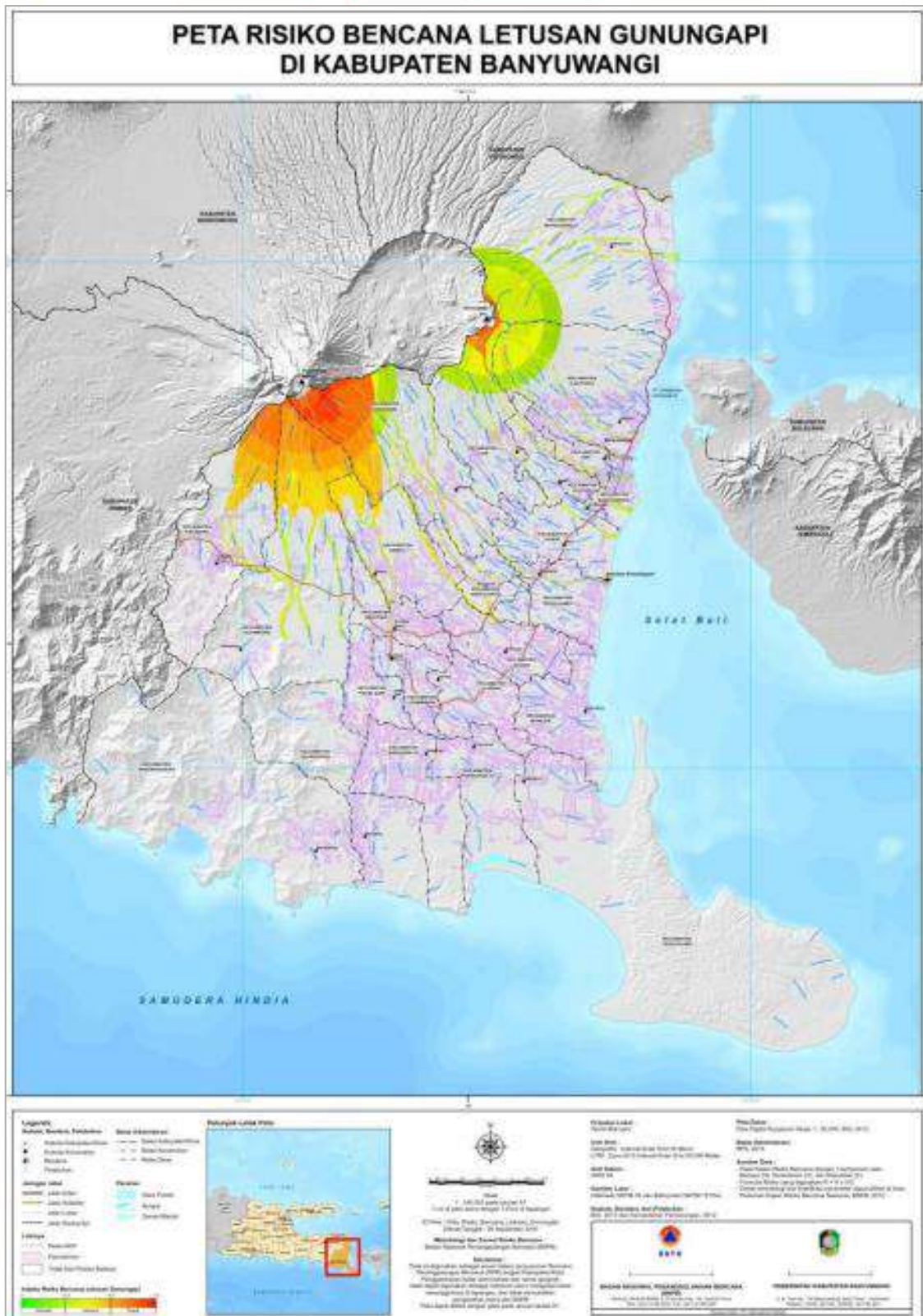
Gambar II. 10 Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021



Gambar II. 11 Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021



Gambar II. Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021



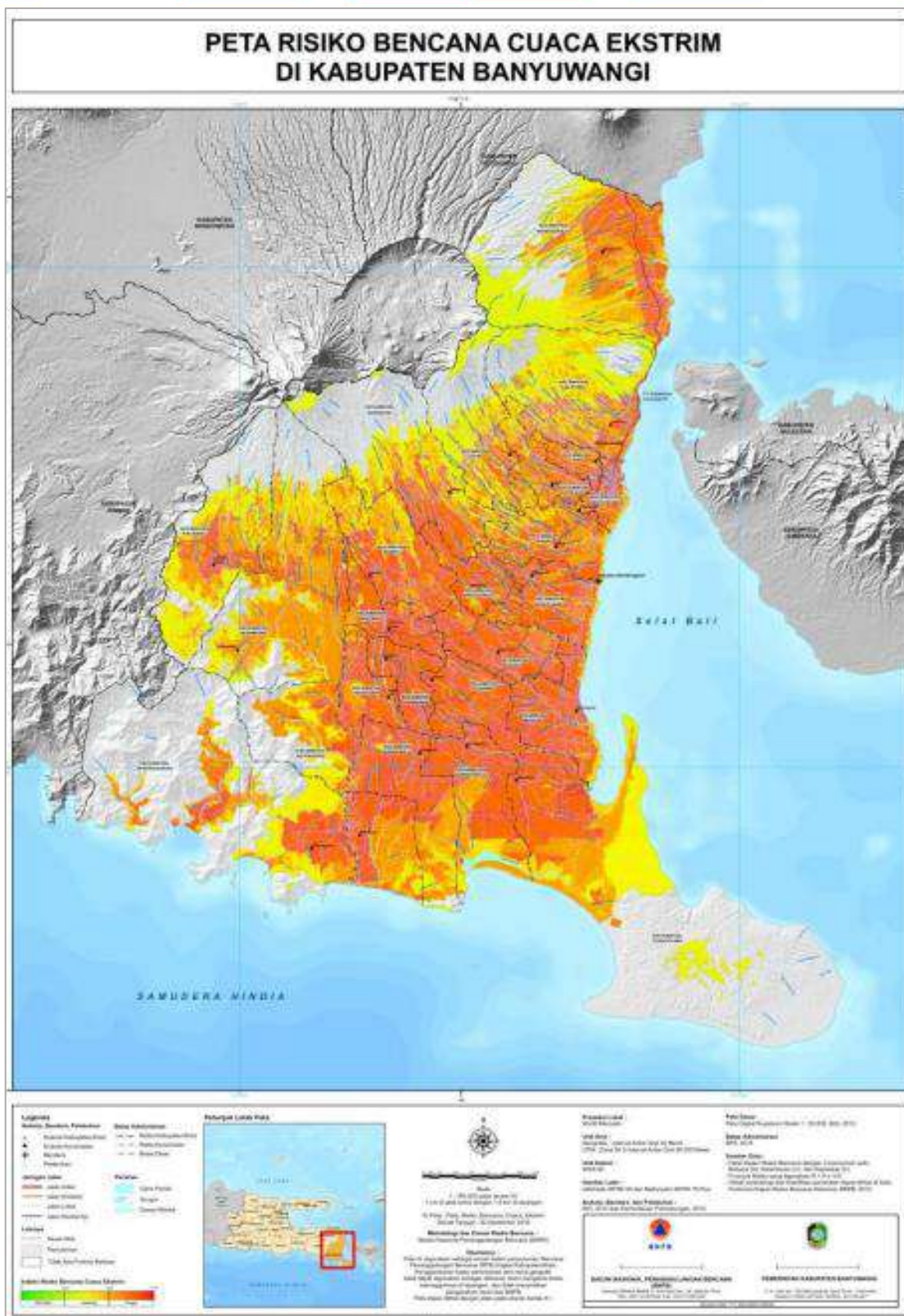
Gambar II. 12 Peta Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021



Gambar II. 13 Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021



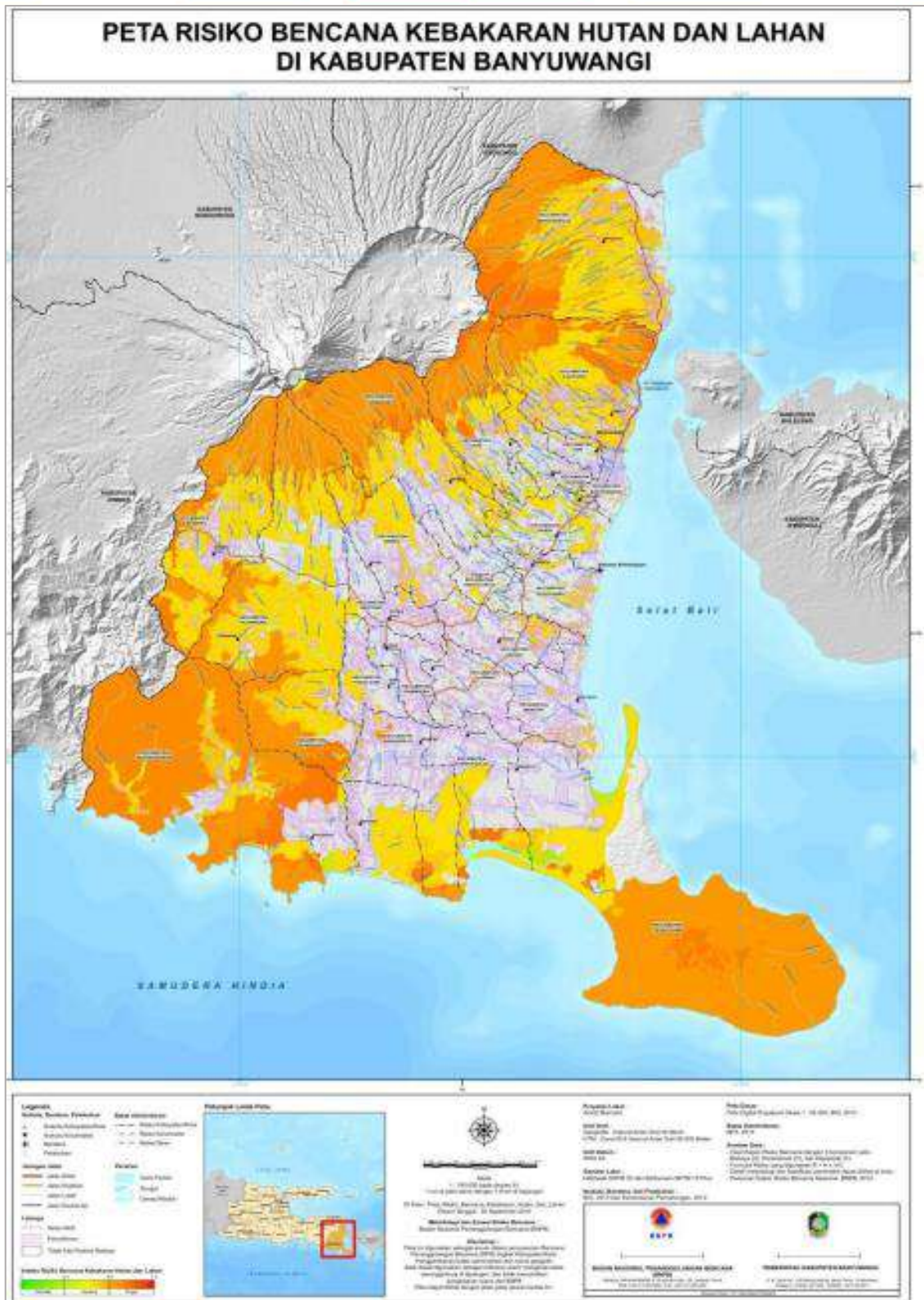
Gambar II. 14 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021



Gambar II. 15 Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021



Gambar II. 16 Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021

2.1.10 Demografi

A. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi yang diambil dari Data Agregat Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 sebesar 1.780.015 jiwa yang terbagi ke dalam 25 kecamatan. Jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Banyuwangi menurut kecamatan terdapat pada Kecamatan Muncar dengan jumlah penduduk sebesar 140.910 jiwa. Kecamatan Banyuwangi berada di urutan kedua dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 120.781 jiwa. Sedangkan, kecamatan Licin dengan jumlah penduduk terendah yaitu sebesar 30.575 jiwa.

Tabel II. 21 Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Rasio Jenis Kelamin (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Laju Pertumbuhan per 2022-2023 (%)
		Laki-Laki	Perempuan			
1	Pesanggaran	28.889	28.808	100,28%	72	1.62
2	Bangorejo	34.333	33.997	100,99%	522	0.96
3	Purwoharjo	35.960	35.804	100,44%	343	0.56
4	Tegaldlimo	34.629	34.095	101,57%	105	0.40
5	Muncar	70.725	70.185	100,77%	554	0.99
6	Cluring	40.526	40.454	100,18%	709	0.99
7	Gambiran	34.395	34.698	99,13%	1515	0.56
8	Srono	50.699	50.478	100,44%	575	0.91
9	Genteng	48.958	48.522	100,90%	647	1.43
10	Glenmore	38.803	39.594	98,00%	186	1.16
11	Kalibaru	33.772	34.177	98,81%	167	0.80
12	Singojuruh	26.474	26.826	98,69%	541	1.07
13	Rogojampi	28.607	29.316	97,58%	1367	0.90
14	Kabat	33.130	33.181	99,85%	1283	1.11
15	Glagah	18.807	19.401	96,94%	1146	1.37
16	Banyuwangi	59.415	61.366	96,82%	1688	0.59
17	Giri	15.991	16.396	97,53%	2542	1.52

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Rasio Jenis Kelamin (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Laju Pertumbuhan per 2022-2023 (%)
		Laki- Laki	Perem- puan			
18	Wongsorejo	40.568	41.021	98,90%	123	1.67
19	Songgon	29.707	29.675	100,11%	197	0.31
20	Sempu	44.013	43.959	100,12%	467	1.35
21	Kalipuro	43.293	43.480	99,57%	99	0.94
22	Siliragung	25.707	25.166	102,15%	718	0.82
23	Tegalsari	27.267	26.896	101,38%	1494	1.51
24	Licin	15.278	15.297	99,88%	513	1.21
25	Blimbingsari	28.342	28.935	97,95%	569	1.26
Total		888.288	891.727	99,61%	308	1.01

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

Jika dilihat dari segi rasio jenis kelamin, secara umum rasio jenis kelamin di Kabupaten Banyuwangi cukup berimbang, namun adanya fluktuasi di beberapa kecamatan mencerminkan dinamika demografis lokal di keseluruhan kecamatan. Dalam data ini, sebagian besar kecamatan memiliki rasio jenis kelamin yang berkisar antara 98% hingga 101%, menandakan distribusi yang cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi di tahun 2023 ada di Kecamatan Siliragung dengan angka 102,15% artinya wilayah tersebut kelebihan jumlah penduduk laki-laki, dan Kecamatan Glagah dengan nilai rasio jenis kelamin 96,94% mengindikasikan kelebihan jumlah penduduk perempuan.

Sedangkan jika dilihat dari kepadatan penduduknya, Kecamatan Giri menjadi kecamatan terpadat dengan 2.542 penduduk/km² sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kalipuro dengan 99 penduduk/ km². Selain itu jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi tahun 2023 adalah sebanyak 1.780.015 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat pada kecamatan Wongsorejo yakni sebesar 1,67 sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat pada kecamatan Songgon yakni sebesar 0,31. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2022 hingga 2023 mengalami peningkatan. Penduduk merupakan unsur penting dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi, dengan adanya pertumbuhan penduduk yang meningkat tentu memberikan dampak positif bagi Kabupaten Banyuwangi untuk dapat dijadikan sebagai unsur/ faktor pembangunan, sehingga perekonomian daerah akan

cepat berkembang. Untuk menghindari peningkatan penduduk yang cukup tinggi, Kabupaten Banyuwangi harus mengimbangi dengan adanya program pengendalian penduduk untuk menekan pertumbuhan sehingga kualitas sumber daya manusia tetap terjaga.

B. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi menurut umur berdasarkan data dari Dispenduk Banyuwangi, jumlah penduduk tertinggi ditunjukkan oleh penduduk kelompok umur 50-54 dengan jumlah penduduk sebesar 136.609 atau sebesar 7,67% dari seluruh penduduk Banyuwangi. Sedangkan penduduk kelompok umur 70-74 memiliki jumlah paling sedikit dari seluruh kelompok umur yakni sebesar 50.126 atau 2,82% dari seluruh penduduk Kabupaten Banyuwangi. Gambar tersebut juga menggambarkan kondisi dimana jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan usia penduduk yang tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Hal ini dapat dikatakan Kabupaten Banyuwangi mengalami bonus demografi dimana akan menjadikan kesempatan strategis bagi Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan percepatan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia berusia produktif yang melimpah, sehingga dapat meningkatkan laju perekonomian Kabupaten Banyuwangi.

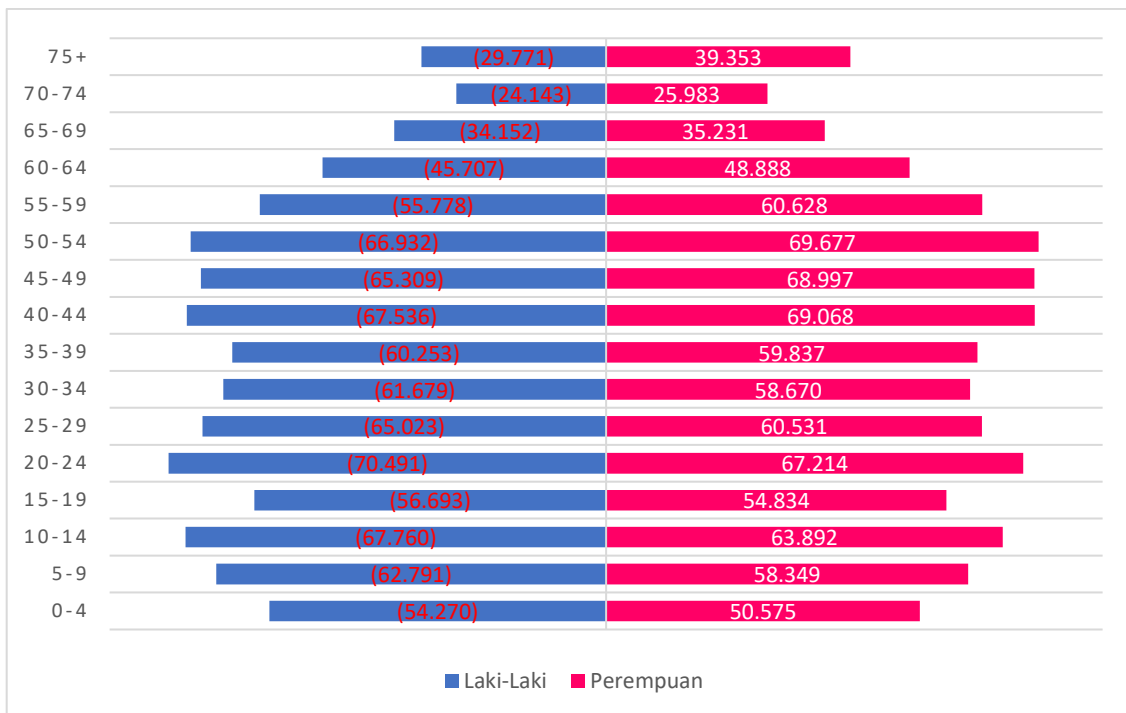
Tabel II. 22 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	54.270	50.575	104.845
5-9	62.791	58.349	121.140
10-14	67.760	63.892	131.652
15-19	56.693	54.834	111.527
20-24	70.491	67.214	137.705
25-29	65.023	60.531	125.554
30-34	61.679	58.670	120.349
35-39	60.253	59.837	120.090
40-44	67.536	69.068	136.604
45-49	65.309	68.997	134.306
50-54	66.932	69.677	136.609
55-59	55.778	60.628	116.406
60-64	45.707	48.888	94.595

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
65-69	34.152	35.231	69.383
70-74	24.143	25.983	50.126
75+	29.771	39.353	69.124
Total	888.288	891.727	1.780.015

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

Berdasarkan pengelompokan umur sebagaimana di atas, berikut visualisasi piramida penduduk Kabupaten Banyuwangi:



Gambar II. 17 Piramida Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023

Sumber: Diolah, 2024

Berdasarkan gambar piramida penduduk yang diberikan, piramida penduduk tersebut termasuk dalam kategori stationer atau ekspansif yang menunjukkan keseimbangan antara sebagian besar kelompok umur dengan sedikit penyempitan di kelompok usia tua, mengindikasikan tingkat kelahiran yang tinggi dan populasi muda yang besar. Kelompok usia muda (0-14 tahun) relatif besar, mencerminkan tingginya tingkat kelahiran di wilayah tersebut. Kelompok usia produktif (15-64 tahun) juga signifikan, yang berarti terdapat potensi tenaga kerja yang besar untuk mendukung pembangunan ekonomi. Kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) lebih kecil dibandingkan dengan kelompok usia muda, namun tetap memerlukan perhatian dalam hal pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

Piramida penduduk ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan. Tingginya populasi muda menggarisbawahi pentingnya investasi dalam pendidikan dan fasilitas kesehatan untuk memastikan perkembangan sumber daya manusia yang optimal. Dengan populasi usia produktif yang besar, terdapat potensi tenaga kerja yang dapat mendukung pembangunan ekonomi jika dikelola dengan baik. Meskipun populasi lansia lebih kecil, tetap penting untuk memperhatikan kebutuhan mereka dalam hal pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Secara keseluruhan, piramida penduduk ini menggambarkan potensi pertumbuhan penduduk yang stabil dan berkelanjutan serta menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial di Kabupaten Banyuwangi.

C. Jumlah Penduduk Menurut Kepercayaan yang Dianut

Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi berdasarkan kepercayaan yang dianut mayoritas didominasi oleh kepercayaan islam yakni sebesar 96,93% dari keseluruhan penduduk di Kabupaten Banyuwangi, selebihnya didominasi oleh kepercayaan Hindu, Kristen, Katholik, Budha, Kong Hu Chu, dan Kepercayaan Lainnya.

Tabel II. 23 Jumlah Penduduk Menurut Kepercayaan yang Dianut

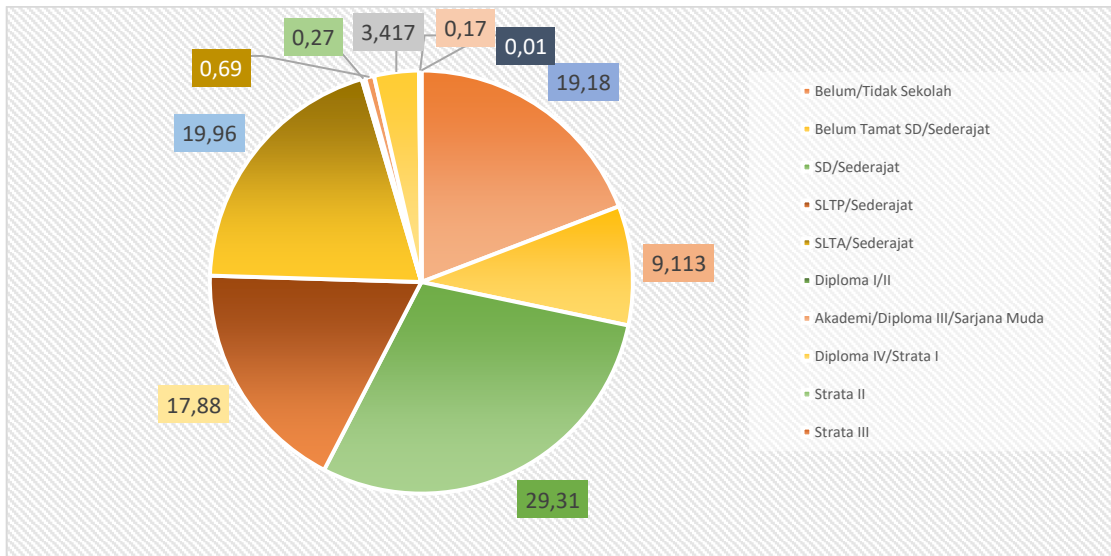
No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Islam	1.725.447	96,934%
2	Katolik	18.348	1,031%
3	Kristen	4.739	0,266%
4	Hindu	27.343	1,536%
5	Budha	3.905	0,219%
6	Kong Hu Cu	111	0,006%
7	Kepercayaan Lainnya	112	0,007%
Jumlah		1.780.015	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

D. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi menurut pendidikan berdasarkan data dari Dispenduk Banyuwangi, didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SD/Sederajat sebesar 29,31% dari seluruh penduduk di Kabupaten Banyuwangi. Persentase jumlah penduduk terendah menurut pendidikan ditunjukkan oleh penduduk dengan tingkat pendidikan Strata III yaitu 0,01% dari seluruh penduduk Kabupaten Banyuwangi. Kondisi tersebut kurang baik untuk kondisi perekonomian

karena menandakan bahwa tingkat pendidikan di Kabupaten Banyuwangi masih rendah dan kesadaran akan pendidikan masih rendah.

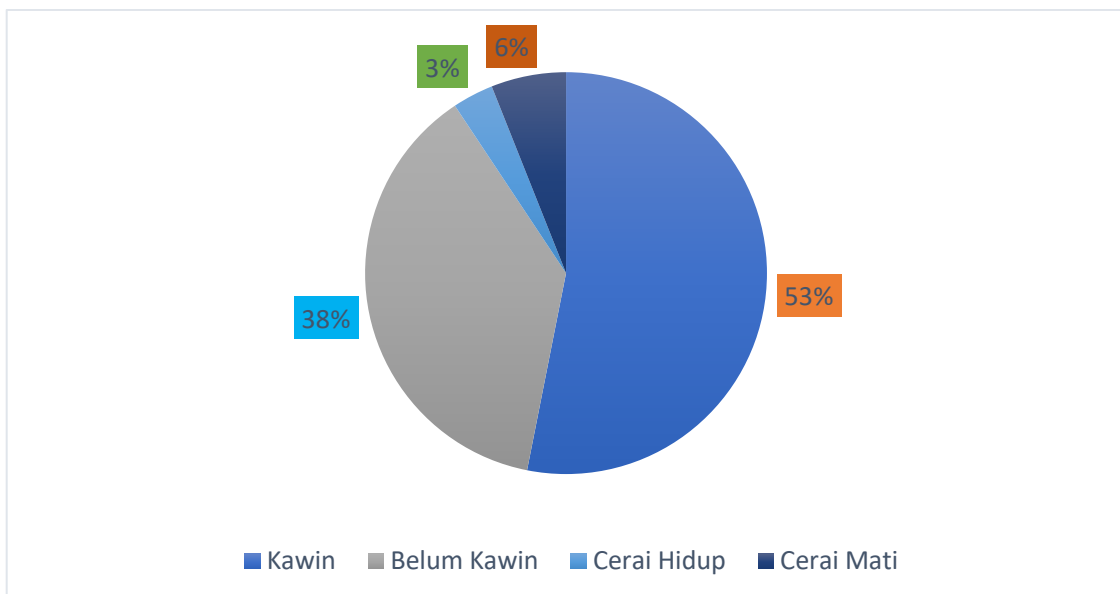


Gambar II. 18 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

E. Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan

Berdasarkan status perkawinan, Kabupaten Banyuwangi didominasi oleh penduduk dengan status kawin sebesar 53,11%. Artinya lebih dari setengah penduduk Kabupaten Banyuwangi dari total 1.780.015 jiwa berstatus kawin dan mempunyai pasangan. Sedangkan penduduk yang berstatus belum kawin sebanyak 37,56% dari keseluruhan penduduk di Kabupaten Banyuwangi, selebihnya penduduk berstatus cerai hidup dan cerai mati.



Gambar II. 19 Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan nilai keseluruhan produk domestik regional bruto (PDRB) suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting untuk mengukur kesehatan ekonomi dan perkembangan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dalam persentase perubahan PDRB dari tahun ke tahun atau dalam periode waktu lainnya. Data indikator pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi tahun 2005-2023 dapat dilihat melalui grafik berikut:



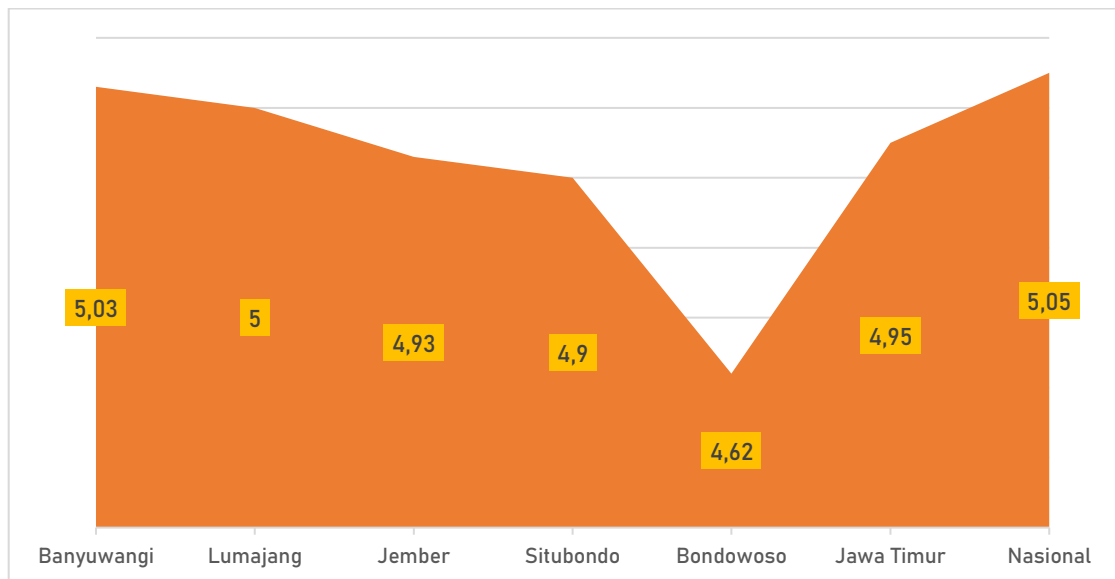
Gambar II. 20 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2010-2023 memiliki capaian yang fluktuatif. Penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2020, hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang membuat capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi turun hingga -3,58. Penurunan ini terjadi di hampir semua sektor lapangan usaha, tercatat hanya 5 dari 17 PDRB menurut lapangan usaha yang penurunannya tidak sampai pada angka - (minus) pada tahun 2020. Kelima lapangan usaha tersebut adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor informasi dan komunikasi; sektor real estate; sektor jasa pendidikan; serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Penurunan paling drastis pada tahun 2020 terjadi pada sektor penyedia akomodasi dan makanan yang mencapai -13,85 kemudian sektor jasa lainnya -13,20 serta sektor transportasi dan pergudangan yang mencapai -12. Kondisi ini berlangsung hingga tahun 2021 yaitu masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang masih menyisakan

sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial yang berada di -0,86 serta sektor transportasi dan pergudangan yang berada di -0,32. Namun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi secara umum pada tahun 2021 sudah semakin membaik jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan capaian pertumbuhan ekonomi yaitu 2,09 dan terus meningkat hingga tahun 2023.

Laju perekonomian Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 paling besar masih ditopang oleh sub Pertanian sebesar 25,37% meskipun demikian tren tiap tahunnya pertumbuhannya terus menurun. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sub Transportasi dan Pergudangan, Penyedia Akomodasi dan Makanan dan Jasa Lainnya. Lapangan usaha potensial lainnya adalah sub konstruksi dan Perdagangan, Hotel dan Restoran yang terus tumbuh dan menyumbang kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi. Melihat tren di atas menunjukkan aktifitas ekonomi di Banyuwangi sudah tidak mengandalkan peran sumber daya alam lagi melainkan mengarah ke penyediaan jasa yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan peran sumber daya manusia.



Gambar II. 21 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2023

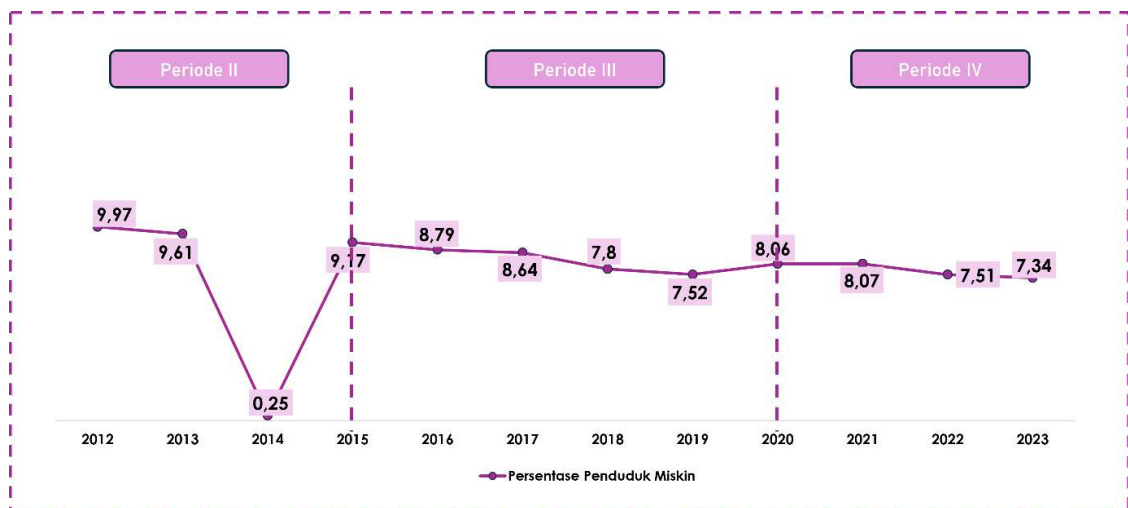
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitarnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi berada pada posisi tertinggi. Sedangkan pada skala provinsi, posisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun 2023 berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan tipis berada di bawah capaian pertumbuhan ekonomi nasional dengan selisih 0,2%. Perekonomian Kabupaten Banyuwangi pada

tahun 2023 memberi kontribusi sebesar 3,43% terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur yang menjadi peringkat urutan ke-8 terbesar dari 38 kabupaten/kota.

B. Angka Kemiskinan

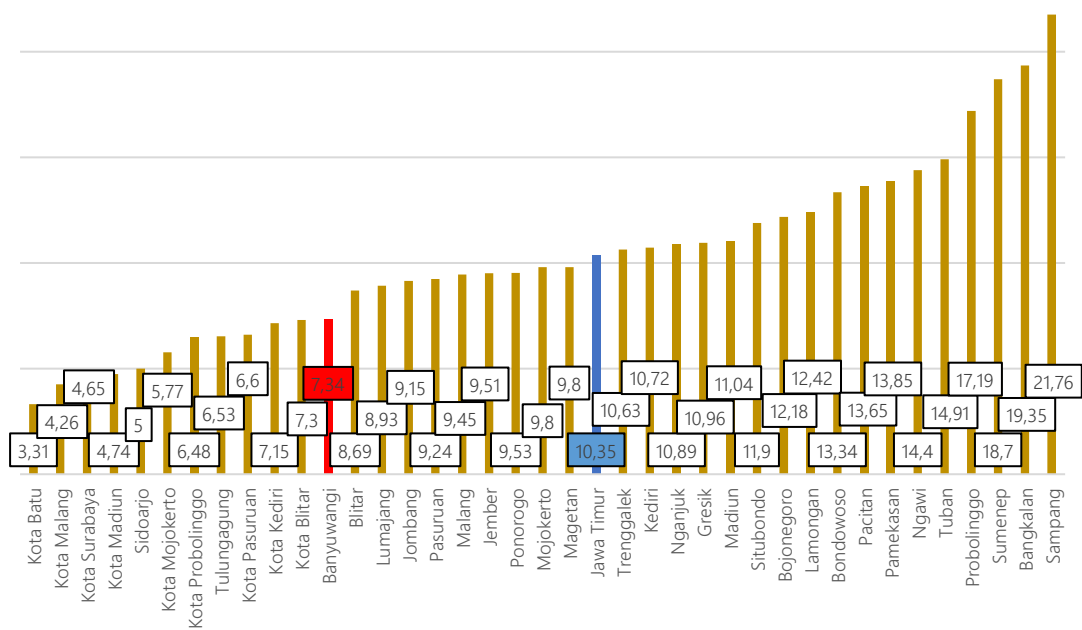
BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal yang layak bagi kehidupannya. Aspek ini didasarkan kepada perbandingan pendapatan, pengeluaran, Pendidikan atau atribut lain dari individu dengan beberapa Batasan yang telah ditentukan, dimana mereka di bawah batas yang ditentukan tersebut dikatakan sebagai miskin. Angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi direpresentasikan oleh realisasi persentase penduduk miskin sebagaimana grafik berikut:



Gambar II. 22 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2023

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2024

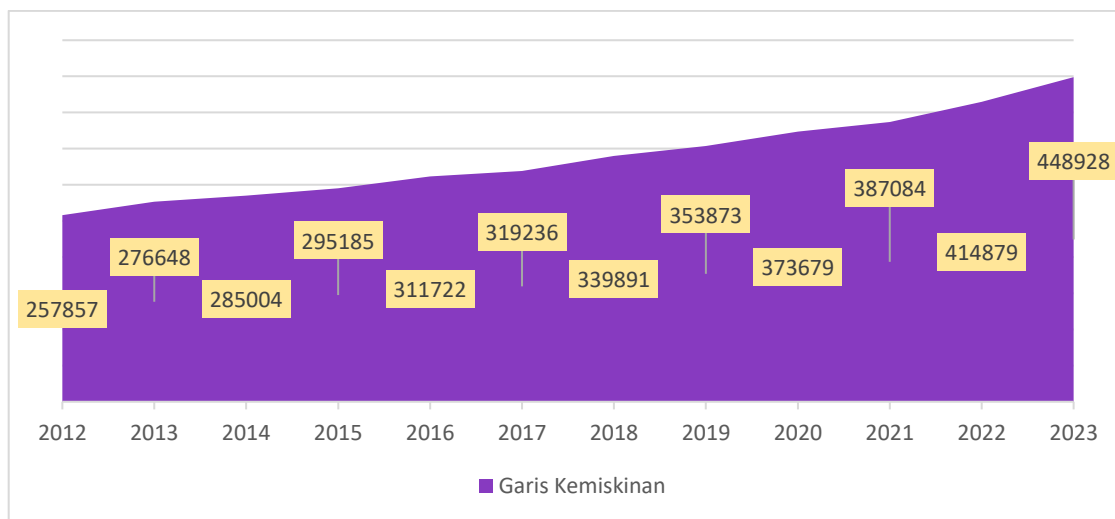
Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten yang berhasil menurunkan kemiskinan dari angka 9,97% tahun 2012 menjadi 7,34% pada tahun 2023. Perkembangan persentase penduduk miskin di Banyuwangi mengalami fluktuasi kenaikan utamanya pada saat pandemi Covid-19 yang melumpuhkan perekonomian global. Jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, persentase penduduk miskin di Banyuwangi berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Hal ini menandakan bahwasanya program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi berjalan dengan efektif.



Gambar II. 23 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

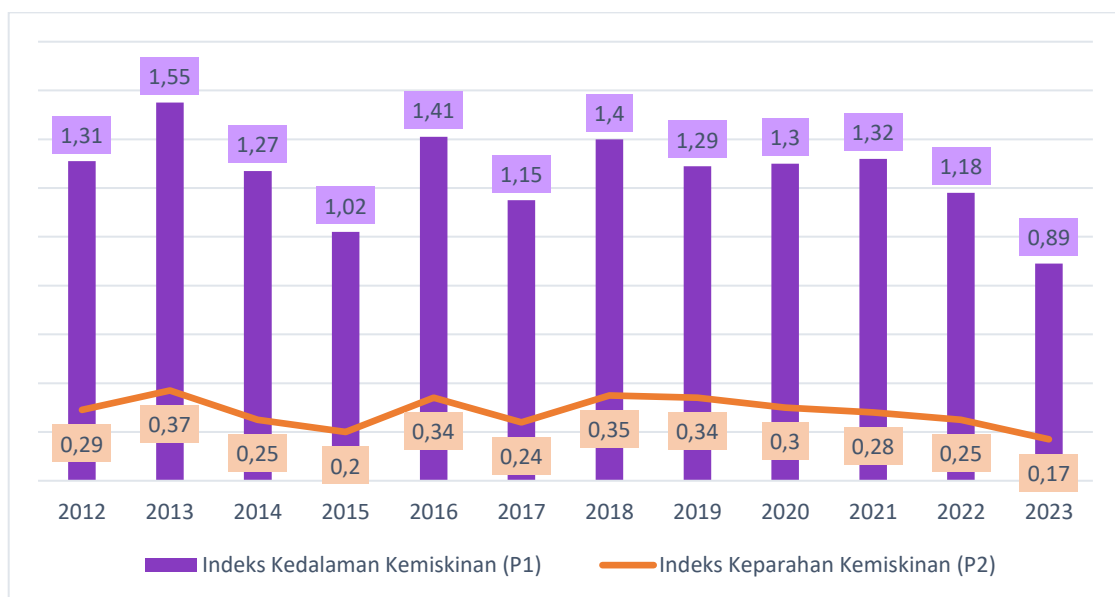
Berdasarkan grafik komparasi di atas, dibandingkan dengan 38 kabupaten/kota se Jawa Timur, angka persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi menempati peringkat 12 di bawah rata-rata Jawa Timur. Jika dibandingkan dengan kabupaten yang terletak di Keresidenan Besuki atau wilayah tapal kuda yaitu wilayah administratif pemerintahan zaman Hindia Belanda yang meliputi wilayah Jawa Timur bagian timur, persentase penduduk miskin Kabupaten Banyuwangi berada di posisi terendah yang berarti positif, artinya persebaran penduduk miskin di Banyuwangi lebih rendah dibandingkan wilayah sekitarnya.



Gambar II. 24 Garis Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2024

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi selain tercermin dari persentase penduduk miskin, dapat dilihat dari garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Tren perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana divisualisasikan pada grafik di atas, dengan basis data tahun 2012-2023 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Garis kemiskinan pada tahun 2012 berada di angka Rp257.857/bulan/kapita tumbuh menjadi Rp448928/bulan/perkapita di tahun 2023. Peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi ini menandakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum penduduk di Kabupaten Banyuwangi semakin tinggi yang berarti tingkat hidup layak penduduk Kabupaten Banyuwangi semakin baik.



Gambar II. 25 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2023

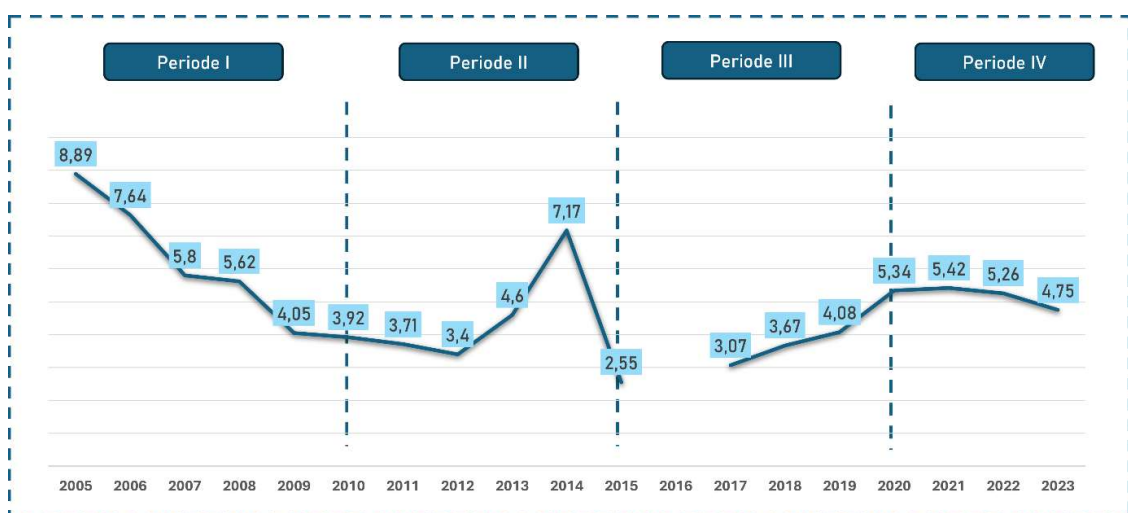
Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2024

Jika dilihat dari grafik di atas, perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (selanjutnya disebut P1) di Kabupaten Banyuwangi dalam rentang tahun 2012-2023 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif dengan kecenderungan menurun. P1 tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 1,55 dan terendah pada tahun 2023 sebesar 0,89 yang berhasil ditekan bahkan sejak terjadinya pandemi Covid-19. Capaian P1 Kabupaten Banyuwangi tahun 2023 menjadi urutan ke-8 (delapan) dibandingkan kabupaten/kota terbesar dalam penurunan P1 se Provinsi Jawa Timur. Hal ini tentunya merupakan capaian yang positif yang menandakan kondisi yang baik dikarenakan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi semakin mendekati garis kemiskinan. Tren serupa juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (selanjutnya disebut P2) di Kabupaten Banyuwangi yang

mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2012-2023 dengan kecenderungan menurun. Capaian P2 Tahun 2023 sebesar 0,17 menjadi capaian paling rendah selama lebih dari satu dekade, dengan menjadi urutan 8 kabupaten/kota terbesar dalam penurunan P2 se Provinsi Jawa Timur. Tren ini menunjukkan kondisi yang baik dikarenakan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi semakin menyempit.


C. Angka Pengangguran

Angka pengangguran merupakan indikator utama yang dapat dipandang dalam dua perspektif yakni perspektif ekonomi yang menjadi tolok ukur bahwa ekonomi dapat didistribusikan dengan baik dan dalam perspektif sosial atau kualitas SDM dimana pengangguran merepresentasikan SDM suatu wilayah mampu berdaya saing sehingga dapat berkontribusi dalam sektor pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka pengangguran merupakan indikator yang fundamental dalam memberikan gambaran kondisi ekonomi, sosial, maupun SDM di Kabupaten Banyuwangi. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan masalah ekonomi serius, seperti ketidakstabilan atau ketidakseimbangan sektor tenaga kerja, yang perlu segera ditangani oleh pemerintah dan pemangku kepentingan ekonomi. Selain itu, data ini juga penting dalam perencanaan kebijakan sosial, pendidikan, dan pelatihan untuk membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup penduduk daerah tersebut. Dengan demikian, pemantauan tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah adalah langkah krusial untuk mengukur dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Berikut merupakan gambaran fluktuasi angka pengangguran di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 2005-2023.



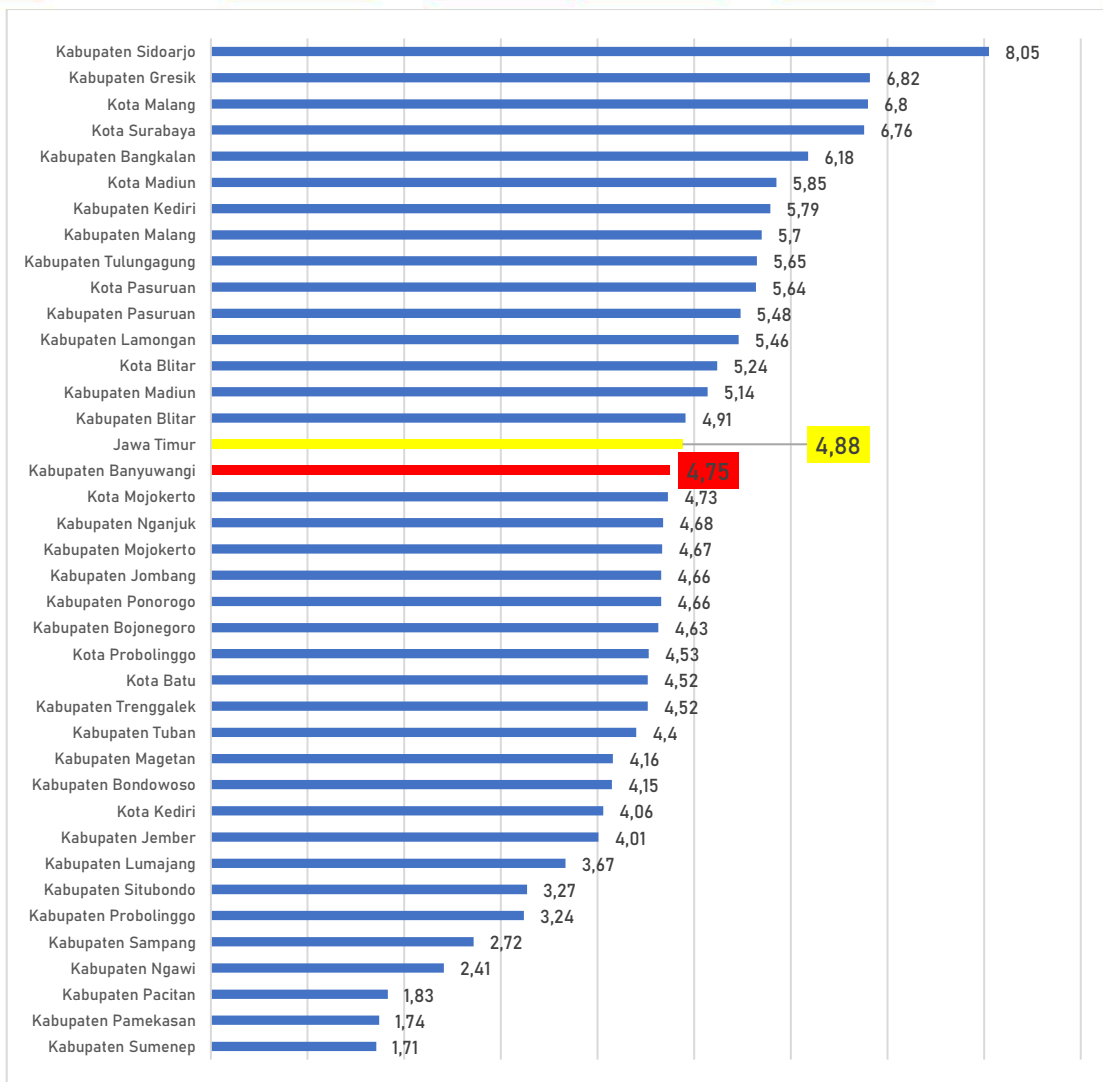
Gambar II. 26 Angka Pengangguran di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2024



Angka pengangguran Kabupaten Banyuwangi direpresentasikan oleh capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sejak tahun 2005 hingga tahun 2023, TPT Kabupaten Banyuwangi menunjukkan adanya tren penurunan dimana data capaian awal RPJPD tahun 2005 terlihat bahwa TPT Kabupaten Banyuwangi mencapai 8.89%, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 4.75% atau turun dalam kurun waktu 19 tahun sebesar 4.14%. TPT di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2005-2023 apabila dilihat dari pentahapan periode RPJPD dalam 4 periode gambaran kinerja diatas cukup fluktuatif dimana periode pertama tahun 2005 – 2009 menunjukkan tren penurunan dari 8.89% pada tahun 2005 menjadi 4.05% pada tahun 2009. Tren penurunan bahkan sampai berlanjut pada periode kedua tepatnya pada tahun 2012 turun hingga 3.4%, dimana pada tahun tersebut angka pengangguran mencapai 29.631. Namun capaian tersebut meningkat pada tahun 2013 dan 2014 bahkan dalam dua tahun tersebut meningkat cukup tinggi hingga diangka 7.17% atau meningkat 4% lebih dari tahun 2012. Tahun 2015 menariknya mengalami penurunan cukup tajam hingga mencapai 2.55% dengan jumlah pengangguran mencapai 22.787 yang merupakan persentase pengangguran terendah dengan jumlah pengangguran terendah dalam kurun waktu 2005-2023. Pada tahun 2016, tidak ada ketersediaan data TPT dikarenakan indikator dihasilkan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus - Tahun 2016 dan tidak cukup sampel untuk melakukan estimasi sampai level Kabupaten/Kota.






Gambar II. 27 Angka Pengangguran Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Bila dibandingkan dengan Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur, TPT Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 berada tipis di bawah angka TPT Provinsi Jawa Timur yang mencapai 4.88%, artinya angka pengangguran di Kabupaten Banyuwangi pada tahun tersebut lebih baik dibandingkan dengan sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2023, TPT Kabupaten Banyuwangi menempati peringkat 23 capaian terendah dari 38 Kabupaten/ Kota. Bila dibandingkan dengan wilayah disekitarnya atau wilayah tapal kuda yang meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Bondowoso, TPT Kabupaten Banyuwangi justru berada di peringkat paling tinggi diantara seluruh daerah tersebut.

Bila melihat kondisi TPT di Kabupaten Banyuwangi dapat disimpulkan bahwa dalam rentang tahun 2005-2023, perkembangan TPT yang merepresentasikan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Kabupaten

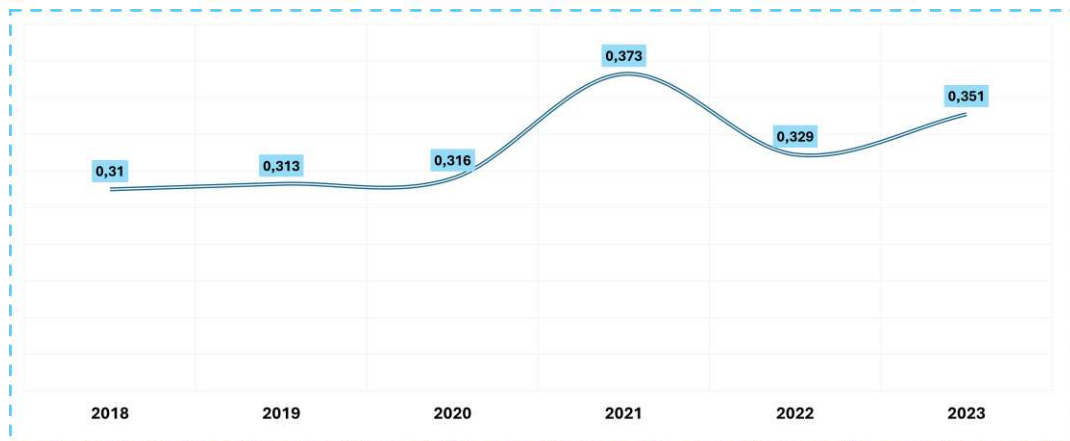


Banyuwangi belum menunjukkan adanya penurunan yang signifikan, namun demikian bila dilihat posisi angka pengangguran Kabupaten Banyuwangi terhadap sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Timur menunjukkan kondisi yang lebih baik. Walaupun demikian, kedepan TPT di Kabupaten Banyuwangi masih perlu ditekan sampai tahun berjalan (2023) masih terdapat 4.75% dari angkatan kerja yang menganggur, selain itu perkembangan penduduk usia kerja dalam setiap tahun selalu mengalami peningkatan, sehingga apabila bertambahnya penduduk usia kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang mencukupi, maka dikhawatirkan angka pengangguran di Kabupaten Banyuwangi akan mengalami peningkatan.

D. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dapat diukur menggunakan Indeks untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan pembagian pendapatan di antara penduduk suatu wilayah. Indeks Gini memiliki rentang nilai antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketidaksetaraan sempurna). Nilai 0 menunjukkan bahwa pendapatan didistribusikan dengan sangat merata, sedangkan nilai 1 menunjukkan tingkat ketidaksetaraan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketidaksetaraan di suatu daerah.

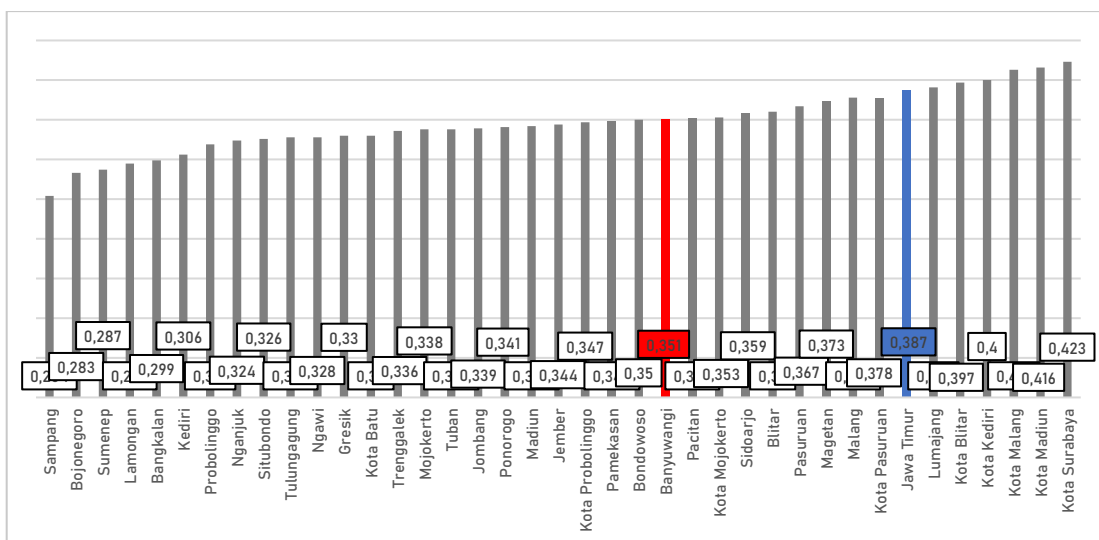
Tidak banyak data kinerja yang didapatkan terkait ketimpangan pendapatan yang direpresentasikan dengan indeks gini, data menunjukkan indeks gini Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 2018-2023 justru menunjukkan adanya peningkatan, dimana tahun 2018 indeks gini mencapai 0.31 meningkat pada tahun 2023 mencapai 0.351. Titik peningkatan yang cukup tajam ialah pada tahun 2021 dimana pada tahun tersebut merupakan tahun pergejolakan peningkatan ekonomi setelah masa pandemi dimana indeks gini meningkat mencapai 0.373. Peningkatan indeks gini tandanya ialah semakin mendekati angka 1 artinya ialah ketimpangan antar kelas pendapatan semakin tinggi. Terutama peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa masa *recovery* akibat pandemi pada tahun 2021 meningkat dimana perputaran ekonomi mayoritas hanya bergeliat pada masyarakat menengah ke atas. Sedangkan untuk masyarakat menengah kebawah masih lambat dan belum bergerak cepat. Berikut merupakan grafik capaian indeks gini di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar II. 28 Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Banyuwangi


Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2023

Walaupun ketimpangan pendapatan (indeks gini) di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 hingga 2023 mengalami fluktuasi, namun ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi masih termasuk dalam taraf/ kategori rendah atau memiliki pemerataan pendapatan yang relatif tinggi (merata), dimana menurut Michael Todaro seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia menyebutkan bahwa bila Gini Rasio terletak antara 0,20-0,35 maka ketimpangan termasuk dalam taraf rendah atau pemerataan relatif tinggi (merata), bila Gini Rasio terletak antara 0,36-0,49 menunjukkan ketimpangan taraf sedang, dan bila Gini Rasio terletak antara 0,50-0,70 maka menandakan bahwa pemerataan sangat timpang atau ketimpangan berada pada taraf tinggi. Artinya dalam 5 tahun terakhir hanya pada tahun 2021 ketimpangan Kabupaten Banyuwangi meningkat dan masuk dalam kategori sedang. Sedangkan empat tahun sisanya dapat dikatakan pada posisi rendah dengan representasi ketimpangan merata.



Gambar II. 29 Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024



Pada tahun 2023, ketimpangan pendapatan Kabupaten Banyuwangi sebesar 0,351 yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,329. Hal ini sama dengan beberapa daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur seperti Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo yang memiliki kecenderungan meningkat. Ketimpangan pendapatan (gini rasio) Kabupaten Banyuwangi bila dibandingkan dengan sebagian besar wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan kondisi yang lebih baik, dimana gini rasio pada tahun 2023 menempati peringkat ke 24 dari 38 dengan gini rasio terendah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, ketimpangan pendapatan (gini rasio) Kabupaten Banyuwangi masih berada dibawahnya dengan selisih sebesar 0,036, dimana pada tahun 2023 Provinsi Jawa Timur memiliki ketimpangan pendapatan (gini rasio) sebesar 0,387. Bila dibandingkan dengan wilayah disekitarnya, posisi ketimpangan pendapatan (gini rasio) di Kabupaten Banyuwangi masih berada di atas Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Probolinggo.

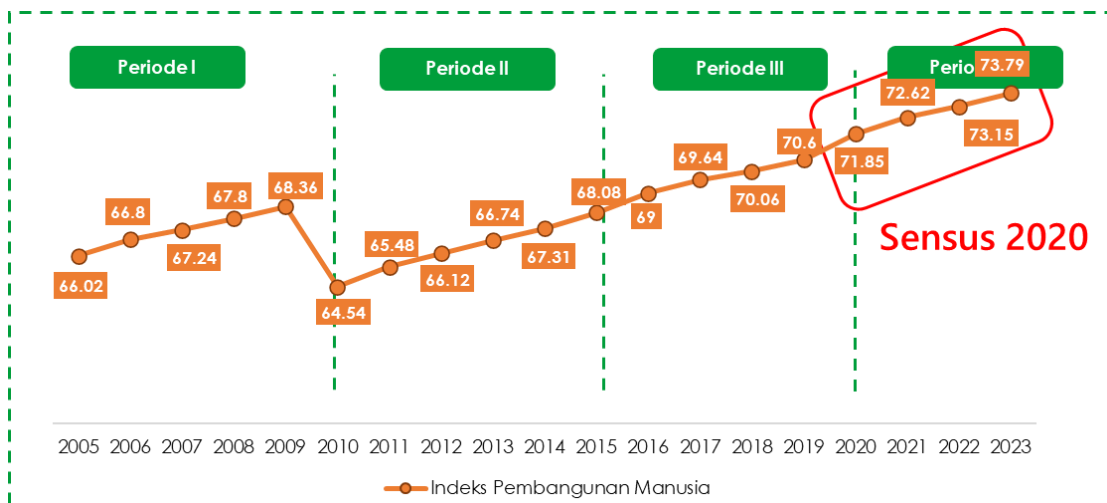
2.2.1 Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator statistik yang mengukur perkembangan sosial dan ekonomi suatu daerah, mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IPM memberikan gambaran holistik tentang pembangunan manusia, dengan nilai lebih tinggi menunjukkan kondisi pembangunan yang optimal. Setiap tahun, BPS merilis laporan Indeks Pembangunan Manusia yang memperbarui peringkat daerah daerah berdasarkan IPM.

Dari tahun 2005 hingga 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuwangi mengalami tren kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2005, IPM Kabupaten Banyuwangi berada pada angka 66.02 dan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 73.79 pada tahun 2023. Pada tahun-tahun tertentu, terdapat fluktuasi kecil dalam pertumbuhan IPM, tetapi secara umum terjadi peningkatan yang stabil. Misalnya, pada tahun 2010 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 68.36 pada tahun 2009 turun pada tahun 2010 mencapai 64.54. Penurunan lebih diakibatkan adanya perubahan metode dan indikator IPM sehingga adanya penyesuaian nilai pada tahun tersebut. Tahun 2011 hingga seterusnya tren terus mengalami peningkatan cukup stabil pun begitu juga untuk tahun 2019-2021 tahun-tahun akibat adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 ada

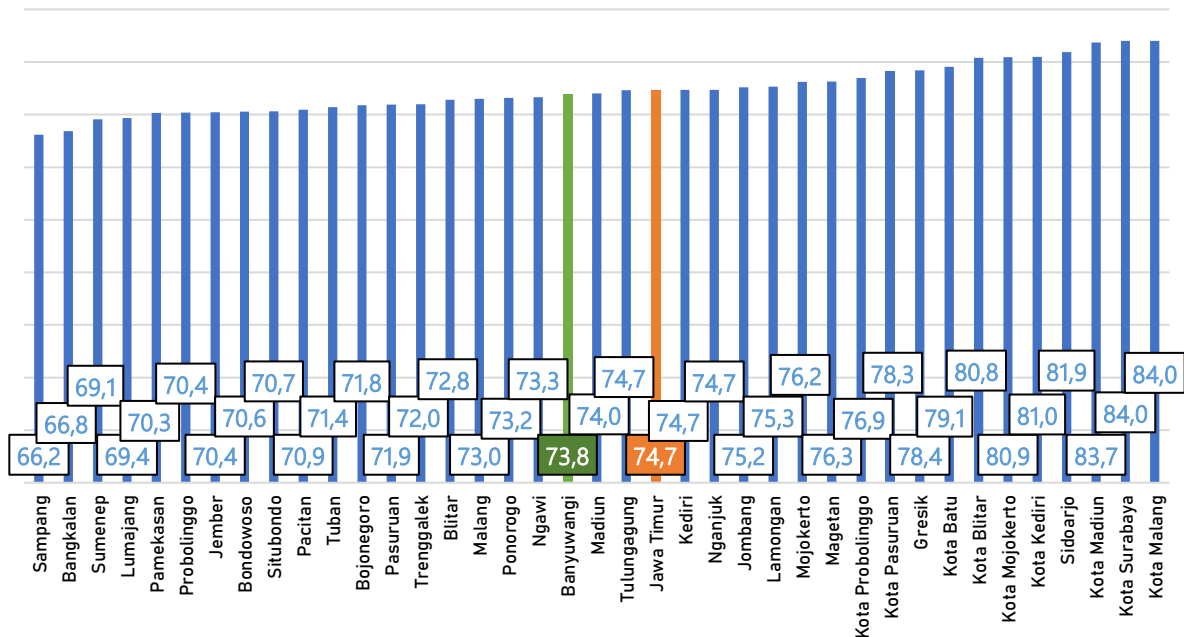
kembali penyesuaian nilai IPM dengan menggunakan data sensus tahun 2020. Berikut merupakan tren IPM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005–2023.



Gambar II. 30 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005–2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2024

Posisi nilai IPM Kabupaten Banyuwangi dibandingkan dengan daerah lain (kabupaten/ kota) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 berada pada peringkat 10 dari seluruh kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, yaitu berada dibawah Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kabupaten Sidoarjo, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Batu, dan Kabupaten Gresik. Selain Kabupaten Banyuwangi, pada tahun 2023 di Provinsi Jawa Timur terdapat 17 kabupaten/ kota yang memiliki nilai IPM berada di atas Provinsi Jawa Timur, sedangkan sisanya sebanyak 20 kabupaten/ kota memiliki nilai IPM dibawah Provinsi Jawa Timur. Posisi peringkat Kabupaten Banyuwangi dibandingkan dengan tahun 2021 tidak mengalami perubahan. Bila angka IPM Kabupaten Banyuwangi dibandingkan dengan angka IPM Provinsi Jawa Timur, maka dapat diketahui bahwa angka IPM Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 masih lebih tinggi, dimana perbedaan/ selisih antara IPM Kabupaten Banyuwangi dengan Provinsi Jawa Timur mencapai 3,6, dimana capaian IPM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 mencapai 74,7 Untuk mengetahui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II. 31 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Berdasarkan gambar di atas, capaian IPM Kabupaten Banyuwangi pada tahun berjalan (2023) mengalami pertumbuhan IPM tertinggi dibandingkan dengan kabupaten disekitarnya seperti Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo. Tren kenaikan angka IPM di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan adanya upaya yang kuat dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya melalui pembangunan di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Peningkatan IPM yang berkelanjutan merupakan indikasi positif tentang progres pembangunan manusia di wilayah tersebut, yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

B. Indeks Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga bertujuan untuk menciptakan keluarga berkualitas yang dapat dilihat dari aspek ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Ketiga dimensi ini menjadi indikator utama dalam mengukur kualitas keluarga melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Dengan nilai indeks yang berkisar antara 0 hingga 100, keluarga dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: rentan (nilai di bawah 40), berkembang (nilai antara 40 hingga 70), dan tangguh (nilai di atas 70). Ketiga kategori ini mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kualitas keluarga, yang menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan keluarga di Indonesia.

Pengenalan iBangga oleh BKKBN pada tahun 2020 menjadi tonggak penting dalam pemantauan kualitas pembangunan keluarga di berbagai wilayah. Perhitungan nilai iBangga yang baru dimulai pada tahun 2021, memberikan data penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan meningkatkan program-program yang bertujuan memperkuat ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Melalui klasifikasi wilayah berdasarkan status pembangunan keluarga—tangguh, berkembang, atau rentan—pemerintah dapat merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di Indonesia. Indeks pembangunan keluarga Kabupaten Banyuwangi tahun 2022 yaitu sebesar 55,87 dengan kategori berkembang.

Tabel II. 24 Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

Indikator	Tahun 2022
Indeks Pembangunan Keluarga	55,87

Sumber: BKKBN, 2023

C. Indeks Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA disusun berdasarkan komitmen Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak, maupun perlindungan khusus anak. IPA juga menjadi indikator utama target kinerja pembangunan perlindungan anak pada RPJMN tahun 2020-2024. Hal ini karena IPA merupakan satu-satunya indeks yang menggambarkan capaian perlindungan anak di Indonesia baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Sehingga, IPA menjadi sasaran strategis Menteri PPPA dalam dokumen rencana strategis Kemen PPPA Tahun 2021-2024 serta menjadi indikator kinerja utama di level pimpinan daerah seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022.

Ukuran pemenuhan hak anak dapat dilihat melalui Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA). Berikutnya Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak

penyanggah disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar. IPA-IPHA-IPKA, merupakan dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah pusat maupun daerah. IPA-IPHA-IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak. Berikut capaian IPA Provinsi Jawa Timur di tahun 2022:

Tabel II. 25 Hasil Capaian IPA, IPHA dan IPKA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Klaster V Perlindungan Khusus	IPA	IPHA	IPKA
1	Pacitan	53,39	74,49	79,27	34,68	61,74	61,16	60,95	59,15
2	Ponorogo	58,37	83,76	84,40	37,63	72,48	68,01	66,70	73,79
3	Trenggalek	56,31	74,68	79,68	34,61	66,46	62,88	61,84	67,53
4	Tulungagung	53,84	83,24	80,96	39,38	70,52	66,25	64,98	73,86
5	Blitar	55,98	82,43	81,27	33,54	71,12	65,64	64,04	71,07
6	Kediri	52,67	81,49	80,84	37,98	69,90	65,23	63,84	72,15
7	Malang	50,40	76,80	78,77	33,16	69,41	62,39	60,35	70,30
8	Lumajang	50,97	67,12	78,69	31,88	76,85	61,77	57,48	78,89
9	Jember	47,43	69,27	74,66	30,81	73,16	59,80	55,99	74,88
10	Banyuwangi	51,80	79,67	80,91	41,23	80,10	67,49	63,87	80,32
11	Bondowoso	48,71	72,93	73,44	28,33	79,65	61,63	56,49	77,18
12	Situbondo	47,00	69,95	72,41	25,16	74,77	58,80	54,25	74,66
13	Probolinggo	48,11	68,41	73,73	27,83	77,44	59,99	55,02	75,92
14	Pasuruan	47,79	71,13	81,39	30,88	80,61	63,15	58,16	79,97
15	Sidoarjo	44,90	92,52	83,06	55,89	80,98	72,16	69,54	84,44
16	Mojokerto	53,06	85,25	85,43	41,05	77,19	69,11	66,76	79,36
17	Jombang	53,39	85,20	82,13	38,40	76,10	67,86	65,46	76,17
18	Nganjuk	54,12	81,99	82,22	33,75	72,56	65,70	63,71	76,39
19	Madiun	55,84	82,51	83,12	36,00	73,20	66,87	65,02	73,86
20	Magetan	55,25	87,03	83,48	38,33	69,57	67,43	66,75	72,42
21	Ngawi	56,83	79,38	81,21	32,46	72,40	65,22	63,14	70,48
22	Bojonegoro	54,77	79,48	82,67	34,30	74,75	65,94	63,40	77,89
23	Tuban	55,06	76,99	81,11	41,01	65,71	64,39	63,96	68,25
24	Lamongan	54,35	78,53	80,54	42,31	76,65	67,12	64,37	81,09
25	Gresik	50,08	86,96	84,33	46,85	86,76	71,85	67,54	88,38
26	Bangkalan	40,82	58,10	72,29	21,62	75,72	54,51	48,48	72,87
27	Sampang	43,70	56,85	79,41	21,37	68,13	54,38	50,46	67,21
28	Pamekasan	43,94	73,40	79,17	27,74	73,33	60,31	56,56	70,83
29	Sumenep	47,17	65,99	74,23	39,01	88,38	63,78	56,79	89,30
30	Kota Kediri	49,66	90,83	83,68	48,79	74,71	70,20	68,81	78,65
31	Kota Blitar	49,99	92,70	86,55	48,90	82,08	72,83	70,11	84,72
32	Kota Malang	43,33	92,50	80,76	53,70	77,26	70,21	68,09	81,79
33	Kota Probolinggo	49,37	88,06	78,38	42,85	81,69	69,04	65,38	83,47
34	Kota Pasuruan	50,31	90,80	80,75	45,66	79,96	70,38	67,58	83,35
35	Kota Mojokerto	50,56	92,97	86,16	48,00	85,24	73,47	70,03	87,58
36	Kota Madiun	45,96	92,84	87,57	54,83	82,01	73,29	70,70	85,05
37	Kota Surabaya	43,63	88,01	85,98	49,96	90,97	72,57	67,25	91,97
38	Kota Batu	48,05	87,94	80,73	45,96	78,72	69,08	66,25	82,06
	Provinsi Jawa Timur	50,92	80,29	80,42	38,74	76,40	66,10	63,13	78,32

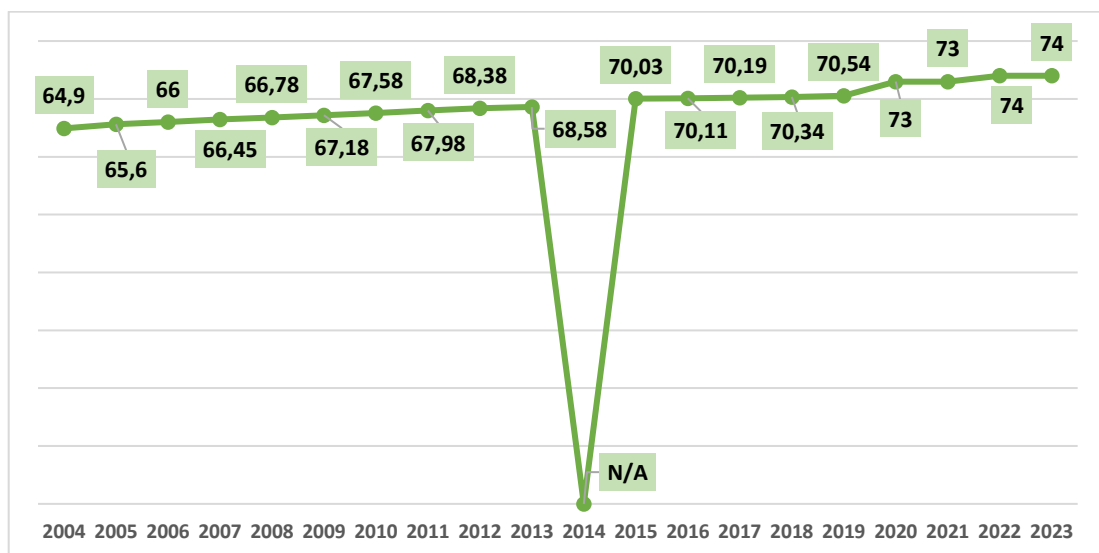
Sumber: Kemen PPA & Badan Pusat Statistik, 2022

Data diatas menunjukkan bahwa capaian IPA Kabupaten Banyuwangi di tahun 2022 tercapai sebesar 67,49. Sedangkan untuk capaian IPHA berada di angka 63,87, dan capaian IPKA berada di angka 80,32. Capaian ini berada diatas capaian Provinsi

Jawa Timur, dan juga berada diatas wilayah sekitarnya seperti Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, serta Kabupaten Situbondo.

D. Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup (selanjutnya disebut UHH) merupakan indeks komposit Indeks Pembangunan Manusia dimana merupakan perkiraan rata-rata tahun yang diharapkan seseorang akan hidup dalam suatu populasi tertentu pada saat kelahiran atau pada titik waktu tertentu dalam hidupnya, berdasarkan pada kondisi kesehatan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi umur seseorang. Capaian UHH menjadi salah satu representasi kesejahteraan sosial dikarenakan didalamnya berkaitan dengan faktor-faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan yang baik, kondisi lingkungan yang bersih dan aman, pendidikan dan pengetahuan kesehatan yang baik, ekonomi yang stabil, serta gaya hidup sehat yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan umur harapan hidup dalam suatu masyarakat. Capaian UHH Kabupaten Banyuwangi dalam rentang tahun 2004-2023 disajikan dalam grafik berikut:



Gambar II. 32 Umur Harapan Hidup Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004-2023

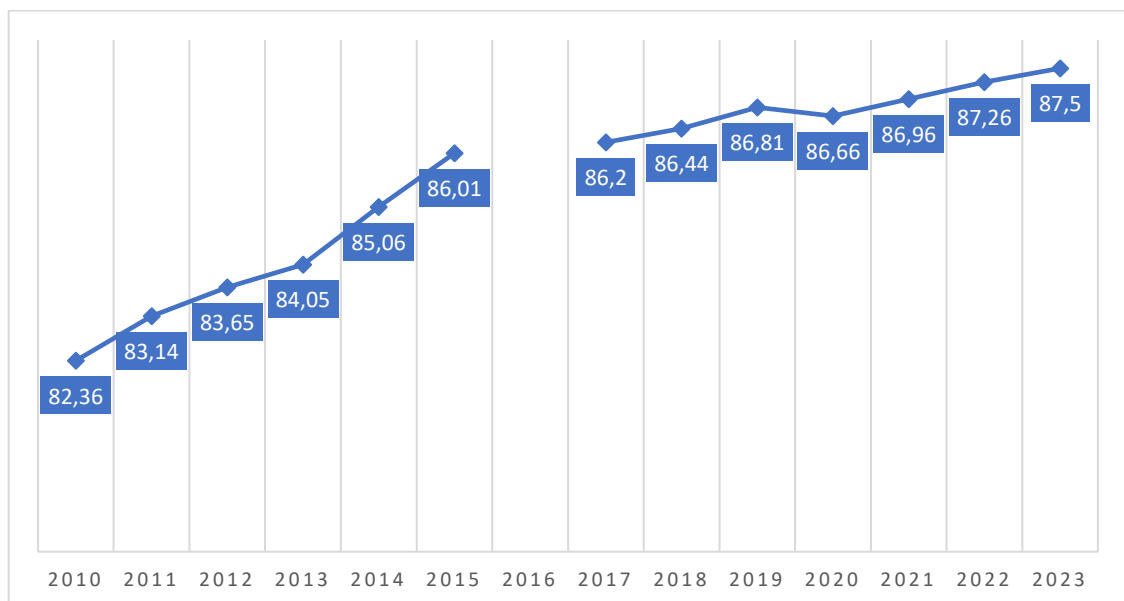
Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2024

Tren perkembangan UHH Kabupaten Banyuwangi selama hampir dua dekade menunjukkan perkembangan yang positif dari angka 64,9 tahun di 2004 menjadi 74 tahun di tahun 2023. Artinya Kabupaten Banyuwangi berhasil meningkatkan UHH bagi masyarakatnya sebanyak 10 tahun melalui intervensi di segala aspek pendorongnya. Capaian UHH Kabupaten Banyuwangi tidak tersedia di tahun 2016. Untuk data tahun 2020-2023, dapat dicermati capaian umur harapan hidup mengalami peningkatan signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan penghitungan UHH tahun 2020-2023 menggunakan hasil *longform* sensus penduduk tahun 2020. UHH Kabupaten Banyuwangi tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan UHH

Provinsi Jawa Timur dengan capaian 72,11 tahun dan UHH nasional dengan capaian 73,93 tahun.

E. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur, salah satunya adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender), yang telah diperkenalkan oleh United Nations Development Programs (UNDP) dalam Laporan pembangunan Manusia tahun 1995. IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Diharapkan dari angka IPG ini mampu memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender.



Gambar II. 33 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2023

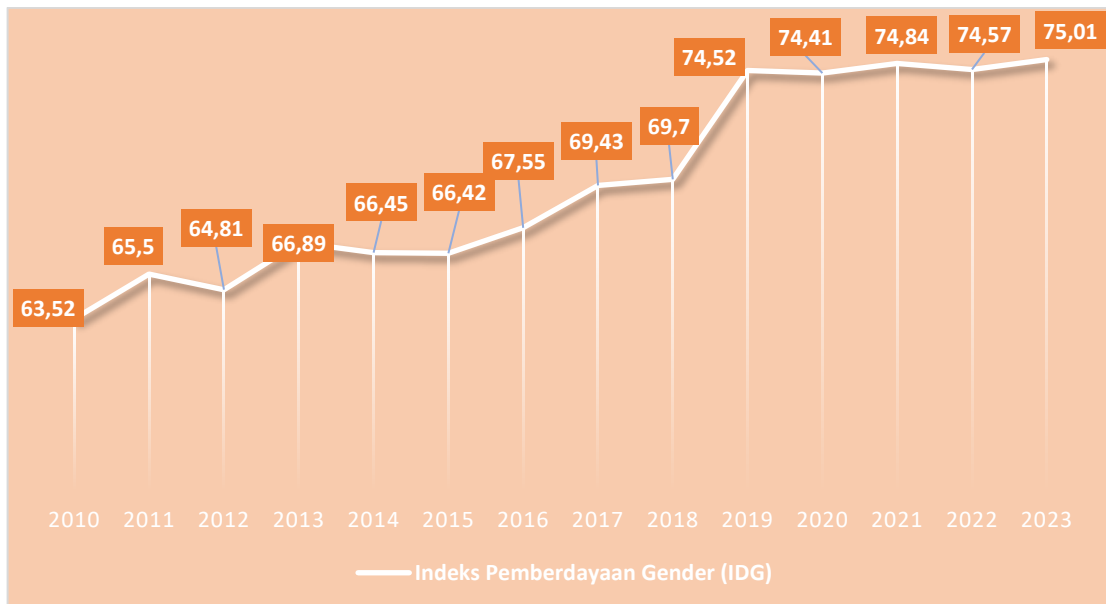
Sumber: Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi, 2023

Berdasarkan pada data diatas, maka dapat diketahui bahwa capaian Indeks Pembangunan Gender terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023. Namun tidak ditemukan data di tahun 2016 dikarenakan tidak dilakukan perhitungan pada tahun tersebut. Capaian mengalami penurunan di tahun 2022 hingga di angka 87,26 dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kasus yang berkaitan dengan gnder. Di tahun 2022 kesetaraan gender antara laki- laki dan perempuan menurun. Namun pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan walaupun tidak

signifikan yaitu di angka 87,50. Demikian membuktikan bahwa kesetaraan gender laki- laki dan perempuan di Kabupaten Banyuwangi seiring berjalannya waktu akan meningkat.

F. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), UNDP juga mengenalkan ukuran komposit lainnya yang terkait dengan gender, yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Kedua ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. IDG menggambarkan besarnya peranan gender dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan.



Gambar II. 34 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2023

Sumber: Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi, 2023

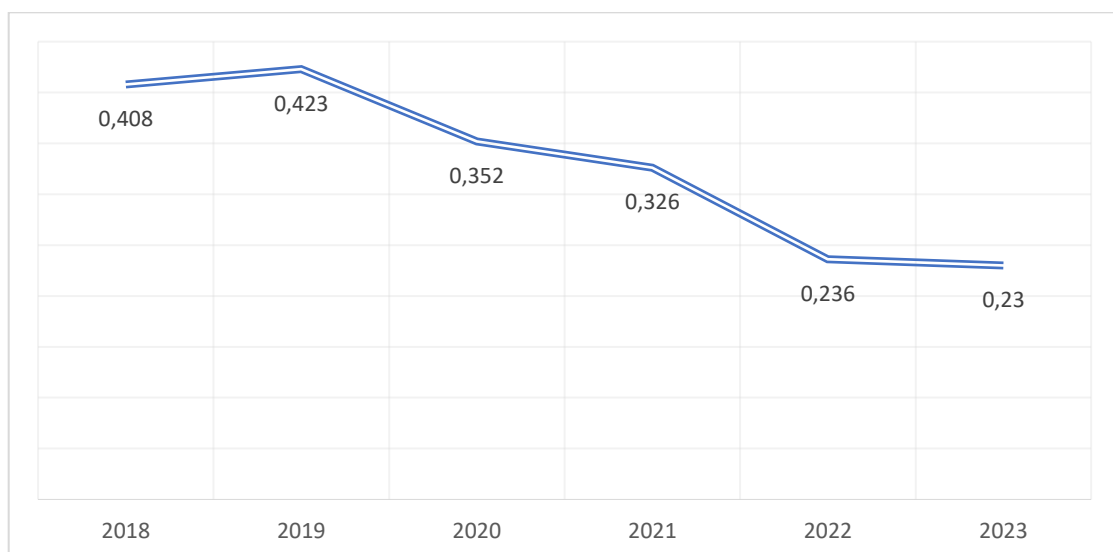
IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Saat ini, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan telah mulai tampak hasilnya. Hal tersebut terbukti dari data diatas, yakni capaian dari IDP dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Dengan kasus bahwa secara kuantitas, telah banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis yang memungkinkan perempuan dapat berperan sebagai pengambil keputusan.

Namun dari aspek kualitas, masih terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan kompetensi yang dimiliki.

G. Indeks Ketimpangan Gender


Indeks Ketimpangan Gender (Gender Inequality Index/GII) adalah ukuran yang mencerminkan ketidaksetaraan antara pria dan wanita dalam berbagai dimensi utama pembangunan. Indeks ini diperkenalkan oleh UNDP (United Nations Development Programme) untuk mengukur ketidakadilan berbasis gender dalam tiga aspek penting, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Ketidaksetaraan gender menghambat kemajuan sosial dan ekonomi karena mencerminkan potensi manusia yang tidak terpenuhi, terutama di kalangan perempuan.

Indeks Ketimpangan Gender menyoroti ketidaksetaraan dalam kesehatan reproduksi melalui indikator mortalitas ibu dan tingkat kelahiran remaja, dalam pemberdayaan melalui proporsi kursi parlemen yang dipegang oleh perempuan dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, serta dalam partisipasi ekonomi melalui partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Semakin tinggi nilai Indeks Ketimpangan Gender, semakin besar ketidaksetaraan gender yang terjadi di suatu negara. Sebaliknya, nilai Indeks Ketimpangan Gender yang rendah menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki lebih setara dalam hal akses terhadap sumber daya dan kesempatan, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Adapun nilai Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Banyuwangi secara rinci dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar II. 35 Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018–2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024



Grafik diatas menunjukkan bahwa Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Banyuwangi secara konsisten mengalami penurunan capaian dari 0,408 di tahun 2018 menjadi 0,23 di tahun 2023. Hal ini berarti bahwa perempuan di Kabupaten Banyuwangi kini memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi, serta partisipasi politik yang lebih tinggi. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan dan program yang difokuskan pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidakadilan gender, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi.

H. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk menilai kinerja pembangunan kebudayaan di berbagai wilayah. IPK bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi kebudayaan berdasarkan berbagai indikator yang mencakup aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya. Indeks ini mengukur perkembangan kebudayaan dalam beberapa dimensi, seperti nilai budaya, partisipasi budaya, ekspresi budaya, warisan budaya, dan tata kelola kebudayaan. Dengan adanya IPK, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus dan merancang kebijakan yang lebih efektif untuk memajukan kebudayaan nasional.

IPK memiliki peran penting dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal serta memperkuat identitas nasional. Indeks ini juga menjadi tolok ukur keberhasilan program-program kebudayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan data yang dihasilkan oleh IPK, dapat dilakukan evaluasi yang komprehensif terhadap upaya pengembangan budaya di tingkat daerah hingga nasional. Pada akhirnya, IPK diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya kebudayaan sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil perhitungan IPK Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang cukup baik yaitu mencapai 63,79. Berdasarkan hasil perhitungan dari ketujuh dimensi indeks pembangunan kebudayaan, capaian terkecil adalah pada dimensi ekonomi budaya dengan capaian 1,02 sedangkan skor tertinggi pada dimensi pendidikan dengan capaian 84,51. Capaian lainnya meliputi dimensi ketahanan sosial budaya memiliki skor 82,95, dimensi budaya literasi dengan skor 78,02, dimensi kebebasan ekspresi budaya dengan skor 75,57, dimensi gender dengan skor 67,13 dan



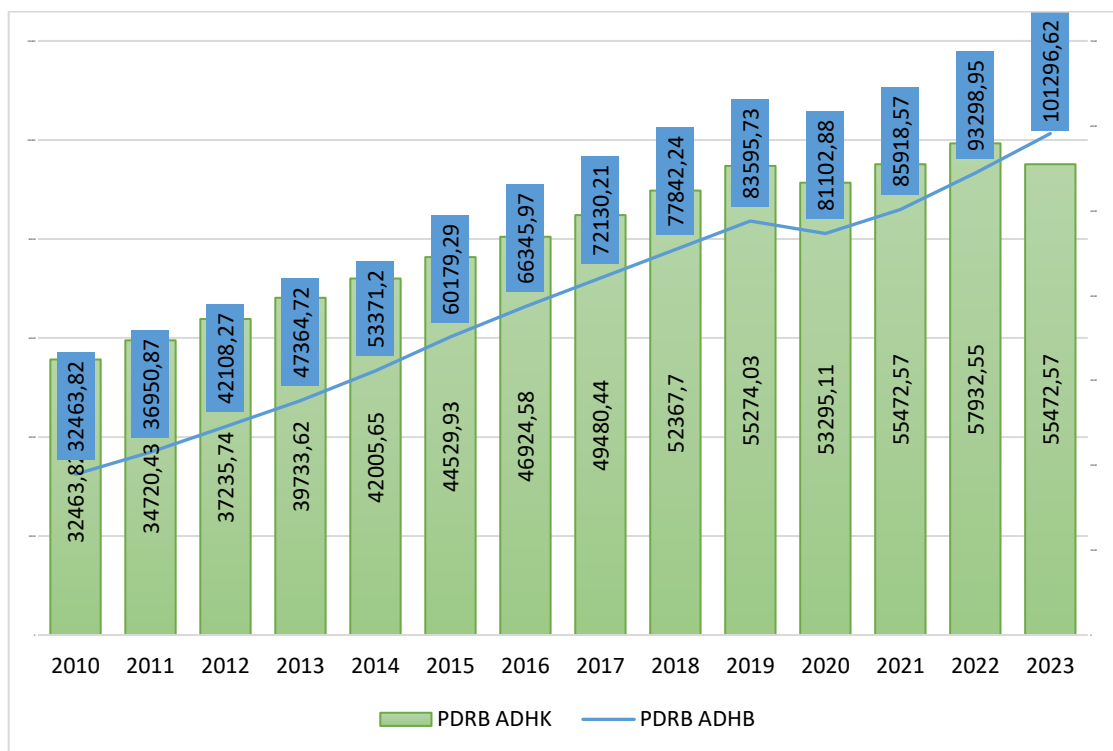
dimensi warisan budaya dengan skor 45,92. Capaian IPK Kabupaten Banyuwangi di tahun 2023 ini menunjukkan capaian yang lebih tinggi dibandingkan capaian nasional dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022.

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari perubahan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya. PDRB mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu wilayah selama periode tertentu, dan menjadi indikator utama perputaran ekonomi di daerah tersebut. Berdasarkan data PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2010 hingga 2023, terlihat adanya peningkatan yang konsisten, meskipun dengan laju yang bervariasi. Pada tahun 2023, PDRB ADHK mencapai angka Rp55.472,57 miliar, sedangkan PDRB ADHB tercatat sebesar Rp101.296,62 miliar. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar II. 36 PDRB ADHK dan PDRB ADHB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2023

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2024

Pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi pada tahun 2023 masih banyak ditopang oleh sektor-sektor tradisional seperti pertanian, namun terlihat bahwa kontribusi sektor jasa seperti Transportasi, Pergudangan, Penyedia Akomodasi, Makanan, dan




Jasa lainnya terus meningkat. Sektor-sektor ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang tinggi dan menyumbang signifikan terhadap total PDRB. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran dalam struktur ekonomi Banyuwangi, dari yang awalnya didominasi oleh sumber daya alam menuju sektor jasa yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan peran sumber daya manusia. Namun, meskipun sektor-sektor jasa semakin berkembang, sektor pertanian masih memegang peran vital dalam perekonomian daerah karena merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan untuk memajukan sektor pertanian tetap penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Banyuwangi. Adapun perincian setiap sektor dari PDRB dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Tabel II. 26 Perkembangan Nilai PDRB ADHB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014-2023

Kategori PDRB (Dalam Miliar Rupiah)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.371,05	21.944,16	23.473,24	24.345,12	24.329,42	24.541,48	24.081,01	25.028,72	26.183,21	28.026,22
Pertambangan dan Penggalian	4.251,24	4.650,84	5.033,74	5.504,25	5.963,32	6.211,03	5.913,07	622,98	6.703,12	7.087,38
Industri Pengolahan	5.852,15	6.549,45	7.264,44	776,81	8.521,54	9.351,68	9.422,28	10.585,83	11.579,64	127.0865
Listrik, Gas, dan Air Bersih	22,53	25,58	28,83	31,56	33,7	35,31	34,91	35,80	39,02	41,90
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	33,49	36,94	40,48	42,02	44,29	47,21	49,71	52,66	56,61	58,51
Konstruksi	613,93	6.820,37	7.775,55	8.994,18	10.517,95	12.005,04	11.362,04	11.892,21	12.986,41	14.011,85
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	7.396,75	8.454,49	9.618,55	10.898,01	12.469,77	14.017,66	13.120,38	14.287,01	16.078,41	17.698,53
Transportasi dan Pergudangan	1.562,16	1.814,18	2.064,86	2.294,32	250,12	270,61	2.369,89	2.377,92	296,91	3.569,99
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.188,25	1.392,29	1.638,07	1.885,46	2.137,88	2.425,55	2.105,92	2.270,05	26.99,50	3.042,06
Informasi dan Komunikasi	2.162,47	2.413,78	2.676,78	2.955,66	3.225,75	3.566,03	3.887,66	4.185,34	444,60	4.804,71
Jasa Keuangan dan Asuransi	933,44	1.055,22	1.180,43	1.278,07	1.377,53	1.449,97	1.449,27	1.517,53	1.632,97	1.756,21
Real Estate	776,12	895,73	970,95	1.063,76	1.170,66	1.268,36	1.301,74	1.344,64	144,25	1.505,22
Jasa Perusahaan	119,67	13,46	149,55	161,18	178,92	194,92	186,23	192,93	20637	229,41
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.179,05	1.340,24	1.494,43	1.637,26	1.745,03	1.822,84	1.845,59	1.819,14	1.873,29	1.988,24
Jasa Pendidikan	1.648,68	1.813,16	1.978,78	216,07	2.363,86	2.573,71	2.681,29	270,66	2.755,37	2.945,67
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	170,03	189,25	217,68	247,16	278,49	302,06	351,71	373,53	40215	431,31
Jasa lainnya	564,84	649,91	739,61	863,39	982,93	1.076,76	940,19	1.018,86	1.225,27	1.390,76

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2024



Berdasarkan data PDRB Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2010 hingga 2023, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah ini berlangsung secara konsisten dengan peningkatan nilai PDRB di berbagai sektor setiap tahunnya. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi kontributor utama, dengan nilai PDRB yang meningkat dari Rp 11.536,35 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 28.026,22 miliar pada tahun 2023. Selain itu, sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, terutama dalam beberapa tahun terakhir, dengan nilai PDRB meningkat dari Rp 4.222,66 miliar menjadi Rp 17.698,53 miliar. Namun, sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat adalah industri pengolahan, yang mencatat kenaikan tajam dari Rp 3.794,32 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 12.708,65 miliar pada tahun 2023, mencerminkan penguatan industrialisasi di Banyuwangi. Sektor jasa, termasuk jasa perusahaan, jasa keuangan dan asuransi, serta jasa pendidikan, juga berkembang dengan baik, menandakan adanya diversifikasi ekonomi di wilayah ini. Selain itu, sektor konstruksi mengalami peningkatan pesat, yang mencerminkan aktivitas pembangunan infrastruktur yang intensif di Banyuwangi. Secara keseluruhan, Banyuwangi berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan merata di berbagai sektor, dengan industri pengolahan sebagai sektor dengan pertumbuhan tercepat, sementara pertumbuhan di sektor jasa dan konstruksi menandakan diversifikasi ekonomi yang semakin kuat.

B. PDRB per Kapita

Untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah, kita umumnya menggunakan perhitungan PDRB Per Kapita. Ini dihitung dengan membagi Pendapatan Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku oleh jumlah total penduduk di daerah tersebut. PDRB per Kapita memberikan gambaran tentang sejauh mana output yang dihasilkan oleh semua unit usaha di wilayah tersebut, dinyatakan dalam satuan rupiah, untuk setiap individu dalam populasi. Dengan kata lain, PDRB per Kapita berfungsi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih baik, karena mencerminkan nilai tambah yang dapat diperoleh oleh setiap penduduk di daerah tersebut.

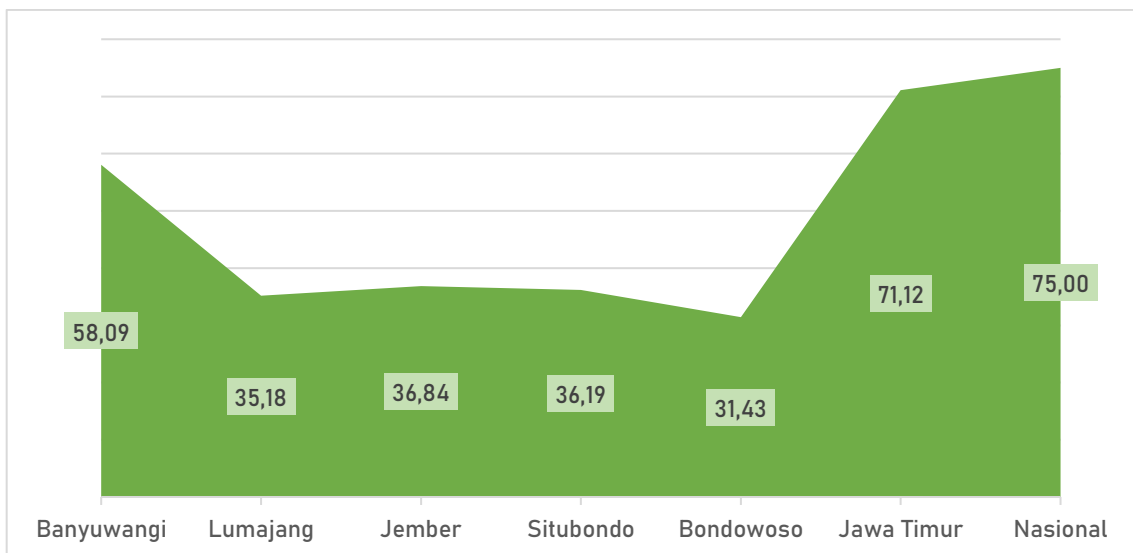




Gambar II. 37 PDRB Per Kapita Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2023

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2024

Berdasarkan grafik di atas, kondisi PDRB perkapita Kabupaten Banyuwangi pada kurun waktu 2012-2023 mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2012 PDRB Kabupaten Banyuwangi ialah diangka Rp 26.743.430,- tumbuh dalam 11 tahun dengan capaian tahun 2023 mencapai Rp 58.085.920,-. Artinya dalam 11 tahun PDRB Perkapita Kabupaten Banyuwangi mampu meningkatkan PDRB perkapita 2x lipat. Meskipun tidak dapat disimpulkan bahwa dengan PDRB Perkapita yang tinggi maka pendapatan seluruh penduduknya akan merata diangka tersebut, namun angka tersebut menunjukkan potensi pemerataan perputaran ekonomi di Kabupaten Banyuwangi dapat dioptimalkan.



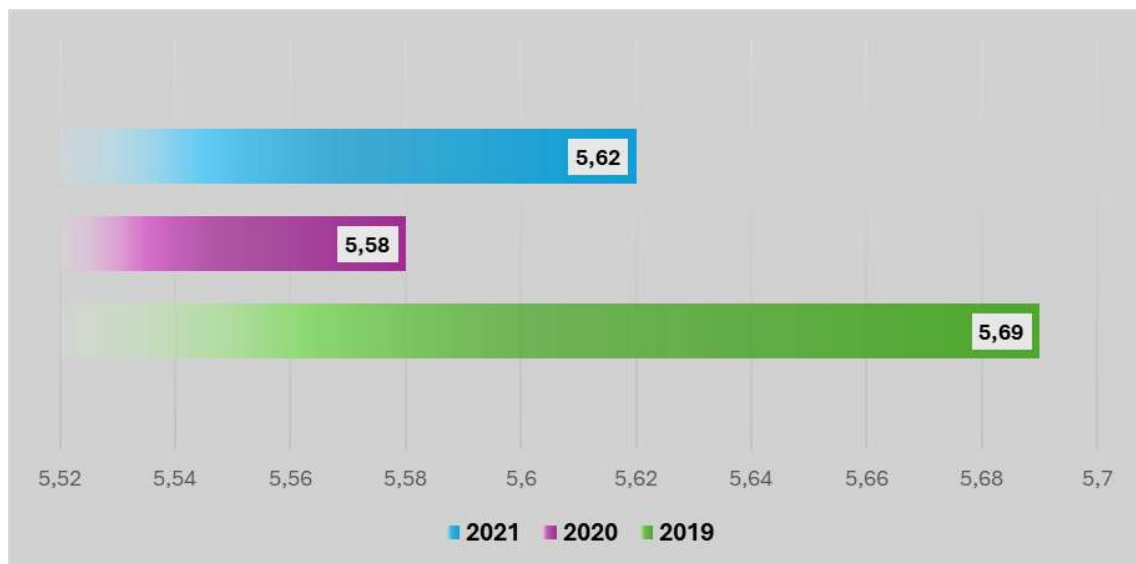
Gambar II. 38 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Wilayah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2023 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Tumbuhnya laju perekonomian Kabupaten Banyuwangi tersebut berdampak pada perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Banyuwangi yang pada tahun 2023 yang mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 58,08 juta dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 53,82 juta. Posisi PDRB Per Kapita Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar, masih menempati posisi tertinggi disusul Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Bondowoso. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional, PDRB per Kapita Kabupaten Banyuwangi masih berada di bawah rata-rata.

C. Indeks Ekonomi Inklusif


Indeks pembangunan ekonomi inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks pembangunan ekonomi inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar (pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; serta perluasan akses dan kesempatan) dan 8 Sub-pilar (pertumbuhan ekonomi; kesempatan kerja; infrastruktur ekonomi; ketimpangan; kemiskinan; kapabilitas manusia; infrastruktur pasar; dan keuangan inklusif) serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif.



Gambar II. 39 Indeks Ekonomi Inklusif di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Bappenas RI, 2024

Capaian diatas menunjukkan bahwa indeks ekonomi inklusif Kabupaten Banyuwangi perlu mendapatkan perhatian. Capaian tertinggi justru terjadi di tahun 2019



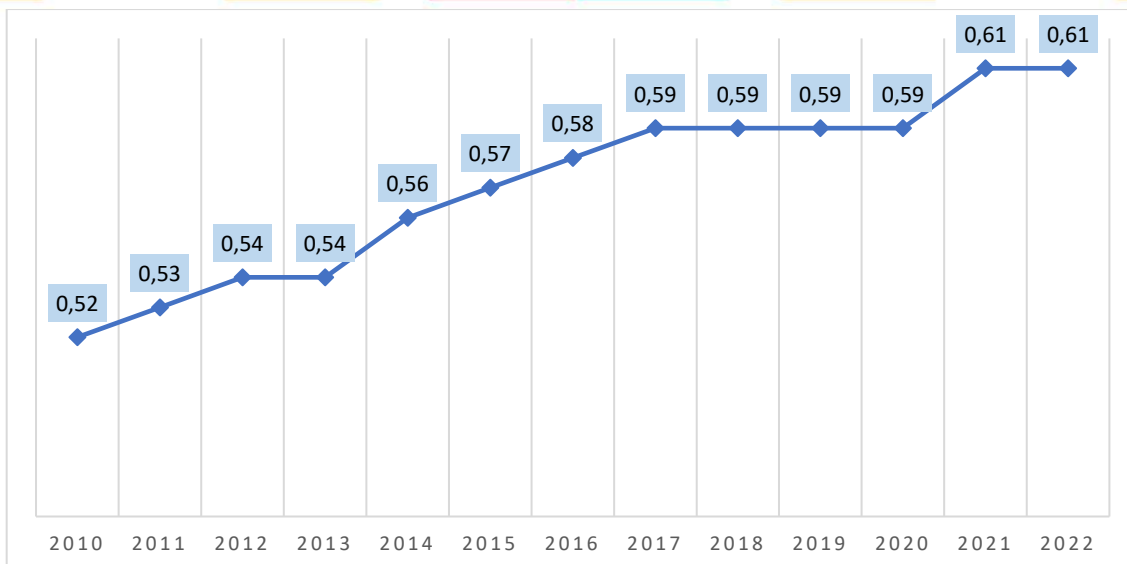
dibandingkan di tahun 2020 dan tahun 2021. Pengaruh terjadinya Covid-19 memang memberikan dampak yang signifikan dalam kondisi perekonomian. Sehingga mendongkrak segala aspek yang berpengaruh dalam perekonomian, menjadi suatu keharusan untuk membuat kondisi daerah kembali stabil. Pembangunan inklusif yang dimaksudkan adalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Upaya yang dilaksanakan dalam pembangunan inklusif melalui dukungan pemerataan infrastruktur di segala lini ekonomi yang berpotensi mendongkrak usaha masyarakat, khususnya kelas ekonomi menengah kebawah hal ini diyakini akan mengurangi kesenjangan di masyarakat.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan adalah sebuah ukuran atau metode untuk menilai tingkat pendidikan dalam suatu populasi atau daerah. Indeks ini biasanya mencakup beberapa indikator pendidikan seperti tingkat melek huruf, rata-rata tahun sekolah yang diselesaikan, tingkat partisipasi sekolah, atau indikator lain yang relevan dengan pendidikan. Indeks pendidikan merupakan cerminan dari kualitas, keterampilan, dan adaptabilitas sumber daya manusia (SDM) suatu daerah dalam pasar tenaga kerja. Tingkat pendidikan yang tinggi mengindikasikan potensi SDM yang lebih berkualitas, terampil, dan inovatif, yang secara langsung berkontribusi pada daya saing daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Melalui pengembangan potensi SDM melalui pendidikan, suatu daerah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, adaptasi terhadap perubahan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Capaian indeks pendidikan Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2022 disajikan dalam grafik berikut:





Gambar II. 40 Indeks Pendidikan Kabupaten Banyuwangi di Tahun 2010-2022

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2024

Indeks pendidikan di Kabupaten Banyuwangi selama rentang tahun 2010-2022 mengalami perkembangan yang positif, tumbuh dari 0,52 di tahun 2010 menjadi 0,61 di tahun 2022. Hal ini selaras dengan meningkatkannya rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka partisipasi sekolah, terbebasnya Kabupaten Banyuwangi dari angka buta huruf yang diupayakan melalui peningkatan aksesibilitas pendidikan dapat berperan penting, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih baik dan peningkatan jumlah sekolah, peningkatan kualitas pendidikan, serta meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat Kabupaten Banyuwangi dalam memperhatikan pendidikan. Dengan berbagai faktor ini bekerja bersama-sama, indeks pendidikan Kabupaten Banyuwangi dapat meningkat, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif pada perkembangan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang ada.

B. Angka Literasi/Numerasi

Literasi numerasi adalah kecakapan yang mencakup kemampuan menggunakan berbagai angka dan simbol terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan berbagai masalah praktis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini meliputi kemampuan menghitung, mengukur, dan memahami data statistik, serta menerapkannya dalam situasi nyata seperti mengelola keuangan pribadi, memahami grafik dan tabel dalam laporan, atau mengukur bahan untuk resep masakan. Literasi numerasi juga penting dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis kuantitatif, seperti membandingkan harga, menentukan waktu perjalanan, atau mengevaluasi risiko. Dengan demikian, literasi numerasi tidak hanya penting bagi

pemahaman akademis tetapi juga esensial dalam menjalani kehidupan sehari-hari secara efektif dan efisien. Berikut kondisi angka literasi/numerasi di Kabupaten Banyuwangi:

Tabel II. 27 Indikator Literasi/Numerasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2023

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	54.99	60.18	80,57
Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	39.42	45.96	56,16
Rerata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	61.97	66.19	73,49
Rerata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	54.21	55.81	53,21

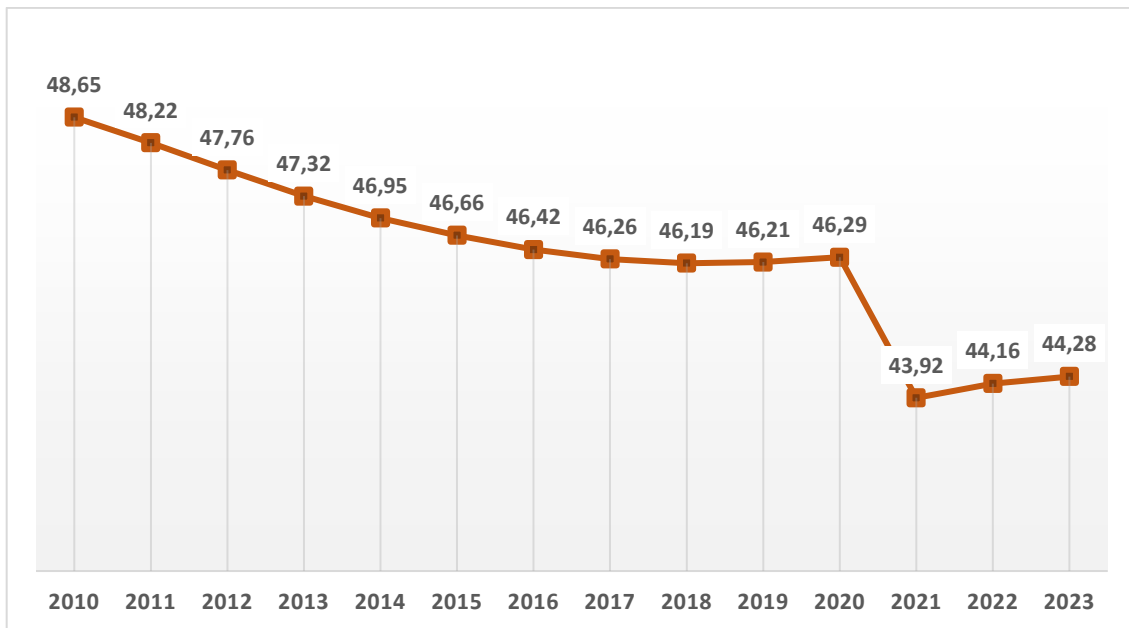
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

Kemampuan literasi, artinya kemampuan siswa untuk membaca, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan berbagai jenis teks dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kemampuan numerasi, artinya terjadi peningkatan kapabilitas siswa dalam memahami dan menggunakan berbagai angka dan simbol matematika dasar serta menganalisis informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk (seperti grafik, tabel, dan bagan) untuk menyelesaikan masalah praktis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dari 4 indikator tersebut, terlihat bahwa indikator rerata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional yang terlihat menurun di tahun terakhir. Sedangkan indikator lainnya mengalami peningkatan. Kemampuan literasi dan numerasi siswa merupakan pondasi utama dalam pemahaman pembelajaran, pada tahapan pendidikan yang lebih tinggi diharapkan kemampuan literasi dan numerasi dapat membentuk penalaran analitis, namun pada saat ini masih banyak siswa yang tidak memahami soal-soal berkategori *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) yang memerlukan penalaran analitis untuk memperoleh solusi.

C. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan atau rasio ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi

persentase rasio ketergantungan, menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif. Berdasarkan data yang himpun dari BPS maka diketahui bahwa capaian Angka Ketergantungan yang direfleksikan dengan indikator Rasio Ketergantungan Kabupaten Banyuwangi ialah sebagai berikut:



Gambar II. 41 Angka Ketergantungan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2023

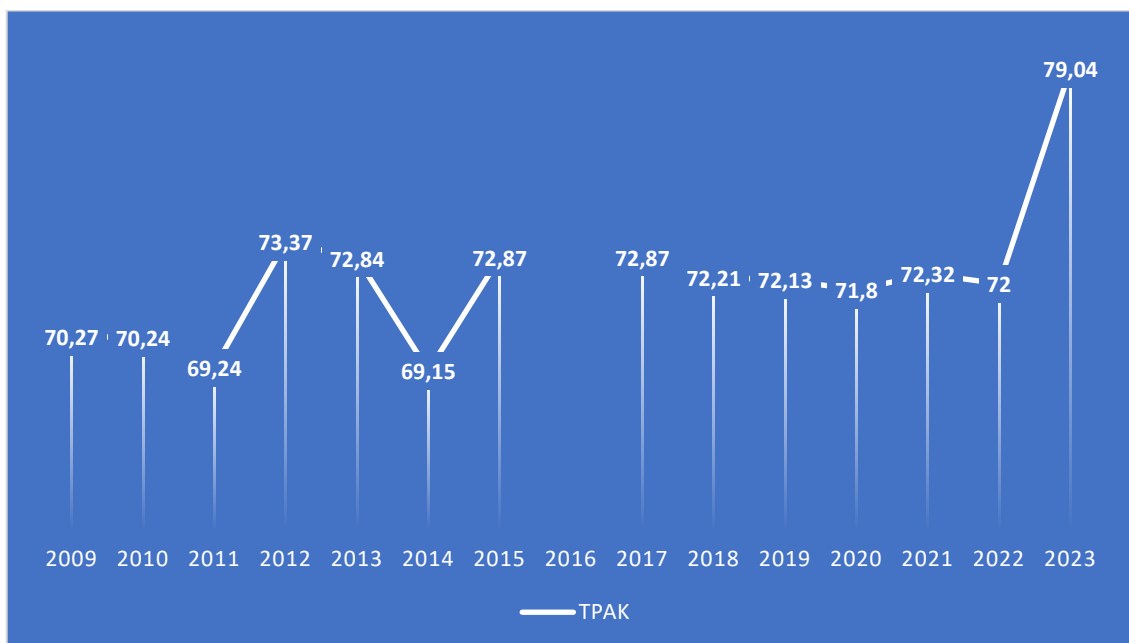
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Berdasarkan pada grafik diatas maka diketahui bahwa nilai dari capaian Angka Ketergantungan Kabupaten Banyuwangi mulai dari kurun waktu 2010 hingga tahun 2023 berangsur mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Jika melihat pada tren capaian tersebut maka menandakan bahwa semakin rendah persentase rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif. Terutama pada tahun 2021 merupakan capaian terendah dari kurun waktu 13 tahun terakhir, yang menunjukkan angka 43,92 dengan asumsi bahwa angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun) pada tahun 2021 memiliki capaian 43,92%. Dependency ratio atau angka ketergantungan yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Mereka yang

digolongkan dalam kelompok umur bekerja adalah berumur 15 tahun ke atas sampai dengan umur 64 tahun. Sedangkan yang berumur 14 tahun ke bawah dan umur 65 tahun keatas digolongkan dalam usia beban ketergantungan. Jika menelaah data secara keseluruhan maka grafik diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berusaha dan mencapai capaian angka ketergantungan yang cenderung menurun pada setiap tahunnya, pada periode 2010 hingga 2023 capain telah menunjukkan hal positif. Namun untuk kedepannya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu mempertahankan capaian yang berangsur menurun tersebut hingga pada capaian yang ideal.

D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan persentase dari populasi usia kerja yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan. Capaian TPAK dapat memberikan gambaran tentang daya saing sumber daya manusia (SDM) suatu daerah. Sebagai contoh, jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, hal itu dapat menunjukkan bahwa banyak penduduk usia kerja yang aktif dalam dunia kerja, yang dapat diinterpretasikan sebagai tingkat keterlibatan ekonomi yang tinggi. Di sisi lain, jika TPAK rendah, ini bisa mengindikasikan masalah seperti pengangguran yang tinggi atau banyaknya populasi usia kerja yang tidak aktif secara ekonomi. Selain itu, TPAK juga bisa mencerminkan tingkat keterampilan dan pendidikan SDM. TPAK Kabupaten Banyuwangi selama rentang tahun 2009-2023 disajikan dalam grafik berikut:

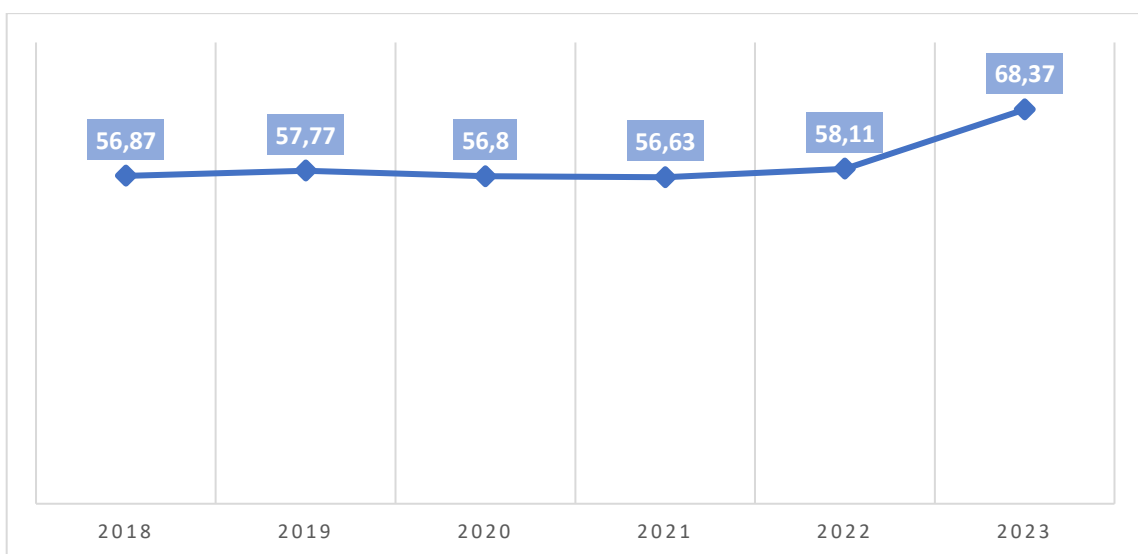


Gambar II. 42 TPAK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009-2023

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2024

TPAK Kabupaten Kabupaten Banyuwangi dalam tahun 2009-2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Capaian TPAK tahun 2009 sebesar 70,27 naik menjadi 79,04 di tahun 2023 dan merupakan capaian tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Capaian TPAK terendah ada di tahun 2014 namun kembali mampu meningkat di tahun 2015, sedangkan data capaian TPAK pada tahun 2016 tidak tersedia. TPAK Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 dimana terjadi pemutusan hubungan kerja massal akibat kesulitan keuangan perusahaan, penutupan usaha atau pembatasan operasional yang menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan jam kerja, serta peralihan ke pembelajaran jarak jauh di sekolah dan perguruan tinggi yang membuat ibu atau bapak yang bekerja harus mengurangi jam kerja atau bahkan berhenti bekerja untuk merawat anak-anak di rumah. Selain itu, ketidakpastian ekonomi selama pandemi juga membuat sebagian orang memilih untuk tidak mencari pekerjaan baru atau mengurangi partisipasi mereka dalam pasar tenaga kerja. TPAK Kabupaten Banyuwangi kembali meningkat di tahun 2021-2022 dan semakin meningkat signifikan di tahun 2023.

Secara khusus, berikutnya diberikan gambaran terkait TPAK perempuan yaitu perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen. Angkatan Kerja Perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang kegiatannya seminggu yang lalu adalah bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau pengangguran/tidak bekerja, dan atau mencari pekerjaan (*unemployed*). Berikut merupakan capaian TPAK perempuan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2023:



Gambar II. 43 TPAK Perempuan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2023

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2024

Berdasarkan pada grafik diatas maka diketahui bahwa tingkat aptisipasi angkatan kerja perempuan yang menggambarkan perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Dari data diatas maka dapat diketahui bahwa capaian angka partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten Banyuwangi seiring dengan berjalannya waktu terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023. Hal tersebut membuktikan bahwa seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern maka juga mempengaruhi mindset perempuan untuk menjadi wanita karir. Ini merupakan hak yang positif dikarenakan akan meningkatkan pertumbuhan dari berbagai sektor, khususnya pada Kabupaten Banyuwangi.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

A. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks kepuasan layanan infrastruktur (selanjutnya disebut IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah. IKLI yang tinggi mencerminkan tingginya kualitas *output* dan *outcome* dari penyediaan layanan infrastruktur, begitu sebaliknya. Selain mengukur kepuasan masyarakat, juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah perencanaan. Selain mengukur kepuasan masyarakat, penyelenggaraan survei IKLI juga menginventarisasi keinginan serta harapan masyarakat terhadap penyediaan layanan infrastruktur. Capaian IKLI Kabupaten Banyuwangi tercermin dalam tabel berikut:

Tabel II. 28 Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur(IKLI) Kabupaten Banyuwangi

Tahun	Capaian IKLI
2022	85.92
2023	85.13

Sumber: Dinas PUCKPP Kabupaten Banyuwangi, 2024

Capaian IKLI Kabupaten Banyuwangi mulai dihitung tahun 2022 dengan skor 85,92 dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2023 menjadi 85,13. Hasil skor ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Banyuwangi puas dengan layanan infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi karena masyarakat memberikan penilaian “baik” atas layanan infrastruktur daerah. Peningkatan kepuasan terhadap masyarakat terhadap hasil pembangunan infrastruktur masih terus dan harus ditingkatkan dengan berbagai upaya dan objek pembangunan yang lebih spesifik. Infrastruktur jalan dan jembatan merupakan infrastruktur yang cukup menentukan seberapa besar dan

spesifik kepuasan masyarakat terhadap kebijakan kabupaten Banyuwangi. Infrastruktur jalan dan jembatan merupakan infrastruktur yang paling dominan dalam mempengaruhi seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat, karena infrastruktur jalan merupakan infrastruktur yang paling bersinggungan langsung terhadap aktifitas dan kehidupan penduduk, dari semua segi status sosial, jenis pekerjaan, pendidikan dan usia. Berdasarkan pada kajian Indeks Infrastruktur Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Banyuwangi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis seperti dibawah ini:

1) Infrastruktur Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan hal yang penting sekali, karena itu harus dijadikan dasar pembangunan di Indonesia. Ruang-ruang kewilayahan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jalan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi transportasi darat. Fungsi jalan adalah sebagai penghubung satu wilayah dengan wilayah lainnya. Artinya adalah infrastruktur jalan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Berikut merupakan data yang menunjukkan bahwa capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Penataan Ruang di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2022 dan tahun 2023:

Tabel II. 29 IKLI Penataan Ruang di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Th 2022	Realisasi Th 2023
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Penataan Ruang	85,95	82,15

Sumber: Dinas PUCKPP Kabupaten Banyuwangi, 2024

2) Infrastruktur Keciptakaryaan

Keciptakaryaan mengemban tugas mulia untuk merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan yang menunjang kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas. Keciptakaryaan memainkan peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikut akan disajikan data mengenai capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan (2022 dan 2023) sebagai berikut:

Tabel II. 30 IKLI Keciptakarya di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Th 2022	Realisasi Th 2023
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakarya	87,00	84,44

Sumber: Dinas PUCKPP Kabupaten Banyuwangi, 2024

3) Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang mencakup perumahan, air minum, air limbah, persampahan dan drainase ditujukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal dan memberikan dukungan terhadap pertumbuhan sektor riil. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah masih terdapatnya rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak, masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi permukiman yang layak, serta masih kurangnya dukungan infrastruktur penyediaan air minum dan sanitasi dalam mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, dan perdagangan. Dengan melalui penjelasan tersebut maka akan ditampilkan data seperti dibawah ini mengenai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Perumahan Kabupaten Banyuwangi tahun 2022 dan 2023:

Tabel II. 31 IKLI Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Th 2022	Realisasi Th 2023
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	85,37	83,92

Sumber: Dinas PUCKPP Kabupaten Banyuwangi, 2024

4) Infrastruktur Kebinamargaan

Infrastruktur bina marga merupakan bagian penting bagi suatu kota guna mendukung kehidupan masyarakat dalam kebutuhan transportasi. Penyediaan infrastruktur bina marga, pada saat ini dan masa mendatang tidak hanya menitik beratkan pada kekuatan struktur saja, namun juga harus memperhatikan dan fungsi dan desain yang berkualitas serta dapat membentuk perilaku yang tertib masyarakat dan berwawasan lingkungan. Bidang kebinamargaan yang meliputi antara lain infrastruktur jalan dan jembatan serta bangunan ikutannya, bidang pengairan yang meliputi infrastruktur antara lain bendungan, waduk dan saluran pembawa serta tangkis sungai dan pantai merupakan salah satu pemicu dalam

pembangunan suatu wilayah dan sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan data yang merefleksikan capaian dari Layanan Infrastruktur Kebinamargaan Kabupaten Banyuwangi tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 ialah sebagai berikut:

Tabel II. 32 IKLI Kebinamargaann di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Th 2022	Realisasi Th 2023
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	85,36	82,21

Sumber: Dinas PUCKPP Kabupaten Banyuwangi, 2024

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

A. Indeks Daya Saing Daerah


Indeks Daya Saing Daerah (selanjutnya disebut IDSD) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai daya saing di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, dengan tujuan mencerminkan tingkat produktivitas daerah tersebut. Perhitungan IDSD dilakukan setiap tahun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kelebihan utama dari konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya menggabungkan perspektif mikro dari level perusahaan/industri dan perspektif makro dari level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro dan makro ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor utama yang menentukan daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan dasar (*basic requirement factors*), faktor penguat efisiensi (*efficiency enhancers*), dan faktor inovasi dan kecanggihan (*innovation and sophistication factors*) yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Capaian IDSD Kabupaten Banyuwangi tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II. 33 Capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Banyuwangi

	Lingkungan Pendukung			SDM			Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
2022	4,25	1,96	3,05	3,59	3,92	3,09	2,55	2,56	4,03	3,64	5,00	1,73	3,28
2023	4,66	3,29	4,09	3,44	3,92	3,15	2,60	2,89	2,93	4,89	3,60	2,55	3,50

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Skor IDSD Kabupaten Banyuwangi tahun 2022 sebesar 3,28 dan mengalami kenaikan menjadi 3,50 di tahun 2023. Pada tahun 2023, nilai tertinggi disokong oleh Pilar 10 (Ukuran Pasar) dan Pilar 1 (Infrastruktur), sedangkan aspek terendah adalah Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi). Skor IDSD Kabupaten Banyuwangi masih berada di bawah capaian IDSD Provinsi Jawa Timur namun sebaliknya berada di atas capaian IDSD Nasional. Artinya, Kabupaten Banyuwangi perlu melakukan peningkatan kapabilitas inovasi baik melalui pembangunan keanekaragaman dan kolaborasi, riset dan



komersialisasi sehingga dapat menunjang pengembangan ekosistem inovasi secara keseluruhan.

B. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama atau Indeks Kesalehan Sosial (IKS) berfungsi sebagai alat untuk mengukur tingkat kesalehan sosial dalam suatu masyarakat, menilai sejauh mana individu dan komunitas menerapkan nilai-nilai moral, etika, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Indeks ini memberikan gambaran penerapan nilai-nilai agama, budaya, dan sosial dalam masyarakat. Pengukuran IKS membantu pemerintah, organisasi sosial, dan komunitas memahami penerapan nilai-nilai moral dan etika, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta merancang program untuk meningkatkan kesalehan sosial, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas hidup dan harmoni masyarakat.

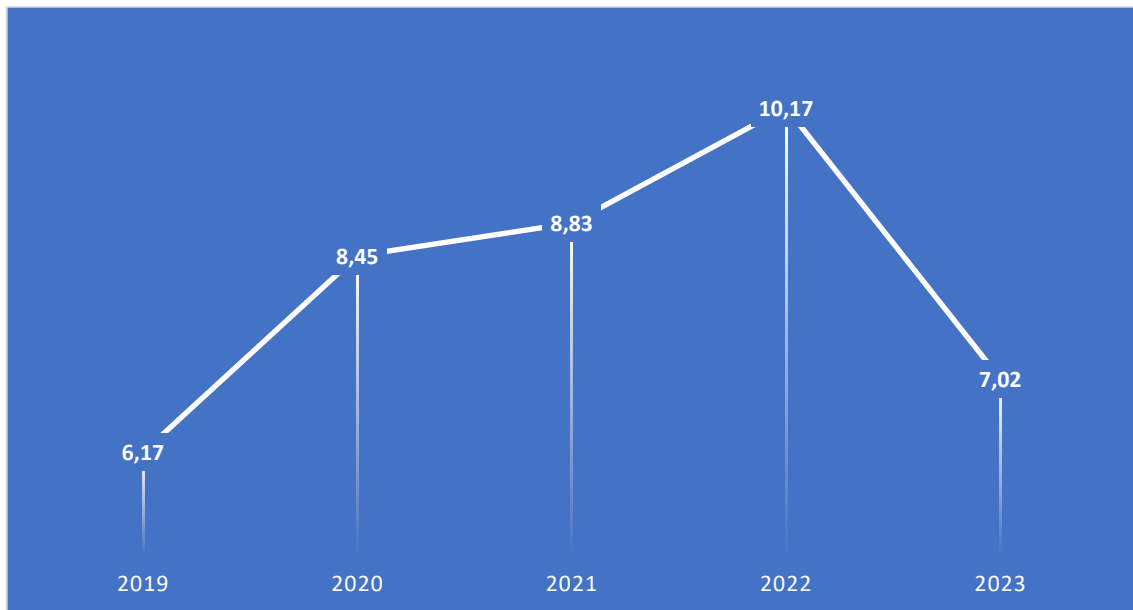
Pada tahun 2023, IKS Kabupaten Banyuwangi ditargetkan sebesar 64,50 dan berhasil terealisasi sebesar 85,57, menunjukkan capaian kinerja sebesar 132,67% yang dikategorikan sangat baik. Kesalehan sosial sendiri didefinisikan sebagai sikap atau perilaku yang mencerminkan kebaikan dan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, meliputi kepedulian sosial, relasi antar manusia, etika dan budi pekerti, pelestarian lingkungan, serta ketaatan pada peraturan negara. Kategori nilai IKS pada masing-masing variabel berada dalam kategori "Sangat Tinggi", dengan rentang nilai 83,80 hingga 86,46. Variabel dengan nilai tertinggi adalah Relasi Antar Manusia sebesar 86,46, sedangkan nilai terendah adalah pada variabel Pelestarian Lingkungan sebesar 83,80. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai IKS Kabupaten Banyuwangi, diperlukan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, sesuai dengan penguatan pilar ketiga dari Gerakan Banyuwangi Rebound yang berfokus pada penguatan ekosistem merajut harmoni.

C. *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah sebuah parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output), dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran), sebagai contoh, misalnya besarnya investasi pada satu tahun di negara A adalah sebesar Rp 300 miliar, sedangkan tambahan output yang diperoleh dari hasil penanaman investasi itu adalah Rp 60 miliar, maka nilai ICOR negara A adalah sebesar 5 (300miliar/60 miliar). Angka ini menunjukkan bahwa untuk menaikkan 1 unit output



diperlukan investasi sebesar 5 unit. Berikut ini data capaian ICOR di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar II. 44 *Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019–2023*

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2024

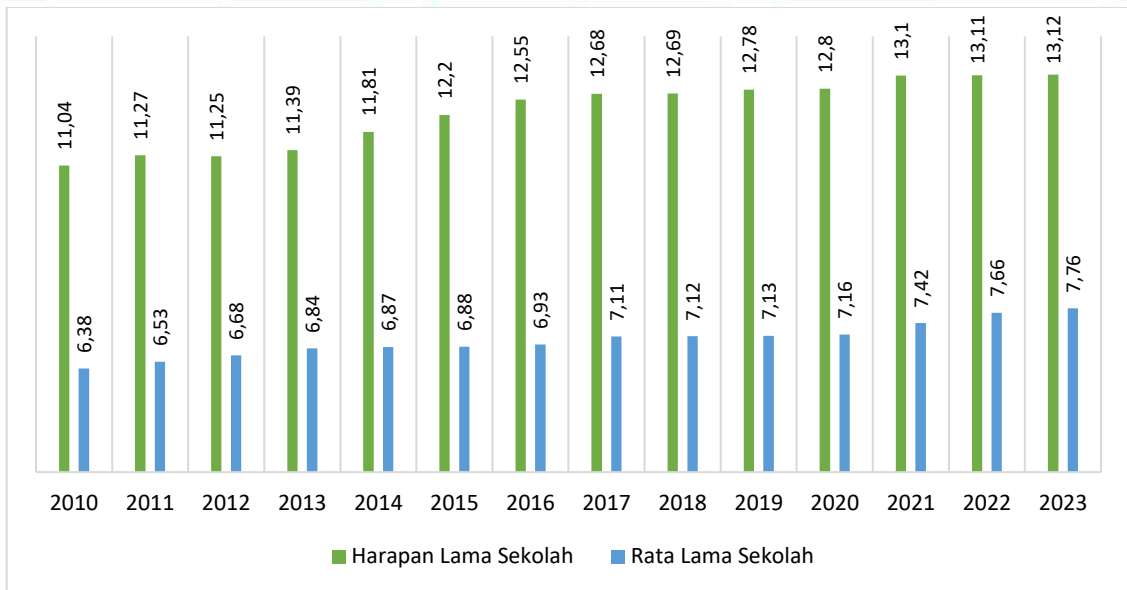
Selama kurun waktu 4 tahun terakhir, ICOR Kabupaten Banyuwangi memiliki tren capaian yang meningkat. Sedangkan di tahun terakhir yaitu tahun 2023 mengalami penurunan. Dari capaian tertinggi di tahun 2022 sebesar 10,17, mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 7,02.

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1 Pelayanan Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Pendidikan adalah proses sistematis yang dirancang untuk mentransmisikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma budaya dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Lebih dari sekadar transfer informasi, pendidikan juga melibatkan pembentukan karakter, pengembangan kemampuan kritis, dan pemberdayaan individu untuk berkontribusi pada masyarakat. Secara teknis, urusan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi diampu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dengan capaian kinerja sebagai berikut:



Gambar II. 45 Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2024

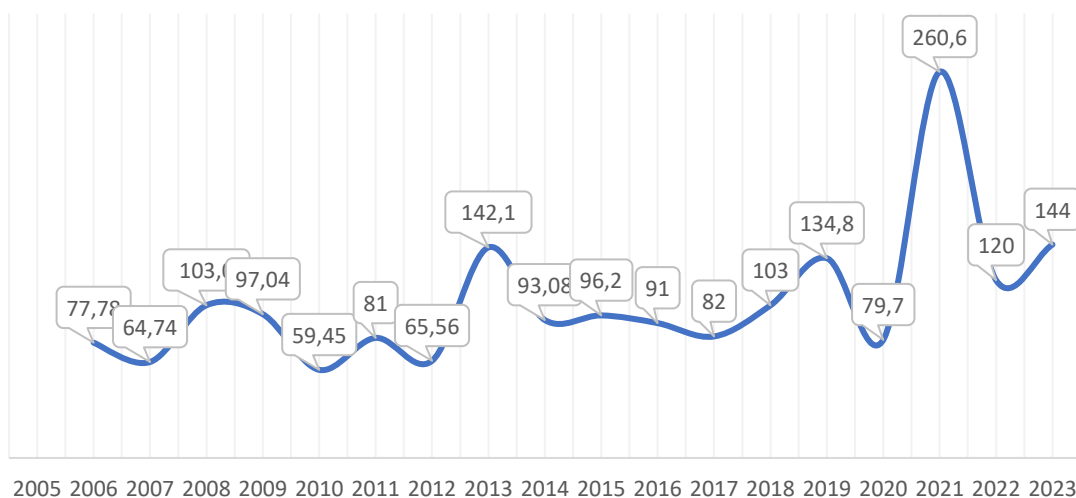
Nilai Harapan Lama sekolah dan rata rata lama sekolah pembentuk dari indeks pendidikan mengalami kenaikan setiap tahun. Tahun 2023 angka rata-rata sekolah mengalami kenaikan menjadi 7,76 sedangkan harapan lama sekolah di tahun 2023 sebesar 13,12. Permasalahan pendidikan yang dihadapi dapat dilihat dari beberapa aspek yang belum sepenuhnya terpenuhi. Pertama, terdapat ketidakmerataan dalam kualitas pendidikan, di mana beberapa wilayah atau lembaga pendidikan mungkin belum mampu memberikan standar kualitas yang setara. Selain itu, pendidikan yang diimbangi dengan nilai karakter juga masih menjadi tantangan, dengan kebutuhan untuk mengintegrasikan pembelajaran akademis dan pembentukan karakter yang kuat. Kedua, masih terdapat hambatan dalam kompetensi guru terkait penguasaan teknologi informasi (IT). Dalam era digital ini, guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang IT untuk mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran. Ketidakmampuan guru dalam hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pendidikan. Terakhir, sarana dan prasarana (sarpras) sekolah masih belum memenuhi akses lengkap dan berkualitas. Beberapa sekolah mungkin masih kesulitan untuk memberikan lingkungan pembelajaran yang memadai, termasuk fasilitas fisik dan teknologi, yang dapat berdampak pada pengalaman belajar siswa.

B. Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap

individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga Negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara. Masa periode RPJPD 2005-2025 memiliki perubahan yang sangat signifikan utamanya dalam pengembangan teknologi dan manajemen kesehatan akan tetapi dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalami permasalahan utamanya dalam penentuan indikator kinerja yang mengalami pergantian, perubahan susunan organisasi, regenerasi SDM serta manajemen arsip dan data yang terus ditingkatkan, oleh karenanya dalam mengukur kinerja pemerintah daerah urusan kesehatan terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan akan tetapi dengan keterbatasan data, sebagaimana berikut.

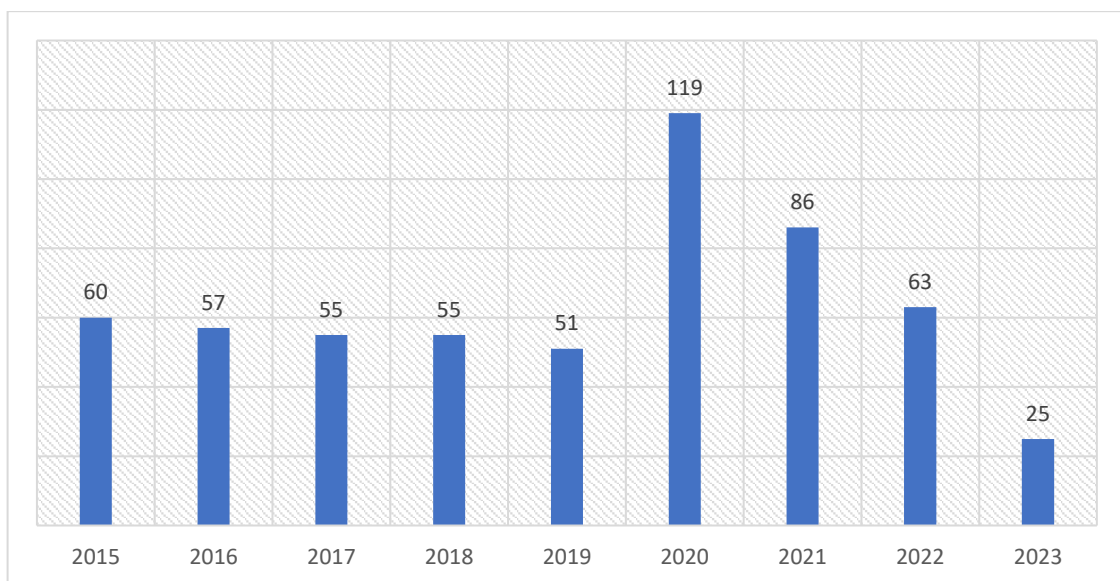
Pertama, Angka kematian Ibu yang dikenal sebagai angka kematian ibu (AKI), adalah ukuran yang digunakan dalam bidang kesehatan untuk mengukur jumlah kematian ibu selama kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah persalinan per 100,000 kelahiran hidup. Angka ini adalah salah satu indikator penting dalam pemantauan kesehatan maternal dan dapat memberikan gambaran tentang efektivitas sistem perawatan kesehatan maternal dalam sebuah negara atau wilayah. Pengurangan angka kematian ibu merupakan salah satu tujuan utama dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Banyuwangi maupun secara nasional.



Gambar II. 46 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, 2024

Berdasarkan data, AKI di Kabupaten Banyuwangi tercatat sejak tahun 2006 hingga 2023, secara general AKI di Kabupaten Banyuwangi mengalami menunjukkan tren yang fluktuatif, namun pada tahun 2008, 2013, 2019 dan tahun 2021 meningkat signifikan. Peningkatan Angka Kematian Ibu di Banyuwangi ini erat kaitannya dengan kebudayaan masyarakat, masyarakat lebih terikat pada tokoh agama/ tokoh masyarakat, sehingga program pemerintah terkait dengan langkah preventif kurang disambut antusias oleh masyarakat, Banyak keterlambatan pasien ibu hamil yang dibawa ke rumah sakit, karena enggan dirujuk dari awal dan mengakibatkan kematian. minimnya pengetahuan dan kemampuan mengambil keputusan menjadi penghambat bagi mereka untuk pergi bersalin di fasilitas kesehatan. Selain itu, kondisi ibu hamil yang bereasiko juga turut mendorong meningkatnya AKI di Kabupaten Banyuwangi, seperti terlalu tua hamil, terlalu muda, terlalu banyak dan terlalu dekat. Khusus pada tahun 2021 angka meningkat sangat signifikan dikarenakan efek dari adanya Pandemi yang diawali dari tahun 2020. Hal ini karena pada kehamilan memiliki tingkat resiko atau kerentanan terhadap Virus Covid-19. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian penurunan AKI di Kabupaten Banyuwangi belum menunjukkan capaian yang konsisten dan perlu menjadi perhatian.

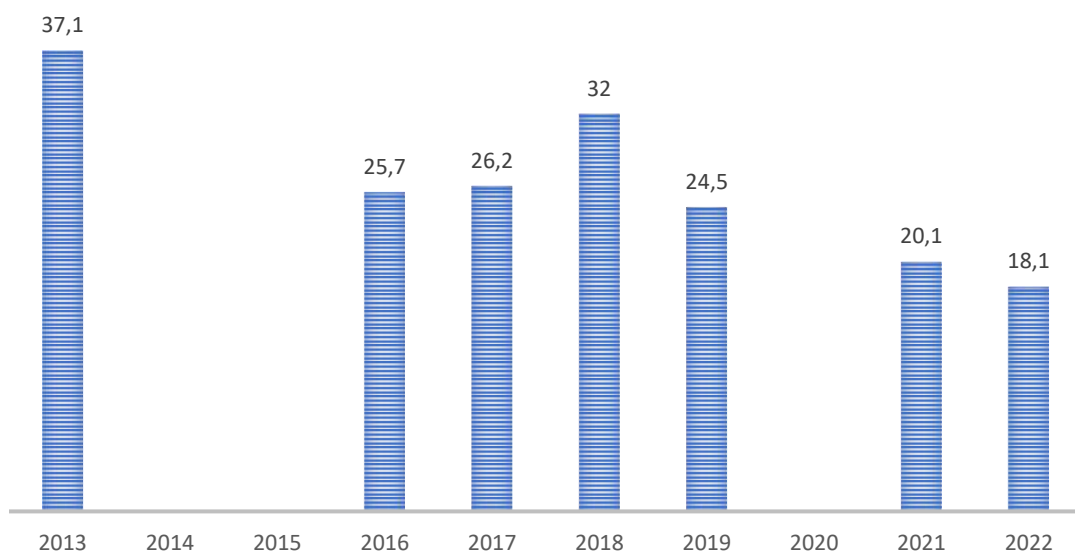


Gambar II. 47 Presentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, 2024

Indikator kedua adalah persentase balita gizi buruk, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi anak balita (biasanya berusia dua tahun ke bawah) yang mengalami defisiensi gizi atau tidak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Gizi buruk pada balita dapat memiliki dampak serius terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan


sistem kekebalan tubuh mereka. Gejala gizi buruk pada balita bisa meliputi pertumbuhan yang lambat, berat badan kurang, kelemahan, mudah sakit, dan masalah kesehatan lainnya. Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Banyuwangi tercatat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2015 sampai dengan 2023 capaian mengenai balita gizi buruk menurun, dengan capaian terendahnya yaitu 25%, namun pada tahun 2020 data menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu mencapai 120%, tentunya hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk ditangani dengan serius. Tingginya persentase balita gizi buruk di Kabupaten Banyuwangi dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Interaksi dan kebijakan orang tua dalam hal pemilihan makanan, pemberian makanan, dan perawatan anak sangat memengaruhi kualitas gizi anak. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Kecamatan Wongsorejo, tingkat gizi buruk tinggi, padahal dekat dengan kantong produksi ikan, Oleh karena itu, edukasi orang tua tentang gizi yang baik dan pentingnya pola makan yang seimbang sangat penting dalam usaha untuk mengurangi angka gizi buruk pada balita.



Gambar II. 48 Persentase Balita Stunting di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, 2024

Indikator ketiga adalah prevalensi balita stunting. Stunting biasanya diukur dengan membandingkan tinggi badan anak dengan standar pertumbuhan yang diharapkan untuk usianya. Jika seorang anak mengalami stunting, artinya tinggi badannya lebih rendah dari yang seharusnya, dan ini adalah tanda bahwa pertumbuhan fisiknya telah terhambat. Stunting biasanya terjadi selama periode awal kehidupan, terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari konsepsi hingga usia dua



tahun, yang merupakan periode kritis untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Keterbatasan data yang tersedia, menyebabkan sulitnya menganalisis terkait dengan kondisi stunting di Kabupaten Banyuwangi. melalui grafik diatas diketahui bahwa prevalensi balita stunting di Kabupaten Banyuwangi tercatat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan tren yang menurun, dengan capaian terendahnya pada tahun 2022 sebesar 18.1%. Sedangkan pada tahun 2014, 2013 dan tahun 2020 data tidak tersedia. Meskipun demikian permasalahan terkait dengan prevalensi balita stunting di Kabupaten Banyuwangi memerlukan upaya serius dalam meningkatkan gizi anak-anak sejak usia dini, memberikan pendidikan dan dukungan kepada orang tua, serta mempromosikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan nutrisi. Pencegahan dan penanganan stunting merupakan investasi penting dalam masa depan anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan.

Secara umum upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi masih perlu ditingkatkan khususnya dalam menunjang kesehatan ibu dan anak, melihat Angka kematian ibu, balita gizi buruk dan juga angka stunting masih tergolong tinggi. Selain itu minimnya ketersediaan data menyebabkan sulitnya menganalisis secara optimal faktor kasualitasnya. Dalam beberapa tahun kedepan, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat akan dihadapkan dengan beberapa tantangan seperti

Gaya hidup masyarakat yang saat ini cenderung tidak sehat terkait dengan jenis makanan dan pola hidup mengindikasikan akan meningkatnya penyakit kronis, sehingga dibutuhkan pembangunan rumah sakit untuk penyakit kronis di Kabupaten Banyuwangi seperti pengobatan terkait penyakit kanker, ginjal dan jantung. Kedua, terkait dengan kondisi budaya masyarakat di Kabupaten banyuwangi dibutuhkan langkah promotif dan preventif khususnya dalam masalah kesehatan ibu dan anak dengan berkolaborasi bersama tokoh masyarakat, mengingat masyarakat lebih dekat/ percaya pada tokoh agama/ tokoh masyarakat. Ketiga, dengan adanya kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pemantauan kesehatan ibu hamil melalui inovasi teknologi pada pelayanan kesehatan. Selain itu peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perbaikan pola hidup bersih dan sehat menjadi hal yang penting dimasa depan untuk menekan angka penyakit tidak menular dan menular.

C. Pekerjaan Umum dan Cipta Karya

Pekerjaan Umum dan Cipta karya merupakan Urusan Wajib dasar yang berkaitan dengan penyelenggaraan infrastruktur dan sarana prasarana publik. Pada dasarnya pembangunan infrastuktur sangatlah luas dimana infrastruktur dapat berkaitan



dengan segala aspek kehidupan namun infrastruktur yang sangat berdampak pada kemajuan daerah serta dapat merepresentasikan bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan infrastruktur dan sarana prasarana publik antara lain adalah pembangunan jalan. Hal ini tentunya menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengingat Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah yang sangat besar dan terbentang dari utara hingga selatan pada ujung timur pulau Jawa. Pembangunan jalan di Kabupaten Banyuwangi pada periode RPJPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2005-2025 telah dievaluasi namun dalam periode tersebut mengalami beberapa kendala utamanya pemenuhan rentang data yang lengkap.

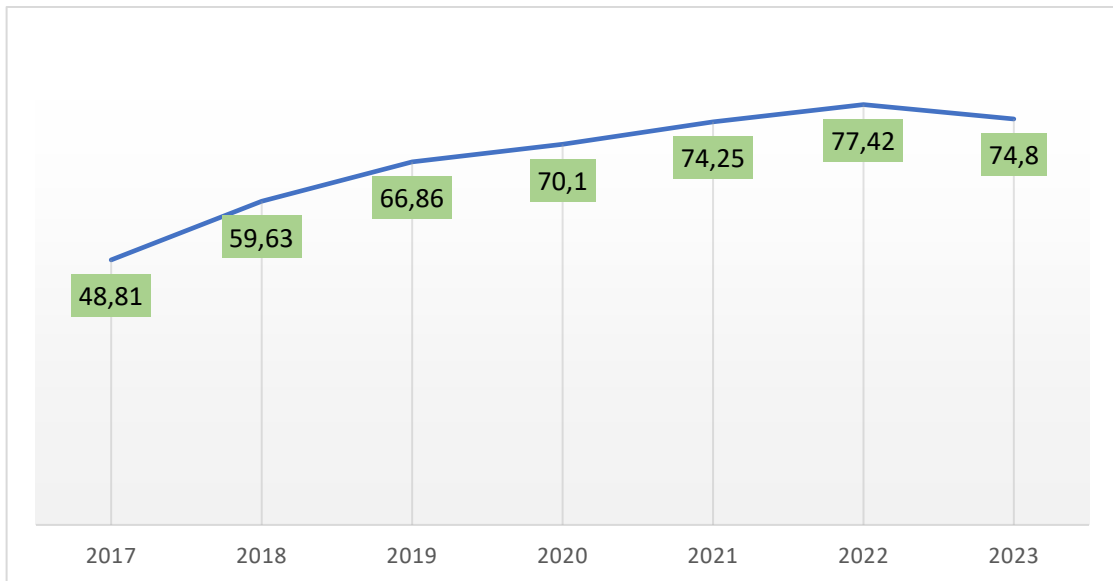
Jalan di Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa kategori status kepemilikan, diantaranya adalah Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No: 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel II. 34 Ruas Jalan Menurut Statusnya di Kabupaten Banyuwangi

No	No Ruas			Nama Ruas	Panjang (Km)
1	026			Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi)	56,96
2	073			Sumberjati/Sempolan - Bts. Kab. Banyuwangi	18,44
3	074			Bts. Kab. Jember - Genteng Kulon	30,08
4	075			Genteng Kulon - Jajag - Benculuk	16,13
5	077			Rogojampi - Bts. Kota Banyuwangi	10,10
6	076			Benculuk - Rogojampi	17,01
7	077			Rogojampi - Bts. Kota Banyuwangi	10,23
8	077	11	K	Jln. S. Parman (Banyuwangi)	1,00
9	077	15	K	Jl. Brawijaya (Banyuwangi)	3,25
10	077	16	K	Jl. Gajah Mada (Banyuwangi)	1,00
11	077	17	K	Jl. Hayam Wuruk (Banyuwangi)	0,61
12	078	18	K	Jl. Raden Wijaya (Banyuwangi)	2,20
13	078	19	K	Jl. Argopuro (Banyuwangi)	2,65
14	078	12	K	Jln. Yos Sudarso (Banyuwangi)	2,86
15	078	13	K	Jln. Gatot Subroto (Banyuwangi)	3,56
				Total	176,08

Sumber: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1688/KPTS/M/2022

Adapun capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur jalan dapat dilihat melalui indikator dibawah ini:




Gambar II. 49 Persentase Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas PUCKPP Kabupaten Banyuwangi, 2024

Berdasarkan grafik di atas, kondisi jalan baik mengalami peningkatan sejak tahun 2017, dengan trend tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat secara konsisten meningkatkan kualitas dan pemerataan jalan di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2023 upaya ini juga semakin digalakkan dimana Pembangunan jalan menjadi bagian dari gerakan “Banyuwangi Rebound” dengan target pembangunan jalan mencapai 222 Kilometer. Namun dalam periode kedepan berbagai kondisi dan permasalahan akan muncul dengan berbagai dinamika utamanya dengan adanya tantangan perubahan iklim, Perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca tidak menentu akan berdampak kepada ketahanan jalan sehingga dengan jumlah curah hujan akan berdampak kepada kerusakan jalan yang lebih cepat disisi lain penggunaan jalan yang semakin banyak, dan tuntutan masyarakat yang terus menerus perlu diakomodir secara berkesinambungan melalui perkembangan teknologi yang semakin maju dalam perbaikan jalan.

Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi perlu dilakukan secara bertahap demi mencapai efektivitas dan efisiensi mengingat Kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap seluruh komponen jalan utamanya drainase, dengan kondisi drainasi yang belum dapat menampung serta mengalirkan debit air hujan maka memungkinkan adanya genangan air yang dapat berpotensi untuk memperpendek usia jalan. Selain itu pembangunan jalan perlu dilakukan secara bertahap dimana tahapan yang dimaksud



tidak berpotensi untuk merusak atau merubah kembali baik jalan maupun komponen atau sarana pendukung jalan.

Pada Sub Pengairan, Irigasi atau pengairan adalah suatu usaha mendatangkan air dengan membuat bangunan dan saluran-saluran ke sawah-sawah atau ke ladang-ladang dengan cara teratur dan membuang air yang tidak diperlukan lagi, setelah air itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Pengairan mengandung arti memanfaatkan dan menambah sumber air dalam tingkat tersedia bagi kehidupan tanaman. Apabila air terdapat berlebihan dalam tanah maka perlu dilakukan pembuangan (drainase), agar tidak mengganggu kehidupan tanaman. Sekitar 86% produksi beras nasional berasal dari daerah sawah ber irigasi. Jadi sawah irigasi merupakan faktor utama dalam pencapaian ketahanan pangan nasional. Agar produksi beras di lahan ber irigasi maksimal, maka jaringan irigasi harus dikelola dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut, di Kabupaten Banyuwangi diampuh oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dengan memiliki beberapa indicator diantaranya:

1. Persentase Ketersediaan Air Irigasi

Irigasi adalah pembuangan air buatan dari sumber air yang tersedia ke suatu lahan dengan tujuan mengalirkannya secara teratur sesuai dengan kebutuhan tanaman pada saat suplai infiltrasi tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, Sehingga tanaman bisa tumbuh normal. Irigasi atau pengairan merupakan hal yang penting dalam pertanian. Tanaman tidak dapat tumbuh secara optimal tanpa pengairan yang tepat. Hal ini juga akan sangat mempengaruhi hasil panen yang akan datang. Pemahaman akan pentingnya irigasi menjadikan pembangunan irigasi sebagai prioritas. Menurut data dalam data frame, pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menargetkan peningkatan irigasi 90 persen pada 2019. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001, irigasi atau pengelolaan irigasi adalah segala upaya pemanfaatan air irigasi, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan, pengamanan, pemulihan, dan peningkatan jaringan irigasi. Berikut merupakan data yang menggambarkan capaian kinerja pada indicator Persentase ketersediaan air irigasi yaitu sebagai berikut:





Gambar II. 50 Persentase Ketersediaan Air Irigasi di Kabupaten Banyuwangi

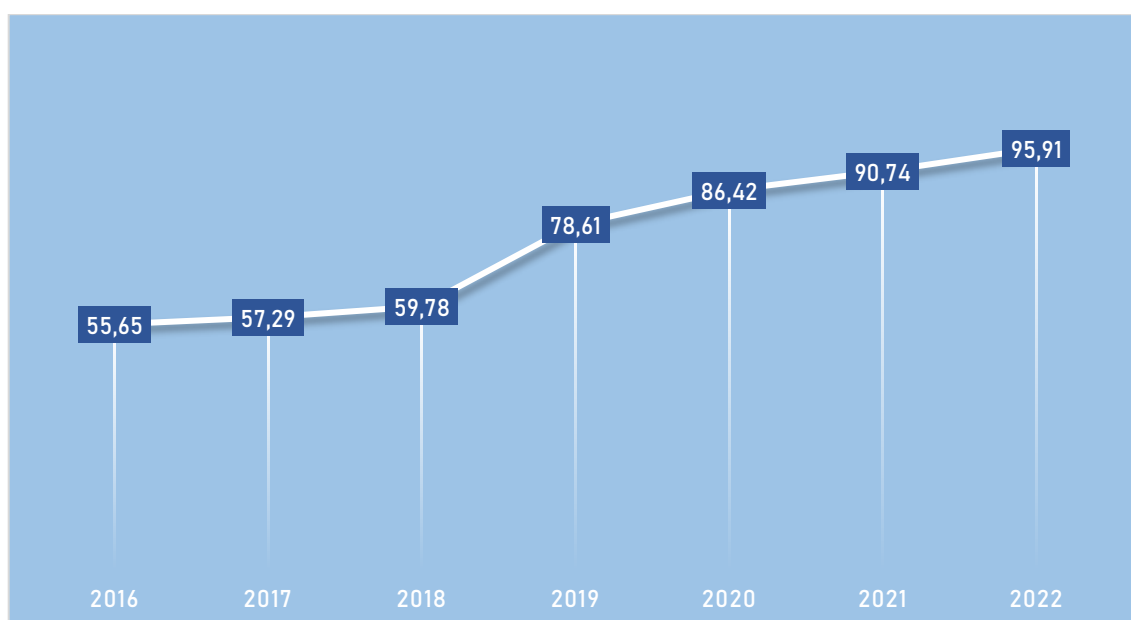
Sumber: Dinas PUCKPP Kabupaten Banyuwangi, 2023

Berdasarkan pada grafik diatas maka dapat diketahui bahwa persentase ketersediaan air irigasi dari kurun waktu berangsur mengalami peningkatan capaian. Data diatas menunjukkan bahwa kinerja Dinas PU Pengairan selama ini mendapatkan hasil yang positif. Hal tersebut didoreng oleh beberapa hal yaitu diantaranya 1) Adanya pembangunan jaringan irigasi, 2) Pembangunan embung (long storage) 3) Serta kegiatan normalisasi sungai seperti pengerukan sedimen yang dapat meningkatkan debit air. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, diperlukan inklusif dan merata, terutama di mana sumber daya air terbatas. Pada musim kekeringan, misalnya, banyak daerah pertanian tidak ditanami karena air diperlukan tidak cukup. Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, perlu diterapkan langkah-langkah pengelolaan yang tepat didukung oleh teknologi dan perangkat hukum yang baik. Penggunaan sumber daya tenaga hidrolik disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit.

Namun ada beberapa hal yang menghambat ketersediaan air irigasi ialah diantaranya 1) Cuaca tidak menentu sehingga dapat mengurangi debit air hingga 25% di musim kemarau 2) Adanya konflik kepentingan antar petani karena kekeringan itu, 3) Adanya kordsa (pembagian wilayah air) dan 4) Adanya internalisasi dengan petani agar mengurangi konflik antar petani. Untuk menanggulangi hal tersebut maka akan dilakukan beberapa tindakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya Dinas PU Pengairan dengan melakukan beberapa monitoring dan evaluasi mengenai kegiatan terkait urusan pengairan.

2. Persentase Ketersediaan Air Bersih

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.32 tahun 2017 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan air adalah Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia yang dapat berupa parameter wajib dan parameter tambahan. Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi tersebut digunakan untuk memelihara kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian. Selain itu Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi dapat digunakan sebagai air baku air minum. Melihat begitu pentingnya air bersih bagi kehidupan manusia maka akan diberlakukannya indicator Persentase ketersediaan air bersih dengan capaian indicator sebagai berikut:



Gambar II. 51 Persentase Ketersediaan Air Bersih di Kabupaten Banyuwangi

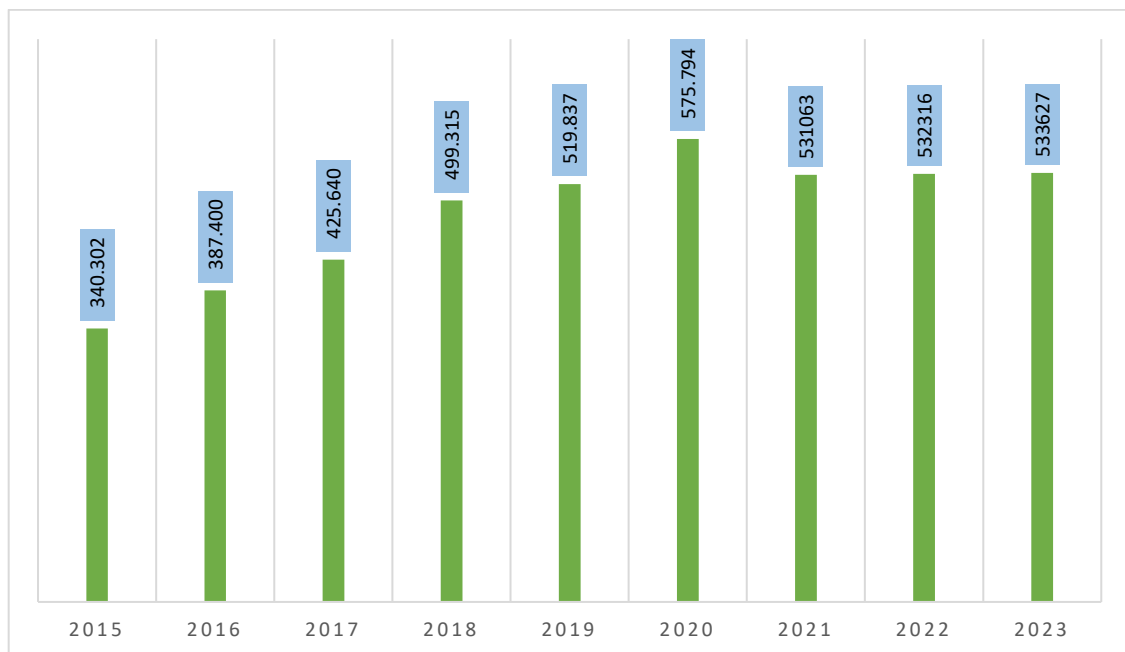
Sumber: Dinas PUCKPP Kabupaten Banyuwangi, 2023

Dengan menggunakan air bersih kita dapat terhindar dari penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacangan, penyakit kulit hingga keracunan. Untuk itu wajib bagi seluruh anggota keluarga dalam menggunakan air bersih setiap hari dan menjaga kualitas air tetap bersih di lingkungannya. Dengan melihat data diatas maka adanya peningkatan capaian daru kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Tren capaian positif tersebut dikarenakan adanya faktor pendorong diantaranya yaitu 1) Adanya pembangunan sarana dan prasaranan air bersih sepertri pembangunan jaringan perpipaan, pembangunan tandon, pembangunan sumur bor dan 2) pembagian daerah air bersih dibagi dua yaitu daerah perkotaan yg diampuh PDAM dan daerah perdesaan yang diampuh oleh Pu pengairan melalui HIPAM.

Namun ada beberapa hal yang menghambat ketercapaian atau ketersediaan air bersih di Kabupaten Banyuwangi ialah Adanya faktor cuaca yang tidak dapat diprediksi sehingga menyebabkan ketersediaan air berkurang. Selain itu juga adanya Sumber mata air yang inaktive karena ketersediaan air dalam tanahnya habis.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan wajib pelayanan dasar berikutnya adalah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Penyediaan tempat tinggal hunian yang layak tentu menjadi salah satu aspek dasar kebutuhan manusia. Pemerintah daerah harus memperhatikan bagaimana masyarakat dapat tinggal layak walaupun kondisi perekonomian mereka berada dalam kondisi yang buruk. Harga Tanah, Aset bahkan material bangunan setiap tahunnya terus mengalami kenaikan sehingga persoalan ini kedepan menjadi tantangan utamanya bagi masyarakat yang memiliki daya beli rendah. Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada periode RPJPD 2005 hingga 2025 perlu diperhatikan dan dievaluasi sejauh mana kinerja pemerintah dalam menghadapi kondisi ini sekaligus sebagai bahan pertimbangan apakah penyelenggaraan urusan ini kedepan perlu di lakukan akselerasi atau tidak. Berikut capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang tercermin dalam beberapa indikator:

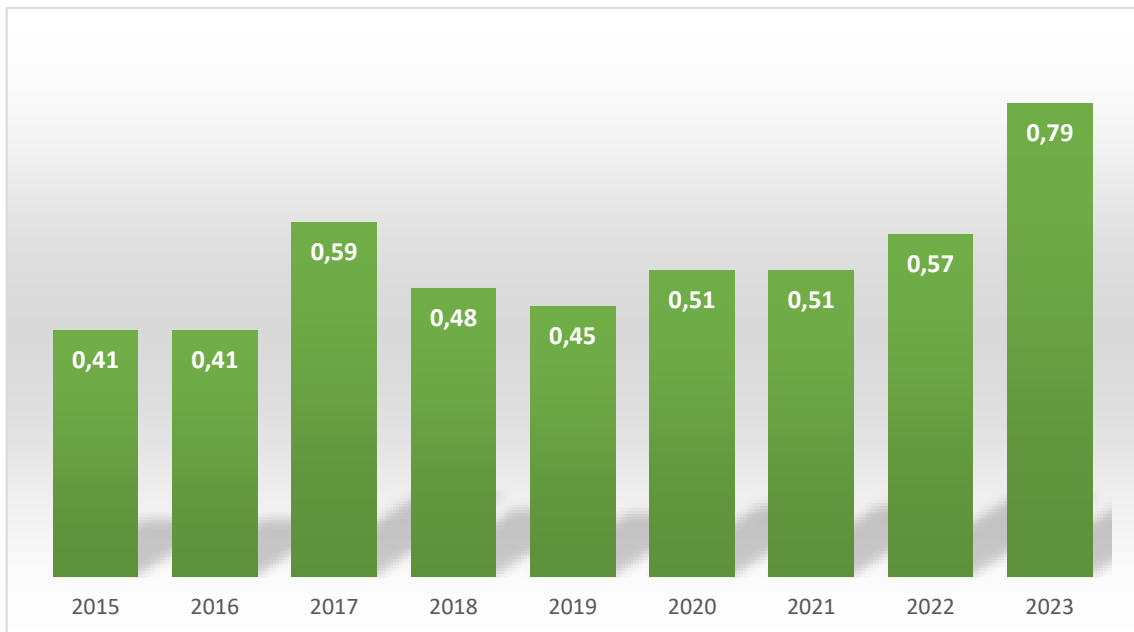


Gambar II. 52 Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak dan Terjangkau di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas PUCKPP Kabupaten Banyuwangi, 2024

Berdasarkan capaian diatas, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun secara konsisten memberikan anggaran terhadap peningkatan layanan RTLH yang terjangkau sehingga masyarakat yang memiliki daya beli rendah terhadap rumah

yang layak huni dapat turut serta pada program yang telah di jalankan oleh pemerintah dan dapat tinggal di rumah yang layak. Berdasarkan angka capaian maka sejak tahun 2015 hingga tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah memberikan layanan RTLH terjangkau sebanyak 533627 Rumah yang dilakukan secara bertahap sehingga apabila dirata-rata Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyediakan 40 RTLH terjangkau pada setiap tahunnya. RTLH sendiri memiliki standarisasi dimana kondisi rumah tersebut harus memenuhi aspek dan indikator sehingga dapat dikategorikan layak. Terlepas pada penyediaan RTLH itu sendiri secara umum masyarakat Kabupaten Banyuwangi memerlukan pengolahan sanitasi yang baik sehingga hal ini dapat memperbaiki kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat. pengelolaan sanitasi dapat dilakukan dengan mengelola timbunan lumpur tinja berikut capaian indikator Proporsi Rumah Tangga terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar II. 53 Proporsi Rumah Tangga Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja di Kabupaten Banyuwangi

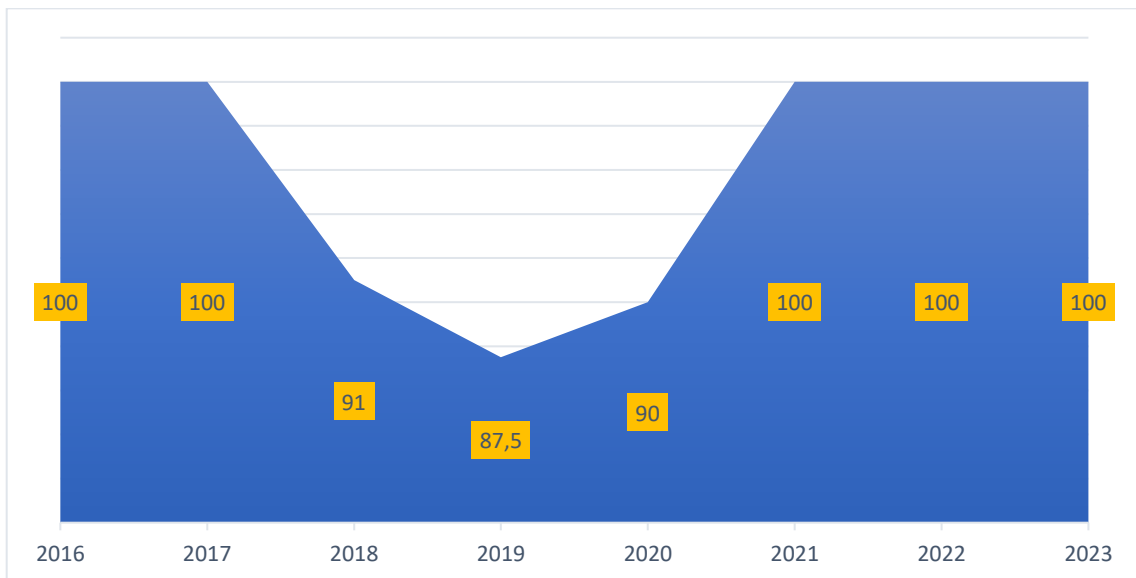
Sumber: Dinas PUCKPP Kabupaten Banyuwangi, 2023

Data diatas menunjukkan angka yang bersifat fluktuatif berada pada rentang capaian 0,41 sampai dengan 0,79. Pengelolaan Lumpur Tinja itu sendiri dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yakni (1) Pengurasan, dilakukan dengan mengeluarkan lumpur tinja pada tangki atau fasilitas sanitasi. (2)Pengangkutan, Mengangkut Lumpur Tinja dari lokasi pengurasan menuju tempat pengolahan. (3)Pengolahan, Mengolah lumpur tinja menjadi produk yang aman dan bermanfaat. Diantaranya kompos, biogas dan lain sebagainya. (4) Pemanfaatan, memanfaatkan

produk hasil pengolahan untuk keperluan masyarakat misal pertanian, irigasi dan energi. Proporsi capaian diatas perlu ditingkatkan kedepannya mengingat pada rancangan awal RPJPN juga disoroti tentang penggunaan EBT (energi baru dan terbarukan) sehingga dengan pengelolaan yang maksimal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat secara linear berperan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Nasional. Pengelolaan air limbah domestik perlu dikelola dengan baik, dikarenakan saat ini hanya ada satu IPLT (instalasi Pengelolaan Limbah Terpusat) yang berada di Kertosari maka belum dapat sepenuhnya menjawab kebutuhan seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum)


Menjaga stabilitas daerah menjadi tugas pemerintah sehingga urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menjadi urusan wajib dan pelayanan dasar yang harus mampu diselenggarakan secara optimal oleh pemerintah. Pemerintah Daerah melalui berbagai aturan dan undang-undang sebagai suatu dasar hukum bagi masyarakat terus berupaya memberikan pelayanan hukum yang adil dan merata serta dapat berdampak secara masif bagi peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat. Berikut adalah capaian indikator persentase pelanggaran perda yang tertangani di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar II. 54 Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi, 2024

Berdasarkan gambar diatas, capaian indikator persentase pelanggaran perda yang tertangani mengalami penurunan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa aturan di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yang baru dan masyarakat belum sepenuhnya beradaptasi dengan baik, banyaknya



pelanggaran mengakibatkan kebutuhan personil yang sangat tinggi sehingga pelanggaran perda belum sepenuhnya dapat ditangani. Disisi lain pada tahun 2019 terjadi wabah pandemi COVID-19 dimana secara linear baik internasional, nasional dalam hal ini pemerintah pusat hingga pemerintah daerah menetapkan aturan pembatasan kegiatan masyarakat serta penggunaan masker dan pola hidup yang baru dalam mengatasi Virus yang merebak kala itu. Masyarakat juga membutuhkan adaptasi yang sangat besar terhadap kondisi tersebut sehingga pelanggaran terkait dengan aturan dan undang-undang dalam mengatasi wabah pandemi juga meningkat. Pada tahun 2021-2023 capaian persentase pelanggaran perda yang tertangani mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan komitmen Satpol PP dalam menjalankan tugas sebagai penegak Perda untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Masih adanya pelanggaran perda/perkada hingga tahun 2023 disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan aturan tersebut dan minimnya hukuman bagi pelanggar. Penegakan aturan juga terhambat oleh benturan kepentingan, serta keterbatasan dalam pengawasan karena wilayah Banyuwangi yang luas dan minimnya teknologi seperti CCTV. Dinamika sosial, politik, ekonomi kedepan menjadi tantangan yang cukup berat terhadap stabilitas daerah sehingga pemerintah harus secara adaptif dan responsif menanggapi isu dan kerentanan baik sosial politik dan ekonomi terlebih untuk dapat secara tergas melakukan penindakan atas pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan.

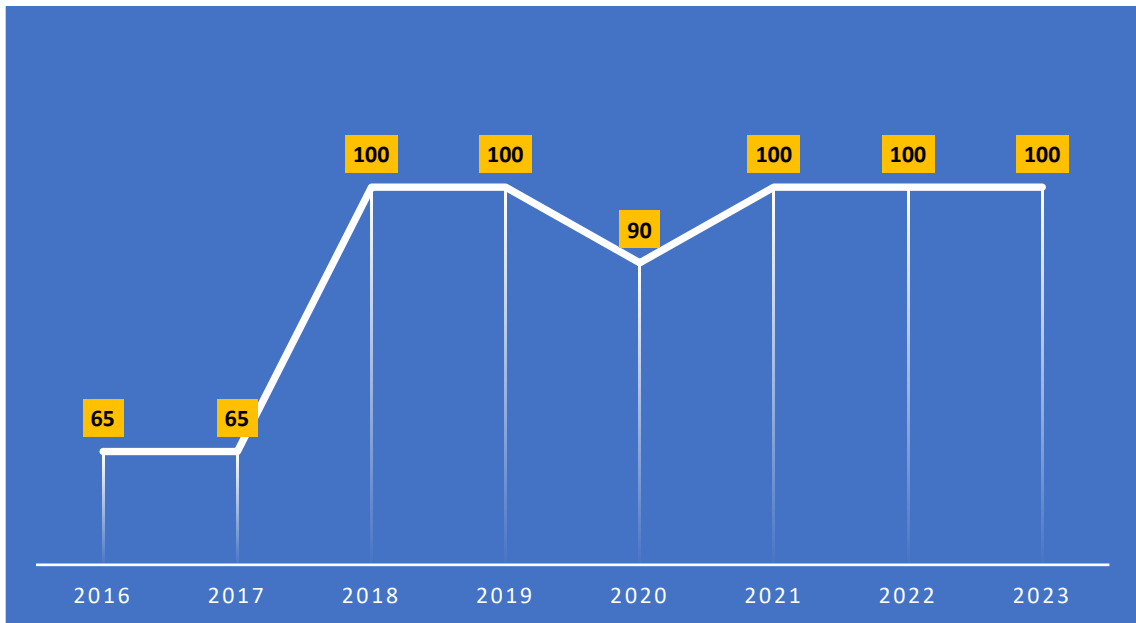
F. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Kebakaran)

Sub urusan kebakaran menjadi salah satu perhatian yang penting penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi dimana upaya penanganan yang cepat dan tepat perlu dilakukan untuk menghindari dampak kerugian atas terjadinya kejadian bencana kebakaran. Berbagai upaya yang perlu dilakukan dalam rangka menjamin terselenggaranya urusan kebakaran adalah melalui pemenuhan kebutuhan baik sumber daya manusia maupun infrastruktur, sarana dan prasarana serta peralatan teknis kebakaran. Disisi lain upaya kesadaran masyarakat terhadap kejadian kebakaran perlu ditanamkan bahkan sejak usia sekolah disamping itu peran swasta serta berbagai orang atau lembaga yang memiliki bangunan perlu diperkuat dengan tersedianya peralatan penanganan cepat kebakaran.

Penyelenggaraan sub urusan kebakaran di Kabupaten Banyuwangi memiliki tantangan tersendiri utamanya perihal pemenuhan SDM dan sarpras. Dengan luasan wilayah yang besar maka jumlah titik yang harus di sediakan untuk merespon cepat



kejadian kebakaran. Berikut capaian respon time layanan penanggulangan kebakaran pada wilayah manajemen kebakaran:



Gambar II. 55 Cakupan Tercapainya *Respon Time* (15 Menit) Layanan Penanggulangan Kebakaran pada Wilayah Manajemen Kebakaran di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi, 2024

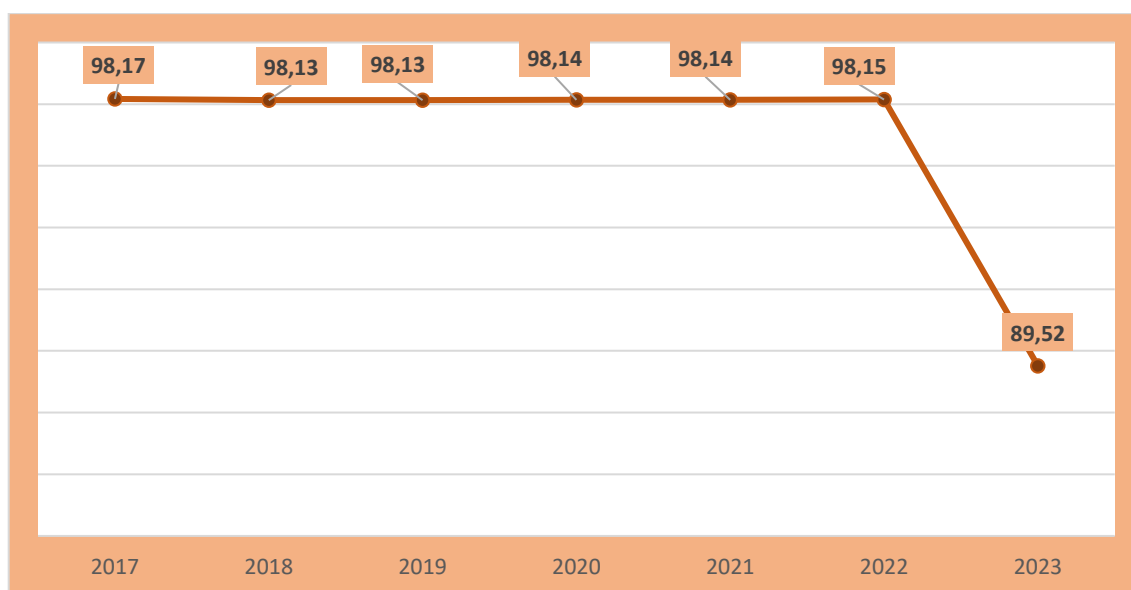
Berdasarkan data diatas, indikator *respon time* layanan penanggulangan kebakaran pada wilayah manajemen kebakaran dengan kecepatan 15 menit pada tahun 2023 mencapai angka 100% dimana angka tersebut berhasil dipertahankan sejak tahun 2021, peningkatan signifikan terjadi di tahun 2018 dimana capaiannya naik hingga 100% dari capaian 65% di tahun 2017. Disisi lain pada tahun 2020 capaian mengalami sedikit penurunan dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 sehingga kejadian kebakaran sangat sulit ditanggulangi dengan cepat akibat pembatasan kegiatan masyarakat. Capaian ini menunjukkan responsibilitas Damkar Kabupaten Banyuwangi dalam merespons kebakaran, mulai dari menerima informasi hingga tiba di lokasi dalam waktu 15 menit. Keberhasilan ini didukung oleh Inovasi Mastang Bakar (Masyarakat Tanggap Kebakaran) dan REDKAR (Relawan Pemadam Kebakaran), sehingga kerugian akibat kebakaran dapat diminimalkan. Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama terkait jumlah sarana dan prasarana pemadam yang masih kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah Banyuwangi. Selain itu, jumlah Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang terbatas, kurangnya *hydrant* di pusat-pusat keramaian, serta integrasi yang lemah antar dinas terkait dalam penanganan bencana kebakaran dari awal hingga akhir masih belum optimal.

G. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan)

Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (sub kebencanaan) adalah bagian penting dari tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Definisi Bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (sub kebencanaan di Kabupaten Banyuwangi dibawa naungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Penanganan Pasca Bencana


Menurut UU No. 24 Tahun 2007, Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas dan rekonstruksi bencana. Manajemen bencana mempunyai tujuan: (1) Mengurangi, atau mencegah, kerugian karena bencana, (2) menjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap korban bencana, dan (3) mencapai pemulihan yang cepat dan efektif.



Gambar II. 56 Persentase Penanganan Pasca Bencana di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2024

Dalam fase pra bencana ini mencakup kegiatan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini. Dari data yang diperoleh diatas, penanganan kasus bencana yang ada di Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan dan belum melampaui target. Terlihat bahwa di tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan capaian. Hal tersebut dikarenakan emulihan pasca bencana tidak sepenuhnya menjadi kewenangan BPBD



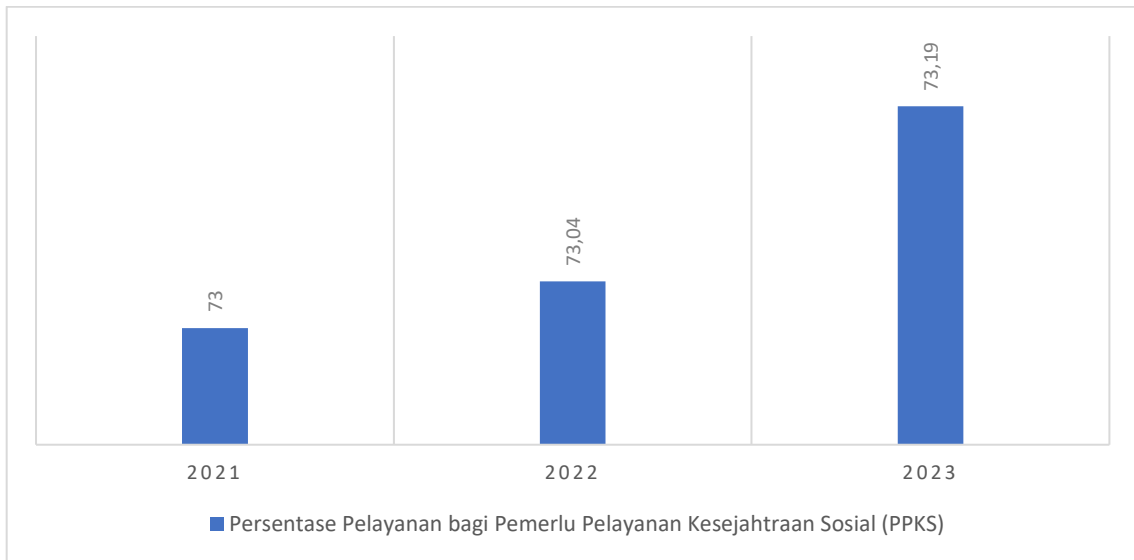
karena ada kolaborasi dengan dinas teknis seperti PU Perkim dan Dinas pengairan. Namun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 capaian mengalami peningkatan, dikarenakan jika bencana yang besar maka ada stok BTT dari Kabupaten, Kolaborasi antar SKPD yang baik dalam penanganan pasca bencana, status rumah yang belum jelas misal tanahnya milik pemerintah. Proses administrasi yang rumit untuk kepemilikan lahan dan lain lain sehingga mereka tidak sabar menunggu. Capaian persentase penanganan pasca bencana di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 89,52%, hal ini dikarenakan minimnya kerjasama antar stakeholder dimana pemulihan pasca bencana tidak sepenuhnya menjadi kewenangan BPBD karena ada kolaborasi dengan dinas teknis seperti PU Perkim dan Dinas Pengairan. Namun juga ada beberapa faktor penghambat Cakupan luas wilayah Banyuwangi yang sangat luas sehingga dibutuhkan ekstra tenaga dalam penanganan bencana. Pengembangan sistem pemulihan bencana karena rehabilitasi yang berbentuk fisik sementara regulasinya dari segi administrasi yang panjang sehingga berpengaruh pada penanganannya.

H. Sosial

Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi merupakan gabungan antara Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dari perubahan tersebut, maka terbentuklah Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 sebagai acuan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi. Begitu pula di Kabupaten Banyuwangi urusan sosial diampuh oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dengan capaian indikator PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya termasuk (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial,



keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.



Gambar II. 57 Persentase Pelayanan PMKS di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi, 2023

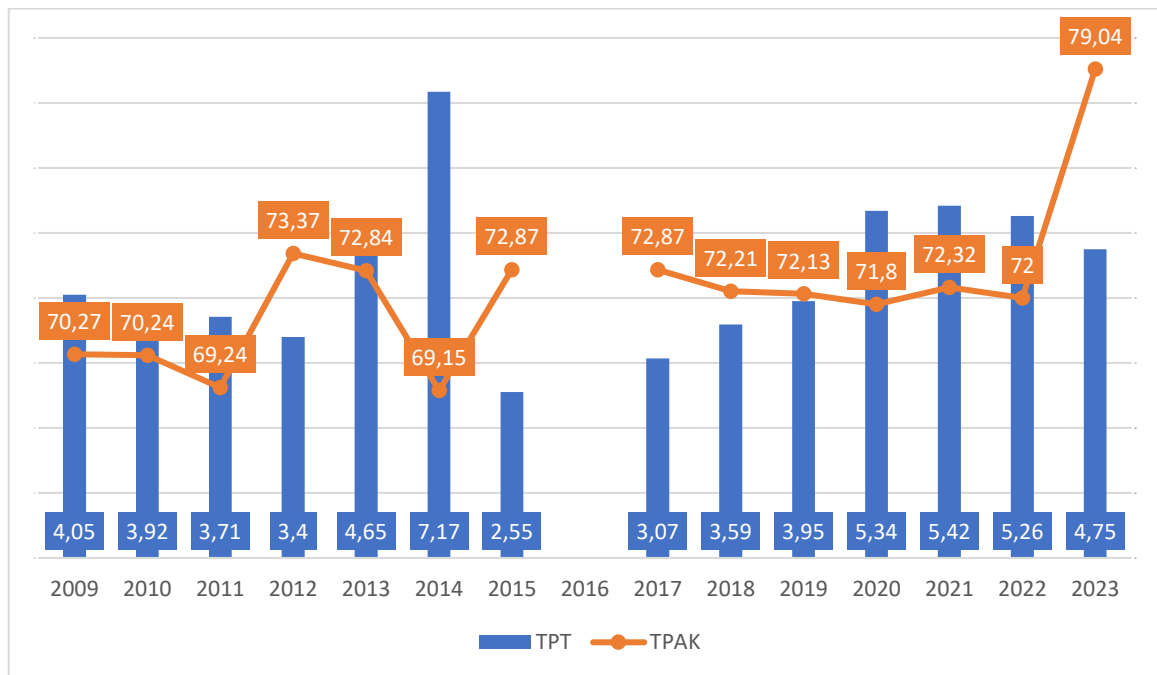
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase pelayanan PMKS di Kabupaten Banyuwangi mengalami tren capain yang menurun. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal yakni alokasi dana untuk penanganan PMKS umumnya tidak sebanding dengan besaran masalah sosial yang dihadapi. Hal lain seperti upaya penanganan terhadap PMKS seringkali hanya berhenti pada pendekatan punitif-represif – sekadar melakukan razia untuk menangkap PMKS – tetapi tidak ditindaklanjuti dengan upaya pembinaan yang efektif karena kurang memadainya tempat penampungan dan pelatihan bagi mereka yang terkena razia. Maka dari itu, Keberhasilan penanganan persoalan PMKS pada dasarnya bukan hanya menjadi tanggung pemerintah daerah saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab seluruh komponen dalam masyarakat (stakeholder) – yang keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan Kerjasama antar berbagai pihak dalam rangka memberikan pelayanan kepada PMKS tersebut.

2.4.2 Pelayanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Pelayanan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuwangi merupakan kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi. Secara tupoksi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk memberikan pelayanan diberbagai aspek

ketenagakerjaan, termasuk pencarian kerja, pelatihan keterampilan, perlindungan hak-hak pekerja, dan layanan terkait lainnya. Berikut merupakan indikator urusan ketenagakerjaan:



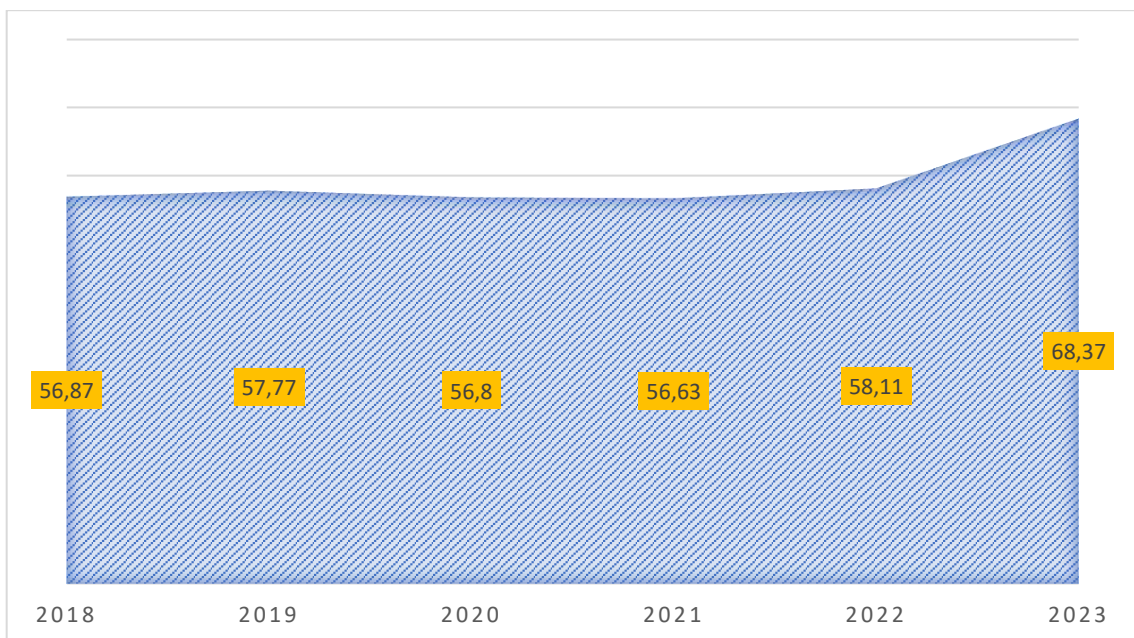
Gambar II. 58 Indikator Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi, 2024

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Banyuwangi tahun 2009-2023 secara umum memiliki capaian yang fluktuatif. Peningkatan capaian secara signifikan terjadi pada tahun 2014, hal ini terjadi dikarenakan jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan. Selain TPAK, yang menjadi indikator pada urusan ketenagakerjaan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator TPT Kabupaten Banyuwangi tahun 2009-2023 secara umum memiliki capaian yang fluktuatif. Capaian TPT jika disandingkan dengan TPAK pada tahun yang sama yaitu tahun 2014-2015 mengindikasikan bahwa jumlah penduduk yang aktif bekerja cukup besar dan kesempatan pekerjaan tersedia cukup luas. Namun seiring berjalannya waktu hingga tahun 2023 kondisi tersebut berubah, adanya peningkatan TPAK dan penurunan TPT jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang mengindikasikan adanya masalah ekonomi yang serius. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh para pencari kerja.

Melihat kecenderungan data dari 2 indikator diatas, tantangan bagi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi kedepannya yaitu meningkatkan Kualifikasi SDM khususnya dibidang pendidikan yang saat ini cenderung

masih rendah sehingga berdampak pada ketersediaan tenaga kerja di masa depan. Mengingat perkembangan teknologi dan digitalisasi di masa mendatang akan sangat pesat, sehingga penting untuk mengembangkan kemampuan dalam industri digital, sehingga tidak hanya mencari lapangan pekerjaan, namun juga dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru di industri digital. Peningkatan *up-skilling* dan *re-skilling* khususnya dibidang pertanian dan perdagangan menuju industri pengolahan export juga penting mengingat potensi Kabupaten Banyuwangi sangat besar khususnya di bidang industri kulit, pemerintah juga harus menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan mendorong pertumbuhan UMKM. Selain itu, perlu adanya kebijakan ketenagakerjaan seperti ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengusaha dan pekerja agar tercipta hubungan kerja yang kondusif.



Gambar II. 59 TPAK Perempuan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2023

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2024

Berdasarkan pada grafik diatas maka dikatehui bahwa tingkat aptisipasi angkatan kerja perempuan yang menggambarkan perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Dari data diatas maka dapat diketahui bahwa capaian angka partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten Banyuwangi seiring dengan berjalannya waktu terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023. Hal tersebut membuktikan bahwa seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern maka juga mempengaruhi mindset perempuan untuk menjadi wanita karir. Ini merupakan hak yang positif dikarenakan akan meningkatkan pertumbuhan dari berbagai sektor, khususnya pada Kabupaten Banyuwangi.



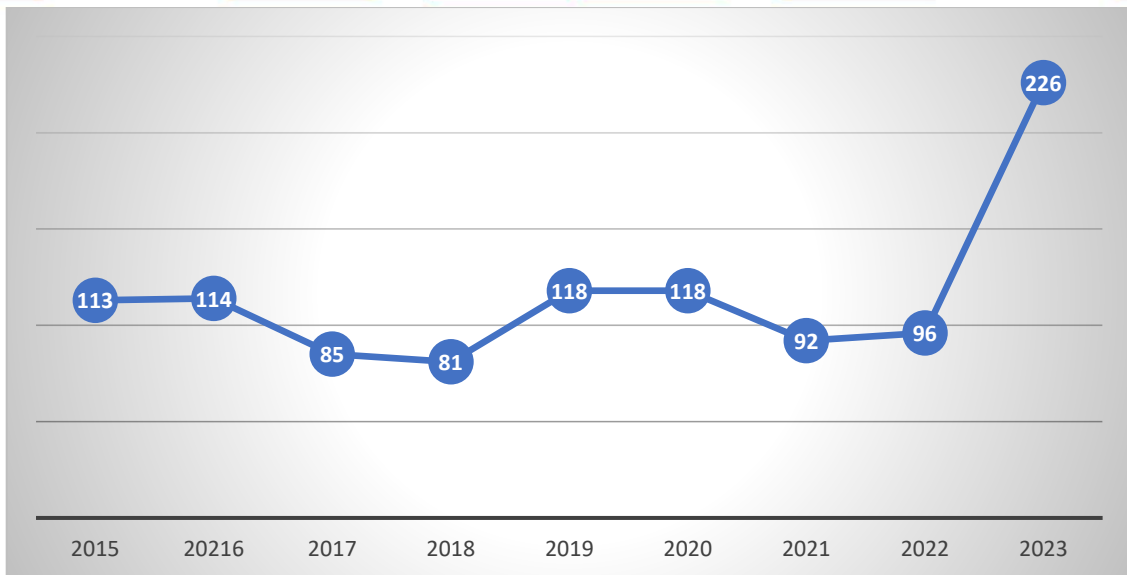
B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak akan terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya, dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan. Sedangkan perlindungan anak ialah Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Banyuwangi diampuh oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

1. Kekerasan Perempuan Dan Anak

Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak kekerasan yang dilakukan seperti penggunaan kekuatan fisik dengan sengaja atau bentuk kekuatan lainnya, ancaman, atau perbuatan nyata, terhadap seseorang, orang lain, atau terhadap suatu kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau memiliki kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, salah perkembangan atau deprivasi.





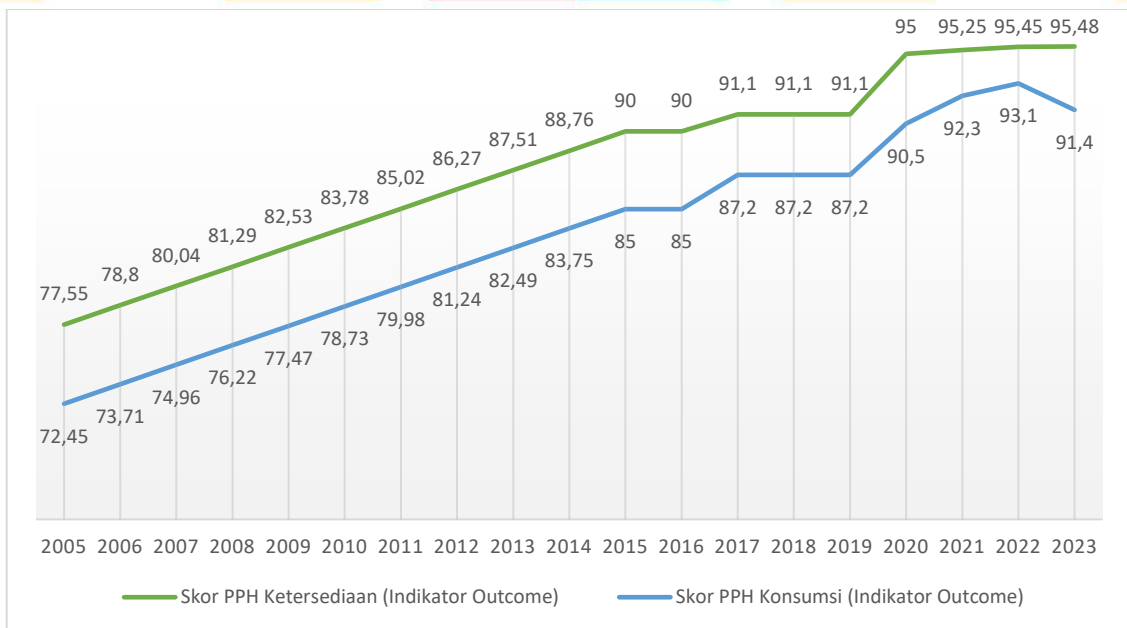
Gambar II. 60 Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi, 2023

Kasus kekerasan pada perempuan dan anak dari kurun waktu ke waktu terus berangsur mengalami penurunan di tahun 2015 sampai tahun 2018. Namun di tahun 2023 mengalami capaian tren kenaikan yang sangat tinggi yakni 226. Kejadian kekerasan pada perempuan dan anak secara umum tidak dapat ditekan hingga mencapai 0%. Terbukti bahwa setiap tahunnya pasti ada kasus kekerasan yang menimpah perempuan dan anak. Kasus yang terjadi seperti pelecehan pada perempuan dan anak dibawah umur. Maraknya kasus pelecehan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi harus ditanggulangi dengan berbagai cara yaitu diantaranya penegakan hukum yang lebih baik. Karena dengan adanya hukum yang mengikat dan keras akan memberikan efek jera ke pelaku tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.

C. Pangan

Kondisi pangan di masa depan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan populasi, perubahan iklim, kemajuan teknologi, dan dinamika ekonomi global. Dengan perkiraan pertumbuhan populasi global, meningkatnya permintaan pangan akan menjadi tantangan utama. Indikator kinerja urusan pangan di Kabupaten Banyuwangi direpresentasikan oleh indikator berikut:



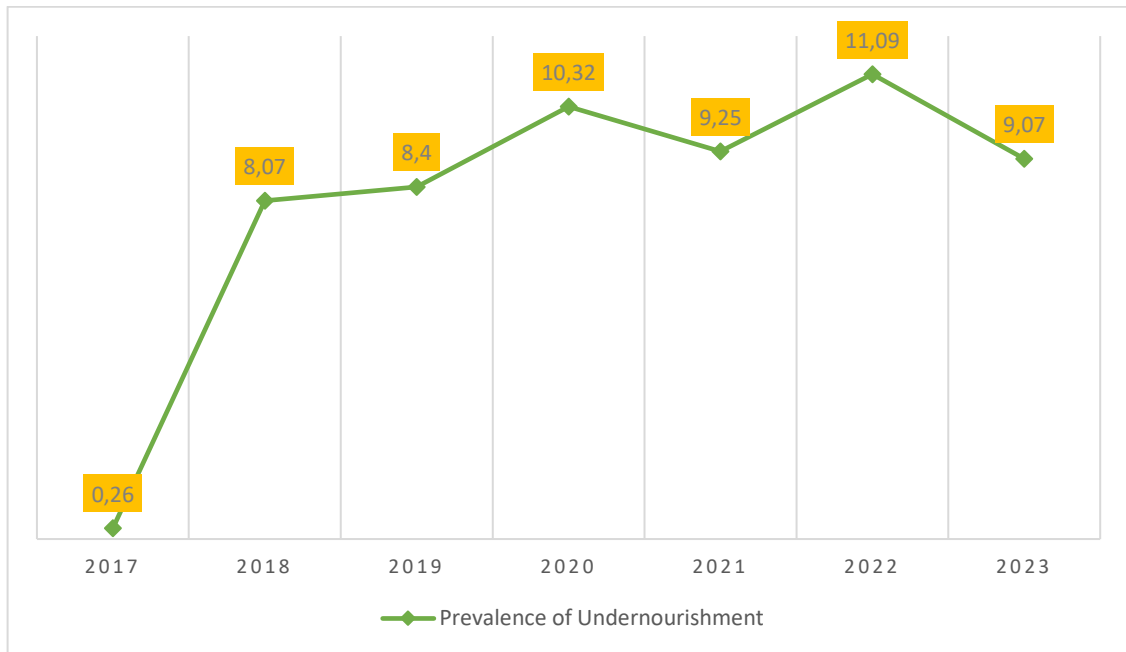
Gambar II. 61 Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2024

Skor PPH ketersediaan dan PPH konsumsi di Kabupaten Banyuwangi memiliki capaian yang terus meningkat selama tahun 2005-2023. Peningkatan kedua indikator ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian di Kabupaten Banyuwangi sehat dan berkembang. Peningkatan skor PPH konsumsi menandakan adanya kenaikan pendapatan perkapita masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk barang dan jasa. Sedangkan peningkatan skor PPH ketersediaan menandakan adanya peningkatan akses yang lebih baik terhadap barang dan jasa internasional sehingga dapat meningkatkan ketersediaan produk luar negeri. Untuk urusan pangan, dapat diuraikan mengenai aspek ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, serta kelembagaan yang mendukung capaian indikator pangan, misalnya skor PPH. Aspek ketersediaan mencakup produksi pangan lokal dan impor, keterjangkauan mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat untuk membeli pangan, pemanfaatan berkaitan dengan kualitas dan nutrisi pangan yang dikonsumsi, dan kelembagaan meliputi peran pemerintah serta lembaga lainnya dalam memastikan ketahanan pangan di daerah tersebut.

Indikator selanjutnya pada urusan pangan yakni Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) digunakan untuk mengukur persentase populasi suatu wilayah yang konsumsi kalorinya berada di bawah tingkat kebutuhan minimum untuk mempertahankan kehidupan yang sehat dan aktif. Indikator ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak orang di suatu wilayah yang tidak

memiliki akses cukup terhadap makanan yang memadai dalam hal jumlah kalori yang dibutuhkan setiap hari.



Gambar II. 62 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Banyuwangi

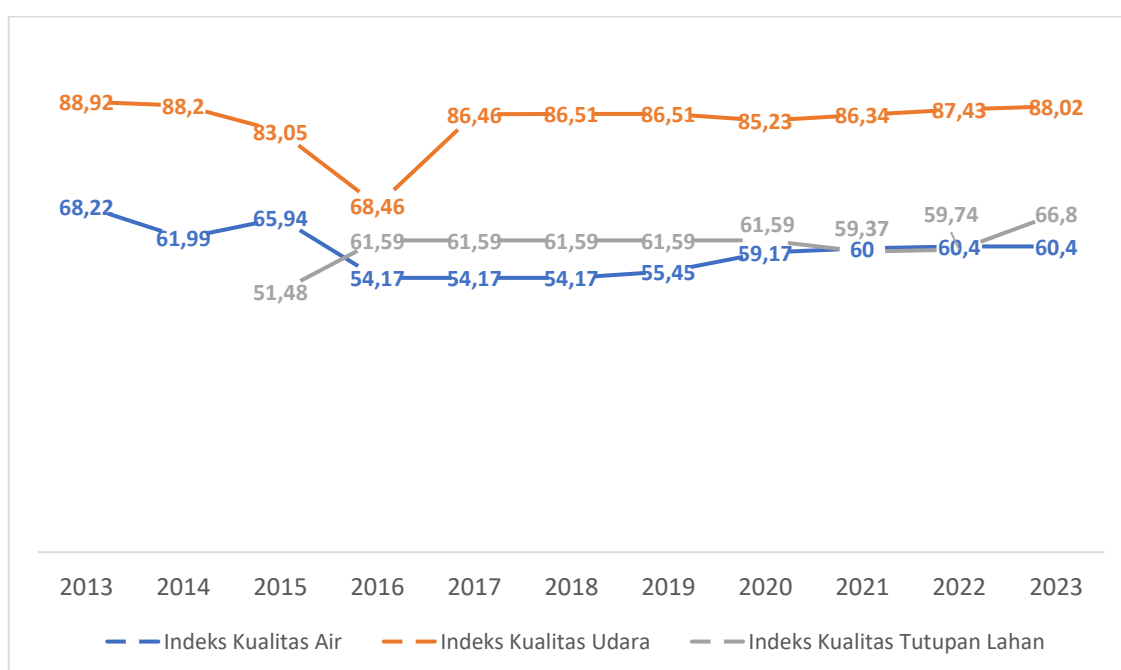
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan tren Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2017 hingga 2023. Pada tahun 2017, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan berada pada angka sangat rendah yaitu 0,28%. Namun, dari tahun 2018 hingga 2019, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana prevalensi naik dari 8,07% pada 2018 menjadi 8,4% pada 2019. Peningkatan ini berlanjut hingga mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan angka 10,32%. Setelah tahun 2020, prevalensi mulai menunjukkan sedikit penurunan, menjadi 9,25% pada 2021. Namun, penurunan ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2022 prevalensi kembali meningkat mencapai 11,09%, yang merupakan angka tertinggi selama periode yang diamati. Pada tahun 2023, terdapat penurunan lagi menjadi 9,07%.

meskipun ada upaya untuk mengurangi ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Banyuwangi, tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Peningkatan prevalensi dari tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan bahwa ada periode ketidakstabilan atau gangguan yang mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi, akses pangan, atau faktor lainnya. Penurunan yang terjadi pada tahun 2023 merupakan sinyal positif, namun upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yang lebih stabil dan memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang cukup dan berkualitas.

D. Lingkungan Hidup


Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di pemerintah daerah menjadi salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang tidak termasuk kedalam pelayanan dasar. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 penyelenggaraan ini terbagi menjadi beberapa sub urusan antara lain perencanaan, kajian, pengendalian, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun, perizinan, pengakuan, pendidikan, penghargaan, pengaduan dan persampahan. Terlepas dari itu penyelenggaraan urusan ini memiliki beberapa indikator yang merepresentasikan kinerja urusan namun terdapat indikator yang cukup makro sehingga dapat secara utuh menggambarkan kinerja seluruh sub urusan dalam Urusan Lingkungan Hidup. Berikut adalah capaian indikator tersebut:



Gambar II. 63 Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, 2024

Gambar di atas menunjukkan adanya fluktuasi pada capaian indeks kualitas air di setiap tahunnya akan tetapi secara trend capaian Indeks Kualitas Air mengalami penurunan sejak tahun 2013 yakni dengan capaian 68,22 dan di tahun 2023 menjadi 60,4. Adapun penurunan capaian indikator ini adalah akibat Pencemaran air di Kabupaten Banyuwangi terutama disebabkan oleh limbah industri dan kegiatan domestik. Limbah industri yang mencemari sungai mengandung parameter seperti *Total Dissolved Solids (TDS)*, *Total Suspended Solids (TSS)*, *Biological Oxygen Demand (BOD)*, dan *Chemical Oxygen Demand (COD)*. Selain itu, pencemaran akibat perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) juga berkontribusi besar terhadap penurunan kualitas air, terutama melalui kontaminasi oleh patogen yang terdapat dalam tinja. Capaian



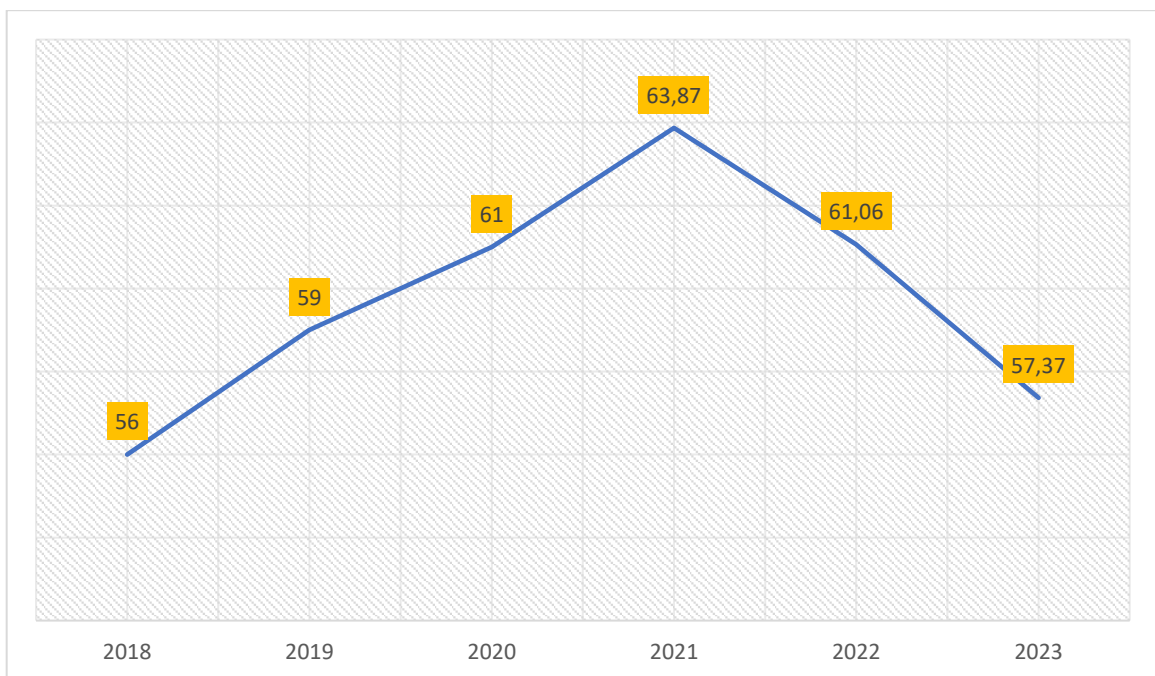
indikator indeks kualitas air pada lingkup nasional memiliki capaian di bawah capaian Kabupaten Banyuwangi yakni di angka 53,88. Meskipun masih berada di atas capaian nasional akan tetapi upaya peningkatan kualitas air perlu dioptimalkan mengingat air itu sendiri merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting. Kualitas air yang baik akan menjamin pada kualitas hidup manusia utamanya pada aspek kesehatan.

Kualitas udara juga memiliki peran yang sama dalam memberikan jaminan kualitas hidup masyarakat. Kualitas udara di Kabupaten Banyuwangi cenderung cukup stabil pada rentang 85 sampai dengan 89. Akan tetapi di tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan, adapun penurunan yang terjadi adalah dikarenakan kondisi iklim dan curah hujan. Berdasarkan capaian nasional pada 2022 indeks kualitas udara mencapai angka 88,06 sehingga capaian Kabupaten Banyuwangi masih berada di bawah capaian nasional akan tetapi melihat fluktuasi beberapa tahun kebelakang maka kedepan capaian ini akan berubah dan dimungkinkan melebihi capaian secara nasional. Adapun bahan pencemar udara yang paling dominan di Kabupaten Banyuwangi berasal dari parameter SO₂ (Sulfur Dioksida) dan NO₂ (Nitrogen Dioksida). Lokasi pemantauan yang menunjukkan konsentrasi tinggi antara lain Kawasan Industri Muncar, Terminal Brawijaya, dan Perkampungan Tukang Kayu. Konsentrasi SO₂ di Perkampungan Tukang Kayu mencapai 1.407 µg/Nm³, sedangkan NO₂ mencapai 1.167 µg/Nm³ di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas udara adalah Polusi, Perubahan iklim, curah hujan, kecepatan angin dan aktivitas manusia yakni segala bentuk kegiatan manusia yang berdampak pada lingkungan seperti halnya transportasi beremisi, industri, pertanian dan pembangunan.

Indikator lain yang merupakan komponen dari IKLH adalah indikator Indeks kualitas Lahan, IKL merupakan indikator yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan vegetasi non hutan, adapun beberapa faktor yang seringkali mempengaruhi penurunan IKL secara nasional antara lain kebakaran hutan, perambahan, konversi lahan dan perubahan iklim. Peningkatan IKL dapat dilakukan melalui upaya reboisasi atau penghijauan, konservasi, rehabilitasi dan restorasi lahan. Capaian IKL menunjukkan angka yang fluktuatif, peningkatan signifikan terjadi ditahun 2016 sedangkan capaian tersebut kembali mengalami penurunan di tahun 2021 namun meningkat Kembali pada tahun 2023 beberapa faktor penyebab adalah dikarenakan pembangunan jalan yang dioptimalkan serta beberapa sarana prasarana dalam menunjang percepatan pemulihan akibat pandemi covid.



Selain IKLH beserta indikator komponen di dalamnya. Pemerintah Daerah memiliki wewenang terhadap penanganan masalah persampahan dimana masalah ini berkaitan secara langsung terhadap kondisi lingkungan hidup masyarakat. melalui pengelolaan persampahan masyarakat diharapkan dapat berperan menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang terbuang pada fasilitas persampahan pemerintah selanjutnya dibawa menuju TPST untuk diolah hingga menyisakan residu yang akan dibuang di TPA. Sampah di TPA tidak serta merta dilakukan penimbunan saja akan tetapi terdapat teknis khusus yang terstandarisasi sehingga dampak adanya persampahan dapat diminimalisir bahkan kedepannya dapat dimanfaatkan kembali hasil olahan sampah tersebut. Berikut capain kinerja persentase sampah yang dikelola di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar II. 64 Persentase Sampah yang Dikelola di Kabupaten Banyuwangi

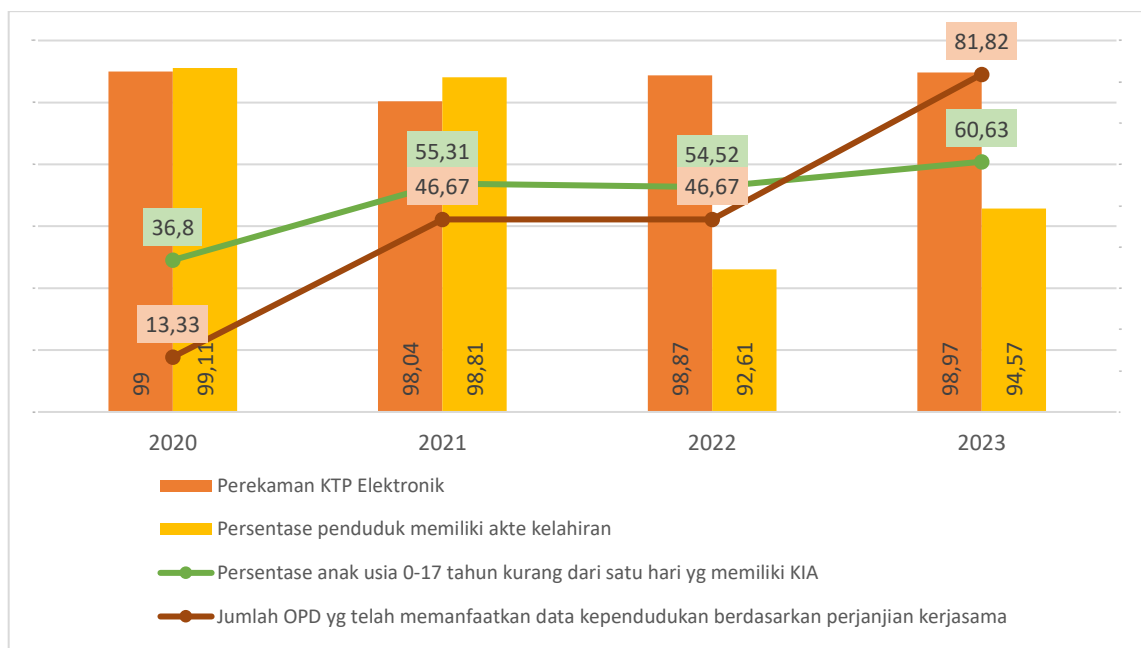
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, 2024

Berdasarkan grafik tersebut menggambarkan persentase sampah yang dikelola di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, persentase sampah yang berhasil dikelola berada pada angka 56%. Angka ini mengalami peningkatan berturut-turut pada tahun 2019 menjadi 59% dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan persentase 63,87%. Namun, setelah mencapai puncaknya, terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 61,06% dan penurunan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2023, dengan persentase pengelolaan sampah hanya sebesar 57,37%. Meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam pengelolaan sampah hingga tahun 2021, Kabupaten Banyuwangi menghadapi tantangan

dalam mempertahankan keberhasilan tersebut, yang ditandai dengan penurunan persentase pengelolaan sampah dalam dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan strategi pengelolaan sampah agar persentase pengelolaan dapat kembali meningkat dan berkelanjutan.

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan wajib non dasar bagi masyarakat. Mengingat dinamika penduduk setiap daerah, maka diperlukan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 mengamanatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah pengampu urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Berikut merupakan indikator yang merepresentasikan capaian kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar II. 65 Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, 2024

Indikator pertama terkait perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, turun dari 99% di tahun 2020 menjadi 98.97% di tahun 2023. Tren penurunan juga terjadi pada indikator terkait



persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran, turun signifikan dari 99.11% di tahun 2023 menjadi 94.57%. Sebaliknya, pada indikator persentase anak usia 0-17 tahun kurang dari satu hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) naik dari angka 36.8% di tahun 2020 menjadi 60,63% di tahun 2023 meskipun sempat menyentuh angka 55.31% di tahun 2021. Indikator jumlah perangkat OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama juga meningkat dari 13.33% di tahun 2023 menjadi 81,82 di tahun 2021 dan stagnan hingga tahun 2022.

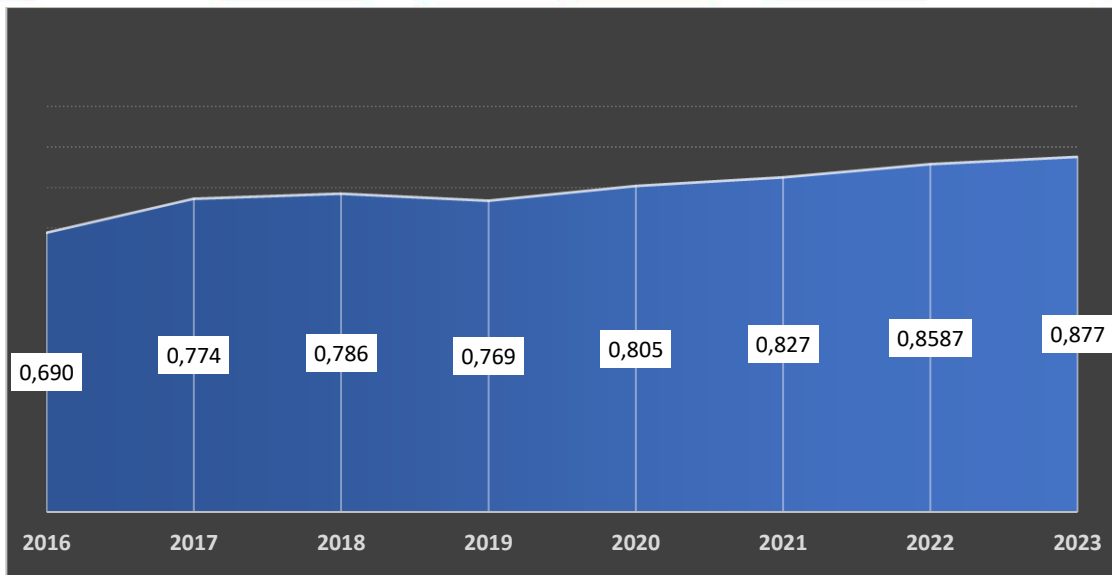
Capaian keempat indikator di atas belum bisa dikatakan maksimal dikarenakan masih terdapat hambatan dalam penyelenggaraannya. Permasalahan terkait cakupan dokumen tidak maksimal akibat masih adanya data ganda, orangtua tunggal, serta tidak adanya dokumen penduduk. Hal ini dilatarbelakangi kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya data kependudukan. Dari segi sumber daya layanan, jumlah petugas di bagian *frontline* tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pemohon, ditambah penerapan digitalisasi masih belum bisa maksimal sehingga penduduk masih bergantung pada layanan konvensional. Selain itu, masih adanya ketergantungan terhadap dokumen fisik, akan tetapi di lapangan masih banyak pemanfaatan dokumen yang belum sesuai dengan peruntukannya sehingga menghambat perluasan data.

Isu dan tantangan bagi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Banyuwangi adalah terkait pemupukan kesadaran bagi masyarakat Banyuwangi akan pentingnya dokumen adminduk bagi kesehariannya. Integrasi digitalisasi layanan juga harus disiapkan, baik dari segi sumber daya, sarana prasarana hingga kesiapan bagi masyarakat dan penyelenggara layanan. Serta diperlukan langkah optimalisasi pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di setiap lini layanan publik maupun umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) merupakan salah satu urusan pelayanan wajib non-dasar yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi. Urusan PMD merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dan desa mencakup berbagai kegiatan seperti pengembangan potensi lokal, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, serta penguatan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat. Kinerja urusan PMD direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:





Gambar II. 66 Indeks Desa Membangun di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, 2024

Data Indeks Desa Membangun di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, tumbuh dari 0.690 hingga mencapai 0.877. Meskipun terjadi fluktuasi pada tahun-tahun tertentu, secara keseluruhan, terdapat indikasi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa. Tren kenaikan ini didukung oleh komitmen dari pimpinan daerah melalui pembentukan regulasi yang mendukung proses pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2020-2024 untuk pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyuwangi, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Selingkar AlasPurwo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2025 dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Selingkar Sukomade Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2025.

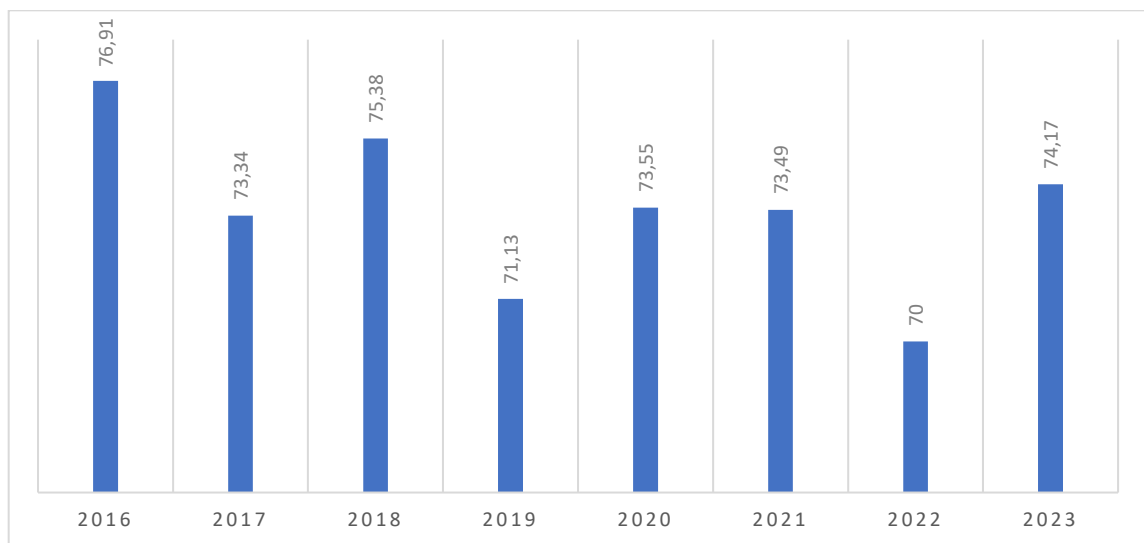
Meskipun demikian, terdapat hal-hal yang masih menjadi penghambat dalam setiap komposit Indeks Desa Membangun. Pada dimensi ekonomi, belum optimalnya Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) dapat diidentifikasi sebagai potensi penghambat, mengingat peran Bumdes dalam pengembangan ekonomi lokal. Perlu perhatian khusus terhadap Bumdes Bersama yang masih mengalami kendala ego sektoral, karena kolaborasi yang efektif di antara Bumdes dapat menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi pembangunan desa. Kawasan perdesaan, seperti Selingkar Ijen, Selingkar Sukomade, dan Alaspurwo, memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata berbasis pengembangan masyarakat dan ekowisata.

Namun, stagnansi yang terjadi di dua kawasan perdesaan baru menyoroti perlunya tindak lanjut dari Badan Kerjasama Antar Desa terhadap Rencana Pembangunan dan Kegiatan Pembangunan (RPKP) untuk memastikan kelanjutan program pembangunan.

Pada dimensi sosial, masih danya keterbatasan akses listrik di beberapa wilayah, khususnya di Sukomade, menjadi tantangan penting yang perlu diatasi untuk memastikan kesetaraan dalam akses infrastruktur dasar. Selain itu, potensi konflik sosial yang minim, kecuali pada saat pemilihan kepala desa, memberikan gambaran positif tentang stabilitas sosial di tingkat desa. Sedangkan pada dimensi lingkungan meskipun bukan menjadi kewenangan daerah, yang perlu diperhatikan adalah terkait minimnya pengolahan sampah perdesaan. Secara keseluruhan, analisis data menunjukkan progres positif dalam pembangunan desa di Kabupaten Banyuwangi. Namun, upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan peran Bumdes, mengatasi kendala infrastruktur, dan memastikan kelanjutan inisiatif pembangunan di kawasan perdesaan. Langkah-langkah ini dapat membantu memperkuat fondasi pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah upaya terstruktur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatur pertumbuhan jumlah penduduk suatu wilayah. Keluarga berencana diarahkan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas, mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, serta memastikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

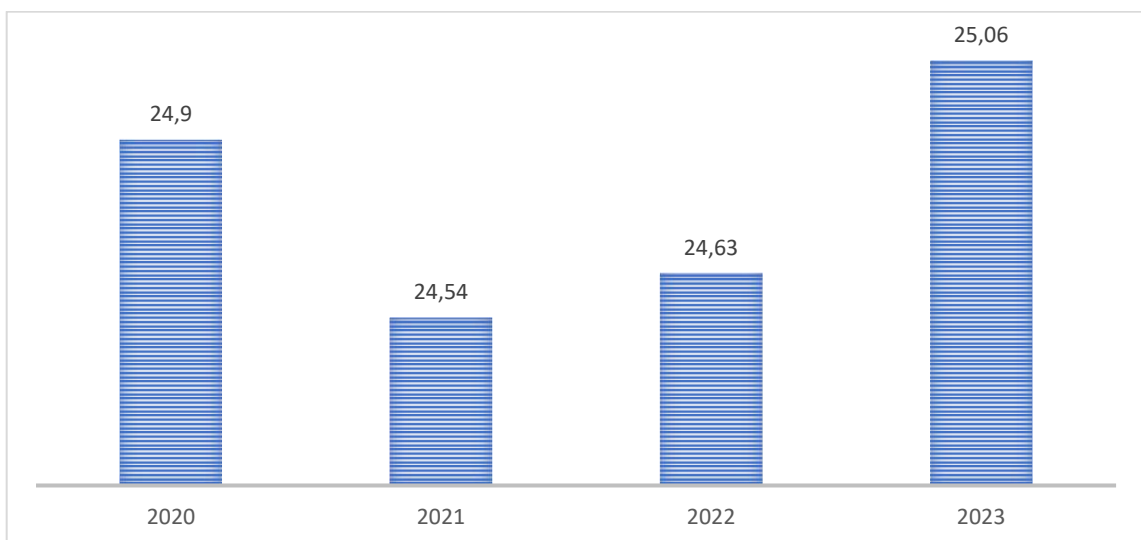


Gambar II. 67 Cakupan KB Aktif di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi, 2024

Cakupan KB Aktif mengacu pada persentase pasangan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi atau melakukan tindakan untuk mencegah kehamilan. Indikator ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak pasangan yang secara aktif terlibat dalam upaya perencanaan keluarga. Cakupan KB aktif Kabupaten Banyuwangi jika dilihat dari trend nya mengalami penurunan. Penurunan di tahun 2023 menjadi 74,17, jika dibandingkan dengan tahun 2016 sampai tinggi penggunaak kb aktif sebesar 76,91.

Indikator selanjutnya mengacu pada persentase perempuan yang menikah atau melibatkan diri dalam ikatan perkawinan pertama mereka sebelum mencapai usia 21 tahun. Indikator ini merupakan ukuran penting untuk memahami tren pernikahan dini dan dampaknya terhadap kesejahteraan perempuan, termasuk risiko kesehatan dan kesejahteraan anak. Usia kawin pertama dibawah 21 tahun di tahun 2020 sebesar 24.9 dengan kecenderungan penurunan. Ditahun 2021 mengalami penuruan dan mengalami tren kenaikan hingga di tahun 2023 mencapai 25.06.



Gambar II. 68 Usia Kawin Pertama (UKP) dibawah 21 Tahun di Kabupaten Banyuwangi

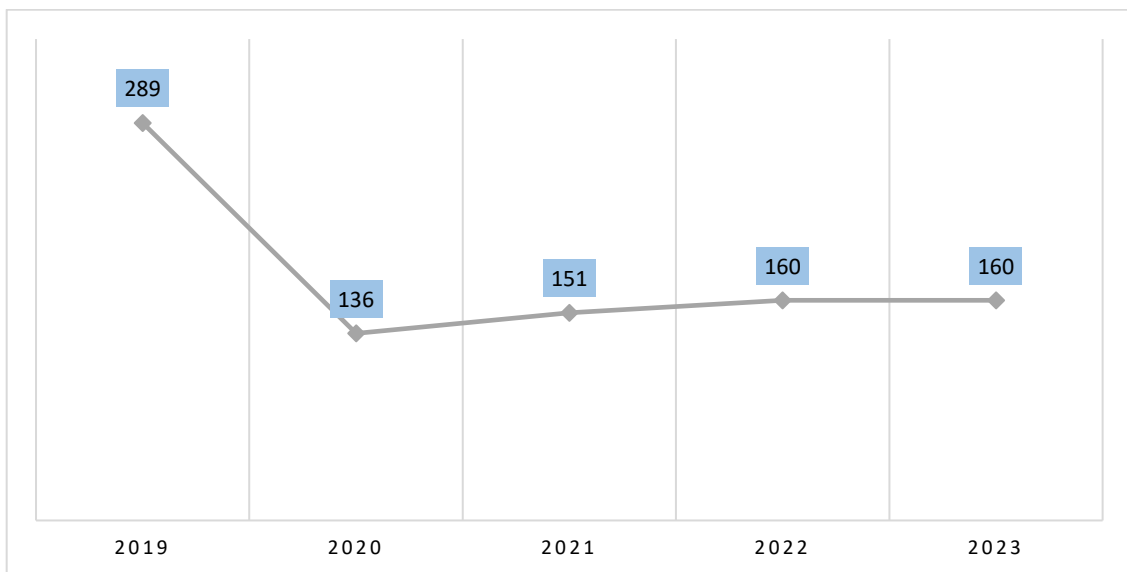
Sumber: Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi, 2024

Permasalahan pokok pada urusan keluarga berencana yaitu Kerentanan kualitas keluarga dapat menjadi faktor yang berkontribusi pada peningkatan perilaku menyimpang di kalangan individu. Permasalahan ini melibatkan berbagai faktor yang dapat mereduksi kemampuan keluarga untuk memberikan lingkungan yang stabil dan mendukung perkembangan anak-anak.

H. Perhubungan

Dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi diperlukan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas yang handal dan berkualitas, infrastruktur perhubungan mempunyai peran yang sangat strategis dalam

menunjang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Kabupaten Banyuwangi. Upaya untuk meningkatkan pelayanan dan ketersediaan sarana prasarana transportasi yang handal dan berkualitas diantaranya melalui pembangunan sistem jaringan perhubungan yang terintegrasi, pengembangan sistem transportasi antar moda, pengembangan angkutan umum massal (*Mass Rapid Transit*) di wilayah aglomerasi perkotaan, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan, serta peningkatan keselamatan lalu lintas yang dilakukan secara terpadu antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.



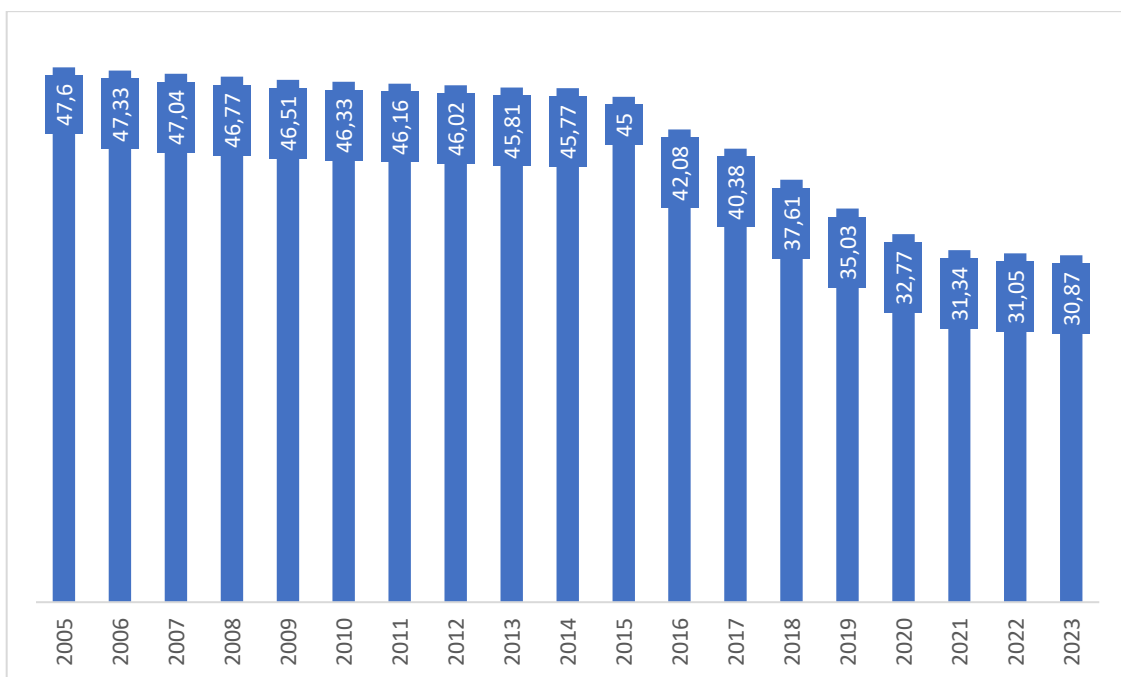
Gambar II. 69 Jumlah Angkutan Umum di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2023

Sumber: Banyuwangi Satu Data, 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah angkutan umum di Kabupaten Banyuwangi mengalami tren penurunan signifikan dari tahun 2019 hingga 2020, di mana jumlah angkutan umum menurun dari 289 unit pada tahun 2019 menjadi 136 unit pada tahun 2020. Setelah penurunan tajam ini, terjadi peningkatan kecil pada tahun-tahun berikutnya, dengan jumlah angkutan umum naik menjadi 151 unit pada tahun 2021 dan kemudian stabil pada 160 unit pada tahun 2022 dan 2023. Tren ini mengindikasikan adanya perubahan dalam penggunaan transportasi umum oleh masyarakat. Penurunan moda angkutan umum bisa akibat kerusakan dan adanya pergeseran preferensi masyarakat terhadap moda transportasi lain seperti pengembangan infrastruktur transportasi alternatif seperti angkutan *online*. Namun, stabilisasi jumlah angkutan umum setelah 2021 menunjukkan adanya permintaan yang tetap untuk layanan ini, meskipun pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan sebelum 2020. Indikator lainnya yang merepresentasikan kinerja urusan perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Indeks Angka kecelakaan Lalu lintas (per 100.000 penduduk)

Menurut (Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) Kecelakaan lalu-lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Ada empat faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor Kelalaian Pengguna Jalan, kedua adalah faktor kendaraan, ketiga Faktor Jalan dan yang terakhir adalah faktor Kondisi Lingkungan. Kombinasi dari keempat faktor itu bisa saja terjadi, antara Pengguna Jalan dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor Kondisi lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Atas dasar itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat membuat langkah penanganan permasalahan odol dengan melaksanakan kegiatan, di antaranya normalisasi kendaraan bermotor, mewajibkan penggunaan bukti lulus uji elektronik kendaraan bermotor, mendorong implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, penegakan hukum, dan membangun kemitraan keselamatan.



Gambar II. 70 Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas per 100.000 penduduk di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, 2024

Berdasarkan pada data grafik diatas maka dapat diketahui bahwa indeks angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyuwangi terus mengalami penurunan. Hal

tersebut dikarenakan Program kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas, pemeliharaan dan pemasangan fasilitas LLAJ pada lokasi-lokasi rawan laka. Lalu dengan adanya program dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menjelaskan, melalui Ditjen Perhubungan Darat memiliki program Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) yang pada tahun ini mengusung tema "We Demand Safe and Sustainable Mobility". Program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas dan penggunaan transportasi aktif. Namun ada beberapa hal yang menghambat tercapainya penurunan angka kecelakaan lalu lintas yakni Menurunnya kepatuhan masyarakat untuk tertib berlalu lintas, Kerusakan fasilitas keselamatan karena faktor alam, Kurangnya anggaran pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana jalan.

2. Volume/ Capasitas (V/C) Rasio Jalan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Kapasitas Jalan atau kapasitas suatu ruas jalan dalam satu sistem jalan raya merupakan jumlah kendaraan maksimum yang memiliki kemungkinan yang cukup untuk melewati ruas jalan tersebut (dalam maupun dua arah) dalam periode waktu tertentu dan dengan kondisi jalan dan lalu lintas yang umum.



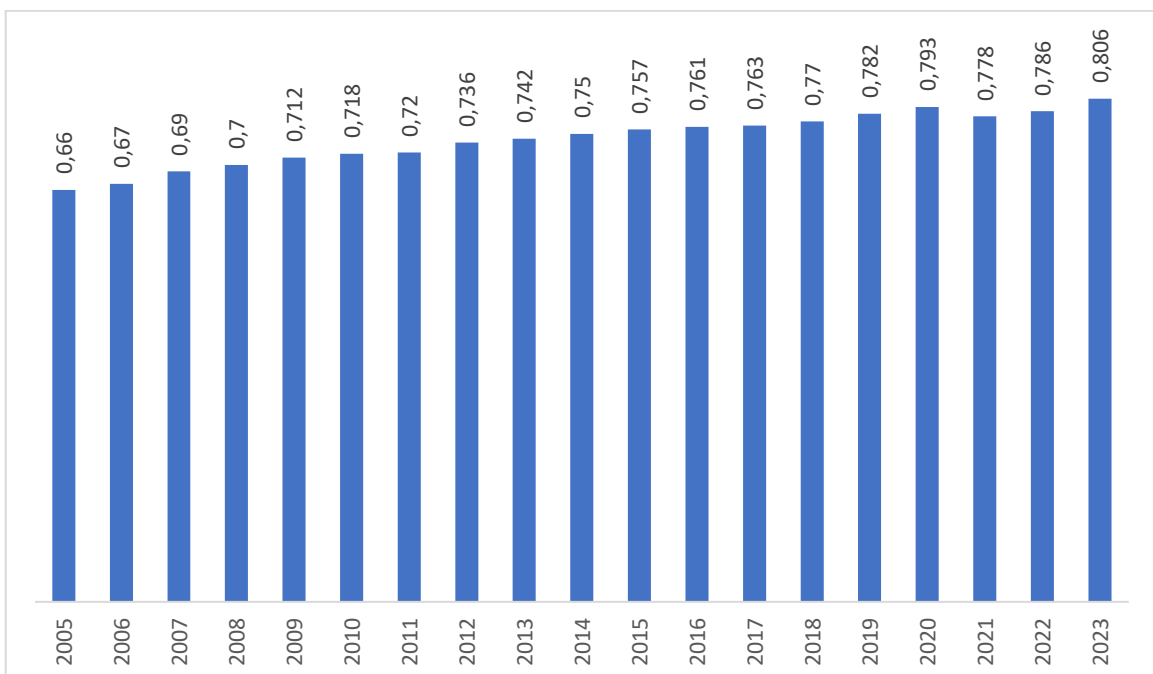
Gambar II. 71 Volume/Capacity (V/C) Rasio Jalan di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, 2024

Kelancaran dan kenyamanan serta keselamatan berkendara juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan kondisi jalan. Data yang tertera diatas bersumber dari Perhitungan rata-rata v/c rasio di ruas Jalan Kabupaten, Jalan Provinsi dan Jalan Nasional, berdasarkan survey LHR per Tahunnya, serta rumusan perhitungan didasarkan pada MKJI. Namun data diatas menunjukkan bahwa v/c rasio jalan di Kabupaten Banyuwangi terus mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan oleh Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas dalam upaya peningkatan kelancaran lalu lintas, pengawasan dan pengendalian dampak lalu lintas pada rencana bangunan baru serta program peningkatan sarana jalan meliputi pengaspalan, perbaikan sarana dan pelebaran jalan.


3. Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota

Pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan konektivitas seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus berupaya mewujudkan infrastruktur transportasi yang tepat guna. Untuk itu lakukannya pengukuran Rasio konektivitas transportasi Kabupaten/ Kota ialah merupakan perbandingan layanan transportasi pada Kawasan Kabupaten termasuk kedalam prioritas Nasional terhadap jumlah Kawasan kabupaten prioritas nasional RPJMN 2020/ 2024 yang telah ditetapkan. Layanan transportasi kabupaten dapat berupa subsidi layanan angkutan kabupaten dengan skema *Buy The Service*.



Gambar II. 72 Rasio Konektivitas Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, 2024



Berdasarkan data yang tertera diatas maka dapat diketahui bahwa rasio konektivitas Kabupaten/Kota di Kabupaten Banyuwangi terus mengalami peningkatan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan juga bertambah pula jumlah kendaraan yang ada sehingga akan mempengaruhi mobilitas di jalan. Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian rasio konektivitas di Kabupaten Banyuwangi ialah Jumlah pengguna angkutan penyeberangan per tahunnya, Kondisi cuaca di Selat Bali yang mempengaruhi ritasi atau jumlah kapal yang beroperasi dan data kebutuhan trayek untuk AKDP dan ASDP. Selain itu, konektivitas juga dihambat oleh beberapa hal seperti Cuaca buruk dan ombak yang berakibat pada berhentinya layanan angkutan penyeberangan. Lebih lanjut guna mewujudkan konektivitas infrastruktur diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pengawasan dari legislatif. Sinergitas dan kolaborasi yang baik dengan sejumlah pihak terkait, khususnya pemerintah daerah diperlukan agar program pembangunan infrastruktur transportasi dapat berjalan dengan optimal.

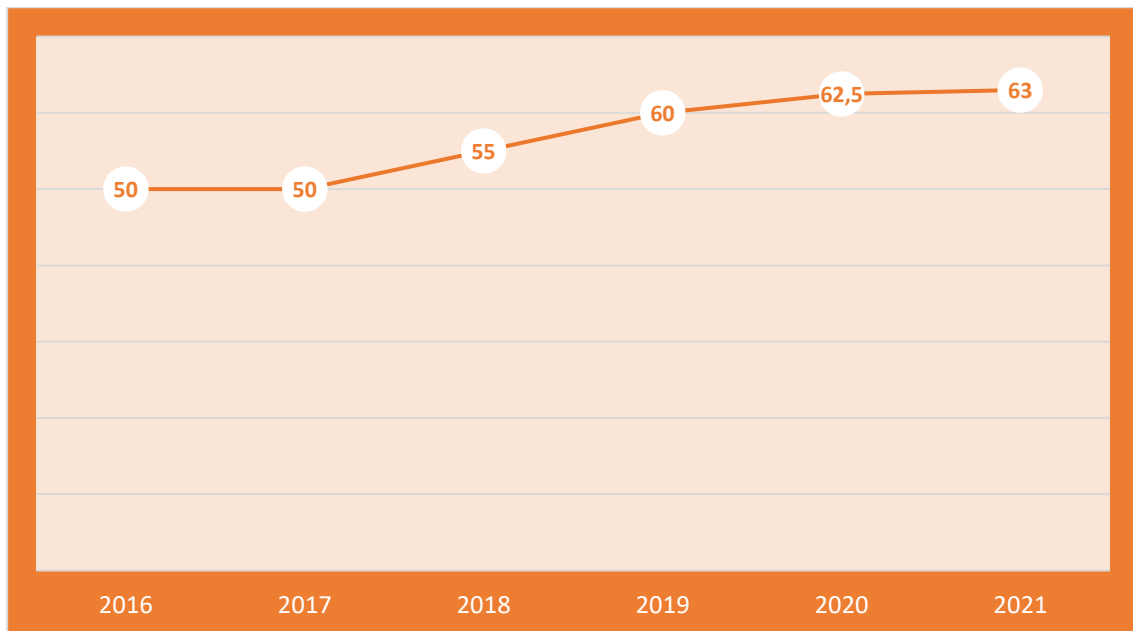
I. Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika memiliki peranan sentral dalam pembentukan masyarakat modern yang terkoneksi secara digital. Dalam era di mana teknologi informasi mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi, urusan ini menjadi pilar utama dalam pemerintahan yang efektif dan inklusif. Pengelolaan teknologi informasi dan jaringan komunikasi yang handal membentuk landasan untuk pengembangan layanan e-government, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat. Perlindungan data menjadi semakin penting seiring dengan bertumbuhnya jumlah informasi pribadi yang dikumpulkan dan diproses secara digital. Dalam konteks inovasi digital, urusan komunikasi dan informatika juga menjadi ajang untuk mendorong ide-ide kreatif yang mempercepat kemajuan ekonomi dan pelayanan publik. Dengan demikian, fokus pada aspek-aspek ini dalam urusan komunikasi dan informatika dapat membentuk fondasi yang kokoh untuk kemajuan berkelanjutan dan inklusif di daerah.

Urusan ini di Kabupaten Banyuwangi direpresentasikan dengan beberapa indikator pembangunan, diantaranya adalah persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik dan persentase aplikasi it yang mendukung city branding dan layanan publik yang berfungsi baik. Dari data persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik di Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2016 hingga 2022, terlihat adanya peningkatan bertahap dalam kinerja sistem. Awalnya, pada tahun 2016, tingkat



fungsionalitas aplikasi e-government sebesar 50%, dan angka tersebut bertahan di tingkat yang sama pada tahun 2017. Namun, terdapat peningkatan pada tahun 2018 menjadi 55%, diikuti oleh peningkatan lebih lanjut pada tahun 2019 menjadi 60%. Pada tahun 2020 dan 2021, persentase tersebut terus meningkat, mencapai 62,5% dan 63% berturut-turut.



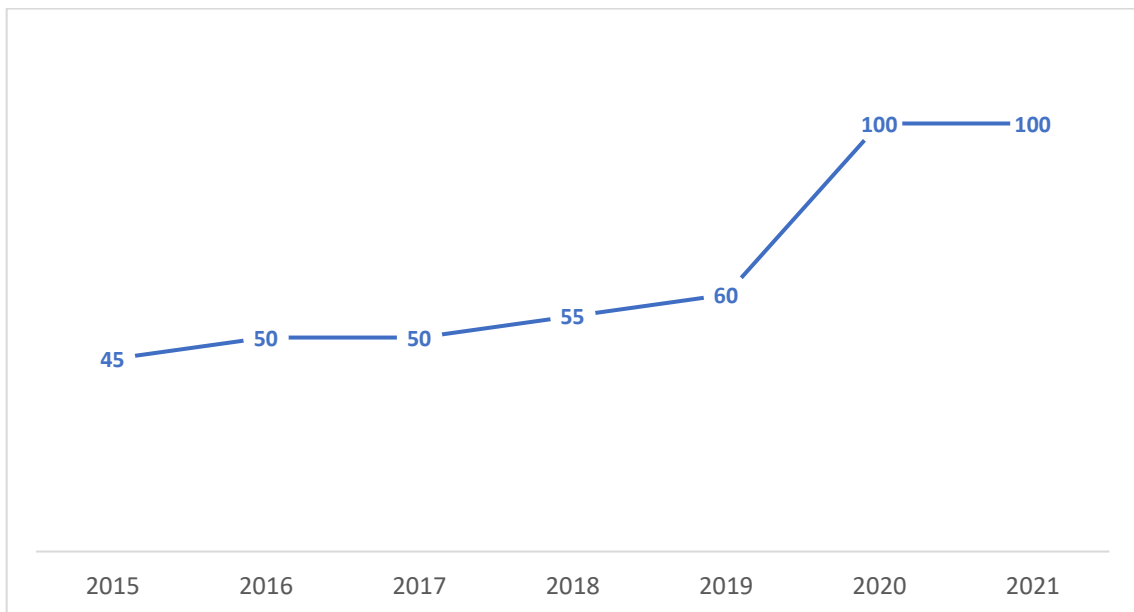
Gambar II. 73 Persentase Aplikasi e-Government yang Berfungsi Baik di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, 2024

Tren peningkatan ini dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem e-government. Peningkatan kinerja tersebut mungkin hasil dari upaya dalam memperbaiki dan meningkatkan aplikasi, serta penyesuaian terhadap kebutuhan yang berkembang dari masyarakat dan lingkungan teknologi. Meskipun tingkat kinerja aplikasi e-government cenderung stabil pada tingkat 50-60% pada empat tahun pertama, strategi dan langkah-langkah yang diambil pada periode berikutnya berhasil membawa dampak positif.

Dalam konteks kondisi saat ini, penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi rutin terhadap sistem e-government, memperhatikan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, dan memastikan pemeliharaan serta pembaruan sistem secara berkala. Langkah-langkah inovatif, seperti penerapan teknologi baru dan pelibatan masyarakat dalam pengembangan aplikasi, dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan manfaat aplikasi e-government di masa mendatang.

Data persentase aplikasi IT yang mendukung City Branding dan layanan publik yang berfungsi baik di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2015 hingga 2021 memberikan gambaran perubahan yang signifikan. Pada tahun 2015, tingkat keterlibatan aplikasi IT dalam City Branding dan layanan publik diukur dengan persentase 45%, menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan. Tren positif mulai terlihat pada tahun 2016 hingga 2018, di mana persentase tersebut stabil pada kisaran 50-55%. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2019 dan 2020, di mana persentase mencapai 60%, menunjukkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan aplikasi IT dalam mendukung citra daerah dan layanan publik.

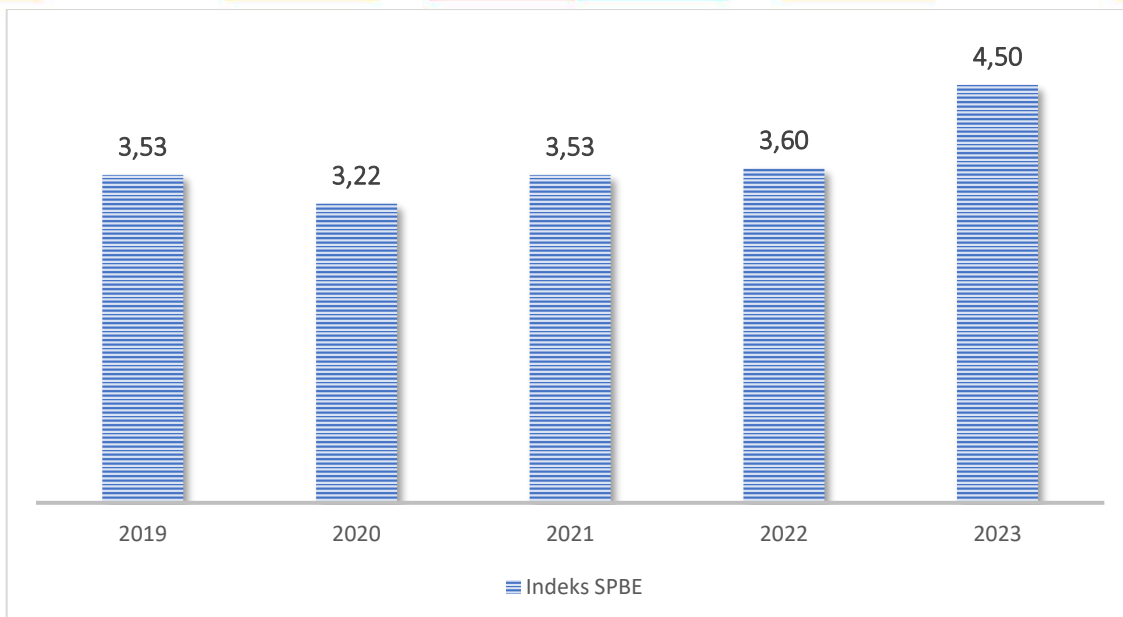


Gambar II. 74 Persentase Aplikasi IT yang Mendukung *City Branding* dan Layanan Publik yang Berfungsi Baik di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, 2024

Peningkatan yang paling mencolok terjadi pada tahun 2020-2021, di mana persentase mencapai 100%. Peningkatan yang drastis ini bisa mencerminkan adopsi teknologi yang lebih luas, implementasi aplikasi yang inovatif, atau pembaruan signifikan dalam infrastruktur IT. Namun, perubahan sebesar ini juga mungkin menimbulkan pertanyaan tentang metodologi pengukuran atau kemungkinan perubahan besar dalam strategi City Branding dan penyediaan layanan publik.

Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Berikut merupakan capaian Indeks SPBE Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2019- 2023 ialah sebagai berikut:




Gambar II. 75 Indeks SPBE Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, 2024

Selanjutnya indikator yang merepresentasikan kinerja urusan komunikasi dan informasi adalah Indeks SPBE. Pemanfaatan teknologi informasi telah banyak diimplementasikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) dalam mengembangkan dan meningkatkan layanannya, namun masih terkendala dalam penyelenggaraan yang belum terintegrasi, terpadu, dan berkesinambungan. Capaian indeks SPBE Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dalam kondisi yang meningkat, hingga mencapai 4,50 di tahun 2023. Capaian ini menunjukkan hal yang positif, Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai kabupaten terbaik dalam indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Kabupaten Banyuwangi mendapatkan indeks sebesar 4,50 dari skala 5 atau yang tertinggi untuk kategori kabupaten seluruh Indonesia di tahun 2023. Penilaian SPBE terdiri atas 47 indikator yang membentuk ekosistem digital di suatu instansi. Penilaian dilakukan dengan melibatkan 30 perguruan tinggi untuk menjamin prinsip independen dan obyektif, yang lalu difinalisasi oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional yang terdiri atas Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, BSSN, dan BRIN. Sejumlah indikator yang dinilai antara lain perencanaan strategis, inovasi proses bisnis, manajemen data, audit keamanan, pengadaan barang/jasa berbasis elektronik, layanan pengaduan publik, pemantauan kinerja pegawai, manajemen aset, kolaborasi penerapan SPBE, hingga layanan publik sektoral seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Banyuwangi unggul pada seluruh domain penilaiannya. Pada domain



kebijakan meraih 4,70; domain tata kelola 4,20; domain manajemen 3,91; dan domain layanan 4,82.

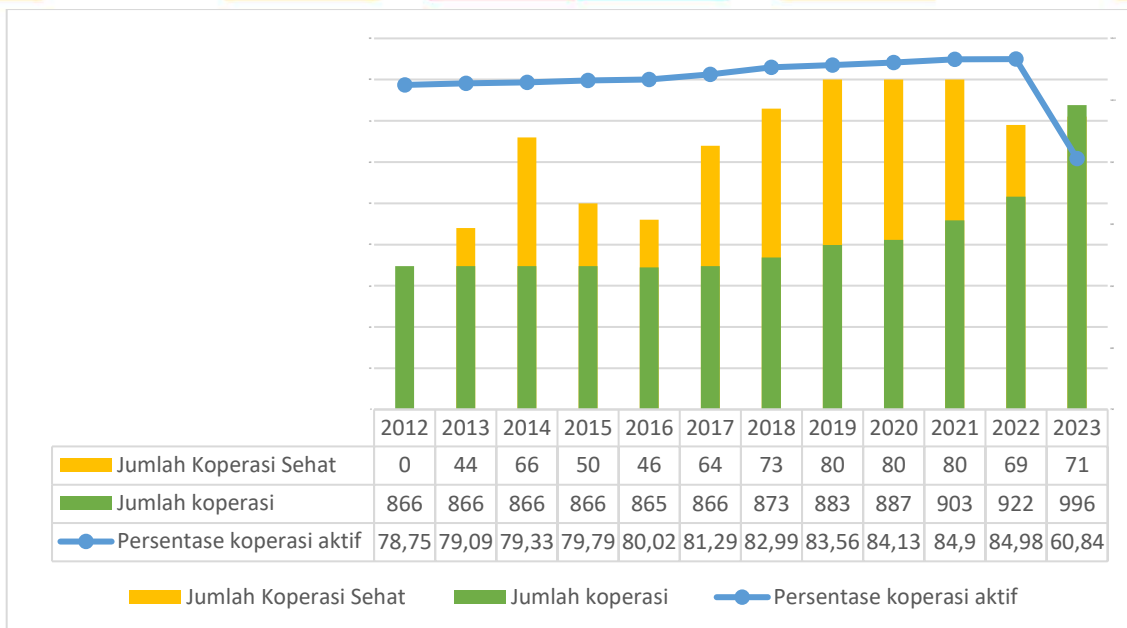
Beberapa kondisi perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan ini kedepannya, diantaranya jaringan intra pemerintah daerah belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh Desa di Kabupaten Banyuwangi serta risiko peretasan dan pelanggaran data yang harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa informasi pribadi dan rahasia tetap terlindungi.

J. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan usaha mikro di wilayah tersebut merupakan elemen kunci dalam menggerakkan perekonomian masyarakat setempat, terutama bagi individu dengan tingkat ekonomi yang terbatas di Kabupaten Banyuwangi. Koperasi adalah alat yang sangat efisien dalam mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat serta memperkuat keberlanjutan ekonomi daerah. Meskipun usaha mikro saat ini mungkin rentan, peran yang dimainkan oleh usaha mikro dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat adalah sangat penting. Bahkan, usaha mikro memiliki kemampuan langsung untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di antara masyarakat.

Kinerja penyelenggaraan urusan koperasi usaha mikro salah satunya fokus terhadap koperasi dimana secara kuantitas mengalami peningkatan, merujuk terhadap data tahun 2011 hingga tahun 2023. Meskipun data terkesan anomali, khususnya pada tahun 2011 hingga tahun 2017 dimana jumlah koperasi tidak berubah. Hal tersebut dikonfirmasi karena lemahnya pendataan koperasi yang mana pada tahun tersebut hanya mengandalkan data survey nasional pada tahun 2011, namun jumlah koperasi dari tahun 2011 hingga saat ini meningkat. Tahun 2011 dengan jumlah koperasi sebanyak 866 saat ini telah meningkat dengan total 922 jumlah koperasi ditahun 2022. Berikut merupakan gambaran data jumlah koperasi, koperasi aktif, dan koperasi sehat.





Gambar II. 76 Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, 2024

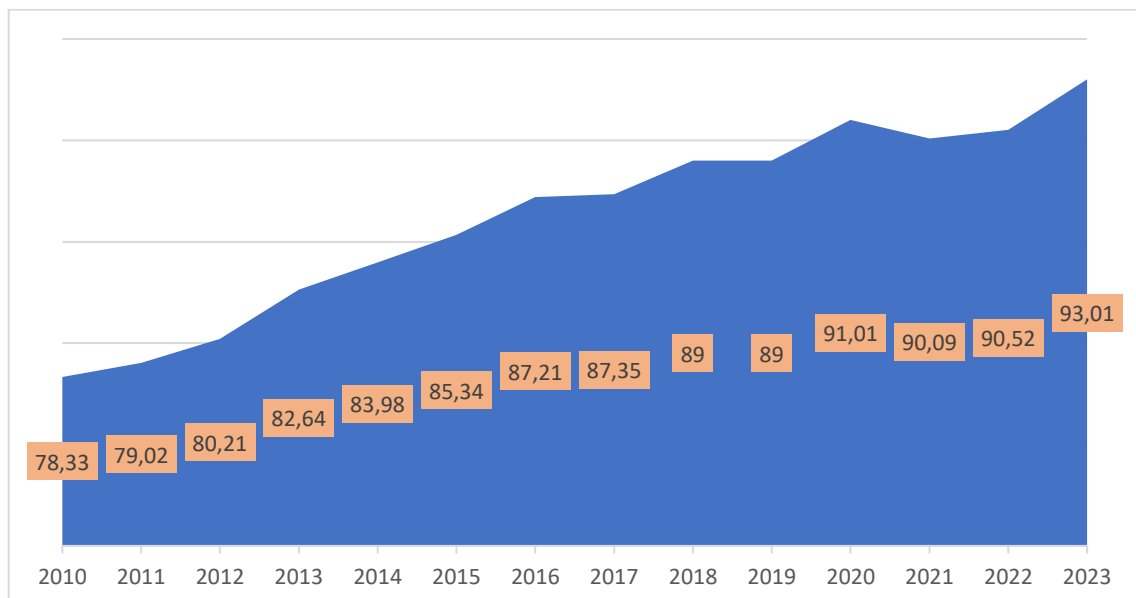
Data diatas menunjukkan bahwa diantara 996 koperasi pada tahun 2023 terdapat penurunan mencapai 60,84 % atau 784 koperasi masuk dalam kategori koperasi aktif. Artinya 39,26% diantara total jumlah koperasi masuk dalam kategori tidak aktif. Meningkatkan persentase koperasi aktif tentunya tidak semudah itu, terutama tidak serta merta koperasi yang tidak aktif dapat dihapuskan. Hal tersebut seringkali terkendala proses penghapusan / pembubaran koperasi yang tidak mudah perlu melalui proses hingga Kemenkumham. Sehingga yang terjadi ialah banyak koperasi tidak aktif yang tidak serta merta dibubarkan.

Selain aktif atau tidaknya koperasi indikator lain yang merepresentasikan kinerja koperasi ialah jumlah koperasi sehat khususnya untuk koperasi yang bergerak di simpan pinjam. Angka menunjukkan jumlah koperasi sehat fluktuatif, dimana capaian tahun 2013 hanya mencapai 44 koperasi meningkat pada tahun 2014 mencapai 66, kemudian turun hingga tahun 2016 diangka 46 dan meningkat hingga pada tahun 2023 jumlah koperasi sehat mencapai 71. Namun jumlah 71 koperasi sehat di Kabupaten Banyuwangi justru merupakan penurunan kinerja dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dimana kinerja koperasi sehat mampu dipertahankan diangka 80 unit koperasi. Beberapa uraian terkait kinerja koperasi diatas dapat diidentifikasi faktor penyebab utamanya ialah profesionalitas pengelolaan koperasi, baik meliputi profesionalitas SDM hingga manajemen tata kelola koperasi itu sendiri.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan ialah minimnya diversifikasi usaha koperasi yang mana masih banyak yang bergerak hanya pada simpan pinjam. Meningkatkan diversifikasi usaha koperasi sesuai dengan potensi daerah dan wilayah akan sangat membantu pergerakan ekonomi masyarakat tentunya anggota koperasi. Hal tersebut dikarenakan jika hanya bergerak disimpan pinjam ancaman terbesar pada era modernisasi saat ini ialah sudah sangat beragamnya sistem pembiayaan melalui perbankan atau bahkan pinjaman online.

K. Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi merupakan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan terpadu kepada para investor dalam proses perizinan dan penanaman modal. Konsep “satu pintu” berarti bahwa semua layanan yang berkaitan dengan perizinan dan penanaman modal dapat diakses melalui satu titik akses, sehingga mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi dalam mendukung investasi. Tujuan DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi yaitu meningkatkan iklim investasi suatu wilayah dengan membuatnya lebih ramah bagi investor sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan perkembangan sektor-sektor tertentu yang mendukung investasi. Adapun capaian indikator kinerja urusan penanaman modal Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat melalui grafik berikut:



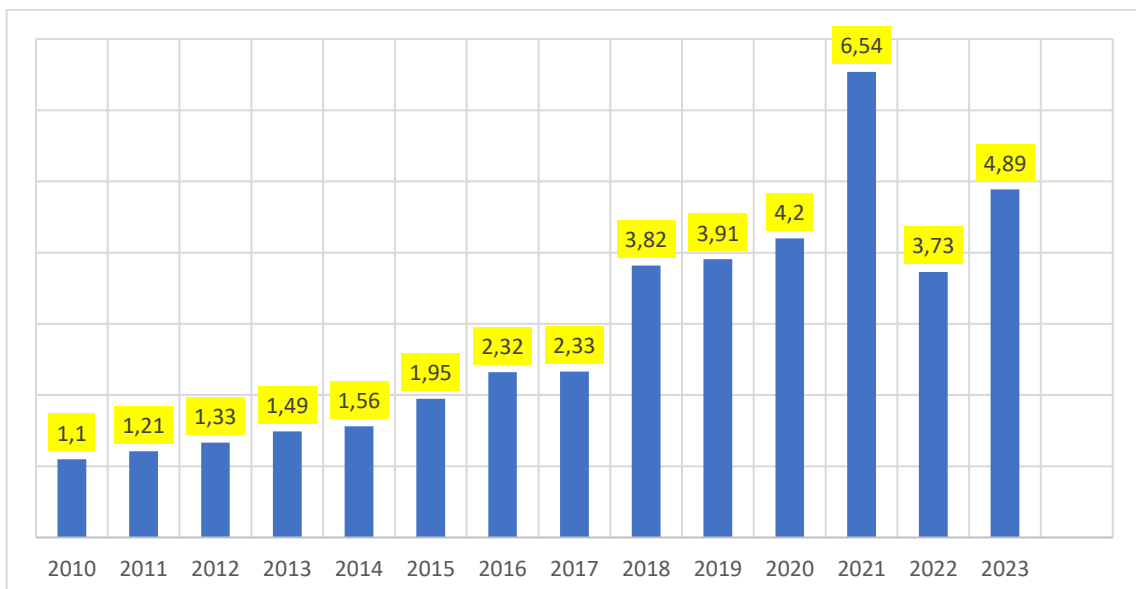
Gambar II. 77 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi, 2024

Capaian indikator urusan penanaman modal Kabupaten Banyuwangi secara umum mengalami peningkatan capaian yang signifikan. Indikator IKM atas pelayanan

perizinan dan non perizinan di Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan terus mengalami peningkatan selama tahun 2010-2023. Adapun yang menjadi isu pada urusan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi yaitu perlu adanya percepatan penyusunan dokumen RDTRK menuju digitalisasi dan bisa terintegrasi dengan aplikasi perizinan digital. Selain itu, perlu untuk menerapkan industri yang ramah lingkungan (*green industry*). Terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan perlu dioptimalkan dengan pola pelayanan terpadu satu pintu serta perlu adanya sosialisasi dan pelatihan aplikasi OSS kepada petugas dan masyarakat secara masif. [Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu](#) juga menghitung realisasi investasi.

Realisasi investasi dapat menjadi indikator penting dalam mengukur daya saing suatu daerah. Tingkat investasi yang tinggi dapat menunjukkan bahwa suatu daerah menarik bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dapat mencerminkan berbagai faktor seperti infrastruktur yang baik, kebijakan yang kondusif, serta ketersediaan sumber daya manusia yang terampil. Dengan demikian, realisasi investasi dapat dianggap sebagai representasi daya saing daerah dalam menarik investasi dan mengembangkan potensi ekonominya. Pemerintah daerah biasanya akan menggunakan data realisasi investasi ini sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan kebijakan ekonomi dan upaya untuk meningkatkan daya saing daerahnya. Realisasi nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Banyuwangi dalam rentang tahun 2010-2023:



Gambar II. 78 Jumlah Nilai Investai PMA dan PMDN (Triliun Rupiah) Kabupaten Banyuwangi

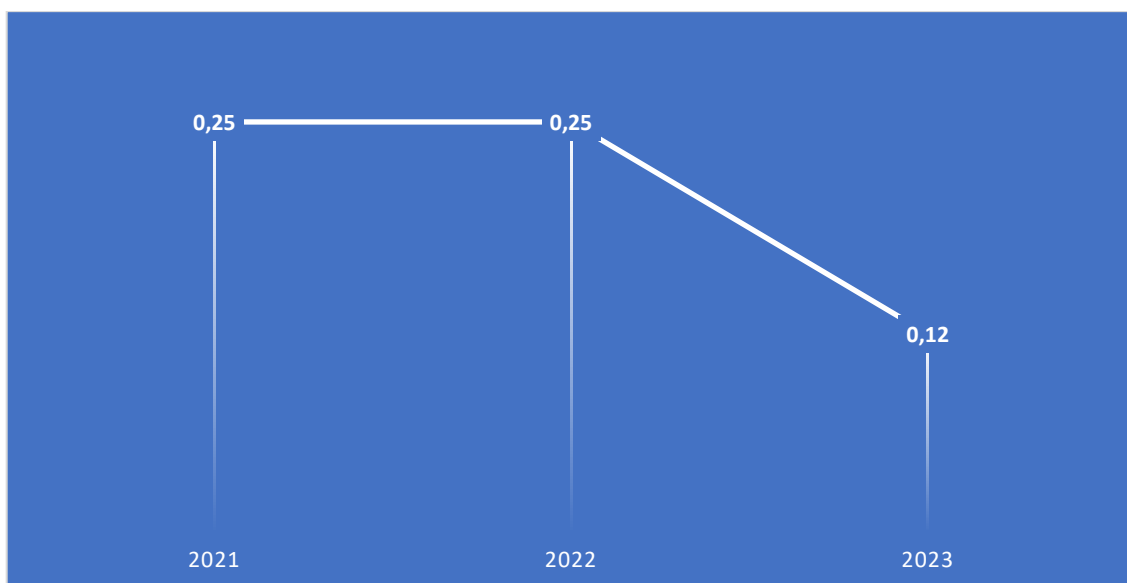
Sumber: Sumber: DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi, 2024

Jumlah nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah) tahun 2010-2023 mengalami peningkatan yang cukup drastis pada tahun 2021 dan kemudian menurun di

tahun 2022 dan tahun 2023 kembali meningkat walaupun tidak terlalu signifikan seperti tahun sebelumnya. Kenaikan capaian realisasi investasi di tahun 2021 tidak terlepas dari adanya potensi investasi yang besar di Kabupaten Banyuwangi karena lokasinya yang strategis dan infrastruktur yang mendukung, selain itu adanya regulasi yang mengatur investasi serta pemberian kemudahan dan insentif. Sementara penurunan capaian realisasi investasi pada tahun 2021 dikarenakan masih belum memiliki peeta potensi dan peta RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) serta luasnya Kabupaten Banyuwangi menyebabkan pentingnya penyesuaian antara dokumen RTRW dengan RUPM.

L. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga merupakan bagian dari urusan wajib non dasar. Urusan ini menjadi wewenang pemerintah daerah dalam rangka mengatur, mengembangkan dan mengawasi kegiatan di bidang pemuda dan olahraga dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, kualitas, kompetensi dan prestas pemuda dan olahraga. Penyelenggaraan urusan ini dapat diukur keberhasilannya melalui indikator persentase pemuda terlatih menjadi wirausaha mandiri/ persentase pemuda terampil. Berikut capaian indikator tersebut:

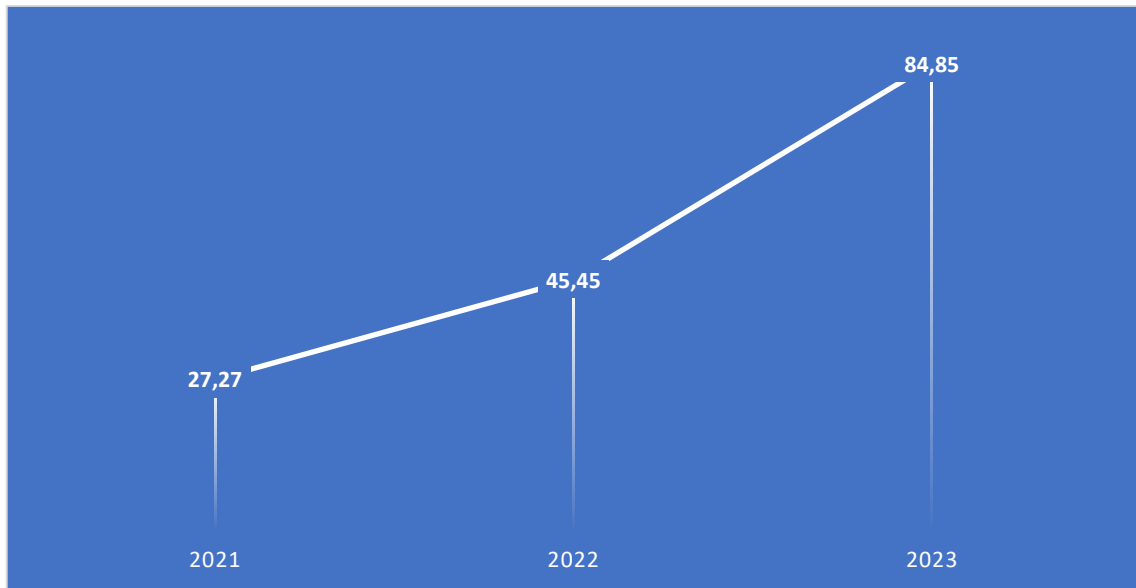


Gambar II. 79 Persentase Pemuda Terampil di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, 2024

Kinerja penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan olahraga yang tercermin melalui indikator diatas menggambarkan bahwa pemerintah dalam urusan tersebut masih perlu ditingkatkan melihat capainnya yang masih di bawah target. Adapun permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan urusan ini cukup kompleks, salah satu permasalahan yang ada adalah terkait pendataan dan pendaftara penduduk usia muda

yang berwirasusaha, dinamika perubahan jaman yang sangat cepat memberikan satu keunggulan dimana dalam bekerja masyarakat tidak dibatasi oleh wilayah, pada kasus ini pemuda Kabupaten Banyuwangi yang bekerja pada sektor informal telah memiliki pekerjaan akan tetapi jenis pekerjaan yang dijalankan tidak tertera pada kolom pendaftaran, banyak generasi muda yang sudah bekerja dan terikat dengan berbagai perusahaan multinasional bahkan pendapatan yang mereka dapatkan jauh melebihi UMR Kabupaten Banyuwangi



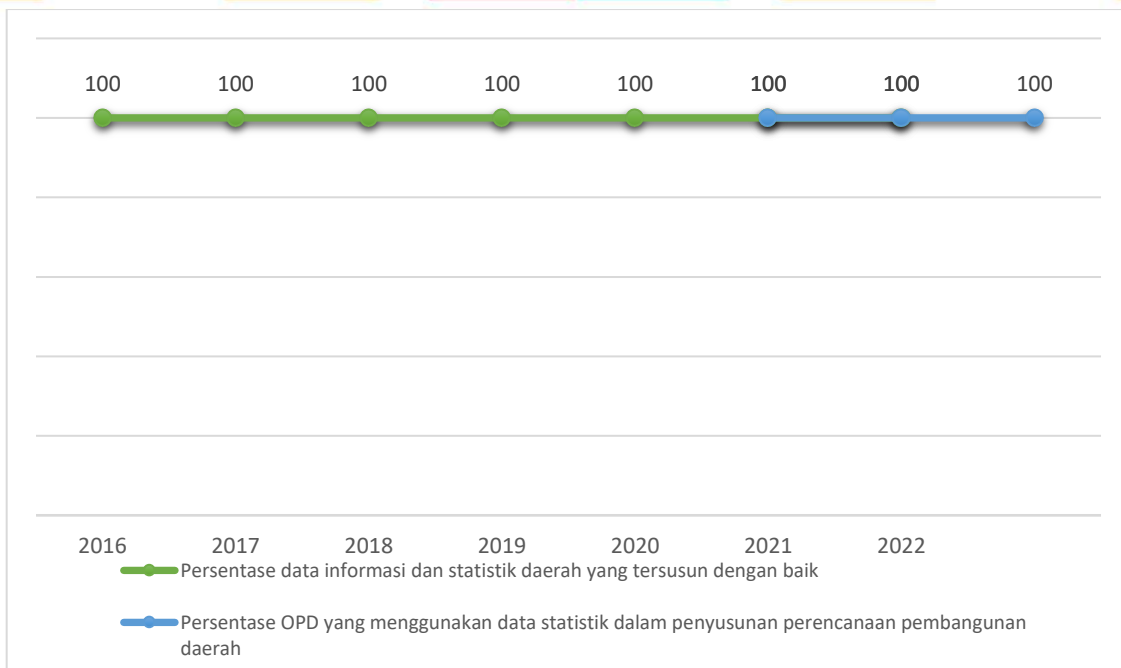
Gambar II. 80 Persentase Prestasi Olahraga Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, 2024

Data di atas menunjukkan capaian indikator prestasi Olahraga pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Walaupun demikian terdapat beberapa tantangan dan kendala pemerintah dalam menyelenggarakan sub urusan keolahragaan. Permasalahan yang paling urgent dibutuhkan adalah ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang lengkap.

M. Statistik

Urusan Statistik merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam rangka tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyediakan data statistik terkait dengan kondisi, perkembangan, dan karakteristik daerah yang mencakup berbagai aspek, seperti statistik penduduk, ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Penyelenggaraan urusan statistik Kabupaten Banyuwangi diampu oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Berikut ini ialah capaian kinerja penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar II. 81 Indikator Urusan Statistika Kabupaten Banyuwangi

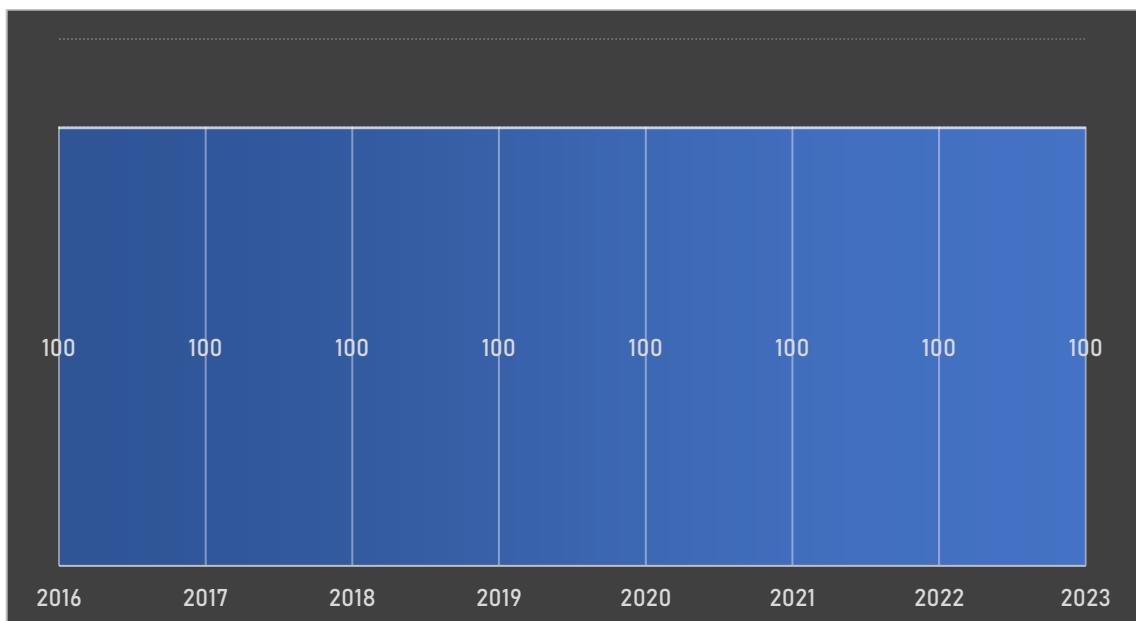
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, 2024

Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun baik di Kabupaten Banyuwangi dalam rentang tahun 2016–2023 menunjukkan capaian yang konsisten dan maksimal di angka 100%. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan tingkat efisiensi dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data tersebut sehingga tersusun dan disajikan dengan sangat baik, dengan tingkat akurasi dan ketepatan yang tinggi, serta memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Penyusunan informasi dan data statistik dapat dioptimalkan melalui di Forum Satu Data di Kabupaten Banyuwangi, yaitu forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyuwangi. Data yang telah terintegrasi dan tersusun dengan baik, kemudian dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam perumusan perencanaan Pembangunan. Dalam rentang tahun 2021–2023, persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah konsisten capaiannya di angka 100%. Pemanfaatan data statistik yang valid dan akurat dalam perencanaan pembangunan menjadikannya lebih terukur, dan mampu memetakan mengetahui *trend* yang akan terjadi pada masa mendatang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Akan tetapi, faktanya di lapangan masih ditemukan penyelenggaraan statistik daerah di Kabupaten Banyuwangi belum sepenuhnya sesuai dengan standar statistik nasional. Selain itu tantangan pengelolaan data statistik sektoral juga didukung adanya perkembangan *Artificial Intelligence (AI)* yang mampu mempelajari pola dan menentukan jawaban berdasarkan data yang ada, sehingga kedepannya data informasi dan statistik daerah akan sangat penting dalam mendukung efektifitas serta ketepatan *Artificial Intelligence (AI)*.

N. Persandian


Urusan persandian merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah yang sering kali diatur secara ketat oleh undang-undang atau peraturan pemerintah, dan biasanya dilakukan oleh lembaga atau unit khusus dalam pemerintahan yang bertanggung jawab atas keamanan informasi dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi. Kinerja urusan persandian direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:



Gambar II. 82 Indikator Urusan Persandian Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, 2024

Persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik telah menunjukkan tren yang positif dalam rentang tahun 2016-2021. Indikator ini kemudian berganti nama menjadi Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dan menunjukkan capaian yang konsisten sebesar 100% di tahun 2022-2023. Capaian ini dimaksimalkan dengan adanya pemantauan yang terus-menerus terhadap jaringan dan sistem informasi penting untuk mendeteksi kegiatan yang mencurigakan atau ancaman



keamanan yang mungkin. Sistem deteksi intrusi dan pemantauan aktivitas pengguna dapat membantu mengidentifikasi serangan cyber atau kebocoran data dengan cepat.

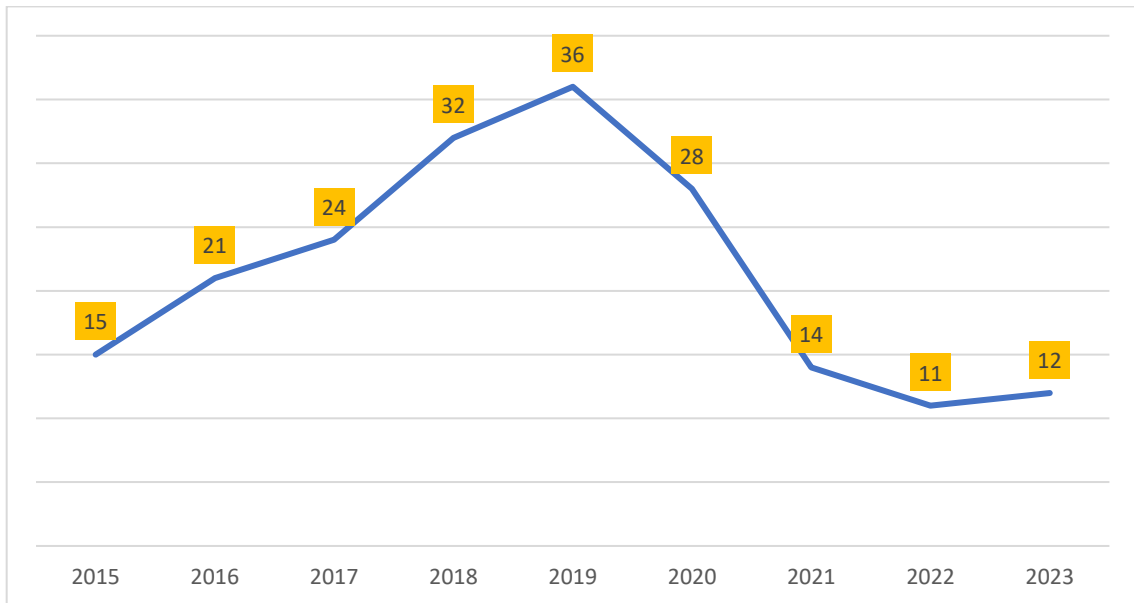
Meskipun demikian, data mencatat bahwa setiap tahun sejak tahun 2021, terjadi peretasan sebanyak 10 kali. Poin positif dalam upaya penanggulangan serangan siber adalah *terbentuknya Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai sarana pengaduan informasi insiden siber dari masyarakat. Masih terdapat tantangan berupa kompleksitas infrastruktur IT yang dimiliki oleh pemerintah daerah, terutama jika terdapat sistem yang tersebar atau berbeda-beda, dapat membuat sulit untuk mengimplementasikan kebijakan dan kontrol keamanan yang konsisten di seluruh organisasi ditambah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan informasi. Penting untuk diapresiasi bahwa langkah-langkah proaktif seperti pembentukan CSIRT menunjukkan komitmen untuk menghadapi ancaman siber dan memberikan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pengamanan informasi. Faktor pendorong tersebut mencerminkan kesadaran dan responsifnya pemerintah daerah terhadap kebutuhan akan ketahanan siber yang meningkat.

Secara keseluruhan, pencapaian target 100% pada indikator kinerja urusan persandian Kabupaten Banyuwangi menunjukkan komitmen dan upaya dalam penyelenggaraan urusan persandian, tantangan serangan siber yang terus berlanjut menekankan pentingnya evaluasi terus-menerus, pengembangan strategi keamanan informasi yang lebih baik, dan kolaborasi dengan masyarakat melalui CSIRT untuk menciptakan ekosistem siber yang aman dan andal di Kabupaten Banyuwangi.

0. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan bagian penting dari identitas suatu masyarakat. Melalui bahasa, tradisi, seni, dan nilai-nilai budaya, masyarakat mengenali diri mereka sendiri dan menghargai warisan budaya yang telah ada sejak lama. Ini membantu mempertahankan dan merawat akar-akar budaya yang penting bagi sebuah daerah. Pembangunan pada urusan Kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat dari indikator jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata sebagai berikut:





Gambar II. 83 Jumlah Budaya Lokal yang Dikembangkan menjadi Daya Tarik Wisata di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2024

Budaya lokal yang dikembangkan menjadi sebuah daya tarik menjadi salah satu cara pelestarian kebudayaan melalui sektor pariwisata. Mengingat kebudayaan memiliki potensi ekonomi yang besar. Seni, kerajinan, musik, dan kuliner tradisional dapat menjadi aset penting dalam industri pariwisata dan perdagangan internasional. Ini memberikan peluang bagi pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi sebuah daya tarik wisata di Kabupaten Banyuwangi tercatat sejak tahun 2015-2023, dengan tren yang cenderung meningkat dan capaian tertingginya adalah pada tahun 2019 yaitu sejumlah 36 daya tarik wisata. Namun pada tahun 2022, jumlah ini menurun menjadi yang terendah yakni 11. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 masih kedalam fase pasca pandemi Covid-19 di Indonesia, sehingga berdampak pada banyak sektor termasuk keberlangsungan sektor pariwisata, yaitu pemanfaatan kebudayaan sebagai daya tarik wisata. Namun, ditahun 2023 terdapat kenaikan budaya lokal sebesar 12 dibanding tahun sebelumnya.

Dalam beberapa tahun kedepan, terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam membangun kebudayaan masyarakat, yaitu 1) Inkonsistensi regulasi pengembangan kebudayaan, 2) Globalisasi dapat membawa ancaman terhadap budaya daerah. Ini karena pengaruh globalisasi yang kuat, seperti arus informasi, teknologi, perdagangan internasional, dan budaya populer, dapat menggeser atau merendahkan budaya-

budaya lokal, 3) Masyarakat lokal kaya akan nilai agama dan kebudayaan yang berkaitan erat, namun budaya yang dibangun haruslah adaptif dan mendukung budaya pembangunan. Penting untuk memastikan bahwa pengembangan budaya lokal sebagai daya tarik wisata dilakukan dengan menghormati dan melestarikan integritas budaya asli, serta memberikan manfaat yang adil kepada komunitas lokal. Ini dapat menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan pemahaman antarbudaya, sambil memastikan bahwa warisan budaya tetap terjaga.

P. Perpustakaan

Urusan perpustakaan di Kabupaten Banyuwangi merupakan kewenangan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi. Terdapat 3 indikator urusan perpustakaan di Kabupaten Banyuwangi yaitu nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat, dan indeks pembangunan literasi masyarakat. Berikut merupakan data perkembangan dari indikator nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Banyuwangi:

Tabel II. 35 Indikator Urusan Perpustakaan Kabupaten Banyuwangi

No	Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	56	58	61.22	63.31
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	5.6	29.08	29.80	65.58

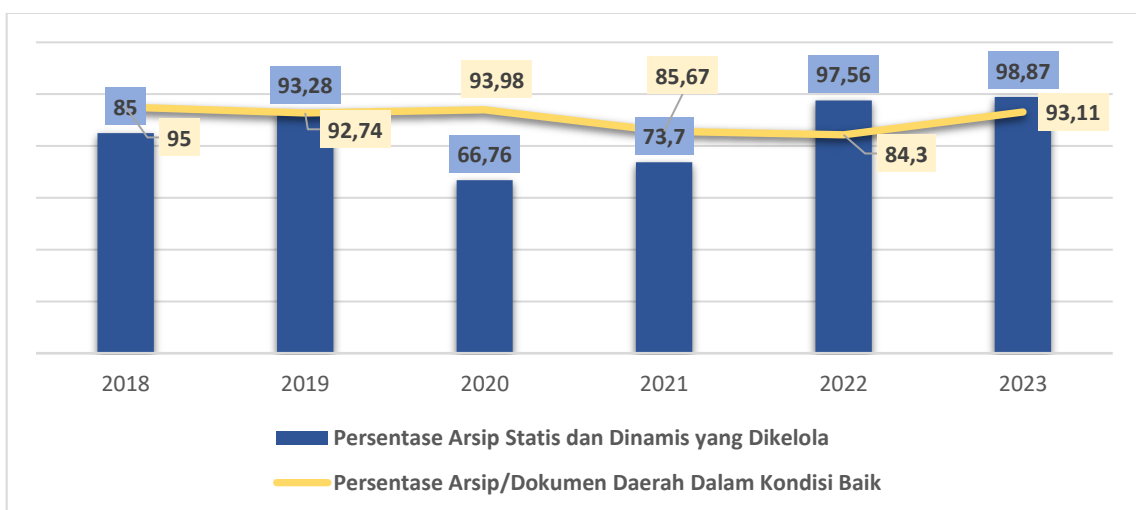
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, 2023

Indikator nilai tingkat kegemaran membaca (TGM) masyarakat di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020-2023 memiliki capaian yang konsisten meningkat. Pada tahun 2020 TGM Kabupaten Banyuwangi sebesar 56, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 58, terjadi peningkatan di tahun 2022 menjadi 61,22 dan terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 63,31. Indikator TGM diukur dari 5 indikator pembentuk yaitu frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah bacaan, frekuensi mengakses internet, dan durasi mengakses internet. Adapun capaian indikator urusan perpustakaan selanjutnya yaitu indeks pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi Indikator indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) di Kabupaten Banyuwangi tahun 2020-2023 memiliki capaian yang juga konsisten meningkat, dari 5,6 meningkat menjadi 29,08, kemudian meningkat kembali menjadi 29,80. Dan meningkat sangat signifikan di tahun 2023 menjadi 65,58. Capaian tersebut berada dibawah capaian Provinsi Jawa Timur yang berada di 75,18, bahkan dibawah capaian IPLM Nasional yang berada diangka 69,42.

Berdasarkan kondisi saat ini, yang dilihat melalui dua indikator tersebut terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi yaitu Minat baca masyarakat yg masih rendah, hal ini berkaitan dengan Koleksi buku yang kurang beragam sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan bacaan masyarakat seperti buku keagamaan dan lainnya. Selain itu juga masih kurangnya pemenuhan referensi untuk masyarakat difabel, membuat pelayanan perpustakaan di Kabupaten Banyuwangi kurang inklusif. Namun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi sudah memiliki inovasi Literasi Cafe untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan meningkatkan daya tarik masyarakat dalam membaca. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah adanya alih media baca, alih media baca adalah fenomena yang terjadi karena perubahan dalam perilaku pembacaan dan konsumsi informasi. Ini terkait dengan pergeseran dari media tradisional seperti buku cetak dan majalah ke media digital, termasuk e-buku, situs web berita, blog, dan platform media sosial, melihat hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi harus dapat adaptif terhadap peralihan tersebut, ini juga berkaitan dengan keterbukaan akses terhadap koleksi buku, jurnal secara luas oleh masyarakat.


Q. Kearsipan

Arsip memiliki peran krusial dalam domain manajemen dan administrasi, dan memiliki signifikansi penting karena mencakup dokumen-dokumen bersejarah. Arsip yang berkaitan dengan catatan bersejarah yang memengaruhi masyarakat secara luas biasanya diarsipkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam Kabupaten Banyuwangi, tugas dan tanggung jawab mengenai kearsipan diemban oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan pencapaian indikator sebagai berikut:



Gambar II. 84 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, 2024



Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren yang fluktuatif. Terjadi penurunan cukup tinggi pada tahun 2020. Persentase arsip statis dan dinamis yg dikelola th 2020 & 2021 terjadi penurunan yg signifikan dikarenakan adanya perubahan parameter perhitungan. sebelumnya yg dihitung jumlah, sedangkan pada tahun tersebut berubah menjadi persentase. Jumlah ini kemudian meningkat, dengan capaian tertingginya yaitu pada tahun 2022 sejumlah 97,56%, hal ini tentunya menunjukkan hasil yang baik karena hampir seluruhnya dokumen-dokumen penting milik daerah sudah dikelola oleh pemerintah. Namun melalui indikator kedua yaitu persentase arsip/dokumen daerah yang dalam kondisi baik sejak tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang cenderung menurun, dengan capaian terendahnya yaitu pada tahun 2022 sejumlah 84,3%. Data pada tahun 2023 capaian realisasi dari duan indicator tersebut juga mengalami peningkatan dengan hasil 98,87% untuk indicator Persentase Arsip Statis dan Dinamis yang Dikelola dan untuk indicator Persentase Arsip/Dokumen Daerah Dalam Kondisi Baik dengan capaian 93,11%. Melihat hal ini terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada urusan kearsipan yaitu 1) Kesadaran msyarakat terkait pentingnya arsip masih rendah, 2) Pendidikan dan sosialisasi terkait kearsipan juga masih perlu ditingkatkan mengingat kebutuhan SDM pengelola arsip juga semakin tinggi. 3) Pemeliharaan dan konservasi koleksi dan kearsipan (restorasi) perlu ditingkatkan, hal ini berkaitan dengan menjaga arsip/dokumen penting daerah dalam kondisi baik.


2.4.3 Pelayanan Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Di tingkat kabupaten, penyelenggaraan urusan perikanan dan kelautan melibatkan serangkaian tanggung jawab yang signifikan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya memiliki peran utama dalam mengelola sumber daya kelautan di wilayahnya, termasuk pengawasan dan pengelolaan stok ikan serta perlindungan ekosistem laut. Pengembangan infrastruktur kelautan, seperti pelabuhan, dermaga, dan fasilitas penyimpanan ikan, juga menjadi fokus dalam mendukung kegiatan perikanan dan kelautan di Kabupaten Banyuwangi.

Membangun sektor perikanan tidak hanya fokus ke alam dan pembangunan infrastruktur pendukung sektor perikanan semata. Namun membangun perikanan kelautan di Kabupaten Banyuwangi juga fokus mengarahkan SDMnya. Dalam



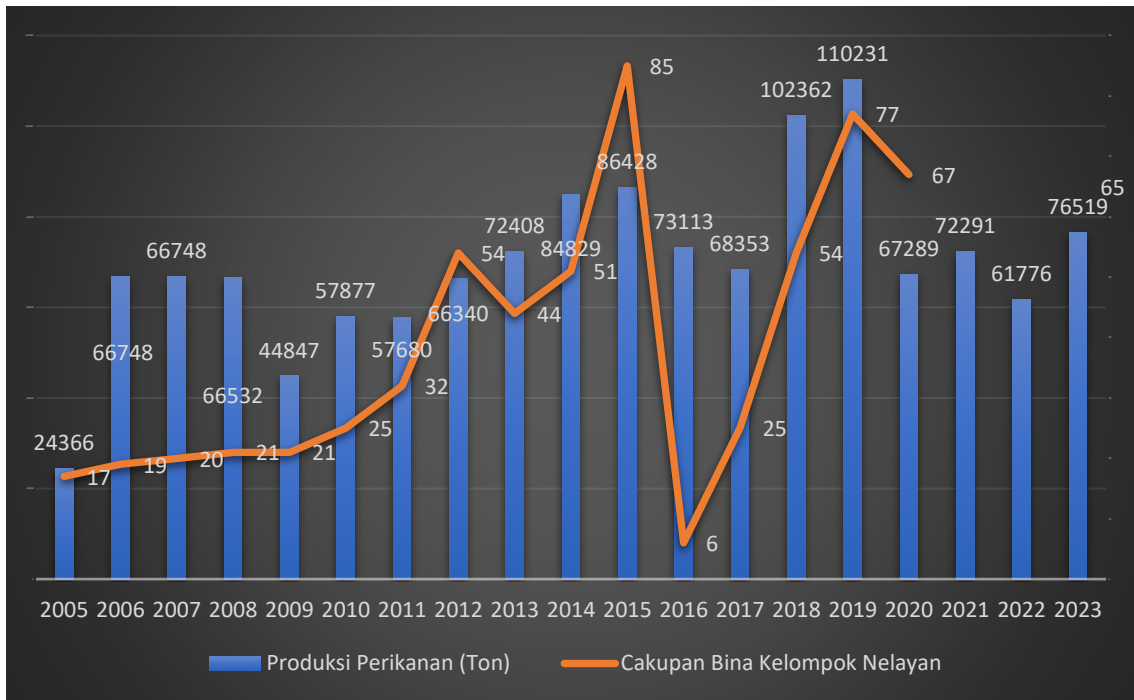


mendukung nelayan lokal, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi memberikan berbagai bentuk dukungan, mulai dari penyediaan bantuan peralatan hingga pelatihan keterampilan. Salah satunya ialah program bina kelompok nelayan, yang mana menjadi strategi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan para nelayan lokal. Program ini mengusung pendekatan holistik, termasuk upaya pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan, serta distribusi peralatan perikanan yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, akses ke pembiayaan diperhatikan dengan memberikan bantuan finansial atau membantu nelayan mendapatkan pinjaman untuk mengatasi kendala finansial yang mungkin muncul dalam usaha perikanan mereka.

Selain aspek ekonomi, bina kelompok nelayan juga melibatkan keamanan sosial dengan menyediakan program asuransi atau dana darurat. Pelatihan keselamatan di laut menjadi fokus utama untuk meningkatkan keterampilan nelayan dalam menghadapi kondisi laut yang berubah-ubah dan mengurangi risiko kecelakaan. Program ini juga dapat mencakup pengembangan kegiatan pariwisata kelautan yang berkelanjutan jika wilayah tersebut memiliki potensi wisata. Melibatkan nelayan dalam program konservasi lingkungan juga menjadi bagian integral untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut. Dengan melibatkan pihak eksternal seperti lembaga non-pemerintah dan sektor swasta, bina kelompok nelayan di Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat menjadi pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengembangkan sektor perikanan lokal.

Namun praktisnya cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 16 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Mulai diinisiasi sejak tahun 2005 dengan cakupan 17 kelompok nelayan terus progresif meningkat hingga puncaknya pada tahun 2015 mencapai 85 nelayan. Namun pada tahun 2016 data menunjukkan adanya penurunan yang cukup tajam hingga hanya menyisakan 6 kelompok nelayan saja. Namun komitmen pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk fokus terhadap pengembangan sektor kelautan dan perikanan ditingkatkan hingga data terakhir menunjukkan tahun 2020 terdapat 67 bina kelompok nelayan yang masih didampingi secara aktif. Berikut merupakan gambaran kinerja sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Banyuwangi.



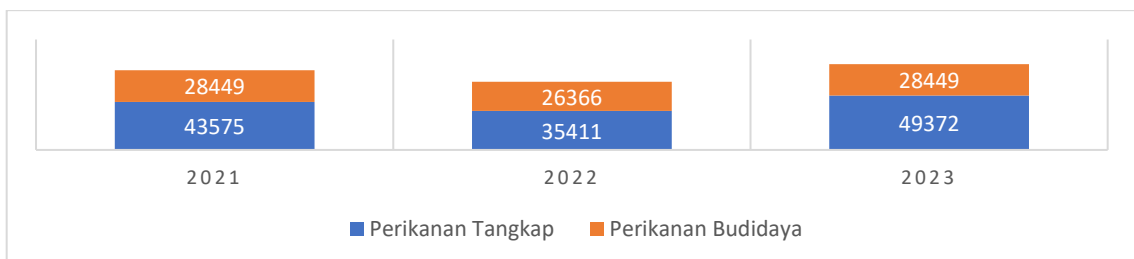


Gambar II. 85 Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2024


Data diatas sekaligus menunjukkan produksi perikanan yang dapat dilihat memiliki kecenderungan yang cukup fluktuatif di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya yang sama besarnya. Khususnya perikanan tangkap terutama didukung dengan pelabuhan besar seperti Pelabuhan Muncar yang menjadi salah satu pusat pelabuhan terbesar di Indonesia, bahkan tahun 2019 pernah menjadi pelabuhan dengan pasokan ikan terbesar di Indonesia. Tahun 2005 hingga saat ini perkembangan produksi sektor perikanan tangkap maupun budidaya berkembang pesat. Tahun 2005 yang mencapai 24 ribu Ton meningkat hampir 3x lipat pada tahun 2023 yang mencapai 76ribu Ton. Puncak produksi sektor perikanan justru terjadi pada tahun 2018 – 2019 yang mencapai 100ribu ton lebih.

Jika dilihat dari masing-masing jenis perikanan yakni tangkap maupun budidaya dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Gambar II. 86 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2024



Berdasarkan grafik di atas, produksi perikanan tangkap menunjukkan tren yang lebih lesar dibandingkan perikanan budidaya di Banyuwangi dengan tren yang fluktuatif. Volume produksi perikanan di tahun 2023 meningkat 26% dibandingkan dengan tahun 2022. Volume produksi perikanan tangkap setelah mengalami penurunan sebesar 19% pada tahun 2022 (dari 43.575 ton menjadi 35.410,5 ton), pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 39% (dari 35.410,5 ton menjadi 49.372 ton). Sektor produksi perikanan budidaya juga mengalami peningkatan sebesar 8% (dari 26.365,6 ton menjadi 28.449 ton). Meskipun secara keseluruhan produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan, namun produksi perikanan tangkap nelayan kecil mengalami penurunan. Faktor penyebabnya adalah wilayah tangkap nelayan kecil pada 0 s.d 12 mil dari pesisir Pantai. Kondisi suhu tinggi hampir sepanjang tahun di 2023 menyebabkan kondisi perairan dari jarak 0 s.d 12 mil keruh karena tingginya plankton. Dengan kondisi tersebut nelayan kecil kesulitan melakukan penangkapan di wilayah tersebut, karena dapat merusak jarring ditambah meningkatnya jumlah hama ubur-ubur di wilayah tersebut.

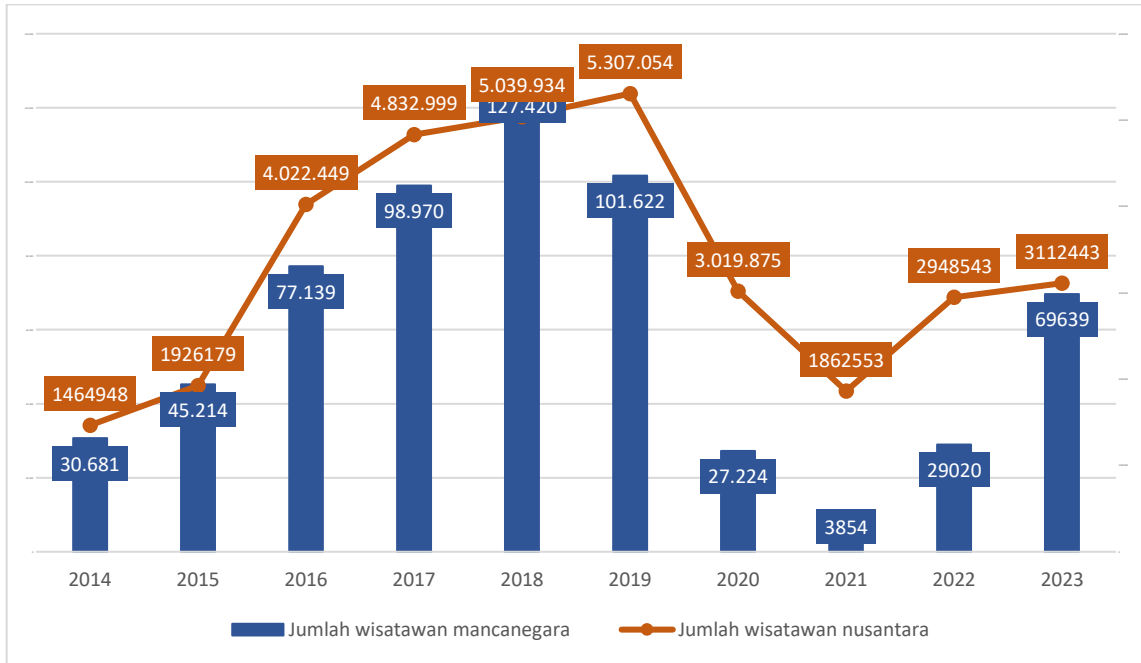
Produksi perikanan di Kabupaten Banyuwangi diproses dan didistribusikan melalui pelabuhan perikanan yang menjadikannya sebagai komponen vital dalam rantai pasok perikanan dan berkontribusi besar pada perekonomian lokal dan nasional. Kabupaten Banyuwangi memiliki tiga fasilitas yaitu Pelabuhan Perikanan Muncar yang merupakan pelabuhan perikanan terbesar di Banyuwangi dan salah satu yang terbesar di Indonesia dengan komoditi khas berupa ikan pelagis seperti tuna, cakalang, dan lemuru. Selanjutnya yaitu Pelabuhan Perikanan Grajagan yang terletak di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, dan juga merupakan pelabuhan perikanan yang penting di Banyuwangi, terutama untuk nelayan lokal. Dan terakhir yaitu Pelabuhan Perikanan Pancer yang menjadi salah satu pelabuhan perikanan yang digunakan oleh nelayan di daerah sekitar. Tantangan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi ke depan adalah hilirisasi produk perikanan serta Tingkat konsumsi ikan yang masih rendah.

B. Pariwisata

Urusan pariwisata mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan, promosi, dan pengelolaan sektor pariwisata suatu wilayah. Pariwisata adalah sektor ekonomi yang penting dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi suatu wilayah, sehingga manajemen yang baik dalam sektor ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang



berkelanjutan. Urusan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi menjadi wewenang dan tanggung jawab dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Adapaun indikator kinerja urusan pariwisata Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar II. 87 Indikator Urusan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

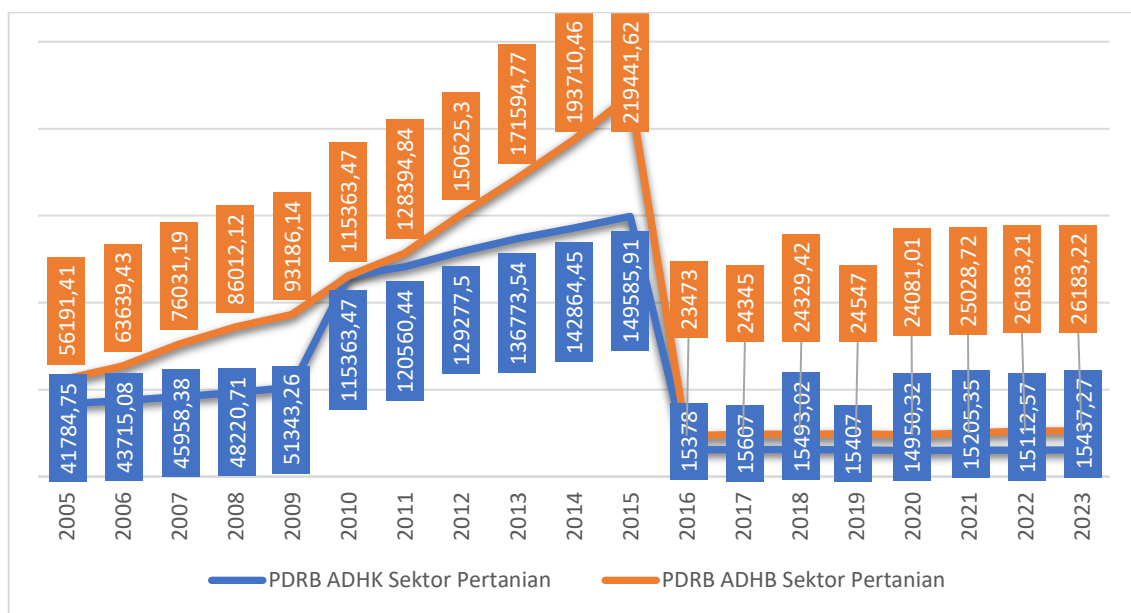
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, 2024

Grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang berkunjung di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2014-2023 mengalami fluktuasi. Adanya penurunan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga muncul kebijakan larangan berkerumun yang salah satunya menyebabkan penurunan jumlah wisatawan, hingga tahun 2023 capaian indikator belum dapat sepenuhnya pulih seperti capaian pada sebelum adanya pandemi covid-19. Rata-rata lama tinggal (*length of stay*) para wisatawan di Kabupaten Banyuwangi adalah 2-3 hari. Namun jika dilihat berdasarkan data setiap tahunnya jumlah wisatawan di Kabupaten Banyuwangi yang terus mengalami peningkatan perlu diperhatikan juga terkait dengan kapasitas daya tampung. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi membutuhkan teknologi untuk menunjang aminitis atau Teknologi Informasi Center guna meningkatkan pentingnya literasi tourism. Adapun terkait isu dan tantangan urusan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi yaitu perlu selektif dalam memberikan izin kepada investor yang ingin berinvestasi di sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi dengan

mempertimbangkan ecotourism, mengingat potensi wisata terbesar di Kabupaten Banyuwangi adalah wisata alamnya.

C. Pertanian

Urusan pertanian mencakup berbagai kegiatan dan aspek yang terkait dengan produksi, pengelolaan, dan pengembangan sektor pertanian. Pertanian adalah sektor ekonomi yang sangat penting dalam menyediakan makanan, bahan baku industri, dan sumber daya ekonomi lainnya. Urusan pertanian terdiri dari pertanian, perkebunan dan peternakan. Di Kabupaten Banyuwangi urusan pertanian merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Adapun capaian urusan pertanian di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat melalui grafik berikut:

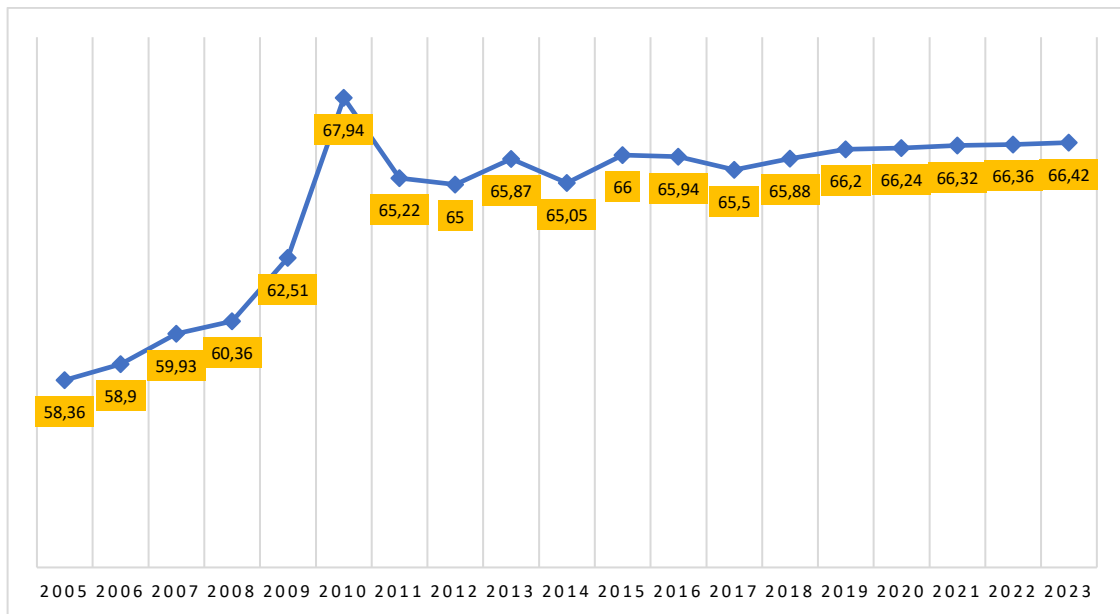


Gambar II. 88 PDRB ADHK dan ADBH Sektor Pertanian Kabupaten Banyuwangi

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2024

PDRB ADHK dan PDRB ADHB sektor pertanian (milyar rupiah) Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2005-2023 memiliki capaian yang fluktuatif. PDRB ADHK sektor pertanian selama tahun 2005-2009 secara konsisten mengalami kenaikan kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan yang drastis. Fluktuasi PDRB ADHK sektor pertanian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan riil sektor pertanian bervariasi dari tahun ke tahun, tanpa memperhatikan perubahan harga. Begitupun dengan PDRB ADHB sektor pertanian selama tahun 2005-2009 konsisten mengalami peningkatan capaian namun pada tahun 2010 mengalami penurunan yang drastis. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi dalam harga produk pertanian yang dihasilkan oleh sektor pertanian berdampak pada nilai ekonomi sektor pertanian. Adapun yang menjadi isu atau tantangan urusan pertanian (termasuk perkebunan dan peternakan)


di Kabupaten Banyuwangi yaitu adopsi teknologi di generasi tua masih rendah, adanya ketergantungan terhadap pupuk sehingga menyebabkan kesuburan lahan pertanian menurun. Selain itu, adanya ancaman penyakit menular dan tidak menular terhadap hewan ternak, serta adanya kenaikan harga pakan yang disebabkan bahan baku pakan ternak harus diimpor dari negara lain. Hilirisasi dan jaringan keperantaan pasar sektor pertanian juga menjadi tantangan urusan pertanian ke depan. Indikator lainnya yang representatif adalah sebagai berikut:



Gambar II. 89 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya per Hektar di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2024

Produktivitas padi di Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan dalam rentang 2005-2023, dari 58.39 di tahun 2005 menjadi 66,42 di tahun 2023. Permasalahan pertama yaitu Penurunan minat bertani merupakan permasalahan yang signifikan di banyak wilayah. Faktor-faktor seperti urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan persepsi negatif terhadap pekerjaan pertanian telah menyebabkan generasi muda cenderung beralih dari sektor pertanian. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya suksesi generasi di bidang pertanian, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada keberlanjutan sektor pertanian. Kesejahteraan petani, terutama buruh tani, seringkali menjadi permasalahan serius. Buruh tani sering berada dalam kondisi kerja yang sulit, termasuk upah rendah, ketidakpastian pekerjaan, dan keterbatasan akses terhadap fasilitas kesejahteraan. Kesejahteraan petani juga dapat terpengaruh oleh fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat di rantai nilai pertanian. Masalah lahan, konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, dan degradasi lahan, dapat menyebabkan



penurunan ketersediaan lahan untuk pertanian. Selain itu, lahan pertanian yang tersedia mungkin mengalami penurunan produktivitas akibat degradasi tanah, kekurangan air, atau perubahan iklim. Hal ini dapat berdampak negatif pada produksi pangan, ketahanan pangan, dan mata pencaharian petani.

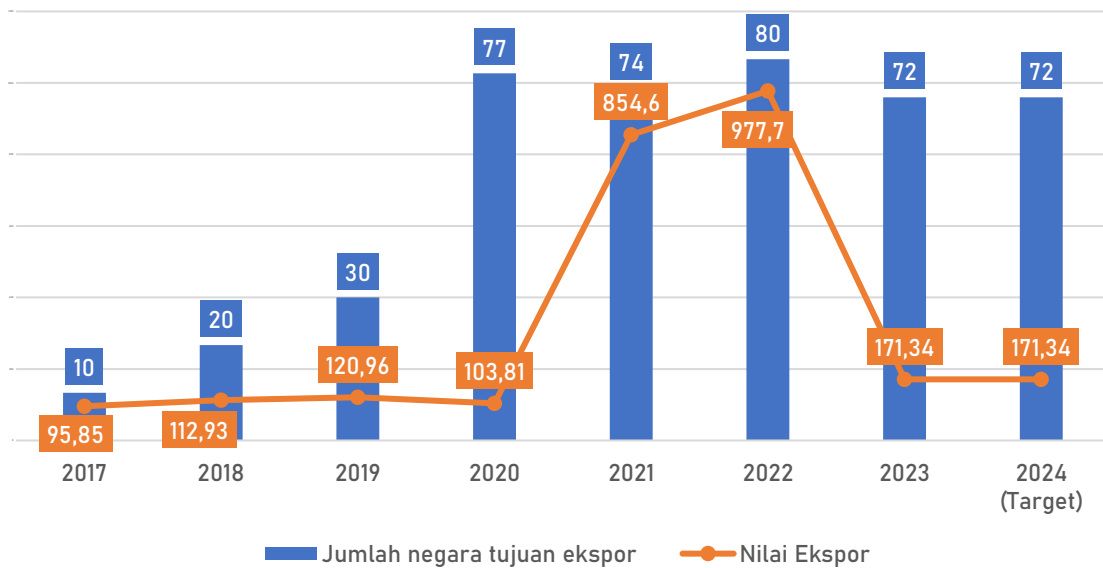
Di tengah kondisi atas, Kabupaten Banyuwangi telah mengupayakan berbagai intervensi dalam mengoptimalkan produktivitas komoditi di tengah berbagai hambatan yang ada melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Seperti peningkatan kapabilitas mekanisasi pertanian melalui penggunaan alat mesin pertanian modern, *combine harvester* untuk alat panen yang menysasar kelompok tani atau gapoktan. Selain itu dari sisi SDM petani juga dilakukan pengoptimalan kompetensi per kelompok tani melalui adanya tenaga penyuluh pertanian setiap desa. Meskipun demikian terdapat kondisi yang perlu diperhatikan seperti jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga kebutuhan pangan semakin tinggi sedangkan lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi semakin terbatas.

D. Perdagangan

Banyuwangi sebagai kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa, memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Selain ketiga sektor unggulan Kabupaten Banyuwangi tersebut, Kabupaten Banyuwangi juga memiliki keunggulan geografis sebagai pintu penghubung Jawa dan Bali dimana potensi sektor perdagangan dapat dioptimalkan. Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan urusan perdagangan juga penting untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok masyarakat.

Salah satu tolok ukur penyelenggaraan sektor perdagangan ialah pengelolaan pasar, yang mana menurut data sejak tahun 2005 hingga tahun 2022 tidak ada pertumbuhan jumlah pasar yang mencapai 21. Namun peningkatan kinerja sektor perdagangan dapat dilihat dari berkembangnya negara tujuan ekspor serta nilai ekspor Kabupaten Banyuwangi. Berikut merupakan kedua data berkaitan dengan kinerja ekspor Kabupaten Banyuwangi.





Gambar II. 90 Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, 2024

Data diatas menunjukkan bahwa perkembangan kinerja sektor perdagangan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan yang sangat progresif kecuali di tahun 2023. Tahun 2017 menunjukkan bahwa tercatat hanya 10 negara ekspor produk Kabupaten Banyuwangi dengan nilai hanya mencapai 95.85 Juta Dollar. Capaian tersebut meningkat cukup pesat dalam kurun waktu 6 tahun hingga pada tahun 2022 mencapai 977.7 Juta Dollar atau meningkan lebih dari 10x lipat dari kinerja tahun 2017 (6 tahun yang lalu) dengan disertai melonjaknya negara tujuan ekspor yang mencapai 80 negara pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup drastic dan hanya dikisaran angka 172,34 Juta Dollar. Hal tersebut dikarenakan Ketergantungan ekspor hanya pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan.

Namun yang perlu diperhatikan ialah mayoritas ekspor produk Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan belum optimal. Dimana sejauh ini meningkatnya ekspor Kabupaten Banyuwangi hanya tergantung beberapa komoditi yang tentunya masih mayoritas ialah barang mentah. Dengan potensi ekspor kenegara tujuan yang bertambah, Kabupaten Banyuwangi harus mulai fokus dalam meningkatkan kualitas ekspor produk unggulan, dimana hilirisasi khususnya pada sektor pertanian dan perikanan yang menjadi produk unggulan ditingkatkan. Selain itu perhatian utama justru tidak hanya terhadap komoditas ekspor, era globalisasi yang sangat sulit dibendung mengakibatkan import juga semakin mudah. Justru jika komoditi tidak

mampu bersaing baik dari sisi kualitas maupun harga yang terjadi ialah pasar lokal akan dikuasi oleh produk non Banyuwangi.

E. Perindustrian

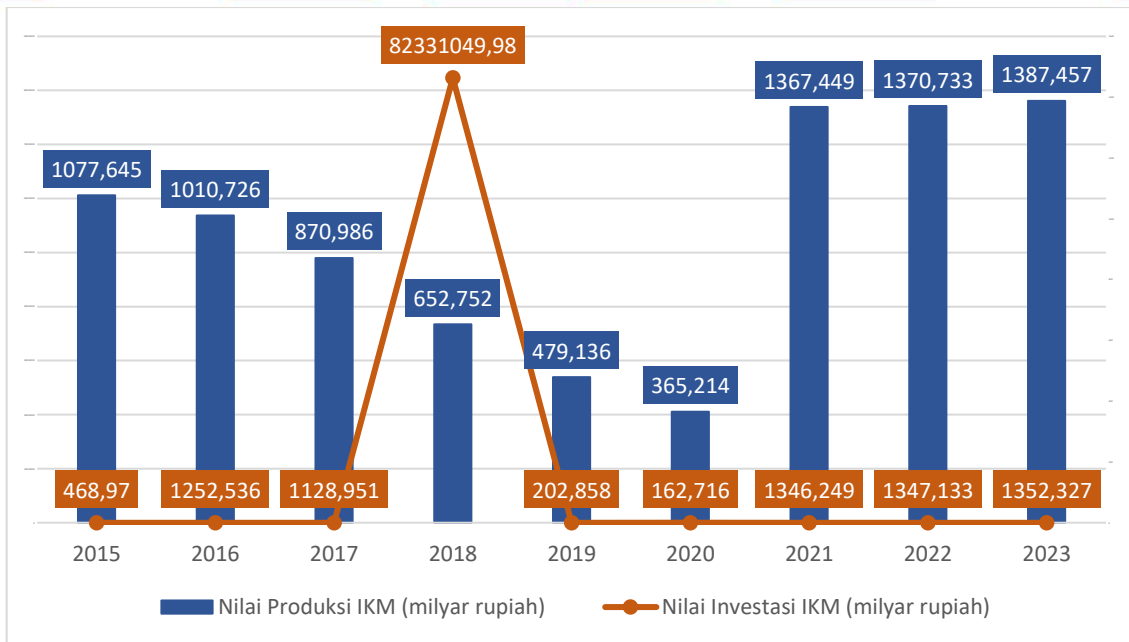
Urusan perindustrian mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan, regulasi, dan pertumbuhan sektor industri dalam suatu wilayah. Perindustrian adalah salah satu sektor ekonomi yang penting, karena berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendukung diversifikasi ekonomi. Urusan perindustrian di Kabupaten Banyuwangi menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi. Adapun capaian indikator urusan perindustrian di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar II. 91 Persentase Peningkatan Nilai Penjualan/Omzet Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi, 2024

Indikator persentase peningkatan nilai penjualan/ omzet Industri Kecil Menengah merupakan indikator kinerja utama dari urusan perindustrian Kabupaten Banyuwangi yang memiliki capaian yang fluktuatif selama tahun 2016–2023. Penurunan capaian paling drastis terjadi pada tahun 2020 hingga mencapai angka -13,16 hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi perekonomian seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Capaian indikator persentase peningkatan nilai penjualan/ omzet Industri Kecil Menengah (IKM) didukung oleh data nilai produksi Industri Kecil Menengah (IKM) dan nilai investasi Industri Kecil Menengah (IKM) yang dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar II. 92 Nilai Produksi dan Investasi IKM di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi, 2024

Kedua indikator urusan perindustrian Kabupaten Banyuwangi diatas memiliki capaian yang fluktuatif selama tahun 2015-2023. Indikator nilai investasi Industri Kecil Menengah (IKM) memiliki peningkatan capaian yang cukup drastis pada tahun 2018 namun kembali turun pada tahun 2019 hingga 2023. Sementara indikator nilai produksi Industri Kecil Menengah (IKM) selama tahun 2015-2020 terus mengalami penurunan namun pada tahun 2021-2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Fluktuasi yang terjadi pada kedua indikator ini disebabkan oleh adanya fluktuasi dalam permintaan pasar baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional, selain itu adanya perubahan dalam kebijakan pemerintah seperti perubahan tarif pajak, regulasi perdagangan atau insentif investasi dan lain sebagainya ikut mempengaruhi pencapaian kedua indikator ini. Adapun yang menjadi tantangan atau isu strategis urusan perindustrian di Kabupaten Banyuwangi ke depan yaitu terkait pemanfaatan teknologi untuk perluasan pasar/ promosi khususnya industri tekstil pengolahan kulit. Sarana dan prasarana industri pengolahan perlu mendapatkan perhatian agar mampu meningkatkan produktivitas. Selain itu, perlunya penciptaan iklim usaha sehingga dapat mendukung pelaku usaha industri pengolahan, prinsip ekonomi berbasis SDA dan industri tekstil berkelanjutan, serta fasilitasi bagi para pelaku usaha industri untuk ekspor.

F. Transmigrasi

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang

diselenggarakan oleh Pemerintah. Adapun dasar hukum pelaksanaan transmigrasi ini adalah: UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009; PP Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU; Nomor 15 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009; Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi; Permen Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Tabel II. 36 Indikator Urusan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah transmigran yg ditempatkan	5 KK	4 KK	14 KK	0 KK	0 KK	10 KK

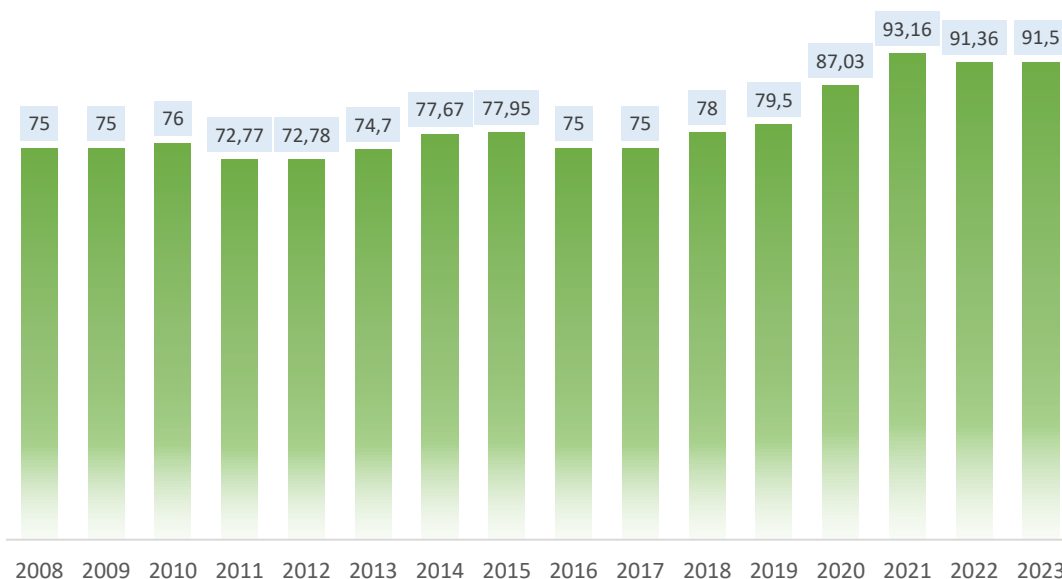
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi, 2024

Urusan transmigrasi di Kabupaten Banyuwangi diampu oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan industri yang menjadi kewenangan daerah; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun data terkait jumlah transmigran yang ditempatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, sejumlah 55 KK, kemudian 4KK, pada tahun 2020 sampai 2021 tidak ada keluarga yang bertransmigrasi mengingat tahun itu Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19, dan pada tahun 2022 terdapat 10 KK yang bertransmigrasi.

2.4.4 Unsur Pendukung

A. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan salah satu bagian dalam unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Berikut ini adalah beberapa indikator yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:



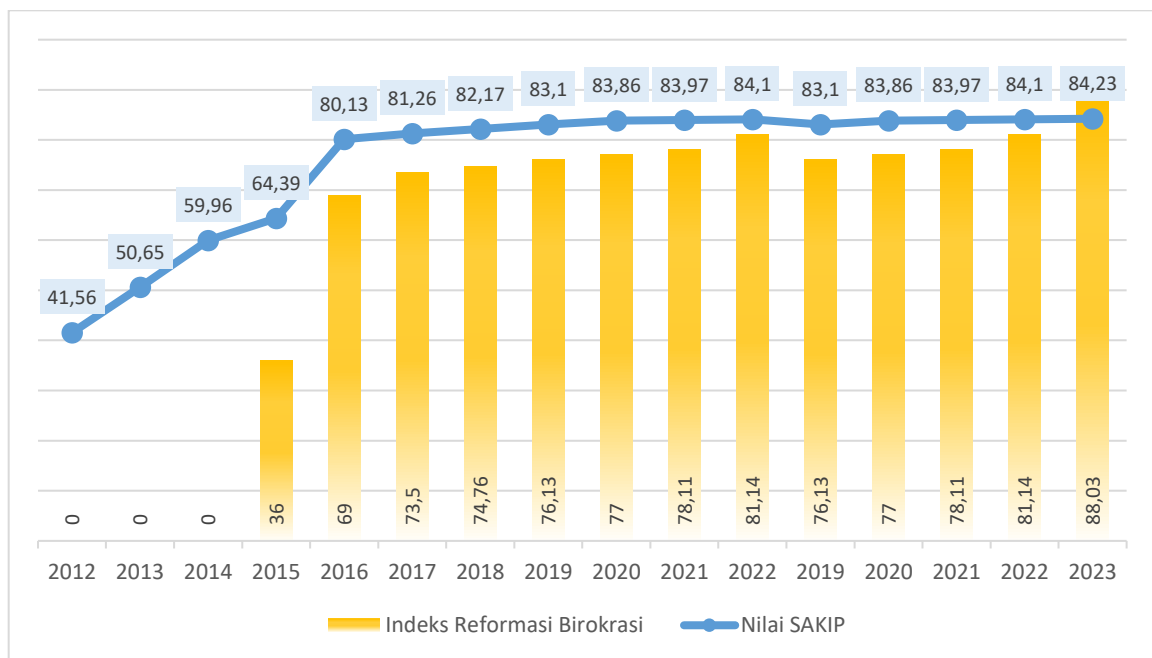
Gambar II. 93 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam konteks pelayanan publik, pengukuran kepuasan masyarakat telah dimandatkan kepada penyelenggara pelayanan publik melalui Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya membangun sistem yang adil, transparan dan akuntabel. Survei kepuasan diatur secara teknis pelaksanaan survei tersebut ke dalam Peraturan Menteri PAN-RB No. 14/2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit kerja Penyelenggara Pelayanan Publik. Sebagaimana grafik di atas, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Banyuwangi dalam rentang 2008-2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung naik. Capaian IKM tahun 2008 menunjukkan angka 75 dan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 91.36 meskipun capaian tertinggi ada di tahun 2021 sebesar 93.16. Tren kenaikan nilai IKM di Kabupaten Banyuwangi menjadi bukti bahwa kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah memberikan kepuasan dan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Hal ini sebanding dengan bentuk komitmen dari pemimpin hingga seluruh unit kerja secara bersama-sama bersinergi. Baiknya nilai IKM di Kabupaten Banyuwangi dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari meningkatkan kualitas pelayanan publik yang konsisten demi

terwujudnya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pihak pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Indikator selanjutnya adalah terkait Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), yaitu salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja reformasi birokrasi di Indonesia. Kabupaten Banyuwangi dalam rentang tahun 2015-2023 mengalami perkembangan capaian IRB yang fluktuatif. Dari angka 36 di tahun 2015 dan tumbuh menjadi 88.03 di tahun 2023. Peningkatan ini tentunya menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahannya menuju *world class government*, salah satunya melalui pembangunan sumber daya aparatur melalui pendidikan. Permasalahan yang masih terjadi adalah adanya kendala dari sesi administrasi dan izin belajar bagi ASN Kabupaten Banyuwangi yang berniat untuk menempuh pendidikan. Tantangan ke depan dalam perwujudan reformasi birokrasi adalah semakin tingginya ekspektasi dan harapan masyarakat di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, sehingga dibutuhkan alternatif penerapan *e-government* di seluruh lini layanan maupun operasional perangkat daerah di Kabupaten Banyuwangi.



Gambar II. 94 Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2024

Indikator selanjutnya adalah nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Secara konsisten perolehan nilai SAKIP oleh Kabupaten Banyuwangi dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren kenaikan yang positif. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas

keuangan. Selama rentan waktu tahun 2016-2022, Kabupaten Banyuwangi telah mendapatkan predikat SAKIP A dikarenakan capaian nilai di rentang 80-90. Berikut merupakan capaian predikat SAKIP Kabupaten Banyuwangi secara lengkap:

Tabel II. 37 Predikat SAKIP Kabupaten Banyuwangi

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Predikat SAKIP	C	CC	CC	B	A	A	A	A	A	A	A	A

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2024

B. Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 69 tahun 2021 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Secara teknik Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun secara rinci capaian dari indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada poin di bawah ini:



Gambar II. 95 Raperda yang Disahkan menjadi Perda Tepat Waktu di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Banyuwangi, 2024

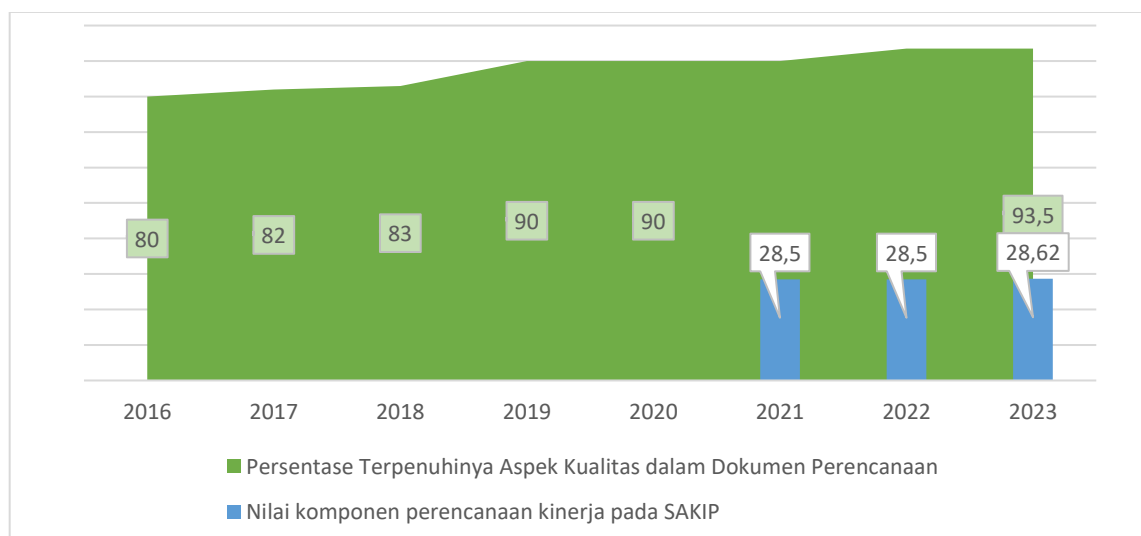
Persentase Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang disahkan menjadi Perda (Peraturan Daerah) secara tepat waktu di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren

capaian yang fluktuatif pada tahun 2015–2023 dan cenderung menurun pada tiga tahun terakhir. Namun capaian realisasi pada tahun 2023 meningkat diangka 53 Raperda. Hambatan yang menjadikan lambatnya proses pengesahan Raperda menjadi Perda disebabkan oleh masih adanya kepentingan politik pada proses penyusunan Raperda, diikuti dengan banyaknya pengusulan raperda inisiatif (dari lembaga legislatif) akan tetapi tidak disertai dengan kajian yang mendalam. Faktor perubahan regulasi yang dinamis dan ketat menjadikan pemerintah lebih selektif dalam penyusunan Raperda serta adanya sistem kerja kolektif kolegial. Isu yang berkembang di dalam penyelenggaraan urusan ini adalah belum adanya regulasi terkait sengketa/permasalahan yang ada di masyarakat untuk nantinya dijadikan bahan *agenda setting* penentuan isu strategis yang akan diangkat sebagai program prioritas melalui penyusunan raperda.

2.4.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan


A. Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi terkait perencanaan yang bersifat strategis yang mana diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan. Penyelenggaraan unsur penunjang perencanaan di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 91 Tahun 2021, diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuwangi. Dengan perencanaan yang baik, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat mengelola sumber daya secara lebih efisien, mengatasi masalah-masalah pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.



Gambar II. 96 Indikator Urusan Perencanaan Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2024



Dalam konteks unsur penunjang perencanaan bagi setiap pemerintah daerah, terdapat tiga jenis dokumen perencanaan yang disusun oleh dengan tujuan merencanakan langkah-langkah strategis dalam kurun waktu tertentu. Jenis-jenis dokumen perencanaan ini mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan jangka waktu perencanaan selama 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan fokus pada perencanaan 5 tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menitikberatkan pada perencanaan tahunan. Persentase terpenuhinya aspek kualitas dokumen perencanaan mengacu pada sejauh mana dokumen tersebut memenuhi standar dan kriteria kualitas yang telah ditetapkan dari segi kompleksitas, akurat, relevan, dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kabupaten Banyuwangi dalam rentang tahun 2016-2023, berhasil secara konsisten berkomitmen memenuhi standarisasi kualitas dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, dari capaian 80% di tahun 2016 menjadi 93.5% di tahun 2022.

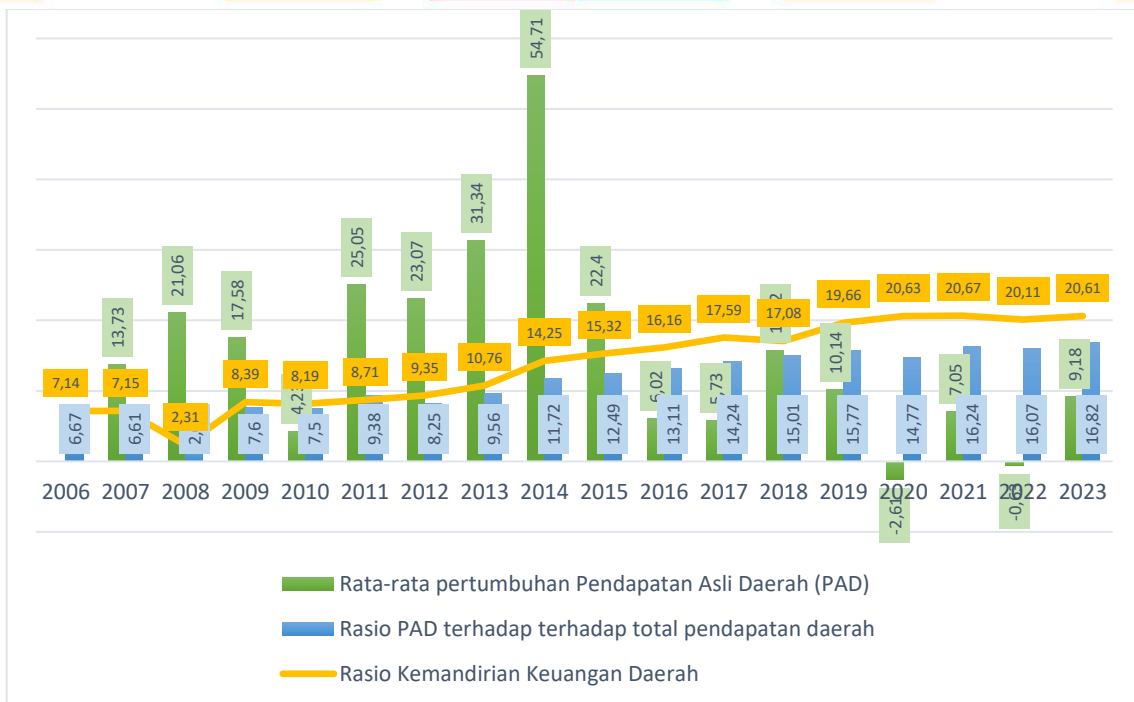
Indikator selanjutnya adalah nilai komponen perencanaan kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Komponen dalam SAKIP dapat berbeda-beda di setiap instansi pemerintah dan dapat disesuaikan dengan tujuan, sasaran, dan kondisi masing-masing. Secara garis besar, perencanaan kinerja meninjau kualitas dokumen perencanaan baik itu RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) serta keselarasan dokumen perencanaan antar PD. Berdasarkan data tahun 2021-2023, secara konsisten nilai komponen perencanaan kinerja pada evaluasi SAKIP Kabupaten Banyuwangi ada di angka 28.62%.

Isu dan tantangan yang berkembang dalam penyelenggaraan unsur penunjang perencanaan bagi Bappeda Kabupaten Banyuwangi adalah adanya *hyper regulation*, atau sebuah kondisi di mana jumlah produk perundang-undangan yang terlalu banyak sehingga berdampak pada inkonsistensi sistem dan kebijakan di pemerintah daerah. apat mengakibatkan ketidakpastian, biaya tambahan, penghambatan inovasi. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi dan misi Kabupaten Banyuwangi sebagai *Smart City* sudah selayaknya dilakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi sebagai *tools* dalam penyusunan perencanaan sehingga lebih optimal dengan memanfaatkan data, bukti dan sumber daya yang ada.

B. Keuangan

Kinerja urusan keuangan daerah di Kabupaten Banyuwangi direpresentasikan dengan dua indikator pembangunan yaitu Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dan Rasio kemandirian keuangan daerah. Berikut ini data kinerjanya sejak tahun 2006-2023:






Gambar II. 97 Indikator Unsur Penunjang Keuangan di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: BPKAD Kabupaten Banyuwangi, 2024

Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi selama rentang tahun 2007-2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2014 sebesar 54,71% dan terendah di tahun 2020 sebesar -2,61% akibat adanya pandemi Covid-19 yang melumpuhkan perekonomian daerah yang berakibat pada turunnya pendapatan daerah. Capaian di tahun 2023 sebesar 9,18% cenderung mengalami tren peningkatan. Hal yang masih perlu diperhatikan terkait rendahnya ketercapaian penerimaan pendapatan adalah masih banyaknya wajib pajak yang bukan orang Banyuwangi sehingga terkendala penagihan sehingga diperlukan optimalisasi kualitas belanja dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar.

Selanjutnya terkait data rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2006 hingga 2023 menunjukkan beberapa tren dan perubahan signifikan. Pada awal periode (tahun 2006-2008), rasio PAD terhadap total pendapatan daerah relatif stabil di sekitar 6-7%. Namun, pada tahun 2008, terjadi penurunan yang cukup tajam menjadi 2,01%, mencerminkan potensi perubahan dalam struktur pendapatan daerah. Selanjutnya, terlihat tren kenaikan yang signifikan dari tahun 2009 hingga 2023, di mana rasio PAD mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan nilai 16,82%. Peningkatan ini menunjukkan upaya dan keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan melalui optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi



secara online dan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak melalui sosialisasi.

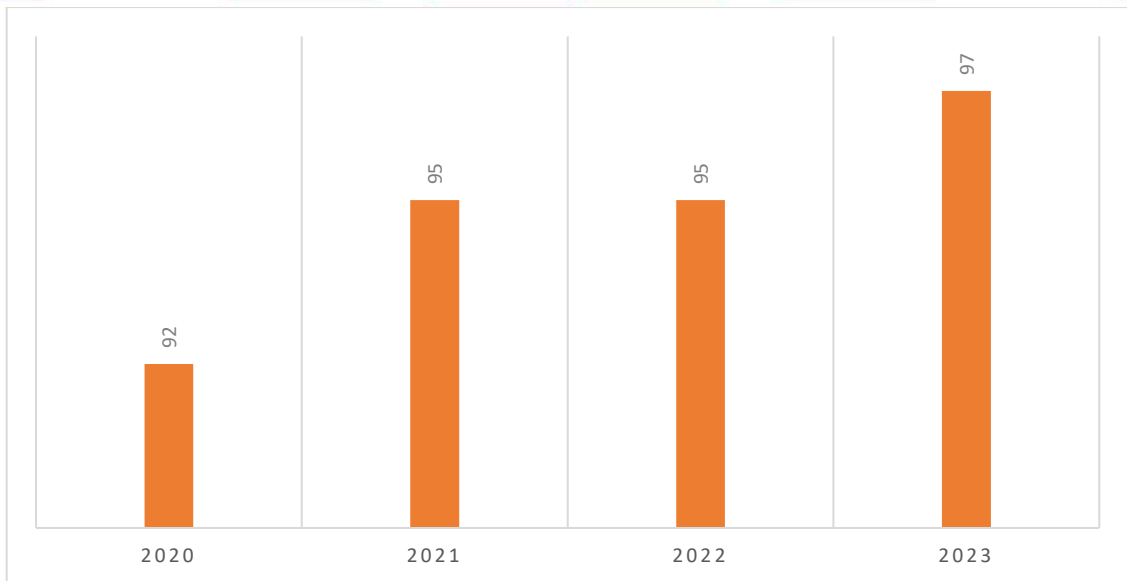
Terakhir rasio kemandirian keuangan daerah, yang mengukur sejauh mana daerah dapat mengelola keuangannya secara mandiri, juga mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang periode yang sama. Pada tahun 2006, rasio kemandirian sekitar 7.14%, dan mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2021 dengan nilai 20.67%. Capaian terakhir di tahun 2023 berada di angka 20.615. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi berhasil mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat dan sumber pendapatan lainnya, sehingga dapat mengelola keuangan daerah secara lebih mandiri.

Peningkatan rasio kemandirian keuangan dan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah secara bersamaan mencerminkan kebijakan fiskal yang efektif dan diversifikasi pendapatan daerah. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa beberapa fluktuasi pada tahun-tahun tertentu mungkin memerlukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Keseluruhan, data tersebut memberikan gambaran positif tentang kemajuan fiskal Kabupaten Banyuwangi, dengan potensi untuk terus meningkatkan kemandirian keuangan daerah di masa mendatang melalui peningkatan inovasi pengelolaan keuangan di daerah.

C. Kepegawaian

Persentase pegawai yang berkinerja baik di Kabupaten Banyuwangi selama periode dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, mendapati persentase 92%. Kemudian, terjadi peningkatan ke 95% pada tahun 2021, dan nilai ini bertahan hingga tahun 2022. Pada tahun 2023, ada peningkatan lebih lanjut dengan persentase pegawai yang berkinerja baik mencapai 97%. Grafik ini secara efektif menunjukkan trend positif dalam kinerja pegawai di Kabupaten tersebut selama empat tahun tersebut. Hal ini terjadi karena program pelatihan yang berkelanjutan dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi pegawai, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kinerja mereka. Termasuk penggunaan teknologi untuk efisiensi operasional, dapat menyebabkan peningkatan kinerja pegawai. Serta, penerapan sistem penilaian kinerja yang adil dan transparan memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik dan meningkatkan produktivitas mereka.

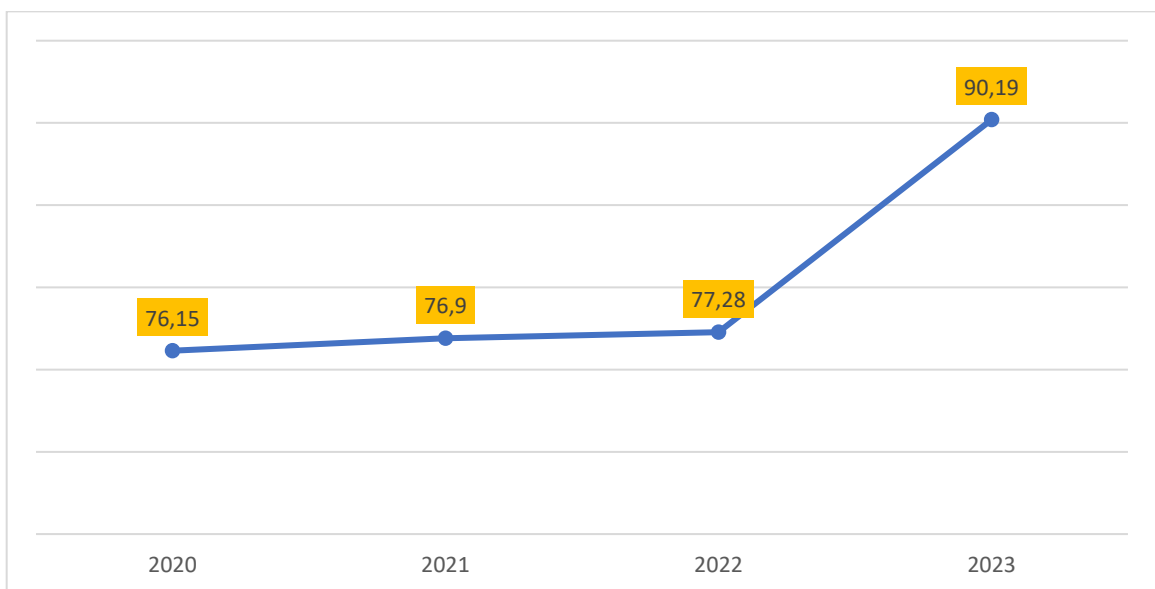




Gambar II. 98 Persentase Pegawai yang Berkinerja Baik di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: BKPSDM Kabupaten Banyuwangi, 2024

Dalam penentuan persentase Pegawai berkinerja baik di kabupaten Banyuwangi terdapat dua indeks penilaian, yakni profesionalitas ASN dan penilaian penerapan sistem merit. Indeks Profesionalitas ASN mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2023 dengan nilai 90,19. Jika melihat grafik dibawah ini menunjukkan pada 4 tahun terakhir bahwa profesionalitas aparatur sipil negeri di tahun 2023 sangat tinggi dibanding dengan tahun yang lain.

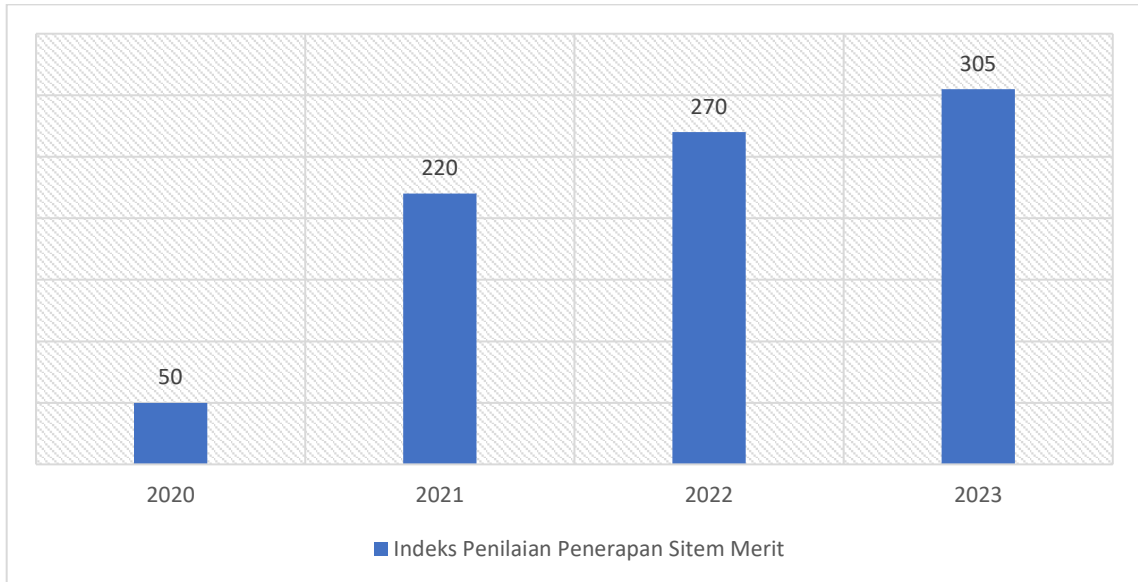


Gambar II. 99 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Banyuwangi

Sumber: BKPSDM Kabupaten Banyuwangi, 2024

Selanjutnya pada indeks penilaian penerapan sistem merit. Grafik tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam indeks tersebut sepanjang periode yang diamati. Pada tahun 2020, indeks berada pada level yang sangat rendah yaitu 50.

Terjadi peningkatan yang dramatis pada tahun 2021 dengan nilai indeks mencapai 220, dan kemudian terus meningkat menjadi 270 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, nilai indeks mencapai puncaknya dengan skor 305, menandakan peningkatan berkelanjutan dan signifikan dalam penerapan sistem merit di Banyuwangi.

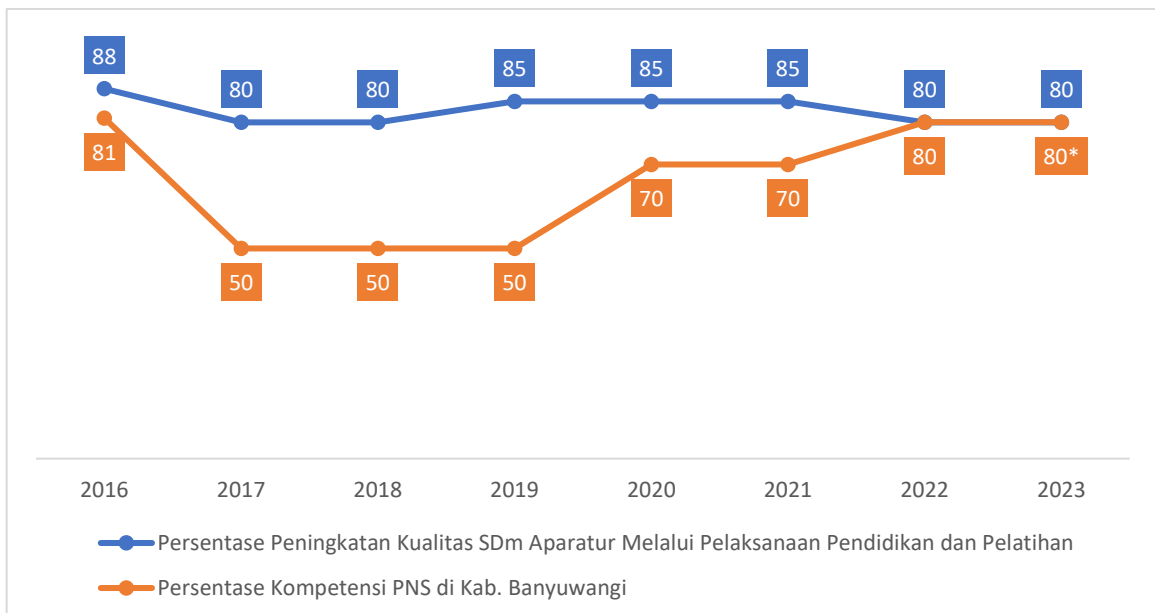


Gambar II. 100 Indeks penerapan Sistem Merit di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: BKPSDM Kabupaten Banyuwangi, 2024

D. Pendidikan dan Pelatihan

Berikut ini adalah data kinerja dari urusan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar II. 101 Indikator Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Banyuwangi

Keterangan: (*) Angka sementara

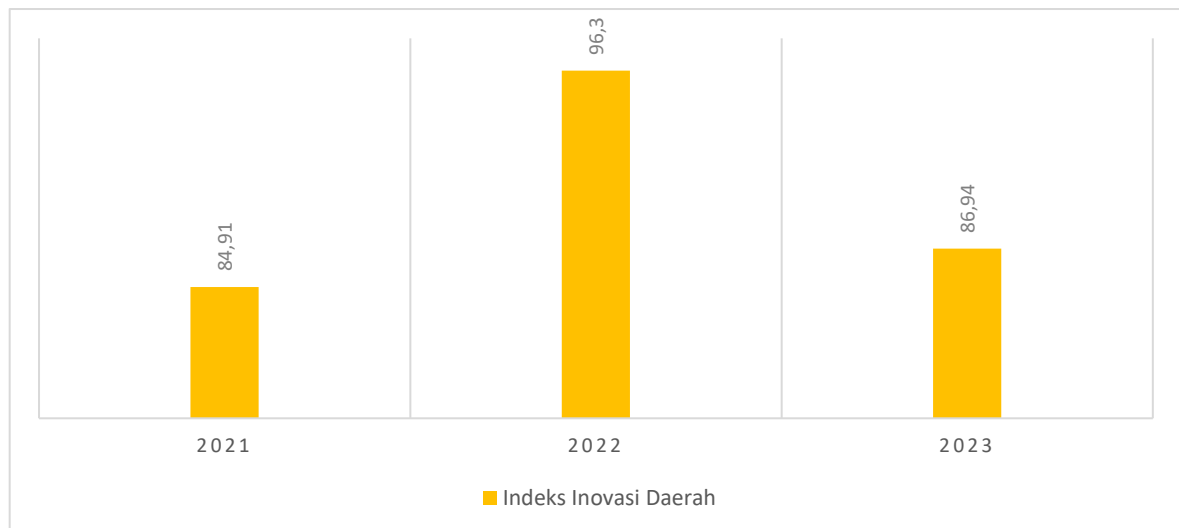
Sumber: BKPP Kabupaten Banyuwangi, 2024

Dari data persentase peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, serta persentase kompetensi PNS di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2016 hingga 2023, terlihat adanya beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait isu-isu kepegawaian. Pada awal periode, terjadi peningkatan kualitas SDM dengan persentase mencapai 88% pada tahun 2016 dan kemudian menurun menjadi 80% pada tahun 2018. Sementara itu, persentase kompetensi PNS relatif stabil di sekitar 80% selama periode yang sama.

Namun, tahun 2019 menjadi titik fokus dengan terjadinya penurunan yang signifikan dalam persentase kompetensi PNS menjadi 50%. Hal ini dapat menjadi perhatian serius terkait efektivitas program pendidikan dan pelatihan atau mungkin adanya kendala implementasi kebijakan kepegawaian. Meskipun demikian, periode 2020 hingga 2023 menunjukkan tanda-tanda pemulihan, di mana persentase kompetensi PNS kembali meningkat menjadi 70% dan 80%.

E. Penelitian dan Pengembangan


Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu unsur penunjang yang secara teknis diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Kinerja urusan penelitian dan pengembangan direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:



Gambar II. 102 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2024

Berdasarkan capaian di atas, secara tren capaian Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Banyuwangi mengalami fluktuatif dari segi skor namun secara peringkat telah konsisten sebagai kabupaten dengan predikat sangat inovatif. Hal ini diwujudkan melalui upaya membangun budaya inovasi dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menumbuhkan komitmen dalam



membangunklim budaya inovasi pelayanan dengan beberapa strategi antara lain pendidikan dan pelatihan, pengakuan dan penghargaan, komitmen pemimpin dan pemanfaatan teknologi secara strategis. Inovasi-inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mampu melakukan percepatan dalam penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan daerah melalui pelayanan publik yang berkualitas di tengah keterbatasan dan tantangan perubahan yang ada.

Indikator lain yang merepresentasikan kinerja urusan penelitian dan pengembangan adalah dalam kurun waktu 2016 hingga 2020, Kabupaten Banyuwangi mencapai pencapaian positif dengan persentase data dan informasi perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan sebagai policy brief sebesar 80%. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pemanfaatan hasil riset, penelitian, dan pengembangan sebagai landasan kebijakan. Pada tahun 2021, terjadi perubahan indikator kinerja yang mengukur terpenuhinya persentase hasil riset yang dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, dengan pencapaian sebesar 81%.

Faktor utama yang mempengaruhi peningkatan ini adalah penekanan pada penyusunan hasil riset, penelitian, dan pengembangan berdasarkan kebutuhan serta kondisi riil permasalahan dalam pembangunan daerah. Pendekatan ini memungkinkan hasil riset tidak hanya menjadi sekadar informasi, tetapi juga dapat diintegrasikan secara langsung sebagai policy brief, mendukung kebijakan pimpinan daerah. Keterlibatan riset yang relevan dan berbasis kebutuhan di dalam proses perencanaan pembangunan menjadi kunci dalam menjadikan data dan informasi sebagai alat yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan.

Pentingnya integrasi hasil riset ke dalam perencanaan pembangunan mencerminkan komitmen Kabupaten Banyuwangi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat, terkini, dan relevan dengan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang mendukung keberlanjutan pendekatan ini perlu dipertahankan dan diperkuat, termasuk kolaborasi yang erat antara lembaga penelitian, instansi perencanaan, dan pimpinan daerah.

Sebagai suatu rekomendasi, perlu terus mendorong inovasi dalam penyusunan hasil riset agar tetap responsif terhadap dinamika permasalahan pembangunan. Selain itu, penguatan koordinasi antarstakeholder dan peningkatan kapasitas SDM terkait perencanaan pembangunan dapat menjadi langkah-langkah yang strategis untuk memastikan keberlanjutan dalam memanfaatkan data dan informasi sebagai landasan kebijakan di Kabupaten Banyuwangi.



2.4.6 Unsur Pengawas

A. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Skor APIP (Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Integritas, dan Tata Kelola) dan Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Kabupaten Banyuwangi yang telah mencapai level 3 sejak tahun 2018 hingga di tahun 2023 merupakan indikator positif terhadap kualitas pengelolaan dan pengendalian internal pemerintah daerah. Namun, beberapa faktor krusial mempengaruhi hasil tersebut dan perlu dianalisis secara mendalam.

Tindak lanjut terhadap temuan perangkat daerah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi skor APIP dan maturitas SPIP. Keterlambatan atau kurangnya respons terhadap temuan dapat merugikan efektivitas sistem pengawasan internal. Terdapat permasalahan yang signifikan terkait sistem pengawasan internal yang dianggap sebelah mata oleh beberapa pihak, disebabkan oleh minimnya sistem reward and punishment. Ini dapat menyebabkan kurangnya insentif untuk memastikan penerapan standar dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola internal.

Ketidakefektifan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) internal inspektorat, khususnya terkait tindak lanjut temuan, menjadi tantangan tambahan. Irban (Internal Bawahan) yang bertugas memeriksa hingga laporan hasil temuan namun penagihan dilakukan di sekretariat dapat menunjukkan kurangnya koordinasi atau efisiensi dalam alur kerja. Hal ini dapat berdampak pada kecepatan dan keberlanjutan tindak lanjut terhadap temuan.

Standarisasi SDM auditor yang belum sepenuhnya memiliki persamaan persepsi juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keseragaman pemahaman dan pendekatan dalam melaksanakan tugas menjadi kunci untuk memastikan keakuratan dan keobjektifan hasil pemeriksaan.

Sebagai rekomendasi, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan efektivitas tindak lanjut temuan, memperkuat sistem *reward and punishment*, dan meningkatkan koordinasi antarunit di internal inspektorat. Peningkatan standarisasi SDM auditor juga menjadi langkah penting untuk memastikan konsistensi dan kualitas pemeriksaan internal. Dengan demikian, upaya terus-menerus untuk memperbaiki aspek-aspek ini dapat memastikan keberlanjutan dan peningkatan dalam tata kelola dan pengendalian internal pemerintah daerah.

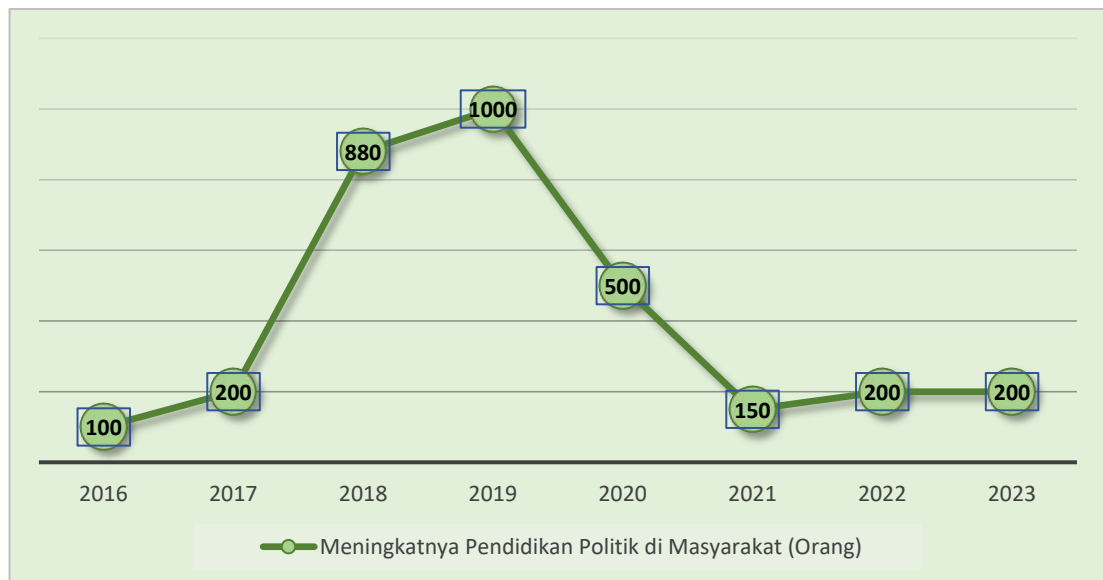
2.4.7 Unsur Pemerintahan Umum

1. Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan kesatuan bangsa dan Politik merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kemendagri sekaligus perangkat dari organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam suatu daerah kabupaten/ kota. Dalam hal ini OPD kesbangpol melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan Amanah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 12 Ayat 1.

1. Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat (Orang)


Politik secara ringkas adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses memerintah dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga/institusi, tujuan negara atau pemerintahannya. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan memahami apa hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara. Mereka hanya hidup berdsarkan kepentingan mereka masing-masing dan tanpa peduli dengan hak dan kewajiban mereka. Padahal jika mereka menggunakan hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara dalam partisipasi politik, mereka dapat turut serta merubah pola pemeritahan yang ada pada negara yang dapat mempengaruhi hidup mereka. Hal tersebutlah yang mempengaruhi dan mengharuskan adanya Pendidikan politik kepada Masyarakat.



Gambar II. 103 Peningkatan Pendidikan Politik di Masyarakat Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, 2024

Melihat data diatas, nilai capaian pada indicator meningkatnya Pendidikan politik di Masyarakat mengalami peningkatan dari tahun 2016 yakni 100 orang dan pada tahun 2019 yakni 1000 orang. Namun di tahun 2020 capaian mengalami penurunan hingga 500 orang. Kondisi penurunan tersebut terus terjadi hingga ditahun 2021. Hal



tersebut dikarenakan pada tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan pengalihan anggaran untuk penanganan covid. selain itu juga dipengaruhi oleh perkembangan politik yang tidak stabil di pusat sehingga kesulitan untuk menentukan langkah kebijakan apa yg harus diambil. Dan juga Pemerintah Daerah sulit mengambil langkah karena ditakutkan akan menyinggung atau kejadian sensitif. Pada tahun 2022 dan 2023, angka ini kembali meningkat meskipun tidak signifikan.

Ketidaktahuan masyarakat akan berpolitik mencerminkan bahwa Pendidikan politik tidak berperan secara maksimal dalam sebuah daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan pendidikan masyarakatnya, sehingga pendidikan harus diutamakan dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Pendidikan politik harusnya membina dan mengembangkan pengetahuan masyarakat dalam kehidupan politik guna meningkatkan berpartisipasi Masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena masyarakat merupakan sumber daya insani potensial yang perlu dikembangkan dan diakutualkan, juga perlu mendapatkan pendidikan politik yang wajar, supaya mampu berpartisipasi politik. Untuk itu kedepannya perlu dilakukan beberapa tindakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seperti lebih mengencarkan dengan melakukan kegiatan sosialisasi terkait politik sejak dini dengan sasaran sekolah SD, SMP. Melakukan kerjasama dengan Posyandu dengan sasaran ibu dan balita, dengan harapan bahwa ibu- ibu akan dikasih wawasan kebangsaan dan politik. Serta melakukan Pengkuruan kinerja untuk ibu- ibu yg diberi wawasan kebangsaan dengan dicantumkan di buku KMS (Kartu Menuju Sehat).

2. Terwujudnya Penanganan Konflik (Kejadian)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial masih bersifat parsial dan belum komprehensif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial. asar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik.





Gambar II. 104 Terwujudnya Penanganan Konflik di Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, 2024

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa kejadian konflik yang berhasil dilakukan penanganan terus bertambah hingga di tahun 2019 sampai 2023 dengan capaian 4 kejadian konflik yang tertangani. Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya Adanya Forkopimcam beserta anggotanya seperti koramil dan polsek dan juga Camat, Toga, Tomas yang akan melakukan mediasi dengan Masyarakat, dikarenakan Forkopimda dan Forkopimcam sebagai ujung tombak untuk menyelesaikan permasalahan di Masyarakat. Selain itu dibentuknya dan dioperasikannya aplikasi Sidediwasda (Sistem deteksi dini kewaspadaan daerah) diperuntukan untuk mencegah dan medeteksi dini segala kerawanan konflik di daerah (kecamatan). Namun juga ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat yaitu adanya provokator yang menggerakkan dan menyulut amarah dan masa Masyarakat serta kurangnya toleransi jika ada perbedaan yang ada dilingkungan mereka.

Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik; penetapan Status Keadaan Konflik; tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau penerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Sedangkan penanganan konflik pada pascakonflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi; rehabilitasi; dan rekonstruksi. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dan pendanaan Penanganan Konflik.

2.5 EVALUASI RPJPD KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2005-2025

2.5.1 Evaluasi RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015

Dalam kampanye yang telah disampaikan, platform bupati terpilih di antaranya sebagai berikut:


a. Visi:

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Perumusan visi dapat dilakukan melalui cara pengumpulan informasi mengenai keadaan daerah yang bersangkutan melalui informasi normatif, informasi visioner, dan informasi teknis. Sesuai dengan hasil pemilu di Kabupaten Banyuwangi terpilih pasangan H. Abdullah Azwar Anas—Yusuf Widyatmoko yang telah membuat visi Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”

Penjelasan Visi:

1. Kemandirian Daerah adalah kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan ekonomi yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
3. Peningkatan perekonomian diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, industri, perdagangan dan jasa, lembaga



keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung oleh infrastruktur fisik dan non-fisik yang memadai.

4. Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sembilan butir sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan;
2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan dan aspek kelestarian lingkungan;
4. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja;
5. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal;
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
9. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

Dari sembilan misi diatas dapat diintisarikan menjadi beberapa poin penting yang saling berkaitan satu sama lain dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Intisari misidiatas adalah sebagai berikut:



1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*);
2. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan bidang Pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berikut merupakan gambaran capaian kinerja RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010- 2015 yaitu seperti dibawah ini:

Tabel II. 38 Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015

No	Misi	Realisasi Capaian Kinerja	Interpretasi Capaian Kinerja
1	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>)	97,94	Sangat Tinggi
2	Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan bidang Pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	84,10	Tinggi
3	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal	136,32	Sangat Tinggi
4	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur publik	96,32	Sangat Baik
5	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan	127,50	Sangat Baik
Rata-rata Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja Periode 2010-2015		108,436	Sangat Tinggi

Sumber: Diolah, 2024

2.5.2 Evaluasi RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021

Visi RPJMD Kabupaten Banyuwangi periode ke 3 tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yaitu, Bapak H. Abdullah Azwar Anas, M.Si, dan Yusuf Widiatmoko, S.Sos. Visi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk periode RPJMD 2016-2021 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka dijabarkanlah Misi yang dibawa oleh Kepala Daerah terpilih dengan menetapkan 5 Misi untuk mewujudkan Visi pembangunannya, kelima misi tersebut adalah:

Misi Politik

- Misi 1 Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- Misi 2 Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal;
- Misi 3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial;
- Misi 4 Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- Misi 5 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good And Clean Governance*) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi.

Sebagai upaya memastikan bahwa Visi dan Misi selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Banyuwangi, maka misi politik tersebut diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan yang terukur. Sehingga sesuai konsensus masing-masing misi akan memiliki tujuan dan sasaran pembangunan yang terukur dan disertai target pembangunan yang mana pada akhir periode RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan dapat diukur tingkat ketercapaian keberhasilannya. Berikut merupakan gambaran capaian kinerja RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.

MISI PEMBANGUNAN

- Misi 1 Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;

Misi 2 Optimalisasi sumber daya untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan;

Misi 3 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*) serta layanan public yang berkualitas bebrbasis teknologi informasi.

Berikut merupakan gambaran capaian kinerja RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.

Tabel II. 39 Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021

No	Misi	Realisasi Capaian Kinerja	Interpretasi Capaian Kinerja
1	Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	97,85	Sangat Tinggi
2	Optimalisasi sumber daya untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan	72,835	Sedang
3	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good and Clean Governance</i>) serta layanan public yang berkualitas bebrbasis teknologi informasi	93,14	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja Periode 2016-2021		87,941	Tinggi

Sumber: Diolah, 2024

2.5.3 Evaluasi RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026

Visi RPJMD Kabupaten Banyuwangi periode ke-4 (empat) tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yaitu Ipek Fiestiandani Azwar Anas dan H Sugirah S.Pd, M.Si. Visi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih yaitu:

“Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera, dan Berkah”

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka dijabarkanlah Misi yang dibawa oleh Kepala Daerah terpilih dengan menetapkan 5 Misi untuk mewujudkan Visi pembangunanya, kelima misi tersebut adalah:

MISI POLITIK

1. Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi local berbasis pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata focus pada keberdayaan keluarga untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan;
2. Membangun SDm unggul, sehat jasmani-rohani, produktif dan berkarakter melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan Masyarakat berkarakter yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan, menjaga keluhuran adat istiadat, serta menguatkan gotong royong dan kerukunan dalam harmoni kebhinekaan;
4. Mempercepat Pembangunan infrastruktur ekonomi dan social yang semakin merata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
5. Memantapkan tatakelola pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital untuk mewujudkan birokrasi produktif dan kemudahan berusaha.

Dalam konteks manajemen strategis, untuk memudahkan Menyusun arsitektur kinerja Pembangunan maka misi kepala daerah diatas dilakukan transformasi menjadi Misi Pembangunan. Adapun misi Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

MISI PEMBANGUNAN

1. Membangun ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan;
2. Membangun SDM unggul berkarakter dan harmonisasi social yang kondusif;
3. Membangun layanan publik dan tatakelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis.

Berikut merupakan gambaran capaian kinerja RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

Tabel II. 40 Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026

No	Misi	Realisasi Capaian Kinerja	Interpretasi Capaian Kinerja
1	Membangun ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan	92,962	Sangat Tinggi
2	Membangun SDM unggul berkarakter dan harmonisasi social yang kondusif	102,515	Sangat Tinggi

No	Misi	Realisasi	Interpretasi
		Capaian Kinerja	Capaian Kinerja
3	Membangun layanan publik dan tatakelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis	96,054	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja Periode 2021-2026		96,43	Sangat Tinggi

Sumber: Diolah, 2024

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi

Pemahaman mendalam tentang dinamika demografis memberikan manfaat lebih lanjut bagi pemerintah, bisnis, dan lembaga lainnya dalam merespons perubahan skala populasi serta profil demografi Kabupaten Banyuwangi. Meramalkan pertumbuhan penduduk memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat, seperti menyediakan pekerjaan, perumahan, dan layanan dasar di Kabupaten Banyuwangi.

Proyeksi kependudukan yang akurat dan terperinci bukan hanya berperan sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai landasan kritis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi. Kepentingan data ini meluas melalui proyeksi penduduk hingga 20 tahun mendatang, memberikan dasar pertimbangan yang kokoh untuk perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, proyeksi kependudukan yang teliti menjadi kunci penting dalam menyusun langkah-langkah kebijakan yang dapat mengakomodasi perubahan populasi di Kabupaten Banyuwangi. Data ini tidak hanya menjadi panduan perencanaan jangka panjang, tetapi juga menjadi dasar untuk mengimplementasikan solusi-solusi yang berkelanjutan demi memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu yang signifikan.

Tabel II. 41 Proyeksi Penduduk Kabupaten Banyuwangi 2025-2045

Group of Ages	Eksisting	Proyeksi				
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	123,200	122,830	119,307	116,440	112,071	109,229
5-9	115,640	117,260	120,819	119,960	116,451	112,087
10-14	121,840	120,450	119,695	123,040	120,189	116,681
15-19	125,890	123,590	121,595	117,390	122,937	120,088
20-24	128,870	128,020	122,220	119,390	116,477	121,970

Group of Ages	Eksisting	Proyeksi				
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
25-29	127,270	127,730	125,134	121,530	118,368	115,466
30-34	123,280	124,910	125,826	126,280	120,953	117,811
35-39	120,040	120,710	123,903	126,550	125,730	120,436
40-44	124,810	121,030	122,391	123,920	126,144	125,325
45-49	130,810	129,580	122,198	119,260	122,923	125,139
50-54	123,790	126,760	123,890	117,990	117,408	121,049
55-59	109,520	113,790	120,738	123,830	114,860	114,363
60-64	90,810	96,720	106,621	116,990	117,973	109,523
65-69	69,260	74,160	87,939	99,140	107,933	109,001
70-74	50,870	53,910	64,829	76,930	86,767	94,775
75+	58,040	63,110	78,219	95,610	118,352	140,790
Total	1,743,940	1,764,560	1,805,325	1,844,250	1,865,536	1,873,733

Sumber: Diolah, 2023

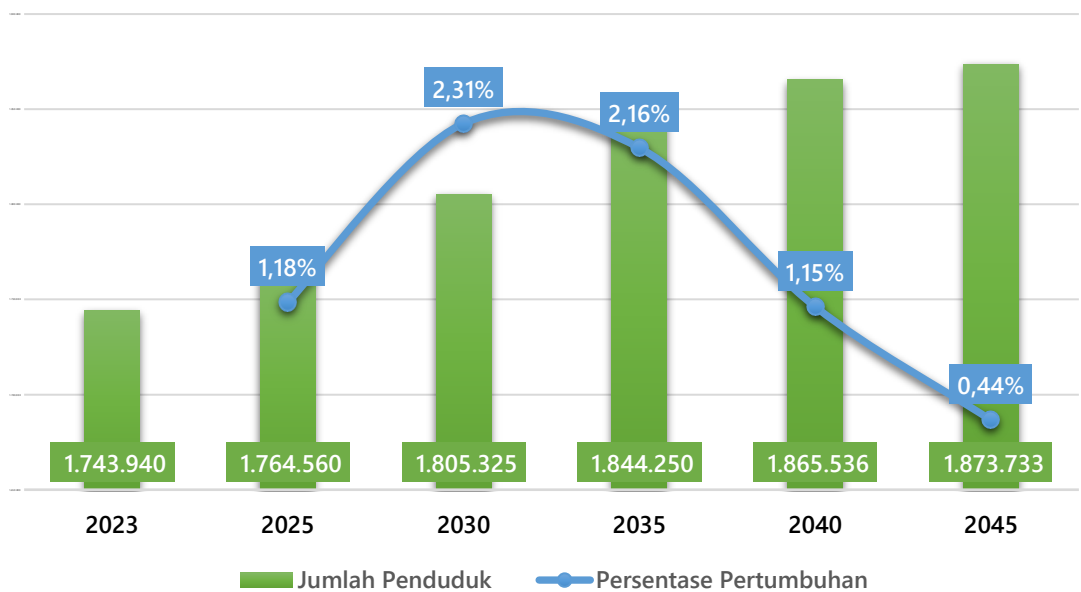
Gambaran perkembangan kondisi demografi Kabupaten Banyuwangi diperkirakan meningkat 129 ribu jiwa dari tahun 2023 yang mencapai 1.743 juta penduduk menjadi 1.873 juta pada tahun 2045 yang terdiri dari 924 ribu jiwa laki-laki dan 949 ribu jiwa ialah perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyuwangi terus meningkat. Pada tahun 2045 diproyeksikan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Banyuwangi sebesar 324 jiwa per km persegi, yang mana tumbuh dari 302 jiwa per km persegi pada tahun 2022.

Tabel II. 42 Proyeksi Penduduk Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Komponen Penduduk Tahun 2025-2045

Komponen	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
Penduduk						
Laki-Laki	872,220	881,590	896,875	915,410	922,999	924,555
Perempuan	871,720	882,970	908,450	928,840	942,537	949,178
Total	1,743,940	1,764,560	1,805,325	1,844,250	1,865,536	1,873,733
Rasio Jenis Kelamin Laki-Laki Terhadap Perempuan (%)	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97
Kepadatan Penduduk (jiwa / km ²)	302	305	312	319	323	324
Komposisi Penduduk (%)						
0-14 Tahun	20.68%	20.43%	19.93%	19.49%	18.69%	18.04%
15-64 Tahun	69.10%	68.73%	67.27%	65.78%	64.53%	63.57%
65 + Tahun	10.22%	10.83%	12.79%	14.73%	16.78%	18.39%
Angka Ketergantungan (%)	44.71%	45.49%	48.65%	52.02%	54.97%	57.30%

Sumber: Diolah, 2023

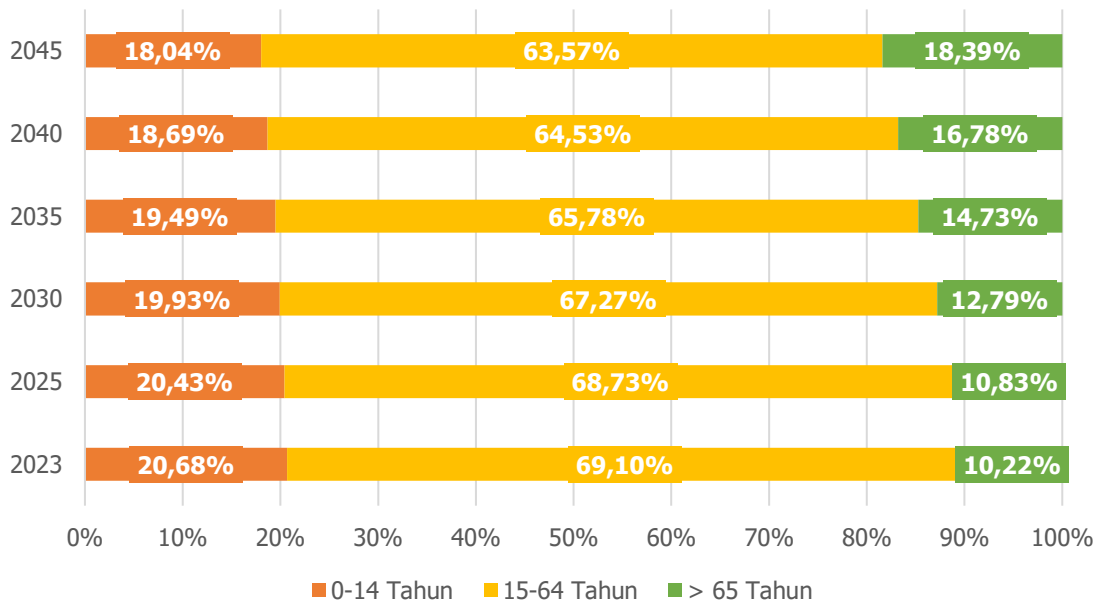
Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banyuwangi secara tren konsisten setiap periodenya tumbuh. Bahkan diproyeksikan pertumbuhan penduduk meningkat dari tahun 2025 dan tahun 2030, namun secara perlahan pertumbuhan melemah pada tahun 2035 hingga tahun 2045. Pertumbuhan penduduk tahun 2025 meningkat dari tahun 2023 mencapai 1,18%. Persentase penduduk meningkat pada tahun 2030 mencapai 2,31%, tumbuh secara konsisten namun melemah pada tahun 2035 mencapai 2,16%. Persentase pertumbuhan terus melemah pada tahun 2040 dan tahun 2045 dimana pada tahun 2040 mencapai 1,15% dan 0,44% pada tahun 2045.



Gambar II. 105 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Diolah, 2023

Perhatian tertuju pada angka pertumbuhan penduduk khususnya pada kelompok usia tertentu, justru mengalami penurunan. Penduduk usia 0 – 14 tahun dan 15-64 Tahun justru mengalami penurunan begitupun dengan proporsinya. Lain halnya dengan usia lansia 65 tahun keatas yang cenderung mengalami peningkatan secara jumlah maupun proporsinya. Hal yang perlu diperhatikan ialah selain menurunnya proporsi jumlah usia 0-14 tahun dan 15-64 tahun, jumlah secara kuantitasnya diproyeksi juga akan mengalami penurunan. Kedepannya yang terjadi ialah jumlah usia produktif yang proporsinya semakin sedikit artinya beban untuk menanggung usia non produktif semakin besar.



Gambar II. 106 Proyeksi Proporsi Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

Sumber: Diolah, 2023

Capaian tersebut tentunya berkaitan pula terhadap angka ketergantungan Kabupaten Banyuwangi dimana justru mengalami penurunan dari 44.71% pada tahun 2023 menjadi 57,3% pada tahun 2045. Artinya bahwa beban usia produktif untuk menanggung usia non produktif meningkat 12% dalam kurun waktu 20 tahun. Capaian tersebut dikarenakan proporsi usia produktif menurun dan peningkatan yang cukup pesat justru ada pada usia non produktif khususnya usia 65 tahun keatas, sedangkan usia 0-14 tahun mengalami penurunan. Bila tidak dikendalikan yang dikhawatirkan ialah jumlah penduduk usia 0-14 tahun akan terus menurun dan jangka panjangnya akan memengaruhi generasi setelahnya.

Terakhir ialah rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Banyuwangi saat ini mencapai 1:1 atau hampir seimbang, meskipun pada tahun 2023 jumlah usia laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, namun diperkirakan pada tahun 2045 pertumbuhan jumlah penduduk perempuan lebih pesat, sehingga proporsi antara perempuan dan laki-laki akan berbalik. Pada tahun 2045 angka ketergantungan menunjukkan bahwa dari 100 jumlah perempuan terdapat 97 laki-laki.

2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kabupaten Banyuwangi

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana dalam penyusunan dokumen RPJPD sangat penting untuk memastikan perkembangan wilayah yang berkelanjutan dan seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana dapat membantu pemerintah daerah dalam merencanakan dan membangun infrastruktur sesuai dengan pertumbuhan penduduk, mengalokasikan sumber daya yang efisien sesuai prioritas, serta dapat menghindari kekurangan fasilitas. Adapun proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana di Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan membandingkan proyeksi jumlah penduduk dan kriteria cakupan pelayanan berdasarkan acuan dari Standar Nasional Indonesia.

A. Proyeksi Kebutuhan Prasarana Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk

Proyeksi kebutuhan prasarana Pendidikan terhadap jumlah penduduk dalam penyusunan dokumen RPJPD sangat penting untuk memastikan bahwa system Pendidikan dapat mengakomodasi pertumbuhan penduduk. Adanya pertumbuhan penduduk yang pesat maka kebutuhan akan fasilitas Pendidikan seperti sekolah, kelas dan sumber daya Pendidikan lainnya turut meningkat. Proyeksi ini membantu pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk. Tanpa proyeksi yang akurat, risiko kekurangan fasilitas, kepadatan siswa, dan keseimbangan distribusi Pendidikan dapat muncul, yang pada akhirnya akan menghambat akses Pendidikan yang merata.

Selain itu proyeksi kebutuhan prasarana Pendidikan membantu pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengantisipasi tantangan di masa depan dan memastikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung perkembangan generasi muda. Melalui perencanaan yang tepat, daerah dapat menghindari situasi Dimana permintaan melebihi kapasitas yang mengakibatkan penurunan kualitas Pendidikan. Proyeksi ini juga memungkinkan penyesuaian kurikulum dan program Pendidikan berdasarkan tren demografis, sehingga Pendidikan dapat tetap relevan dan bermanfaat bagi Masyarakat. Lebih jauh lagi, melalui perencanaan yang efektif, pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendorong partisipasi aktif siswa serta mendukung pertumbuhan social dan ekonomi daerah secara keseluruhan. Adapun perhitungan proyeksi kebutuhan prasarana Pendidikan terhadap jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2045 dapat dilihat melalui table berikut:

Tabel II. 43 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	1.743.940	1.764.560	1.805.324	1.844.250	1.865.536	1.873.733
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
- TK	797	288	288	288	279	270
- SD/MI	806	225	225	225	218	211
- SMP/MTs	224	253	253	253	251	248
- SMA/MA/SMK	145	253	253	253	251	248

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Data tabel diatas menunjukkan bahwa kebutuhan prasarana Pendidikan pada setiap jenjang Pendidikan selama tahun 2025-2045 di Kabupaten Banyuwangi tidak selalu meningkat bergantung pada hasil proyeksi jumlah penduduk sesuai kelompok usia. Adapun kondisi eksisting prasarana Pendidikan TK dan SD di Kabupaten Banyuwangi sudah melebihi kebutuhan yang diproyeksikan. Adapun kondisi eksisting jumlah SD/MI di Kabupaten Banyuwangi yang saat ini terdapat kelebihan 509-581 gedung sekolah dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan di masa mendatang. Jumlah fasilitas pendidikan dasar yang tersedia saat ini lebih banyak daripada yang diperkirakan akan diperlukan untuk memenuhi permintaan pendidikan di masa mendatang, baik karena penurunan jumlah siswa atau perubahan demografis lainnya. Dalam konteks perencanaan dan pengelolaan pendidikan, hal ini bisa berarti bahwa ada potensi untuk mengoptimalkan atau merelokasi penggunaan fasilitas tersebut, misalnya dengan menggabungkan sekolah yang kurang siswa, mengalihfungsikan gedung untuk keperluan lain, atau menginvestasikan kembali sumber daya tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara untuk prasarana Pendidikan SMP dan SMA/SMK masih belum mampu memenuhi proyeksi kebutuhan, sehingga pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu melakukan penambahan jumlah fasilitas Pendidikan (sekolah) ditingkat SMP dan SMA/SMK. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa Pendidikan tetap menjadi prioritas dan tersedia bagi semua lapisan Masyarakat.

B. Proyeksi Kebutuhan Prasarana Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk

Proyeksi kebutuhan prasarana Kesehatan terhadap jumlah penduduk merupakan aspek penting dalam Menyusun dokumen RPJPD karena berperan dalam memastikan tersedianya layanan Kesehatan yang memadai untuk Masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan peningkatan permintaan terhadap fasilitas

Kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Tanpa proyeksi yang tepat, Kabupaten Banyuwangi berisiko menghadapi kurangnya fasilitas Kesehatan, antrian Panjang, dan layanan medis yang tidak memadai. Melalui proyeksi yang akurat, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik dan merencanakan Pembangunan atau perluasan fasilitas Kesehatan untuk mengatasi permintaan yang meningkat.


Disamping itu, proyeksi kebutuhan prasarana Kesehatan juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat. Perencanaan yang efektif memungkinkan pemerintah daerah untuk memperkirakan kebutuhan tenaga medis, obat-obatan dan peralatan Kesehatan, serta merencanakan program-program Kesehatan yang relevan. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa Masyarakat memiliki akses pada layanan Kesehatan yang berkualitas dan tepat waktu. Proyeksi ini juga membantu mengidentifikasi daerah-daerah yang kurang terlayani, memungkinkan pemerintah untuk mengarahkan sumber daya ke area yang paling membutuhkan dan mengurangi kesenjangan akses Kesehatan. Secara keseluruhan proyeksi yang akurat memungkinkan perencanaan yang lebih baik, yang pada akhirnya mendukung system Kesehatan yang kuat dan Masyarakat yang lebih sehat. Adapun perhitungan proyeksi kebutuhan prasarana kesehatan terhadap jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2045 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel II. 44 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	1.743.940	1.764.560	1.805.324	1.844.250	1.865.536	1.873.733
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
- Rumah Sakit	13	7	8	8	8	8
- Puskesmas	45	15	15	15	16	16
- Puskesmas Pembantu	103	59	60	61	62	62
- BKIA	113	59	60	61	62	62
- Praktek Dokter	90	353	361	369	373	375
- Apotek	247	59	60	61	62	62

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Data tabel diatas menunjukkan bahwa kebutuhan prasarana Kesehatan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2045 terus mengalami



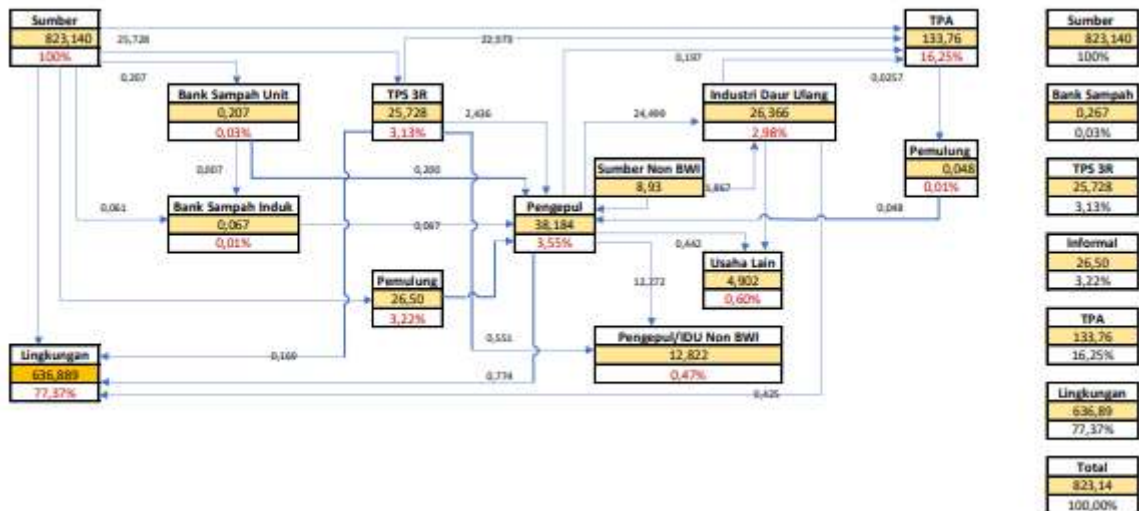
peningkatan seiring dengan terus bertambahnya proyeksi jumlah penduduk. Kondisi eksisting prasarana Kesehatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi saat ini sudah mampu memebuhi proyeksi kebutuhan akan fasilitas Kesehatan bagi Masyarakat Kabupaten Banyuwangi, kecuali tempat praktik dokter yang masih perlu dilakukan penambahan. Kondisi eksisting jumlah rumah sakit di Kabupaten Banyuwangi saat ini terdapat 13 rumah sakit dengan rincian 1 rumah sakit tipe B, 6 rumah sakit tipe C dan 6 rumah sakit tipe D. Meskipun secara kuantitas terdapat kelebihan prasarana rumah sakit dari yang diproyeksikan, namun jika dilihat dari tipe rumah sakit dan memperhitungkan letak rumah sakit dibandingkan luas wilayah Kabupaten Banyuwangi, rasio persebarannya yaitu setiap 1 rumah sakit melayani 2 kecamatan. Hal yang sama juga terjadi pada prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu yang mengalami kelebihan dibandingkan kebutuhan yang diproyeksikan. Adapun pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi memiliki 1-2 puskesmas dan 4-5 puskesmas pembantu. Kondisi eksisting prasarana BKIA dan apotek di Kabupaten Banyuwangi juga mengalami surplus sebanyak 54 BKIA dan 188 apotek. Surplus ini dapat mengindikasikan bahwa fasilitas kesehatan dan apotek di Banyuwangi lebih dari cukup untuk melayani populasi saat ini dan masa depan, atau bisa juga menunjukkan adanya potensi distribusi yang tidak merata. Dalam jangka panjang, surplus ini bisa dimanfaatkan dengan cara mengoptimalkan distribusi pelayanan kesehatan, meningkatkan aksesibilitas di daerah yang masih membutuhkan, atau mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kualitas layanan yang ada. Namun pada prasarana praktek dokter justru mengalami defisit sehingga diperlukan penambahan sarpras sebanyak 263 praktek dokter. Penambahan tempat praktik dokter ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mendapatkan layanan medis yang memadai dan merata di seluruh wilayah.

C. Proyeksi Pengelolaan Persampahan

Proyeksi timbulan sampah terhadap jumlah penduduk merupakan komponen krusial dalam penyusunan dokumen RPJPD karena memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan pengelolaan limbah yang efisien dan berkelanjutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, volume sampah yang dihasilkan juga meningkat, dan tanpa adanya proyeksi yang akurat akan membuat kapasitas pengelolaan sampah kewalahan. Dengan proyeksi yang tepat, pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat merencanakan infrastruktur yang diperlukan, seperti tempat pembuangan sampah, fasilitas daur ulang, dan tempat pengumpulan sampah. Selain itu, proyeksi juga dapat membantu menentukan strategi pengelolaan sampah yang



tepat, menghindari penumpukan sampah yang berlebihan dan menjaga kebersihan serta Kesehatan lingkungan. Berdasarkan Dokumen Rencana Induk Persampahan (DRIP) Kabupaten Banyuwangi tahun 2023 aliran sampah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 ditunjukkan melalui gambar berikut:



Gambar II. 107 Aliran Sampah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Sumber: Dokumen Rencana Induk Persampahan (DRIP) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023

Neraca massa menunjukkan total timbulan sampah sebesar 823,14 ton/hari dan 636 ton/hari sampah yang dihasilkan oleh Kabupaten Banyuwangi bocor ke lingkungan, melalui berbagai cara, diantaranya dibakar, ditimbun atau dibuang ke sungai. Setiap tahun ini berarti lebih dari 243.000 ton sampah tidak dikelola dan memerlukan kontrol lebih lanjut.

Proyeksi timbulan sampah untuk Kabupaten Banyuwangi menggunakan pendekatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan penduduk. Jika pertumbuhan PDB positif, maka dari waktu ke waktu akan terjadi peningkatan timbulan sampah yang besarnya lebih besar daripada pertumbuhan populasi. Menurut data Bank Dunia, dalam 10 tahun terakhir, tingkat pertumbuhan PDB Indonesia cukup stabil, sekitar 5% dengan penurunan yang signifikan pada tahun 2020 (-2%). Di Kabupaten Banyuwangi, penurunan tahun 2020 bahkan lebih nyata (-3,6%). Asumsi berikut dibuat untuk memprediksi tingkat pertumbuhan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di masa depan:

- Sampah Rumah Tangga:
 - 1) Pertumbuhan penduduk sebesar 0,94% per tahun
 - 2) Peningkatan jumlah timbulan sampah (kg/orang/hari) secara bertahap mulai dari 0,37 hingga 0,5 dalam 20 tahun ke depan
- Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

- 1) Peningkatan jumlah timbulan sampah sejenis sampah rumah tangga secara bertahap mulai dari 1% hingga maksimal 3% per tahun dalam 20 tahun ke depan dikarenakan adanya kenaikan PDB wilayah
- 2) Kenaikan jumlah timbulan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk 5 tahun awal ditargetkan rendah (1% per tahun) sebagai cerminan dari pemulihan Covid-19.

Tabel di bawah menunjukkan total timbulan sampah berdasarkan asumsi tersebut. Di tahun 2040, Kabupaten Banyuwangi akan menghasilkan lebih dari 500.000 ton sampah per tahun, hal itu membutuhkan tambahan infrastruktur pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir.

Tabel II. 452 Estimasi Total Timbulan Sampah Per Tahun di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020-2040

Tahun	Total Timbulan Sampah (ton/tahun)	Tahun	Total Timbulan Sampah (ton/tahun)
2020	311.289	2031	367.137
2021	319.394	2032	371.489
2022	322.438	2033	383.271
2023	325.511	2034	387.811
2024	328.613	2035	392.413
2025	342.212	2036	450.835
2026	346.229	2037	457.333
2027	350.300	2038	463.960
2028	354.425	2039	509.701
2029	358.606	2040	516.961
2030	362.843		

Sumber: Dokumen Rencana Induk Persampahan (DRIP) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023, 2024

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi bertanggung jawab untuk mengatur sistem pengelolaan sampah di seluruh wilayah kabupaten. Saat ini, DLH Kabupaten Banyuwangi sudah melayani area perkotaan dan area-area tertentu. Untuk pengelolaan sampah desa, pengelolaan sampah diserahkan pada Pemerintah Desa atau dijalankan oleh pihak swasta untuk beberapa desa. Penyedia layanan swasta skala kecil mengumpulkan sampah dari sumber dan langsung menarik iuran darinya. Tingkat layanan sampah di Kabupaten Banyuwangi sebesar 22%. 15,6% sampah tersebut dikelola oleh DLH, dan 5,4 % oleh jaringan daur ulang swasta dan informal. DLH

Kabupaten Banyuwangi juga bertanggung jawab atas operasional fasilitas pemrosesan.

Tabel II. 46 *Kebutuhan Sarana TPS3R Kabupaten Banyuwangi dalam 20 Tahun Kedepan*

Jenis	Kapasitas	Jumlah (Unit)
<i>Environment Park/TPS3R RDF Skala Kota</i>	- 100 – 150 ton per hari - Melayani beberapa kecamatan	2
<i>TPS3R RDF skala kecamatan</i>	- 30 – 60 ton per hari - Melayani beberapa desa di 1 kecamatan - Bisa mengolah residu dari TPS3R desa terdekat	7
<i>TPS3R skala desa</i>	- 3 – 10 ton per hari - Melayani 1-2 desa	54
Total		63

Sumber: Dokumen Rencana Induk Persampahan (DRIP) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023, 2024

D. Proyeksi Kebutuhan Rumah

Proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Banyuwangi hingga 20 (dua puluh) tahun yang akan datang pada RP3KP didasarkan pada hasil proyeksi penduduk. Rencana rumah dapat diuraikan jumlah rumah, luas lahan yang dibutuhkan, serta lokasi pembangunan rumah di masing-masing wilayah kecamatan. Walaupun proyeksi dimulai dari tahun 2023 hingga 2043 (berbeda dengan Pedoman Penyusunan di Inmendagri nomor 1 tahun 2024), namun masih sangat representative digunakan untuk proyeksi kebutuhan Rumah tahun 2025-2045. Rencana tersebut menunjukkan bahwa selama 20 tahun dibutuhkan rumah baru di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 682.792 unit yang terdiri atas rumah tipe mewah sebanyak 68.279 unit, rumah tipe menengah sebanyak 204.837 unit, dan rumah tipe sederhana sebanyak 409.675 unit, dimana setiap 5 tahun mengalami pertambahan kebutuhan rumah sebanyak + 34.589 unit, berikut ini tabel proyeksi yang telah disesuaikan:

Tabel II. 47 *Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Banyuwangi 2023-2045*

Uraian	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah				
		2023	2028	2033	2038	2043
Proyeksi Kebutuhan Rumah	1,743,940					
Rumah Mewah		54,444	57,902	61,361	64,820	68,279
Rumah Sedang		163,331	173,707	184,084	194,461	204,837
Rumah Sederhana		326,661	347,414	368,168	388,921	409,675

Sumber: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2023-2043

Perencanaan dilakukan secara bertahap, berdasarkan hasil estimasi, maka kebutuhan lahan untuk pengembangan rumah di Kabupaten Banyuwangi hingga periode terakhir RPJPD Kabupaten Banyuwangi dengan rincian tipe rumah mewah sebesar 1.024 Ha, rumah menengah sebesar 6.145 Ha dan rumah sederhana sebesar 20.484 Ha.

E. Proyeksi Kebutuhan Air

Sumber air minum di Kabupaten Banyuwangi berupa ledeng/kemasan, sumur terlindung/pompa dan sumber yang berasal dari Perusahaan Air Minum daerah Kabupaten Banyuwangi (PDAM). Mengacu pada dokumen RP3KP Kabupaten Banyuwangi 2023-2045 dan SNI, Kebutuhan air rata-rata hingga tahun 2045 di Kabupaten Banyuwangi terus meningkat. Dapat diketahui pada tahun 2025 Kabupaten Banyuwangi membutuhkan air 67.641 liter/hari dan meningkat kebutuhan airnya menjadi 71.826 liter/hari. Proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Banyuwangi mengacu pada standar SNI kebutuhan air bersih di daerah permukiman dengan rata-rata kebutuhan 60 liter/hari/orang. Berikut hasil perhitungan proyeksinya:

Tabel II. 48 Proyeksi Kebutuhan Air di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

Uraian	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1,743,940	1,764,560	1,805,325	1,844,250	1,865,536	1,873,733
Proyeksi Kebutuhan Air Domestik (liter/hari)	29066	29409	30089	30738	31092	31229
Proyeksi Kebutuhan Air Non Domestik (liter/hari)						
Fasum (10%)	2907	2941	3009	3074	3109	3123
kantor (10%)	2907	2941	3009	3074	3109	3123
Komersial (10%)	2907	2941	3009	3074	3109	3123
Industri dan Perdagangan (70%)	20346	20587	21062	21516	21765	21860
Kebutuhan Hidran (20%)	5813	5882	6018	6148	6218	6246
Kehilangan Air (10%)	2907	2941	3009	3074	3109	3123
Total Kebutuhan Air (Liter/hari)	66851	67641	69204	70696	71512	71826

Sumber: Data Diolah, 2024

F. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Kebutuhan listrik di Kabupaten Banyuwangi terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik. Kebutuhan domestik digunakan

untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah pada rumah tangga, sedangkan kebutuhan non domestik digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik pada sarana. Pada perhitungan listrik, dapat diketahui bahwa kebutuhan listrik di Kabupaten Banyuwangi hingga tahun 2043 sebesar 594.711.434 watt. Tabel berikut ini menggambarkan proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Banyuwangi:

Tabel II. 49 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

Uraian	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
		2023	2028	2033	2038	2043
Jumlah Penduduk	1,743,940	1,764,560	1,805,325	1,844,250	1,865,536	1,873,733
Proyeksi Kebutuhan Listrik (watt)	-	474.202.885	504.44002	534.457.159	564.584.297	594.711.434

Sumber: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2023-2043

Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan adanya kegiatan industri yang cukup maka kebutuhan akan energi listrik akan besar pula. Kebutuhan listrik disamping pemenuhannya diperoleh dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga dapat diperoleh dari usaha pembangkitan listrik atau dengan Generator Set.

2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN DAN ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN

2.7.1 Arah Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kewilayahan Nasional

Linearitas perencanaan menjadi salah satu isu dalam periode RPJPD 2025-2045 hal ini dilakukan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi sehingga seluruh perencanaan menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Hal ini juga berlaku pada arah pengembangan pusat pertumbuhan dan kewilayahan dimana pada dokumen Rancangan Awal RPJPN Indonesia Emas 2045 telah dipetakan berbagai kebijakan kewilayahan dalam menjawab isu besar berkaitan dengan kesenjangan pembangunan. Berikut isu wilayah dan sarana prasarana yang termuat didalam dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesai Emas 2025-2045:

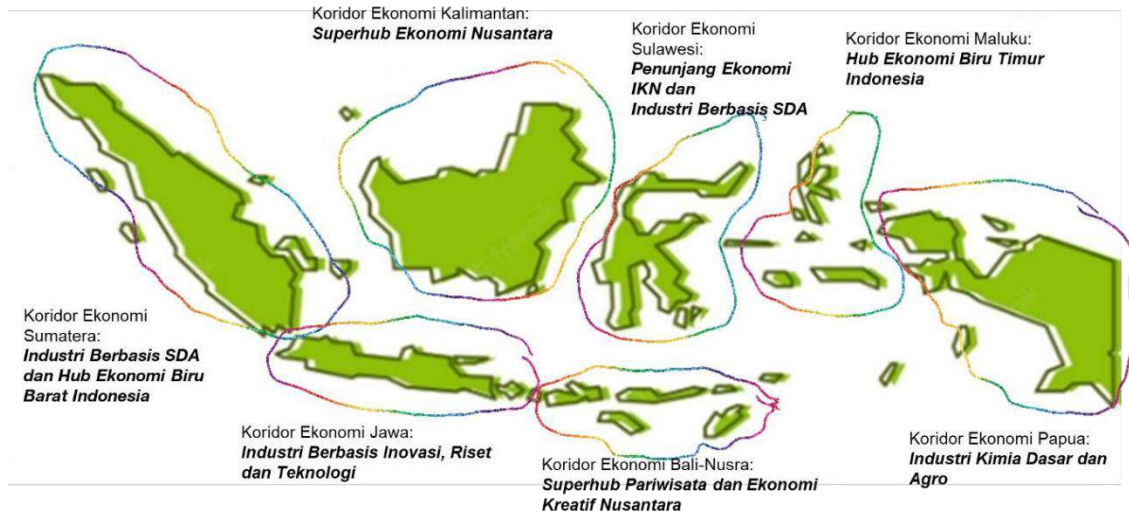


Gambar II. 108 Isu Wilayah dan Sarana Prasarana dalam RPJPN 2025-2045

Sumber: RPJPN 2025-2045

Isu kesenjangan menjadi salah satu isu yang sangat ditekankan dalam perencanaan nasional, pembangunan wilayah pada periode mendatang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan. Desentralisasi sangat diandalkan dalam kemajuan wilayah melalui pendekatan serta fokus terhadap optimalisasi potensi wilayah utamanya berkaitan dengan kesenjangan antara Jawa dan Luar Jawa serta antara wilayah barat dan wilayah timur. Berdasarkan isu dan permasalahan tersebut maka pembangunan di luar pulau Jawa lebih diintensifkan mengingat besarnya sumber daya alam yang belum optimal pemanfaatannya dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Pulau Jawa. Hal ini memungkinkan pertumbuhan diluar Jawa kedepan akan lebih cepat dibandingkan pulau Jawa sehingga harapannya kesenjangan antar

wilayah dapat diselesaikan. Berikut adalah arah pembangunan wilayah dengan dibagi kedalam beberapa koridor ekonomi berdasarkan potensi wilayah:



Gambar II. 109 Klasifikasi Koridor Ekonomi berdasarkan Potensi Wilayah

Sumber: RPJPN 2025-2045

Berdasarkan arah pembangunan wilayah diatas, Pulau Sumatera akan difokuskan sebagai Koridor industri berbasis SDA dan hub ekonomi biru barat Indonesia, Pulau Jawa akan di fokuskan terhadap koridor industri berbasis inovasi, riset dan teknologi, Pulau Kalimantan akan berfokus pada koridor superhub ekonomi nusantara, Pulau Sulawesi akan berfokus pada koridor penunjang ekonomi IKN dan industri berbasis SDA, Pulau Bali-Nusa dan sekitarnya akan berfokus pada koridor superhub pariwisata dan ekonomi kreatif nusantara, Kepulauan Maluku akan berfokus pada koridor hub ekonomi biru timur, Pulau Papua akan berfokus pada koridor industri kimia dasar dan agro. Arah pembangunan wilayah tersebut selanjutnya diturunkan pada kebijakan umum kewilayahan meliputi Tata ruang dan pertanahan, Urbanisasi dan Perkotaan, Perdesaan dan daerah afirmasi, Konektivitas, ketenagalistrikan, teknologi, informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana dasar dan Desentralisasi.

Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian dari Pulau Jawa dimana arah kebijakan perencanaan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 maka arah kebijakan Pulau Jawa akan difokuskan kedalam koridor ekonomi industri berbasis inovasi dan IPTEK, berikut arah kebijakan pulau Jawa:



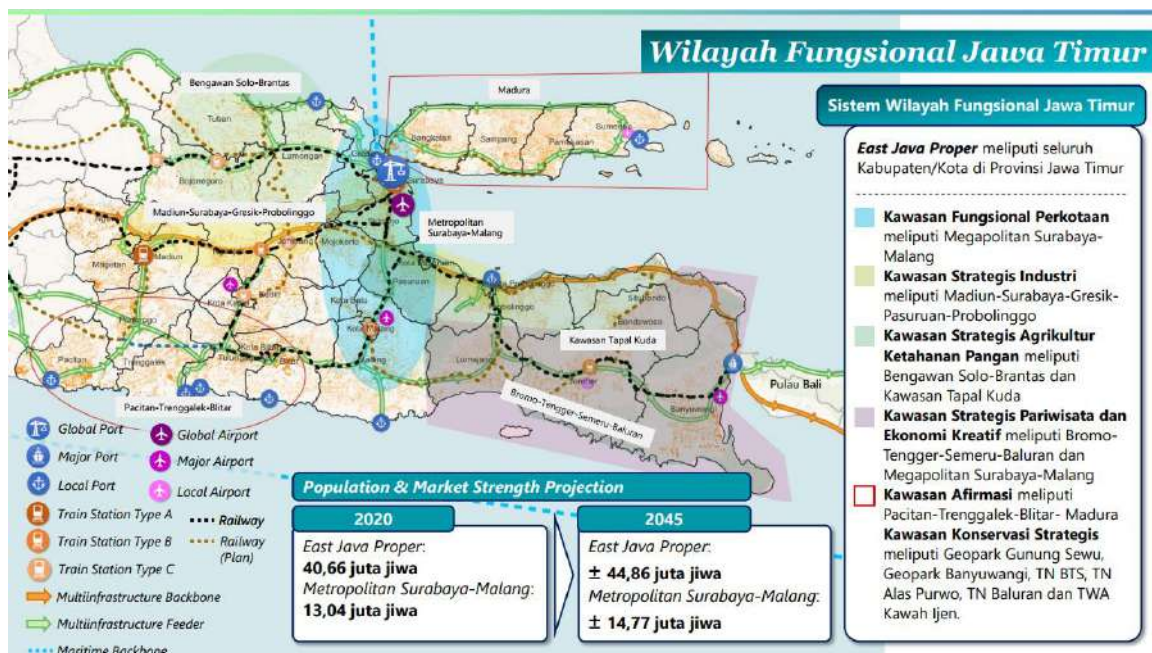
Gambar II. 110 Arah Kebijakan Pulau Jawa

Sumber: RPJPN 2025-2045


1. Pertama, pengembangan Sumber Daya Manusia berdaya saing global (talenta global); serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi/3T;
2. Kedua, pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti: kawasan strategis industri ramah lingkungan, kawasan strategis pariwisata; kawasan strategis agrikultur kemandirian pangan, dan kawasan strategis perkotaan;
3. Ketiga, percepatan pembangunan berbasis pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan geopark; termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan;
4. Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas multi-infrastructure backbone dan feeder, serta maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar;

5. Kelima, penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

Searah dengan kebijakan tersebut pemerintah pusat melalui Bappenas telah menentukan arah pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional dimana salah satu arahan yang disebutkan adalah integrasi koridor Sumatera-Jawa, Dalam perspektif makroregional, berperan sebagai hinterland dan atas aglomerasi penduduk di Jawa Semenanjung Malaya-Singapura-RRT berperan sebagai market/demand generator. Adapun dalam arah pembangunan tersebut juga telah ditetapkan arahan hingga sampai pada level provinsi. Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 5 sistem wilayah fungsional yang terdiri dari Kawasan Fungsional Perkotaan meliputi Megapolitan Surabaya-Malang Kawasan Strategis Industri meliputi Madiun-Surabaya-Gresik-Pasuruan-Probolinggo Kawasan Strategis Agrikultur Ketahanan Pangan meliputi Bengawan Solo-Brantas dan Kawasan Tapal Kuda Kawasan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi Bromo-Tengger-Semeru-Baluran dan Megapolitan Surabaya-Malang Kawasan Afirmasi meliputi Pacitan-Trenggalek-Blitar-Madura Kawasan Konservasi Strategis meliputi Geopark Gunung Sewu, Geopark Banyuwangi, TN BTS, TN Alas Purwo, TN Baluran dan TWA Kawah Ijen. Berikut gambar peta arah pembangunan jangka menengah dan jangka panjang



Gambar II. 111 Sistem Wilayah Fungsional Jawa Timur

- 
2. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 3. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peningkatan layanan transportasi dalam rangka mendukung mobilitas orang dan barang, peningkatan layanan dasar permukiman, peningkatan layanan infrastruktur sumber daya air, dan peningkatan jaringan prasarana lainnya.
 4. Peningkatan jaringan Infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan sistem permukiman serta peningkatan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif.
 5. Penguatan Peran Kawasan Metropolitan terintegrasi dengan Kawasan agropolitan, Kawasan Industri dan gugusan Kawasan pegunungan.
 6. Pemaduserasian antara koridor pertumbuhan wilayah daratan dan kelautan di sebagai bentuk nilai tambah sinergitas antar wilayah ruang darat dan ruang laut di Provinsi Jawa Timur.
 7. Percepatan keseimbangan pembangunan antara koridor pertumbuhan wilayah utara-selatan dan kepulauan sebagai upaya mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.
 8. Peningkatan preservasi dan konservasi pada Kawasan lindung dengan prinsip pelestarian geodiversity, biodiversitas, culture diversity dan pembangunan berkelanjutan Serta peningkatan kapasitas ketangguhan terhadap penanggulangan bencana.
 9. Optimalisasi peran kawasan budidaya yang produktif dan kompetitif dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi serta daya dukung daya tampung lingkungannya.
 10. Perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.
 11. Pemaduserasian ruang darat, ruang laut, wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil disertai Kawasan pertahanan keamanan melalui pengaturan kelembagaan, pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan memperhatikan kerawanan terhadap bencana serta adaptasi terhadap perubahan iklim.
 12. Perwujudan Kawasan strategis provinsi yang terpadu dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya, serta perlindungan terhadap kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.




13. Pengintegrasian antara koridor pertumbuhan wilayah daratan dengan sentra pertumbuhan kelautan di WP- 3-K bagi terselenggaranya nilai tambah sinergi antar wilayah dan mengurangi disparitas wilayah pada Kawasan Gerbangkertasusila, Kawasan Bromo Tengger Semeru, Kawasan Selingkar Wilis, Kawasan Ijen dan Kepulauan Madura melalui pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah. Pengintegrasian konektivitas antar 7 koridor pengembangan wilayah yang meliputi:
- Koridor Metropolitan Surabaya – Malang Raya;
 - Koridor Kota Besar, Menengah dan Kecil di Wilayah tengah/antar pegunungan (Smart Village Valley);
 - Koridor Industri Maritim di Pantura sampai dengan Madura;
 - Koridor/Klaster Migas dan Kondensat di Pantai Utara Pulau Jawa (Tuban – Gresik);
 - Koridor Industri Agro di wilayah Perbatasan/Utara;
 - Koridor Wisata Pesisir/Pantai (Coastal Tourism) di Wilayah Pansela (Pacitan – Banyuwangi);
 - Koridor penghubung antar Kawasan dan Kepulauan yang meliputi Kawasan Gerbangkertasusila (GKS), Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS), Kawasan Selingkar Wilis, Kawasan Ijen dan Kepulauan Madura.



Gambar II. 113 Peta Persebaran Pusat kegiatan Provinsi Jawa Timur

Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045




Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Jawa Timur, adapun pengembangan Kabupaten Banyuwangi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan komoditas unggulan berbasis pertanian, perhutanan, dan perikanan yang menjadi hulu Agropolitan dan Minapolitan antara lain pada Selingkar Bromo - Tengger - Semeru (BTS), Selingkar Wilis (termasuk Kelud dan Lawu), Selingkar Ijen, wilayah Tuban-Bojonegoro dan Pulau Madura.
2. Pengembangan sentra produksi dengan outlet pengumpul dan distribusi komoditas unggulan berupa pasar agribisnis yang menjadi input industri Agro.
3. Pengembangan daya Tarik wisata di Kawasan Bromo - Tengger - Semeru dan Kawasan Selingkar Ijen dan Kawasan Selingkar Wilis dengan konsep ekowisata. Selanjutnya di wilayah-wilayah perkotaan perlu mengadopsi pengembangan pariwisata antara lain melalui penyelenggaraan Meeting, Incentives, Conférences, and Exhibitions (MICE).
4. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global pada pusat aglomerasi Madiun, Kediri, dan Jember.
5. Pengembangan Sentra Industri Maritim dan pelabuhan perikanan sebagai pusat perikanan tangkap serta dukungan pengembangan Ekonomi Biru.
6. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan pendidikan vokasi bidang maritim dan migas.
7. Pengembangan wisata pada Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP).
8. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Industri (KI) dan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM).
9. Pengembangan Kawasan Geopark (Taman Bumi) guna mendukung pengembangan kawasan strategis Provinsi serta memperkuat pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui pilar konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
10. Optimalisasi pengelolaan layanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien melalui pedoman praktik klinis rumah sakit yang standar serta pelaksanaan sistem rujukan berbasis kompetensi.

Indikasi Program/Proyek Strategis Provinsi Jawa Timur

Penyusunan Indikasi program/ proyek strategis di provinsi Jawa Timur salah satunya mengacu pada indikasi program yang telah ditetapkan dalam Perda 10 Tahun






2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 dan kebijakan strategis sektoral lainnya. adapun indikasi program/proyek strategis yang terdapat di Provinsi Jawa Timur dijabarkan sebagai berikut.

Dalam mendukung perwujudan konektivitas daerah, terdapat program Pemantapan dan pengembangan jalan Umum yang meningkatkan konektivitas dari dan ke pusat kegiatan, Peningkatan akses, menuju kawasan strategis melalui pengembangan, pemeliharaan, dan pemantapan jalan khusus dan pemantapan dan pengembangan jalan tol dengan pertimbangan aspek ekologis dan rawan bencana serta Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung jaringan jalan tol, serta Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemantapan jalur/jembatan/flyover/underpass pada jalan perpotongan.

Sistem jaringan transportasi Jawa Timur yang terbagi menjadi sistem jaringan transportasi darat, laut dan udara dapat dikembangkan dengan beberapa program. Dalam sistem jaringan transportasi darat Jawa timur dikembangkan dengan terminal tipe A dan tipe B melalui pengembangan dan pemantapan prasarana terminal penumpang tipe A dan tipe B. Selain itu, terdapat rencana pengembangan sistem jaringan kereta api melalui pembangunan dan pengembangan jaringan jalur kereta api, pengembangan jaringan jalur kereta api menuju kawasan strategis, pembangunan sarana dan prasarana pendukung operasionalisasi dan keselamatan perkeretaapian, pengembangan jaringan dan layanan kereta api cepat, serta pengembangan transportasi massal perkotaan berbasis kereta seperti Autonomous Rail Rapid Transit (ART), Surabaya Regional Railways Line (SRRL), dan Light Rapid Transit (LRT). Dalam mendukung integrasi pergerakan orang dan barang antar sistem jaringan transportasi baik darat, laut maupun udara dikembangkan terminal barang dan jembatan timbang melalui Identifikasi kebutuhan terminal barang potensial pendukung pergerakan barang regional di Jawa Timur dan Pemantapan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (Jembatan Timbang).

Dalam sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dapat dikembangkan dengan pelabuhan pelayanan penyeberangan melalui pemantapan dan pengembangan pelabuhan pelayanan penyeberangan kelas I, Kelas II dan Kelas III, pembangunan dan pengembangan pelabuhan sungai dan danau, serta penyusunan kajian pembangunan industri pelabuhan. Selain itu, sistem jaringan transportasi laut hampir sama yaitu dapat dikembangkan dengan pelabuhan laut melalui pemantapan dan pengembangan pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan, terminal terminal umum dan khusus, pemantapan dan pengembangan alur pelayaran laut nasional





dan/atau internasional dari dan/ atau ke Provinsi Jawa Timur dan Monitoring dan pemeliharaan alur-pelayaran masuk pelabuhan dalam rangka mendukung transportasi penyeberangan dan laut.

Dalam melengkapi sistem jaringan transportasi yang ada maka terdapat pengembangan sistem jaringan transportasi udara berupa pengembangan bandar udara umum dan khusus melalui pengembangan bandar udara pengumpul, pengumpan dan khusus, pembangunan Bandar udara perairan untuk mendukung akses ke kepulauan. Selain itu terdapat identifikasi kebutuhan pengembangan potensi bandar udara baru dalam mendukung pengembangan wilayah Pada aspek infrastruktur sumber daya air dalam mendukung pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Timur terdapat program pengelolaan sumber daya air berupa pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan provinsi dan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

Pada aspek infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam mendukung kebutuhan penyediaan air minum di Provinsi Jawa Timur terdapat program berupa pengembangan jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) berupa SPAM regional kabupaten/kota, Pengembangan jaringan air baku untuk industri serta pemantapan pipa air bersih bawah laut.


Pada aspek pengelolaan air limbah (SPAL) terdapat program berupa Kajian kelayakan potensi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Skala Provinsi, Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Regional Kewenangan Provinsi, dan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) industri dan rumah tangga sesuai kebutuhan.

Pada aspek pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 (B3) untuk meningkatkan pengelolaan limbah B3 yang berkelanjutan terdapat program pengembangan, pemantapan, serta percepatan dan operasionalisasi sistem pengelolaan limbah B3.

Selanjutnya pada aspek jaringan persampahan terdapat program pengembangan sistem jaringan persampahan berupa TPA regional, peningkatan kualitas kesehatan, lingkungan fisik dan sosial di sekitar sistem jaringan persampahan TPA regional, monitoring dan evaluasi pada kualitas lingkungan dan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar Sistem jaringan persampahan TPA Regional, serta penggunaan teknologi tepat guna pada pengelolaan sistem jaringan persampahan pada TPA regional.

Dalam kawasan permukiman, terdapat program yang dikembangkan guna mendukung perwujudan kawasan tersebut. Beberapa program yang mendukung






perwujudan kawasan permukiman dilakukan melalui pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan, pengembangan dan pengelolaan rumah susun yang dikelola pemerintah provinsi, penanganan kawasan permukiman kumuh, percepatan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP), penyediaan dan peningkatan kualitas rumah swadaya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penanganan mitigasi bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di kawasan perumahan dan permukiman serta pengembangan dan optimalisasi implementasi desa tangguh bencana terutama pada desa rawan bencana di kawasan rawan bencana Jawa Timur.

Pada kawasan transportasi, program-program yang direncanakan dalam mewujudkan kawasan tersebut dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan transportasi, pemetaan dan kelayakan terhadap potensi pengembangan kawasan transportasi baru, peningkatan aksesibilitas menuju kawasan transportasi, penyediaan zona penyangga/buffer di sekitar kawasan transportasi untuk meminimalisasi dampak gangguan dan keamanan terhadap kawasan sekitarnya, pemaduserasian dan koordinasi berkelanjutan perihal kegiatan operasionalisasi perhubungan antara kepentingan sipil, militer, dan kepentingan khusus, peningkatan kualitas kesehatan, lingkungan fisik dan sosial di kawasan transportasi serta penanganan mitigasi bencana, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim di kawasan transportasi.

Pada aspek infrastruktur jaringan energi di Provinsi Jawa Timur, perwujudan pengembangan infrastruktur jaringan energi dijabarkan dalam berbagai program. Adapun program-program yang mendukung perwujudan infrastruktur jaringan energi dilakukan melalui program pengembangan dan pemantapan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan Pembangkit Listrik Lainnya serta program pengembangan dan inisiasi pembangunan pembangkit listrik menggunakan sumber energi baru dan terbarukan, Selain itu, untuk mewujudkan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung terdapat program berupa pengembangan dan pemantapan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, pembangunan jaringan baru transmisi tenaga listrik antarsistem, pengembangan dan pemantapan jaringan distribusi tenaga listrik antarsistem, pemeliharaan dan pemantapan gardu listrik





eksisting serta pembangunan gardu listrik baru sesuai kebutuhan yang sesuai kajian teknis dan lingkungan. selain itu untuk memenuhi kebutuhan listrik antar pulau terdapat program pembangunan jaringan energi berupa pipa/kabel bawah laut sebagai media penyaluran tenaga listrik ke pulau madura, pulau bali, maupun pulau lain dalam wilayah provinsi Jawa timur.


Pada sisi infrastruktur jaringan pipa minyak dan gas bumi di provinsi Jawa Timur diwujudkan melalui program Pengembangan dan pemantapan jaringan pipa minyak dan gas bumi, Pengembangan dan pemantapan sumber dan prasarana minyak dan gas bumi serta pengembangan biofuel dari metanol dan etanol.

Pada aspek infrastruktur sistem jaringan telekomunikasi, guna meningkatkan kemudahan arus telekomunikasi di Provinsi Jawa Timur maka diwujudkan ke beberapa program. Adapun program yang mendukung perwujudan infrastruktur jaringan telekomunikasi dilakukan melalui pengembangan dan pemantapan jaringan serat optik, pengembangan jaringan kabel telekomunikasi bawah laut yang memperhatikan aktivitas perhubungan laut dan kegiatan hankam, Pengembangan jaringan terrestrial melalui sistem kabel, pengembangan jaringan sistem nirkabel atau BTS (Base Transceiver Station) terpadu, pengembangan jaringan satelit menggunakan tower dan non tower, serta pemeliharaan jaringan telekomunikasi eksisting.

Pengembangan kawasan Agropolitan dan Minapolitan sentra hulu produksi agro yang meliputi berbagai sektor seperti pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Program ini didukung dengan pengembangan linkage sentra melalui hub logistik serta pengembangan hilir industri agro dan pasar (mengingat peran perkotaan sebagai pasar konsumen komoditas agro). Selain itu, terdapat program konservasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang menjadi fokus untuk menjaga keberlanjutan produksi. Di samping itu, upaya untuk meningkatkan pasar agribisnis juga tercermin melalui pengembangan Pasar Induk Agribisnis Puspa Agro menjadi Jatim Food Hub. Program ini juga dilengkapi dengan peningkatan infrastruktur pendukung produksi agro, seperti jalan produksi/usaha tani, embung tani, dan daerah serta saluran irigasi. Lokasi indikasi program terfokus pada wilayah selingkar Bromo - Tengger - Semeru (BTS), Selingkar Wilis (termasuk Kelud dan Lawu), Selingkar Ijen, wilayah Gresik-Lamongan-Tuban- Bojonegoro, dan Pulau Madura.

Pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dan wilayah potensial. Pengembangan ini juga mencakup program pelengkapan





infrastruktur untuk melayani kebutuhan wilayah industri, termasuk akses jalan, jembatan, air baku, energi, pengolahan limbah, RTH, pelayanan kesehatan, dan seterusnya.

Dalam upaya mengembangkan potensi pariwisata Jawa Timur, fokus utama terletak pada Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP). Dengan mengoptimalkan daya tarik wisata yang dimiliki oleh Jawa Timur, seperti keindahan alam, budaya, maupun hasil buatan manusia. Selain itu, pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata menjadi kunci dalam memfasilitasi pertumbuhan sektor pariwisata. Infrastruktur tersebut mencakup peningkatan aksesibilitas, (jalan dan jembatan pendukung daya tarik wisata), pengembangan fasilitas akomodasi yang berkualitas, (hotel, homestay, dan lain-lain) untuk menampung jumlah wisatawan yang meningkat. Juga pengembangan sarana transportasi regional, seperti kereta api dan bus pariwisata, serta peningkatan pelayanan bandara dan terminal bus, untuk memudahkan perjalanan wisatawan di seluruh wilayah Jawa Timur.

Pengembangan kawasan Geopark yang mendukung kawasan strategis provinsi melalui pelestarian potensi warisan geologi baik yang bernilai internasional, nasional, dan lokal, pelestarian budaya melalui konsep wisata geopark/ geowisata.

Penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Timur dalam jangka panjang (2025-2045) akan difokuskan pada 15 kantong kemiskinan Jawa Timur dalam bentuk pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan UKM serta program lainnya dalam upaya mengurangi wilayah-wilayah kantong kemiskinan. Akan tetapi Kabupaten Banyuwangi tidak termasuk kedalam 15 wilayah yang di prioritaskan kedalam wilayah prioritas kantong kemiskinan Jawa Timur.


2.7.3 Arah Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kewilayahan Kabupaten Banyuwangi

Pembangunan kewilayahan dan pengembangan pusat pertumbuhan di Kabupaten Banyuwangi sangat erat kaitannya dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah, RTRW Kabupaten Banyuwangi bersamaan dengan disusunnya dokumen ini maka beririsan terhadap dokumen RTRW periode tahun 2024-2044. Adapun Visi dan Misi yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Banyuwangi tahun 2012- 2032 adalah sebagai berikut:

Visi

“Terwujudnya pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi kabupaten berbasis pada potensi sumber daya alam daerah yang didukung oleh pembangunan sarana





dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan harmonisasi antara pengelolaan kawasan budidaya, kawasan lindung, dan pengendalian kawasan rawan bencana”.


Misi

1. Mewujudkan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan pengendalian kawasan rawan bencana secara harmonis dan berkelanjutan;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perdesaan untuk mendukung pengembangan wilayah dan untuk mengurangi disparitas antar wilayah;
3. Mewujudkan pengembangan kawasan ekonomi unggulan yang berbasis sumber daya lokal berupa pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Mewujudkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri kecil dan menengah serta industri besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi;
5. Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berbasis sumber daya lokal dalam rangka mendukung peningkatan sumber daya manusia;
6. Meningkatkan kerjasama investasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
7. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Visi dan Misi diatas diwujudkan kedalam beberapa kebijakan antara lain:

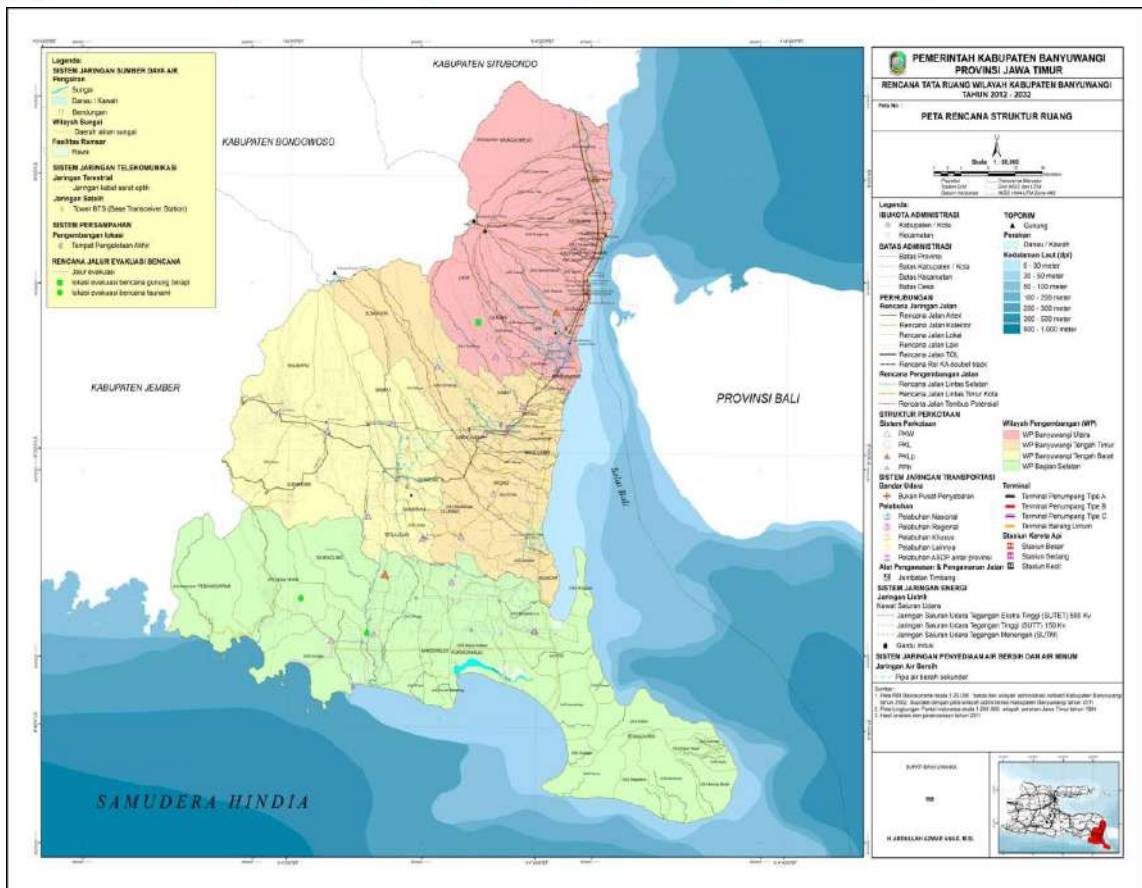
- 1) Kebijakan Pengembangan Kawasan Pertanian
- 2) Kebijakan Pengembangan Kawasan Perikanan
- 3) Kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata terpadu berbasis potensi wisat alam, budaya dan wisata buatan
- 4) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan dan perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan, pariwisata, idnustri, perdagangan dan jasa
- 5) Penataan sektor informal
- 6) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, industru, perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta pelayanan dasar masyarakat
- 7) Pengembangan kawasan strategis kabupaten



- 
- 8) Pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam
 - 9) Pengembangan kasasn bududaya dengan menumbuhkan kearifan loka dan memperhatikan aspek ekologis
 - 10) Pengendalian dan pelesatarian kawasan lindung
 - 11) Pengendalian kawsan rawan bencana alam
 - 12) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Pengembangan Pusat perkotaan di Kabupaten Banyuwangi tergambar melalui sitem perkotaan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi merupakan kawasan yang dijadikan sebagai PKW atau Pusat Kegiatan Wilayah yang artinya Kabupaten Banyuwangi merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten. Dengan pengertian ini, suatu PKW harus mempunyai fasilitas-fasilitas yang jangkauan pelayanannya minimal meliputi lebih dari satu kabupaten, seperti misalnya kegiatan industri manufaktur yang proses input-outputnya menjangkau antar kabupaten dan sangat signifikan pada tingkat provinsi. Disisilain terdapat juga PKL atau Pusat Kegiatan Lokal. PKL merupakan daerah pusat perkotaan yang harus mampu melayani daerah disekitarnya dalam rangka meningkatkan perekonomian disekitar wilayah tersebut, adapun struktur ruang di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagi berikut:






Gambar II. 114 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044

Sumber: RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044

Adapun dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi sistem perkotaan terdiri atas uraian berikut:


1. Pusat Kegiatan Wilayah : berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan wilayah di Kabupaten Banyuwangi, PKW Kabupaten Banyuwangi berada di kawasan perkotaan Banyuwangi
2. Pusat Kegiatan Lokal, berfungsi sebagai pengembangan pusat pelayanan wilayah belakang (*hinterland service*) dan pusat pertumbuhan antar wilayah, berikut PKL Kabupaten Banyuwangi:
 - a. Perkoataan Genteng
 - b. Perkotaan Muncar
 - c. Perkotaan
 - d. Rogojampi
 - e. Perkotaan Gambiran
3. Pusat Kegiatan Lokal promosi, merupakan wilayah perkotaan yang memiliki potensi sebagai PKL:
 - a. Perkotaan Wongsorejo

- 
- b. Perkoaan Kalipuro
 - c. Perkotaan Bangorejo
4. Pusat Pelayanan Kegiatan, merupakan wilayah kecamatan yang berfungsi melayani wilayahnya sendiri, berikut PPK di Kabupaten Banyuwangi :
- a. Perkotaan Glagah;
 - b. Perkotaan Giri;
 - c. Perkotaan Licin;
 - d. Perkotaan Kabat;
 - e. Perkotaan Srono;
 - f. Perkotaan Cluring;
 - g. Perkotaan Singojuruh;
 - h. Perkotaan Sempu;
 - i. Perkotaan Songgon;
 - j. Perkotaan Purwoharjo;
 - k. Perkotaan Tegaldlimo;
 - l. Perkotaan Tegalsari;
 - m. Perkotaan Glenmore;
 - n. Perkotaan Kalibaru;
 - o. Perkotaan Pesanggaran; Dan
 - p. Perkotaan Siliragung.

Dalam rencana struktur ruang digambarkan berbagai arahan terhadap pengembangan wilayah pada Sistem Jaringan Transportasi, Sistem Jaringan Energi dan Sistem jaringan penyediaan air bersih dan air minum dan secara terperinci dapat dilihat pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya terdapat Rencana Pola Ruang yakni distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Berikut penjelasan mengenai rencana pola ruang wilayah di Kabupaten Banyuwangi:

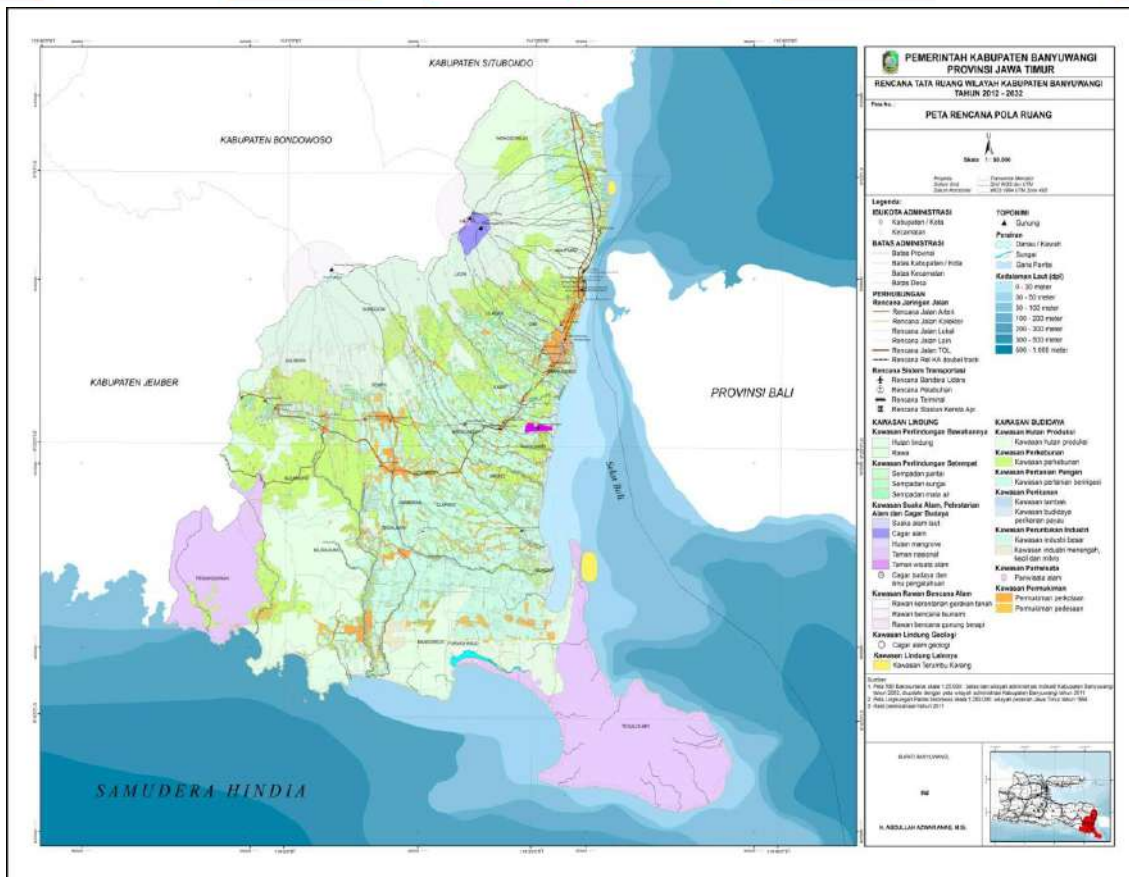
1. Kawasan Lindung, meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam.
 - f. kawasan lindung geologi; dan



- 
- g. kawasan lindung konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan.
2. Kawasan Budidaya, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. kawasan peruntukan peternakan;
 - e. kawasan peruntukan agropolitan;
 - f. kawasan peruntukan perikanan;
 - g. kawasan peruntukan pertambangan;
 - h. kawasan peruntukan industri;
 - i. kawasan peruntukan pariwisata;
 - j. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - k. kawasan peruntukan lainnya;

Kawasan Lindung merupakan kawasan yang harus dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan karena memiliki peran terhadap keberlangsungan kehidupan dimasa mendatang, sedangkan kawasan budidaya merupakan kawasan yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan perekonomian dan kegiatan sosial. Berikut gambaran peta Pola Ruang Kabupaten Banyuwangi:

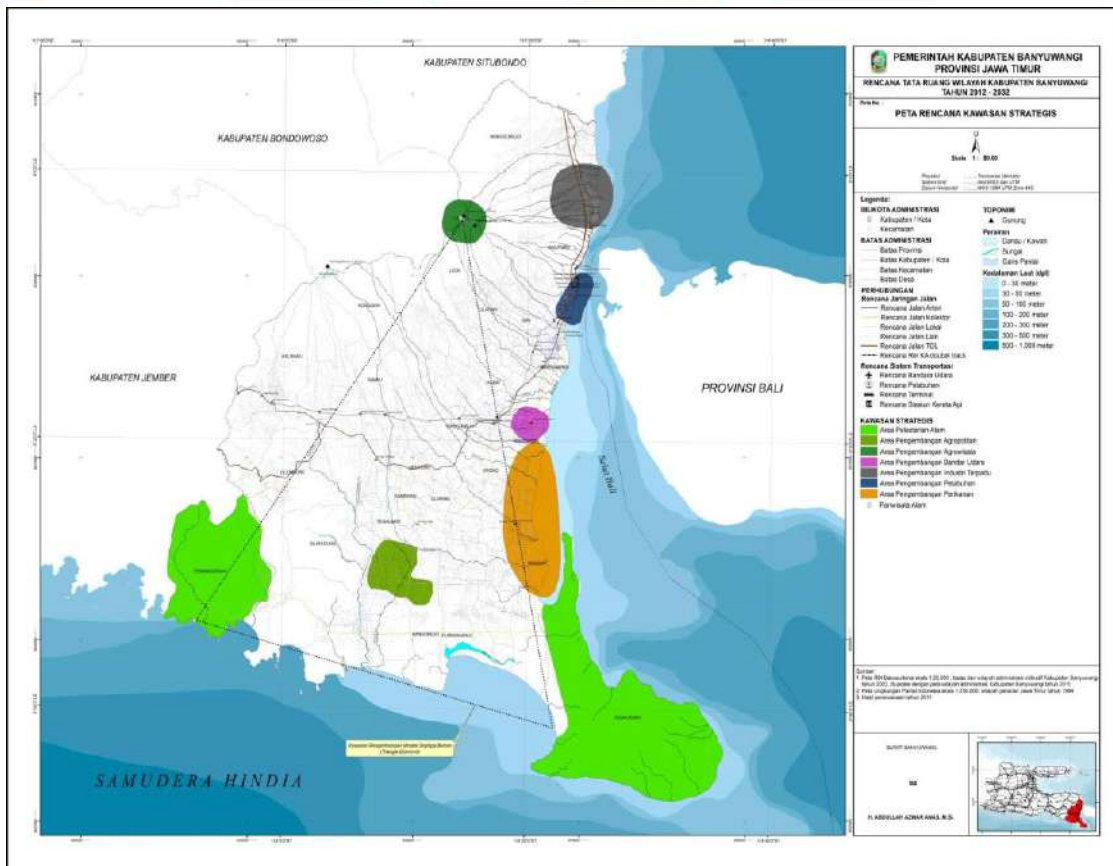




Gambar II. 115 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2024

Sumber: RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2024

Kabupaten Banyuwangi memiliki berbagai kekayaan sehingga harus dikelola dengan baik, adapun kawasan strategis yang berada di Kabupaten Banyuwangi meliputi Kawasan Strategis Nasional, kawasan Strategis Provinsi maupun Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan strategis memiliki pengertian sebagai wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam kehidupan baik secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Berikut gambaran Peta Kawasan Strategis di Kabupaten Banyuwangi:




Gambar II. 116 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044


Sumber: RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044

Kawasan Strategis ditinjau dari kepentingannya terbagi menjadi beberapa. Berikut penjabaran Kawasan Strategis di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan kepentingannya:

1. Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan ekonomi kawasan agropolitan di Kecamatan Bangorejo berupa pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan wilayah penunjangnya meliputi:
 - a. Kecamatan Purwoharjo;
 - b. Kecamatan Tegaldlimo;
 - c. Kecamatan Siliragung; dan
 - d. Kecamtan Pesanggaran.
2. Kawasan agropolitan ijen berada di Kecamatan Licin berupa pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pariwisata dengan wilayah penunjangnya meliputi:
 - a. Kecamatan Glagah;
 - b. Kecamatan Kalipuro; dan
 - c. Kecamatan Songgon.
3. Kawasan minapolitan meliputi:
 - a. Pengembangan zona inti berada di Kecamatan Muncar

- 
- b. Pengembangan zona sentra produksi meliputi:
 - Kecamatan Purwoharjo; dan
 - Kecamatan Pesanggaran.
 - c. Pengembangan zona penyangga meliputi:
 - Kecamatan Rogojampi;
 - Kecamatan Srono; dan
 - Kecamatan Tegaldlimo.
 - d. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang sistem minapolitan.
4. Kawasan Industri, meliputi:
 - a. Kawasan *industrial estate* berada di Kecamatan Wongsorejo;
 - b. Kawasan industri terintegrasi dengan pengembangan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus berada di Kecamatan Kalipuro;
 - c. Kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan berada di Kecamatan
 - d. Muncar terintegrasi dengan sistem minapolitan;
 - e. Kawasan *fishery park* berada di Kecamatan Rogojampi; dan
 - f. Kawasan peruntukan agroindustri berada di Kawasan agropolitan.
 5. Kawasan pelabuhan, meliputi:
 - a. Kawasan pelabuhan umum Tanjungwangi berada di Kecamatan Kalipuro;
 - b. Kawasan pelabuhan khusus berada di Kecamatan Kalipuro; dan
 - c. Kawasan pelabuhan penyeberangan Ketapang berada di Kecamatan Kalipuro.
 6. Kawasan bandar udara berupa bandar udara Blimbingsari meliputi:
 - a. Kecamatan Rogojampi; dan
 - b. Kecamatan Kabat.
 7. Kawasan pariwisata, meliputi:
 - a. Wisata andalan sebagai pusat pengembangan obyek wisata disekitarnya, WPP meliputi:
 - WPP I berupa Kawah Ijen;
 - WPP II berupa Pantai Plengkung; dan
 - WPP III berupa Pantai Sukomade.
 - b. Wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan secara terpadu ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata.
 8. Kawasan strategis kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. Kawasan Taman Sritanjung, Taman Blambangan, Pendopo Kabupaten, Masjid Agung Baiturrahman, kompleks Makam Bupati Banyuwangi



- 
- Pertama sampai dengan Kelima, Bangunan Inggris, Kantor Pos, Gedung Juang, Gedung Loji (SD Negeri Kapatihan), Markas Kodim 0825, Rumah Dinas Kodim 0825, dan Rumah Dinas Polres Banyuwangi berada di Kecamatan Banyuwangi;
- b. Kawasan makam Datuk Ibrahim berada di Kecamatan Banyuwangi;
 - c. Kawasan Desa Wisata Osing berada di Kecamatan Glagah;
 - d. Kawasan situs Ompak Songo, situs Siti Hinggil, situs Gumuk Jadah, situs Gumuk Klinting, situs Gumuk Putri berada di Kecamatan Muncar;
 - e. Kawasan situs Tawang Alun berada di Kecamatan Kabat; dan
 - f. Kawasan situs Rowo Bayu berada di Kecamatan Songgon.
9. Kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam:
- a. Kawasan pertanian , terdiri dari
 - Kecamatan Wongsorejo;
 - Kecamatan Muncar;
 - Kecamatan Tegaldlimo; dan
 - Kecamatan Pesanggaran.
 - b. Kawasan perikanan meliputi:
 - Pengembangan Kawasan perikanan tangkap berada di perairan pesisir dan laut terdiri dari: Kecamatan Wongsorejo, Kecamatan Kalipuro; Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Kabat, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Muncar, Kecamatan Tegaldlimo, Kecamatan Purwoharjo, Kecamatan Bangorejo, Kecamatan Siliragung, dan Kecamatan Pesanggaran.
 - Pengembangan Kawasan budidaya perikanan laut, budidaya perikanan payau, dan budidaya perikanan tawar tersebar diseluruh kecamatan.
 - Pengembangan Kawasan konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan meliputi: Perairan Kayu Aking berada di Kecamatan Tegaldlimo, Perairan Takatbulan berada di Kecamatan Wongsorejo; dan Perairan Pulau Tabuhan berada di Kecamatan Wongsorejo.
10. Kawasan pertambangan, meliputi:
- a. Kawasan tambang mineral logam berupa tambang emas, perak, dan tembaga terdiri dari:
 - Kecamatan Pesanggaran; dan
 - Kecamatan Siliragung.



b. Kawasan tambang mineral bukan logam berupa tambang belerang berada di Kecamatan Licin.

c. Kawasan pertambangan panas bumi berada di Kawah Ijen Kecamatan Licin

11. Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:

Kawasan hutan konservasi

- a. Taman Nasional Meru Betiri berada di Kecamatan Pesanggaran;
- b. Taman Nasional Alas Purwo berada di Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Purwoharjo;
- c. Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup berada di Kecamatan Licin;
- d. Cagar Alam Janggangan Rogojampi berada di Desa Pakel Kecamatan Licin; dan Taman Wisata Alam Kawah Ijen berada di Kecamatan Licin

Kawasan Hutan Lindung

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. Kecamatan Wongsorejo; | h. Kecamatan Tegaldlimo; |
| b. Kecamatan Kalipuro. | i. Kecamatan Bangorejo; |
| c. Kecamatan Licin; | j. Kecamatan Tegalsari; |
| d. Kecamatan Glagah; | k. Kecamatan Siliragung; |
| e. Kecamatan Songgon; | l. Kecamatan Pesanggaran; |
| f. Kecamatan Sempu. | m. Kecamatan Glenmore; dan |
| g. Kecamatan Purwoharjo; | n. Kecamatan Kalibaru |

Kawasan Hutan Produksi

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. Kecamatan Wongsorejo; | h. Kecamatan Tegaldlimo; |
| b. Kecamatan Kalipuro. | i. Kecamatan Bangorejo; |
| c. Kecamatan Licin; | j. Kecamatan Tegalsari; |
| d. Kecamatan Glagah; | k. Kecamatan Siliragung; |
| e. Kecamatan Songgon; | l. Kecamatan Pesanggaran; |
| f. Kecamatan Sempu. | m. Kecamatan Glenmore; dan |
| g. Kecamatan Purwoharjo; | n. Kecamatan Kalibaru |

Kawasan Perkebunan

Kawasan Perkebunan Besar:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| a. Kecamatan Licin; | f. Kecamatan Songgon; |
| b. Kecamatan Kalipuro; | g. Kecamatan Sempu; |
| c. Kecamatan Songgon; | h. Kecamatan Pesanggaran; dan |

- 
- d. Kecamatan Kalibaru;
 - e. Kecamatan Glenmore;
 - i. Kecamatan Siliragung


Kawasan perkebunan kecil berupa perkebunan rakyat berada diseluruh kecamatan.

Indikasi Program/Proyek strategis Kabupaten Banyuwangi

Indikasi program strategis mengarah pada perwujudan rencana strauktur ruang wilayah kabupaten, Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten dan Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten. Terdapat beberapa indikasi program yang tergambar secara spesifik antara lain:

1. Perwujudan sistem pusat permukiman antara lain PKW, PKL, PPK, PPL dan penyusunan terhadap Peraturan Bupati tentang RDTR
2. Perwujudan sistem jaringan prasarana serta jaringan transportasi
3. Pembangunan jaringan jalan, terdapat beberapa prioritas meliputi pembangunan Pansela, Pembangunan dan Pelebaran Jalan Nasional dari Rogojampi sampai Jember, Pembangunan jalan dari exit tol Probolinggo-Banyuwangi ke Bandar Udara Banyuwangi, Peningkatan Jalan Akses KSPN Ijen-Baluran.
4. Perwujudan sistem jaringan kereta api, beberapa prioritas antara lain pembangunan jaringan jalur kereta api antarkota *double track* Surabaya-Jember-Banyuwangi, Penyusunan kajian kereta api cepat Merak-Jakarta-Banyuwangi dan reaktivasi jalur kereta api perkotaan Rogojampi.
5. Perwujudan sistem jaringan sungai, danu dan penyeberangan meliputi pelabuhan penyeberangan kelas I dan pembangunan fasilitas integrasi stasiun dan pelabuhan
6. Perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul, pengumpan regional, pengumpan lokal, terminal khusus, pelabuhan perikanan pantai dan pangalan pendaratan ikan.
7. Perwujudan sistem jaringan energi diprioritaskan pada Perwujudan jaringan infrastuktur minyak dan gas buri berupa pengembangan dan pemeliharaan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangunan Pembangkit Listrik Geothermal Ijen. Serta pengembangan pembangkit listrik tenaga lainnya.



- 
8. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi pengembangan dan pemeliharaan jaringan kabel tetap, jalur kabel bawah laut, jaringan bergerak terestrial, menara BTS dan pengembangan layanan internet pada fasilitas umum
 9. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi sistem jaringan irigasi, pengendalian banjir, dan pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air.
 10. Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sistem pengelolaan air limbah (SPAL)
 11. Pemeliharaan dan Pembangunan TPS3R, TPS, TPA, TPST. Pengadaan obyek angkutan persampaan dan pola kemitraan.
 12. Perwujudan Kawasan Lindung, Badan Air, Kawasan yang memeberikan perlindungan pada kawasan bawahnya dan Kawasan Perlindungan setempat, Kawasn Konservasi, Kawasan Cagar Budaya, Kawasn Ekosistem, Kawasan Budidaya, Kawasn Hutan Produksi, Pertanian Utamanya Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Kawasan Perkebunan utamanya Pengembangan kawasan sentra nasional (jeruk siam), Kopi Arabika, Kawasan Perkebunan Pariwisata dan Industri, Kawasan Peternakan, Kawasan Perikanan, Kawasan Peruntukan Industri.
 13. Kawasan Peruntukan Pariwisata, Terindikasi pada Pengembangan Geopark, Peningkatan fasilitas wisata kawa blue fire, Pantai Sukamade, Pengembangan eduwisata Alas Purwo, Meru Betiri, rencana pengembangan Pariwisata dan Marina, Program Desa Wisata Rakyatnya Cerdas, Mandiri dan Sejahtera (DEWI CEMARA).
 14. Perwujudan Kawasan Permukiman utamanya melalui pengadaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Penyediaan RTH publik 20% dan RTH privat 10 %, dan penataan pemakaman umum
 15. Perwujudan kawasan transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
 16. Perwujudan Kawasan strategis Kabupaten terindikasi prioritas pada pengembangan strategis agropolitan Banyuwangi (Glagah, Giri, Bangorejo, Kalibaru, Kalipuro). Kawasn Minapolitan Muncar-Srono. Peningkatan fasilitas pada kawasan strategis *culturesite geopark Ijen*. Pemeliharaan pengoptimalan fungsi kawasn *Biosite* dan *Geosite Geopark Ijen*.







BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Peran Pemerintah adalah menjaga agar tidak muncul permasalahan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang. Pemerintah sendiri juga memiliki peran untuk menjaga agar tidak muncul permasalahan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun sumber data permasalahan dalam Kabupaten Banyuwangi berasal dari identifikasi perbandingan data capaian kinerja antar tahun dan perbandingan data capaian dengan antar daerah dari masing-masing urusan serta untuk mendalami permasalahan tersebut dilakukan desk yang melibatkan perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi.

Identifikasi permasalahan terbagi menjadi tiga yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok sendiri merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui perumusan misi, tujuan, dan sasaran. Kemudian untuk masalah merupakan hal - hal yang harus dicari penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik, biasanya dipecahkan dalam bentuk strategi-strategi khusus. Dan akar masalah adalah hal-hal yang harus dicari penyebab dari masalah yang lebih rinci, biasanya pemecahan akar masalah dilakukan melalui rumusan program/kegiatan.

Berikut merupakan permasalahan pembangunan Kabupaten Banyuwangi di masing-masing urusan:



Tabel III. 1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi

No	Urusan	Permasalahan
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum meratanya kualitas pendidikan 2. tantangan dalam mengimbangi pendidikan dengan nilai karakter 3. Belum sepenuhnya kompetensi guru dalam penguasaan IT 4. Sarpras sekolah belum memenuhi akses lengkap yang berkualitas
2	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum meratanya jaminan Kesehatan 2. Kenaikan angka kematian ibu 3. Kondisi Stunting 4. Infrastruktur kesehatan penyakit menular dan tidak menular yang berkualitas
3	PUPR PU Pengairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infstruktur jalan dan jembatan serta konektivitas daerah belum optimal 2. Kondisi drainase yang belum bisa menampung air hujan 3. Terdapat Konflik kepentingan antar petani terkait pembagian air 4. Pemanfaatan lahan masih belum sesuai peruntukan, belum optimalnya pengembangan jaringan irigasi 5. Masih terdapat sumber mata air <i>inactive</i>
4	Perkim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan permukiman kumuh dan RTLH belum berjalan optimal 2. IPLT yang ada sekarang tidak dapat menampung kebutuhan
5	Trantibum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengamanan digital seperti CCTV 2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan penegakan perda/perkada
6	Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya integrasi antar dinas terkait dalam penanganan bencana 2. Kurangnya sarana dan prasarana pemadam 3. Pos sektor pemadam yang belum merata Kurangnya hydrant pada pusat-pusat keramaian
7	Kebencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang belum jelas 2. Pemahaman SDM yang tidak merata 3. Desa Tanggap Bencana (Destana) hanya ada 27 desa dari 217 desa

No	Urusan	Permasalahan
		4. Minimnya Kerjasama antar stakeholder
8	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaktepatan sasaran bantuan sosial karena data belum tepat 2. Kurang sinerginyapihak terkait dalam pelayanan PMKS
9	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh para pencari kerja. 2. Serapan tenaga kerja di banyuwangi masih belum optimal 3. Tingkat pengangguran yang masih tergolong tinggi
10	PPPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi peningkatan kekerasan perempuan dan anak
11	Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minat bertani berkurang kesejahteraan petani khususnya pada buruh tani 2. Lahan produktif mulai berkurang 3. Kesejahteraan petani yang belum optimal
12	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya Pencemaran air dan udara, 2. Penumpukan sampah yang tidak di daur ulang 3. Kerusakan alam dan perubahan iklim mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia 4. Belum optimalnya pengelolaan sampah berkelanjutan di wilayah selain wilayah kota 5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah
13	Adminduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya data kependudukan 2. Kurang maksimalnya integrasi digitalisasi layanan
14	PMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya peran BUMDES sebagai penggerak ekonomi lokal 2. Terjadi stagnansi pengembangan kawasan perdesaan
15	Pengendalian Penduduk dan KB	Terjadi kerentanan kualitas keluarga yang berdampak pada peningkatan perilaku menyimpang di kalangan individu
16	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minat masyarakat dalam penggunaan transportasi umum sangat rendah 2. Perlengkapan jalan belum memenuhi kebutuhan

No	Urusan	Permasalahan
		<ol style="list-style-type: none"> Menurunnya kepatuhan masyarakat untuk tertib berlalu lintas, Terhambatnya konektivitas akibat faktor alam sehingga menyebabkan berhentinya layanan angkutan penyeberangan.
17	Kominfo	<ol style="list-style-type: none"> Masih sulitnya integrasi data, terutama dengan aplikasi-aplikasi pusat belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh Desa di Kabupaten Banyuwangi
18	Koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya tata kelola sumber daya koperasi Minimnya diversifikasi usaha koperasi
19	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> Lemahnya daya tarik investasi Belum adanya dokumen RDTRK menuju digitalisasi dan terintegrasi dengan aplikasi perizinan digital Penerapan industri yang ramah lingkungan (<i>green industry</i>) belum optimal
20	Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang kurang Belum sinkronnya data terkait pemuda dan keikutsertaanya dalam aktivitas usaha
21	Pertanahan	Kurang Optimalnya Layanan air minum dan layanan sanitasi yang berkelanjutan
22	Statistik	Masih ada penyelenggaraan statistik yang belum sesuai dengan standar statistik nasional
23	Persandian	<ol style="list-style-type: none"> Masih terjadinya kasus peretasan data Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan informasi Sulitnya kontrol keamanan akibat kompleksitas infrastruktur IT di masing-masing dinas
24	Kebudayaan	Kecenderungan meninggalkan budaya akibat teknologi yang semakin cepat berubah
25	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> Masih kurangnya bahan bacaan sehingga berakibat pada minat baca masyarakat rendah Belum inklusifnya layanan di perpustakaan daerah
26	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> Kesadaran msyarakat terkait pentingnya arsip masih rendah, Belum optimalnya pemeliharaan dan konservasi koleksi dan kearsipan (restorasi)

No	Urusan	Permasalahan
27	Kelautan dan Perikanan (Pilihan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi perikanan mengalami penurunan 2. Komsumsi ikan masih rendah hilirisasi produk perikanan
28	Pariwisata (Pilihan)	Minimnya promosi serta pengembangan atraksi dan sarana pendukung pariwisata
29	Pertanian (Pilihan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya ancaman penyakit menular dan tidak menular terhadap hewan ternak
30	Peternakan (Pilihan)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya ketergantungan terhadap pupuk sehingga menyebabkan penurunan kesuburan lahan pertanian 3. Hilirisasi dan jaringan keberantaraan pasar sektor pertanian
31	Perdagangan (Pilihan)	Belum efektif dan efisiennya jaringan distribusi perdagangan melalui penataan sistem dan sarana distribusi, serta belum siapnya usaha masyarakat yang beradaptasi dengan teknologi dan pemasaran
32	Perindustrian (Pilihan)	Akses permodalan dan akses pasar
33	Sekda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala administrasi dan izin belajar untuk ASN studi lanjut 2. Tumpang tindih regulasi tata kelola lebih akuntabel
34	Sekwan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda yang tidak disertai kajian mendalam 2. Terdapat kepentingan politik dalam penyusunan raperda 3. Sistem kerja yang kolektif kolegial
35	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hyper regulation berdampak pada inkonsistensi sistem dan kebijakan di pemda 2. Pemanfaatan teknologi sebagai tools perencanaan
36	Kuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sistem keuangan terintegrasi 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
37	Kepegawaian	Penerapan sistem merit dan talent mobility.
38	Pendidikan dan Pelatihan	Aparatur yang kurang profesional dan disiplin
39	Litbang	Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
40	Pembinaan dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum efektifnya sistem pengawasan internal 2. Kurangnya koordinasi atau efisiensi dalam alur kerja 3. Belum terkelolanya standarisasi pengetahuan bagi auditor

No	Urusan	Permasalahan
	Penyelenggaraan Pemda	
41	Kesatuan Bangsa dan Politik	Pendidikan politik tidak berperan secara maksimal

Sumber: Data Diolah, 2024

3.2 Isu Strategis

3.2.1 Isu Global


Tantangan global di masa mendatang semakin kompleks sejalan dengan dinamika perubahan yang sangat cepat di berbagai sektor, dikenal sebagai tren besar atau megatren global. Perubahan global ini bersifat transformatif dengan skala yang besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat meluas, terutama didorong oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Seiring itu, dampak pandemi COVID-19 juga telah mengubah pola kehidupan sosial dan ekonomi secara signifikan, menciptakan tatanan kehidupan baru yang sering disebut sebagai "*new normal*."

A) Demografi Global

Perkembangan demografi global menjadi elemen krusial yang memberikan dampak signifikan terhadap dinamika ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, perlu diperhatikan bahwa laju pertumbuhannya mengalami perlambatan seiring berjalannya waktu. Fenomena ini menciptakan tantangan dan peluang yang memengaruhi struktur global secara menyeluruh.

Dalam skala mikro, perubahan pada struktur dan bentuk keluarga menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas kehidupan keluarga dalam konteks demografi. Kontribusi signifikan dari perkembangan teknologi digital membentuk pola interaksi sosial, memodifikasi cara individu dan keluarga berkomunikasi, serta berinteraksi. Penetrasi global, yang semakin meningkat melalui konektivitas, mempercepat pertukaran informasi dan memengaruhi budaya lokal.

Proyeksi ke depan menunjukkan kecenderungan pertumbuhan penduduk dunia yang terfokus di kawasan Asia dan Afrika. Perubahan ini membawa implikasi besar, termasuk munculnya kelompok negara yang memegang peran krusial dalam perekonomian global. Oleh karena itu, tantangan dan peluang yang timbul dari dinamika demografi ini menjadi fokus utama dalam perencanaan dan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah. Kesadaran terhadap perubahan struktural ini menjadi



penting dalam memandu langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan potensi pembangunan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

B) Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global menjadi tantangan serius bagi negara-negara, termasuk Indonesia, dengan potensi konflik yang meruncing di beberapa wilayah kritis. Meskipun Indonesia meresponsnya dengan pendekatan berbasis ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, fokusnya pada dialog, kerja sama, dan perdamaian, krisis ekonomi dan sosial di berbagai sektor menghadirkan risiko terhadap kestabilan geopolitik di masa depan. Adaptabilitas dan strategi bijaksana menjadi kunci dalam menghadapi perubahan geopolitik dan menjaga keamanan global dan regional.


Sementara itu, dinamika ekonomi global menunjukkan pergeseran di mana negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bukan hanya peserta, tetapi juga pemimpin dalam kontribusi terhadap ekonomi dunia. Sektor komoditas yang dulu menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi berkembang mengalami perubahan, dengan institusi ekonomi menjadi sumber pertumbuhan yang semakin penting. Keberhasilan negara-negara berkembang tergantung pada kebijakan ekonomi bijaksana, reformasi institusi, dan pengelolaan sumber daya yang efektif.

Dengan menerapkan kebijakan yang tepat, negara-negara berkembang memiliki peluang untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing global. Proyeksi untuk perekonomian global pada tahun 2050 menunjukkan peningkatan signifikan, mencerminkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan. Dalam menghadapi tantangan dan peluang ini, kolaborasi global dan kebijakan progresif diperlukan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

C) Disrupsi Teknologi

Perubahan teknologi yang cepat, dipercepat oleh pandemi COVID-19, menciptakan disrupsi yang signifikan di berbagai lapisan masyarakat, memerlukan adaptasi dalam bekerja, belajar, dan berinteraksi. Dampak disrupsi ini melibatkan sektor manufaktur, yang membutuhkan adaptasi cepat terhadap transformasi teknologi dan otomatisasi. Sementara itu, sektor pendidikan juga mengalami perubahan, memerlukan inovasi untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dalam era digital. Pemanfaatan teknologi dalam kebijakan pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, dengan regulasi yang dapat diperbarui dengan cepat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan ekosistem yang mendukung kesiapan masyarakat, termasuk peningkatan





infrastruktur digital, investasi dalam pelatihan keterampilan teknologi, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi.

D) Urbanisasi Dunia


Peningkatan jumlah penduduk dan ukuran kota mempengaruhi negara-negara dengan ekonomi yang sedang berkembang. Peningkatan ini dapat memberikan dampak signifikan terutama pada pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi di kota-kota tersebut. Tantangan seperti infrastruktur yang tidak memadai dapat memperburuk kesejahteraan masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, perencanaan perkotaan dan kebijakan yang mendukung sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Teknologi informasi dan komunikasi juga diakui sebagai solusi, dengan inovasi seperti smart city solutions dan aplikasi berbasis teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi layanan publik dan kualitas hidup penduduk perkotaan. Pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan perkotaan dengan infrastruktur dan layanan yang memadai disoroti, menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengembangkan solusi holistik dan berkelanjutan dalam menghadapi dampak urbanisasi di masa depan.

E) Perdagangan Internasional

Peningkatan peran negara berkembang, terutama di kawasan Asia-Afrika, menjadi pendorong utama perubahan dalam dinamika perdagangan internasional. Negara-negara ini tidak hanya menjadi konsumen yang signifikan tetapi juga berperan dalam produksi dan penyediaan sumber daya global. Kolaborasi produksi bersama dan rantai pasok global menjadi landasan utama perdagangan, memungkinkan integrasi komponen dari berbagai negara untuk menciptakan jaringan produksi global yang efisien. Hal ini memberikan peluang bagi negara-negara di daerah untuk terlibat dalam rantai nilai global dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian global.

Perdagangan internasional semakin dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan pertumbuhan konsep keberlanjutan. Inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi membentuk pola perdagangan baru, sementara perhatian terhadap keberlanjutan mendorong praktik perdagangan yang ramah lingkungan. Kerja sama regional, seperti di ASEAN, menciptakan hub perdagangan strategis dan memungkinkan negara-negara di daerah untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Keberhasilan kerja sama regional dapat meningkatkan peluang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta daya saing dalam perdagangan internasional.





Manfaat ekonomi dan peluang kerja dari kolaborasi internasional dan perdagangan regional menjadi fokus bagi perkembangan di daerah. Peningkatan infrastruktur, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan investasi asing adalah dampak positif dari partisipasi dalam rantai nilai global dan kerja sama kawasan. Oleh karena itu, peran dan kesiapan daerah dalam mengikuti perkembangan perdagangan internasional menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

F) Kelas Menengah

Pertumbuhan kelas menengah di seluruh dunia pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 8,8 miliar orang, mendominasi lebih dari 90 persen dari populasi global. Fenomena ini tidak hanya menciptakan dinamika baru dalam struktur sosial dan ekonomi global, tetapi juga mengubah pola konsumsi secara substansial. Kelas menengah yang berkembang pesat menjadi kekuatan ekonomi utama, memimpin pertumbuhan konsumsi dan investasi secara global. Pertumbuhan ini menciptakan kebutuhan konsumen yang lebih beragam dan memunculkan gaya hidup baru, merangsang inovasi dan peluang bisnis di berbagai sektor ekonomi.


Dampaknya pada tingkat daerah sangat signifikan. Penyediaan barang dan jasa berkualitas, infrastruktur yang memadai, dan peluang pekerjaan menjadi esensial untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi kelas menengah yang berkembang ini. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, adopsi gaya hidup baru oleh kelas menengah membuka peluang bisnis dan pekerjaan di tingkat lokal, terutama dalam industri kreatif, pariwisata, dan sektor-sektor terkait gaya hidup. Oleh karena itu, daerah perlu memahami dan menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan konsumsi ini untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

G) Persaingan Sumber Daya Alam

Berkurangnya Sumber Daya Alam (SDA) secara global memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan di tingkat daerah. Khususnya, kekurangan energi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menyulitkan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Daerah diharapkan untuk mencari sumber energi alternatif, merumuskan kebijakan efisiensi energi, dan mengembangkan infrastruktur yang ramah lingkungan guna mengatasi tantangan ini. Persaingan terkait air, terutama di daerah yang mengalami kekeringan atau ketidakseimbangan pasokan air, dapat





memicu ketegangan sosial dan ekonomi. Pengelolaan air yang bijaksana dan investasi dalam infrastruktur air menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pasokan air dan mencegah konflik di daerah. Permasalahan kekurangan pangan juga menciptakan dampak serius di tingkat lokal, mendorong perlunya pengembangan sistem pertanian berkelanjutan, peningkatan efisiensi produksi pangan, dan pembentukan kebijakan ketahanan pangan untuk menghadapi ketidakpastian pasokan pangan global.

H) Perubahan Iklim


Perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan pada pembangunan jangka panjang melalui berbagai mekanisme. Pertama, meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai dapat merusak infrastruktur, menghancurkan sumber daya, dan menyebabkan kerugian ekonomi, sehingga menghambat proyek pembangunan. Kedua, pemanasan global memengaruhi distribusi dan ketersediaan sumber daya alam seperti air dan tanah subur, mengganggu produksi pangan dan sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada sumber daya tersebut. Ketiga, ketidakstabilan iklim dan lingkungan menciptakan kondisi yang sulit diprediksi, menyulitkan perencanaan jangka panjang dan menghambat strategi pembangunan. Keempat, peningkatan risiko kesehatan masyarakat akibat perubahan iklim menimbulkan beban ekonomi jangka panjang melalui biaya perawatan dan penanggulangan dampak kesehatan. Kelima, infrastruktur perkotaan terancam oleh kenaikan permukaan air laut, banjir, dan erosi, memerlukan investasi besar untuk adaptasi dan perbaikan. Keenam, perubahan iklim dapat merubah pola sosial dan ekonomi masyarakat, menciptakan ketidakstabilan yang mempengaruhi rencana pembangunan jangka panjang. Terakhir, tekanan pada ketahanan pangan melalui penurunan produktivitas pertanian dan risiko bencana alam memerlukan adaptasi strategi keamanan pangan dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, perlu integrasi strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan proyek-proyek tersebut.

3.2.2 Isu Nasional

A) Telaah RPJPN Indonesia Tahun 2025- 2045

Pembangunan Nasional selama dua dekade kebelakang dalam periode RPJPN 2005-2025 telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam berbagai bidang pembangunan. Akan tetapi dalam mengarungi perencanaan kedepan terdapat tantangan perubahan yang cukup tinggi baik dari dinamika sosial, ekonomi, terlebih dinamika perubahan lingkungan oleh karenanya dalam menetapkan Visi dan Misi Pembangunan jangka Panjang Nasional maka perlu membaca dan menganalisa






berbagai kemungkinan serta menyimpulkannya kedalam isu pembangunan yang menjadi titik tekan dalam menentukan langkah demi langkah perwujudan pembangunan nasional. Adapun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional telah dipetakan beberapa isu meliputi:

1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat, disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah
2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN), sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi.
3. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah, terjadinya pelemahan sektor manufaktur (dutch diseases), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.
4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata, disebabkan oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan serta belum optimalnya inovasi dan akses pasar internasional.
5. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut, potensi ekonomi laut belum dapat secara optimal dimanfaatkan untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan.
6. Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi, UMKM dan Koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja akan tetapi kontribusina terhadap perekonomian relatif rendah.
7. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, Kapasitas dan kapabilitas TIK yang dimiliki Indonesia saat ini belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam mempercepat pemanfaatannya secara optimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.



- 
8. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan, penggunaan energi fosil yang masih tinggi namun selain itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan
 9. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas, infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata
 10. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal, Tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah, ketidaksesuaian keahlian (mismatch) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.
 11. Tata kelola pemerintahan belum optimal, Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif karena Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.
 12. Kepastian dan penegakan hukum masih lemah, Regulasi yang berlebihan (hyper regulation) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah. Selain itu, sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan
 13. Demokratisasi Belum Optimal, Demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan. Selain itu Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal dan prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarus utamakan dalam pelaksanaan pembangunan.
 14. Ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi, masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal khususnya di bagian timur Indonesia, serta masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya minat investasi di luar Pulau Jawa terutama di KTI.




3.2.3 Isu Regional

A) Telaah Rancangan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan daerah provinsi yang memiliki potensi perekonomian tinggi di Pulau Jawa, sehingga potensi yang dimiliki harus mampu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Berbagai permasalahan serta tantangan kedepan telah terpetakan dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045. Potensi dan tantangan ini mengerucut pada beberapa isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, daya saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal,
Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam rangka menggerakkan perekonomian regional, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar.
2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan
Ketersediaan infrastruktur di Jawa Timur masih memerlukan peningkatan dari aspek kualitas maupun pemerataan. Infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air, maupun transportasi yang terintegrasi dengan penataan ruang termasuk mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan risiko bencana dan krisis iklim dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sumber daya lokal guna mendukung penguatan ekonomi daerah.
3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar
Pemenuhan kebutuhan sosial dasar, khususnya pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan serta peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan, menjadi isu strategis karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan suatu masyarakat.
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan menciptakan insan yang berkualitas dimulai dari usia dini hingga usia kerja dengan peningkatan relevansi dan daya saing Pendidikan dan Pelatihan, pelibatan dunia




Industri dan dunia usaha dalam pengembangan vokasi, serta penguasaan adopsi teknologi dan penciptaan inovasi. Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal mencerminkan pentingnya memahami, menghargai, dan memelihara identitas budaya suatu masyarakat dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal membentuk fondasi kuat untuk membangun masyarakat yang beragam namun tetap kokoh dalam solidaritas, menciptakan keseimbangan antara globalisasi dan keberlanjutan budaya lokal.

5. Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan
Penting untuk menciptakan kebijakan dan strategi pembangunan yang mempertimbangkan interkoneksi antara produksi pangan dan sumber daya energi. Dengan demikian, dapat diciptakan lingkungan yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing tinggi bagi masyarakat lokal dan wilayah secara keseluruhan.
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana
Ancaman terhadap penurunan daya dukung dan daya tampung cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk serta aktivitas perekonomian termasuk pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman, serta industri dan perdagangan. Serta tantangan perubahan iklim.
7. Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Menitik beratkan upaya dalam meningkatkan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

3.2.4 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan dan lingkungan hidup adalah dua bidang yang saling berkaitan. Satu sisi pembangunan dirasakan perlu untuk meningkatkan harkat hidup manusia, tetapi di sisi lain tidak jarang program pembangunan tanpa disadari mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Untuk mewujudkan keseimbangan antara pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan kelestarian lingkungan, maka perlu diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan yang memperhatikan/ mempertimbangkan pada isu-isu lingkungan maupun pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development), baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang.






Konsep SDGs itu sendiri lahir pada kegiatan Konferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi. Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, maka SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai. Sedangkan yang dimaksud dengan *Sustainable Development Goals* (SDG's) merupakan dokumen kesepakatan pembangunan global untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pada proses pembangunan. SDG's ini merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan.

Sesuai hasil Deklarasi, SDGs terdiri dari 17 goals yang dapat dikelompokkan menjadi 4 pilar yang tidak terpisahkan dan saling memiliki ketergantungan. Empat pilar ini untuk menunjukkan ada dan pentingnya keseimbangan di antara 3 pilar utama yaitu pilar/dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan hidup, yang didukung dengan pilar tata kelola. Ketiga pilar ini merupakan pilar yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Pilar lingkungan merupakan unsur terpenting, karena pertumbuhan saat ini yang digambarkan dalam pilar ekonomi, perlu menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Demikian pula, perilaku sosial masyarakat yang digambarkan dalam pilar sosial, perlu berubah dan memiliki perilaku yang ramah terhadap lingkungan. Adapun 17 tujuan yang diusulkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan;
6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan;
7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern;




- 
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
 10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara;
 11. Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan;
 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
 14. Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;
 15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
 16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dari ke- 17 tujuan Pembangunan berkelanjutan diatas, maka akan diimplementasikan ke dalam beberapa indikator TPB Kabupaten Banyuwangi. Secara umum, berdasarkan 199 indikator TPB dengan membandingkan terhadap target sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan TPB, Kabupaten Banyuwangi memiliki 100 indikator atau sebesar 50,25% yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 49 indikator atau sebesar 24,62% yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target, 43 indikator atau sebesar 21,61% yang tidak tersedia data, dan 7 indikator atau sebesar 3,52% yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Dari hasil dokumen KLHS terdapat isu SDG'S yang telah terekapitulasi yaitu:

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Hidup Masyarakat Rentan
2. Pengendalian Kesehatan Masyarakat, Ibu dan Bayi serta Pemerataan SDM Kesehatan
3. Pengentasan Kewajiban Belajar dan Mutu Pendidikan
4. Pemenuhan Fasilitas Dasar Pendidikan



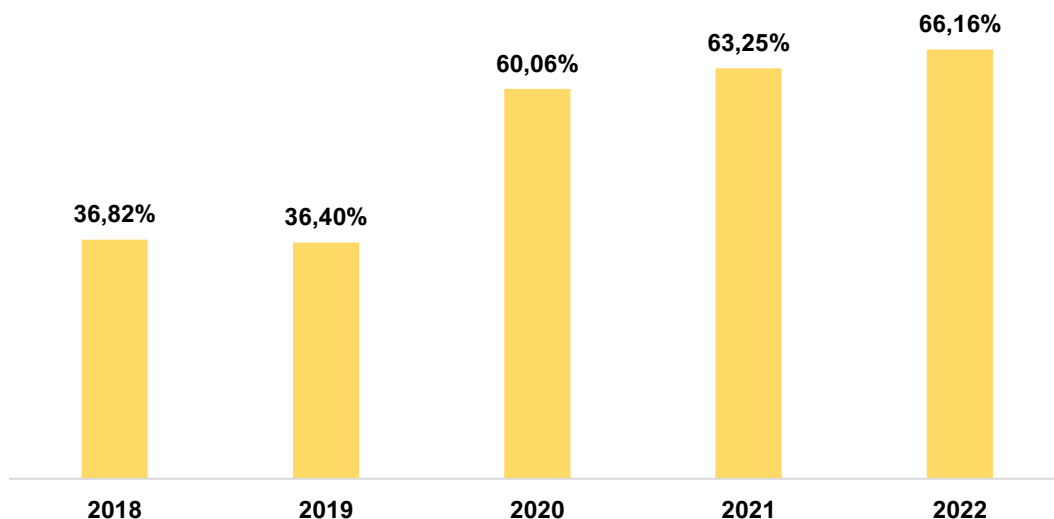
- 
5. Menurunnya kualitas ketenagakerjaan dari sisi produktivitas dan Angka Pengangguran
 6. Akses Permodalan dan Kredit bagi Wirausaha
 7. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Aksesibilitas Sanitasi
 8. Optimalisasi Pengendalian dan Pengelolaan Sumber Daya Air
 9. Mitigasi Risiko Bencana dan Kapasitas Kesiapsiagaan Bagi Wilayah Rawan Bencana
 10. Pengendalian Pencemaran, Alih Fungsi Lahan dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
 11. Ketentraman Sosial dan Kepeberpihakan pada Perempuan
 12. Afirmasi Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah
 13. Optimasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis dirumuskan dengan melakukan penilaian/ pembobotan terhadap masing-masing isu pembangunan berkelanjutan yang telah disajikan sebelumnya.

1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Hidup Masyarakat Rentan

Pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan bagi masyarakat rentan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Berbagai program dan kebijakan dapat dilakukan untuk memastikan hal ini tercapai, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan sosial. Contohnya, dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, program bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), dan subsidi listrik merupakan upaya pemerintah untuk memastikan akses masyarakat terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, dan energi listrik. Sedangkan untuk jaminan sosial, program jaminan kesehatan nasional (JKN) dan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) di Indonesia adalah contoh program yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Untuk dapat mendukung pernyataan perumusan isu strategis diatas maka dapat dikudung dengan data sebagai berikut:





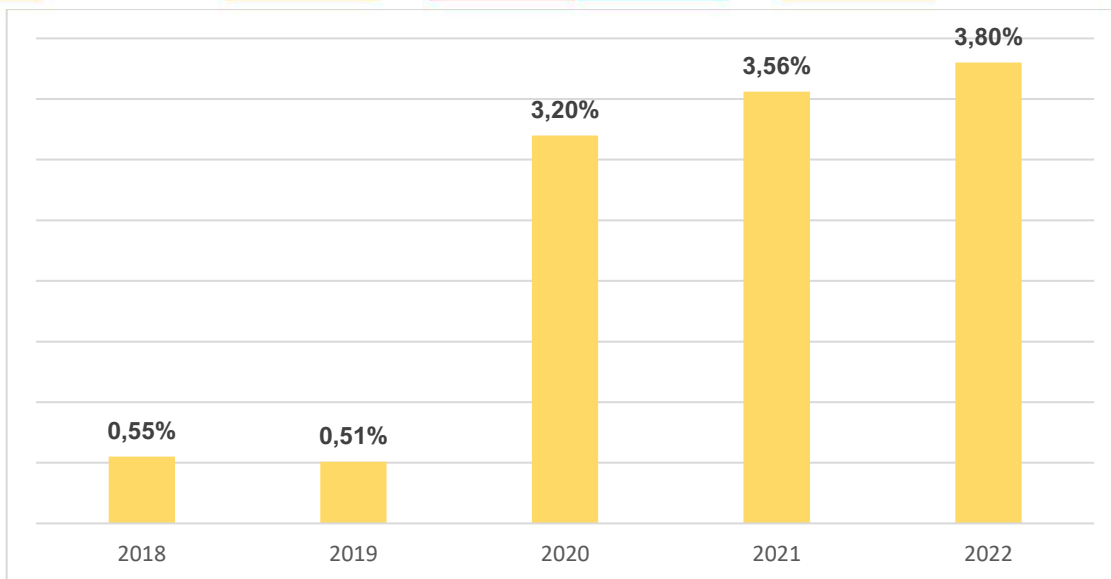
Gambar III. 1 Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi

Sumber:

Berdasarkan pada grafik diatas maka dapat diketahui bahwa peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi hingga tahun 2022 masih mencapai 66,16%, dimana target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 95%, sehingga tingkat kepesertaannya di Kabupaten Banyuwangi hingga tahun 2022 masih berada dibawah target dengan selisih/ gap sebesar -28,84%. Masih tingginya gap antara target dengan capaian hingga tahun 2022 perlu mendapatkan perhatian pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dimana diharapkan semua masyarakat di Kabupaten Banyuwangi dapat memperoleh jaminan kesehatan sehingga mendukung peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan dan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

2) Pengendalian Kesehatan Masyarakat, Ibu dan Bayi serta Pemerataan SDM Kesehatan

Kesehatan Masyarakat, Ibu dan Bayi di Kabupaten Banyuwangi perlu mendapatkan perhatian, dimana bila dilihat berdasarkan indikator Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun capaiannya mengalami peningkatan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir, bahkan pada tahun 2022 nilainya mencapai 3,80% atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2021). Bila dibandingkan dengan target yang semakin menurun, maka kondisi di Kabupaten Banyuwangi saat ini menunjukkan capaian yang lebih buruk. Untuk dapat mendapatkan data secara detail maka disajikan data mengenai Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun sebagai berikut:



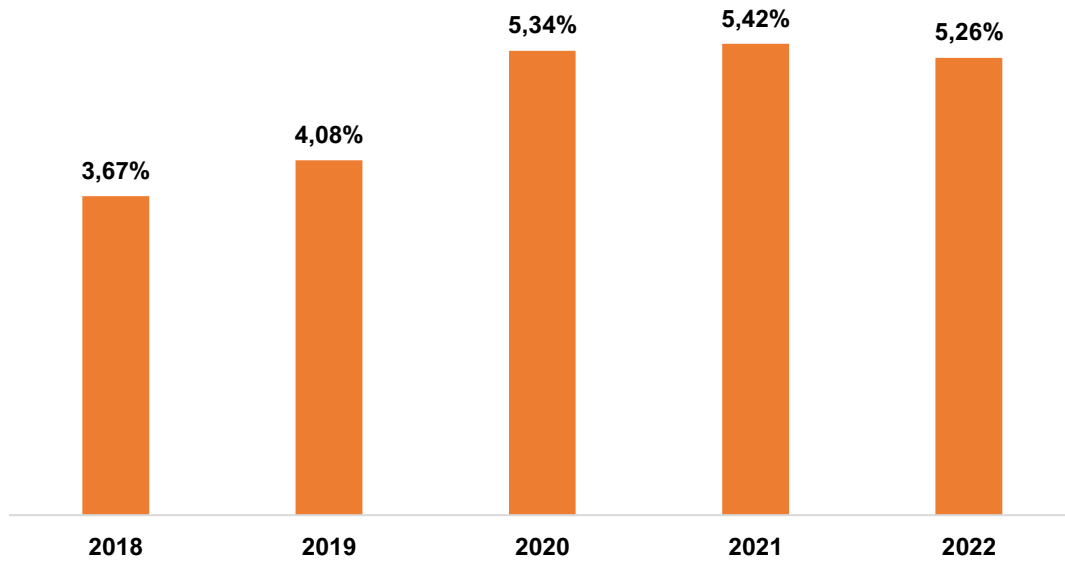
Gambar III. 2 Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun di Kabupaten Banyuwangi

Sumber:

Dari data diatas maka menunjukkan bahwa Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Maka dari itu isu mengenai Kesehatan Masyarakat, Ibu dan Bayi serta Pemerataan SDM Kesehatan perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga dimungkinkan untuk kedepannya Masyarakat akan mendapatkan layanan serta Kesehatan yang memenuhi standar yang tepat.

3) Menurunnya kualitas ketenagakerjaan dari sisi produktivitas dan Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyuwangi dalam 4 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 4,08% pada tahun 2019 menjadi 5,34% pada tahun 2020. Terjadinya peningkatan pada tahun tersebut disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 sehingga perekonomian daerah mengalami dampak yang cukup signifikan yang pada akhirnya berimbas pada meningkatnya pengangguran. Pada tahun 2021 peningkatan pengangguran terbuka di Kabupaten Banyuwangi masih berlanjut hingga mencapai 5,42% dan sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 5,26%. Walaupun telah sedikit mengalami penurunan, namun tingkat pengangguran di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2022 masih cukup tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan data yang disajikan sebagai berikut:



Gambar III. 3 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Banyuwangi

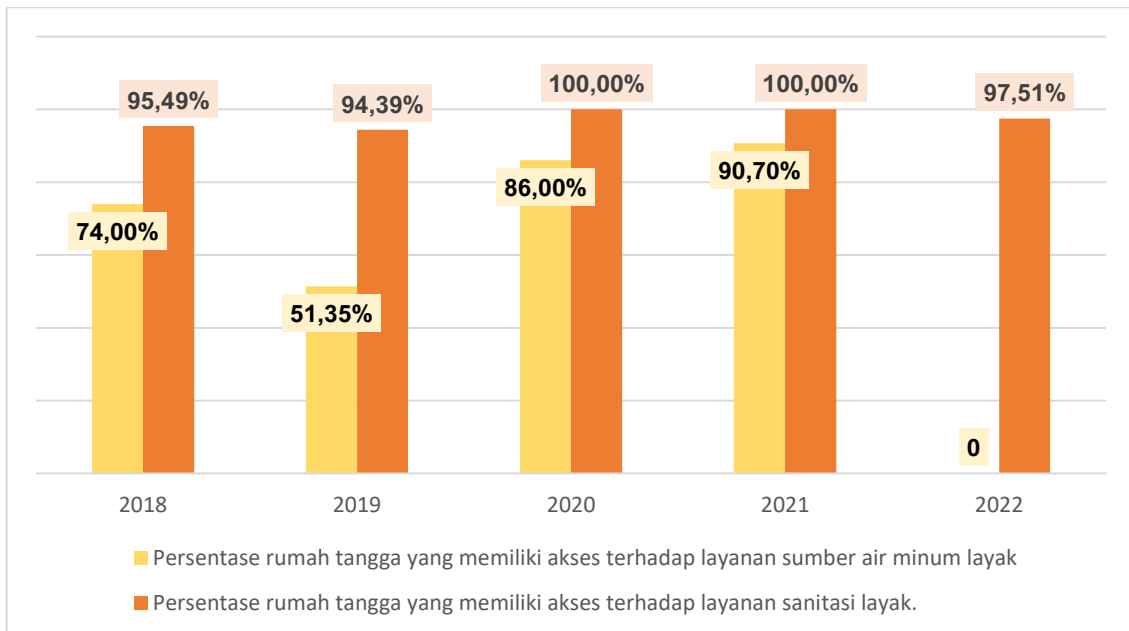
Sumber:

Dengan melihat data yang tersaji seperti diatas, maka angka tingkat pengangguran terbuka yang digambarkan dari tahun 2020 hingga tahun 2022 masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Khususnya pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyuwangi memiliki capaian tertinggi yakni di angka 5,42%. Lambatnya penurunan tingkat pengangguran terbuka memang disebabkan oleh berbagai faktor, bila dilihat dari faktor internal semakin meningkatnya pengangguran mengindikasikan adanya penurunan kualitas ketenagakerjaan dari sisi produktivitas, sehingga angkatan kerja yang tersedia belum secara optimal terserap di pasar kerja. Untuk itu, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja perlu memperoleh perhatian pemerintah dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, disamping adanya upaya didalam meningkatkan ketersediaan lapangan kerja.

4) Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Aksesibilitas Sanitasi

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/* SDG's) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Akhir-akhir ini banyak persoalan yang timbul akibat dari perilaku-perilaku manusia yang melakukan banyak pelanggaran terhadap cara pengelolaan air minum di sekitar lingkungannya. Berbagai masalah yang melatar

belakangi buruknya sanitasi dan pengamanan air minum diantaranya: pencemaran air, sumber mata air mengering, air bersih menjadi komoditas yang mahal, musim yang tidak menentu lagi, dan sebagainya. Dari pernyataan tersebut maka akan disajikan data yang mendukung mengenai pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas selama ini di Kabupaten Banyuwangi:



Gambar III. 4 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum & Sanitasi Layak di Kabupaten Banyuwangi

Sumber:

Bila melihat pada akses masyarakat terhadap layanan sumber air minum di Kabupaten Banyuwangi dapat diketahui mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 90,70%, namun demikian bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 100%, masih terdapat 9,30% rumah tangga yang belum terlayani, sehingga hal tersebut menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkannya, melalui pemenuhan seluruh rumah tangga terhadap ketersediaan layanan sumber air minum, mengingat air merupakan sumber kehidupan. Begitupun dengan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, dimana berdasarkan data yang diperoleh Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 100% menjadi 97,51%, sehingga dengan demikian ketersediaan akses sanitasi layak perlu lebih ditingkatkan, sehingga secara konsisten mampu mencapai 100% dalam setiap tahunnya.

5) Optimalisasi Pengendalian dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengendalian dan pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Konservasi sumber daya air meliputi upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Pengelolaan sumberdaya air di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyuwangi menghadapi problema yang sangat kompleks, mengingat air mempunyai beberapa fungsi baik fungsi sosial-budaya, ekonomi dan lingkungan yang masing dapat saling bertentangan. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas kegiatan ekonomi, telah terjadi perubahan sumberdaya alam yang sangat cepat. Mengingat bahwa pentingnya untuk menjaga dan melestarikan keberadaan sumber daya air di Kabupaten Banyuwangi, maka berikut merupakan table yang menyajikan data mengenai jumlah jaringan sumber daya air yang terbentuk:

Tabel III. 2 Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	3	3	3	3	3

Sumber:

Bila melihat pada Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Banyuwangi masih tersedia jaringan informasi sumber daya air yang terbatas, dimana pada tahun 2018 hingga 2022 masih terdapat 3 jaringan informasi SDA. Bila dikaitkan dengan target yang mencapai 8, maka hingga tahun 2022 masih terdapat kekurangan sebanyak 5, sehingga pengelolaan sumber daya air perlu dioptimalkan dalam rangka mendukung/ menjamin ketersediaan air dimasa mendatang Jaringan Informasi Sumber Daya Air merupakan instrumen yang mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air. Jaringan informasi Sumber Daya Air harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.

6) Mitigasi Resiko Bencana dan Kapasitas Kesiapsiagaan Bagi Wilayah Rawan Bencana

Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat. Risiko merupakan fungsi dari ancaman atau bahaya

dengan kerentanan dan juga kapasitas. Risiko bencana dapat berkurang, apabila kapasitas ditingkatkan atau kerentanan dikurangi, sedangkan risiko bencana dapat meningkat apabila kerentanan semakin tinggi dan kapasitas semakin rendah. Risiko bencana dapat berkurang, apabila kapasitas ditingkatkan atau kerentanan dikurangi, sedangkan risiko bencana dapat meningkat apabila kerentanan semakin tinggi dan kapasitas semakin rendah. Kabupaten Banyuwangi memiliki indeks risiko bencana yang semakin berkurang dalam setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui grafik seperti dibawah ini:



Gambar III. 5 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Banyuwangi

Sumber:

Kabupaten Banyuwangi memiliki tren capaian indeks risiko bencana yang semakin berkurang dalam setiap tahunnya, dimana berdasarkan besaran indeks risiko dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 tercatat sebesar 168,29 dengan kategori tinggi (atau berada di atas 144). Status IRBI dengan kategori tinggi terus berlanjut hingga pada tahun 2019, walaupun nilai indeksnya mengalami penurunan. Sejak tahun 2020 hingga 2022 nilai Indeks Risiko Bencana kembali mengalami penurunan dari 137,92 menjadi 119,81 dengan status sedang (atau berada pada nilai 13 hingga 144). Walaupun mengalami penurunan, namun Indeks Risiko Bencana pada wilayah tersebut masih berada di atas nilai Provinsi Jawa Timur yang pada tahun 2022 tercatat sebesar 108,69. Hal tersebut menunjukkan bahwa risiko bencana di Kabupaten Banyuwangi masih termasuk lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Timur, sehingga dengan demikian perlu dilakukan mitigasi risiko bencana dan kapasitas kesiapsiagaan bagi wilayah rawan bencana, mengingat wilayah Kabupaten Banyuwangi

cukup luas dan masih terdapat wilayah dengan risiko bencana yang masih tinggi untuk jenis bencana tertentu.

7) Pengendalian Pencemaran, Alih Fungsi Lahan dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan kualitas lingkungan hidup masih dihadapkan pada kondisi dimana Pencemaran dan Alih Fungsi Lahan yang perlu dikendalikan, serta perlunya pengelolaan sampah. Kualitas Air di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan adanya fluktuasi pada capaian indeks kualitas air di setiap tahunnya akan tetapi secara trend capaian Indeks Kualitas Air mengalami penurunan sejak tahun 2013 yakni dengan capaian 68,22 dan di tahun 2022 menjadi 60,4. Adapun penurunan capaian indikator ini adalah akibat dari adanya pembuangan limbah pabrik ke badan air selain itu masyarakat juga masih seringkali menyalahgunakan fungsi aliran sungai dengan perilaku Open Defecation yang tentunya berpotensi untuk menurunkan kualitas air. Untuk membuktikan pernyataan tersebut maka akan disajikan data mengenai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Lahan dan Persentase Sampah yang Dikelola sebagai berikut:

Tabel III. 3 IKA, IKL, dan Persentase Sampah yang Dikelola di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2022

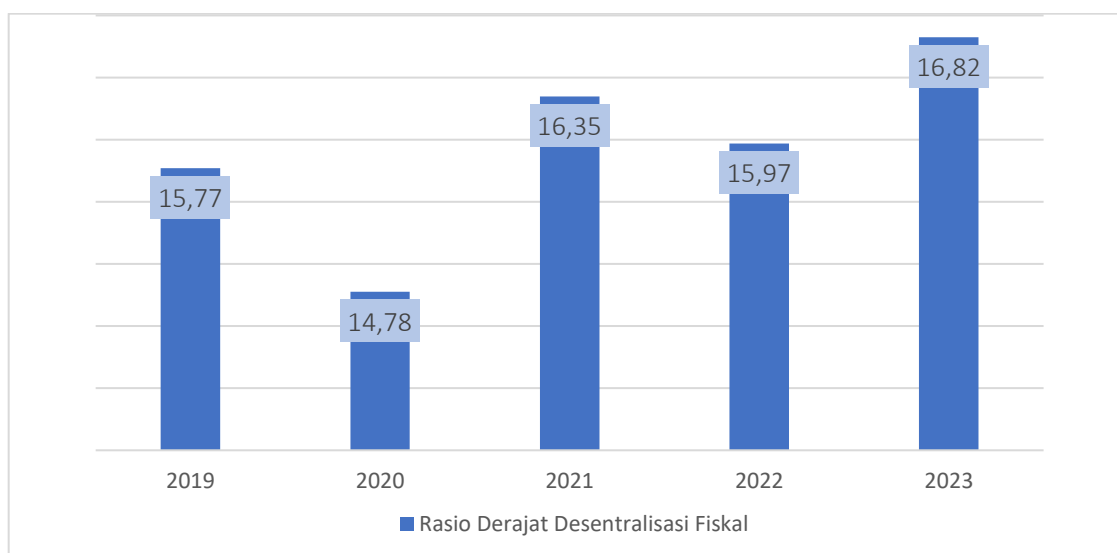
Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Air	54,17	55,45	59,17	60	60,4
Indeks Kualitas Lahan	61,59	61,59	61,59	59,37	59,74
Persentase Sampah yang Dikelola	56,00	59,00	61,00	63,87	61,06

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, 2023

Pemerintah Daerah memiliki wewenang terhadap penanganan masalah persampahan dimana masalah ini berkaitan secara langsung terhadap kondisi lingkungan hidup masyarakat. Melalui pengelolaan persampahan masyarakat diharapkan dapat berperan menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dikelola di Kabupaten Banyuwangi hingga saat ini masih belum dapat berjalan optimal, dimana capaian tertinggi tahun 2021 mencapai angka 63,87, dan kembali mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 61,06. Salah satu tantangan terberatnya adalah luasan wilayah yang cukup besar, disisi lain produksi persampahan pada setiap waktu terus bertambah yang artinya tuntutan pengolahan sampah juga harus terus ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga dengan demikian pengelolaan sampah menjadi salah satu isu yang penting dan perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kedepan.

8) Optimasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan tata kelola pemerintahan masih dihadapkan pada persoalan kemandirian fiskal, dimana nilai rasio Deajat Desentralisasi Fiskal (proporsi antara PAD terhadap total pendapatan) di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2022 mengalami penurunan hingga mencapai angka 15,97% dibandingkan pada tahun 2021 yang berada pada rasio 16,35%, sehingga dengan demikian derajat kontribusi PAD pada total Pendapatan Daerah masih memiliki kriteria yang kurang, dimana masih berada dibawah 20%. Hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih cukup tinggi, yaitu berada di atas 80% dalam setiap tahunnya. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan potensi wilayah yang dapat memacu peningkatan PAD, mengingat kebutuhan anggaran pembangunan semakin lama mengalami peningkatan seiring dengan tuntutan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.




Gambar III. 6 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Banyuwangi

Sumber:

3.2.5 Isu Strategis daerah

Mengacu pada berbagai permasalahan sektoral yang dihadapi di Kabupaten Banyuwangi kemudian menelaah isu-isu pembangunan mulai dari isu global, isu pembangunan nasional, isu pembangunan kewilayahan di Jawa Timur, serta isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pembangunan jangka panjang Kabupaten Banyuwangi telah dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan jangka panjang di Banyuwangi. Berikut ini adalah isu strategis pembangunan tersebut:



Belum Optimalnya Pendidikan merata yang berkualitas yang berorientasi pada IT dan karakter.

Terdapat beberapa isu yang mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Upaya peningkatan kapasitas guru dan kompetensi dalam penguasaan IT menandakan perhatian terhadap transformasi pendidikan yang memanfaatkan teknologi di era digital. Adanya kegiatan yang diimbangi dengan nilai karakter, terutama dalam konteks pengangkatan guru agama di Sekolah Negeri, mencerminkan komitmen untuk mengintegrasikan aspek budaya dan moral dalam proses pembelajaran. Upaya peningkatan capaian hasil belajar siswa terkait literasi, numerasi, dan karakter juga memberikan fokus pada pengembangan siswa secara holistik, mendukung capaian PISA, dan merespons tuntutan global.


Pada tingkat nasional, disrupsi teknologi pendidikan dan kebutuhan akan pendidik berkualitas menjadi isu penting. Peningkatan kompetensi guru dalam penguasaan IT sejalan dengan isu nasional terkait dengan perkembangan teknologi pendidikan yang cepat. Hal ini mencerminkan tantangan dan peluang dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana efektif dalam proses pembelajaran. Namun, sejumlah permasalahan hasil evaluasi tetap menjadi fokus. Meratanya kualitas pendidikan menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk menyamakan standar pendidikan di seluruh wilayah. Pendidikan yang diimbangi dengan nilai karakter menyoroti pentingnya integrasi aspek moral dan budaya dalam pembelajaran. Belum sepenuhnya kompetensi guru dalam penguasaan IT menunjukkan perlunya peningkatan keterampilan tenaga pendidik dalam mengadopsi teknologi. Permasalahan sarana prasarana sekolah yang belum memenuhi akses lengkap dan berkualitas menegaskan pentingnya investasi dalam infrastruktur pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki kesadaran yang kuat terhadap transformasi pendidikan, pengembangan kompetensi guru, dan integrasi nilai karakter dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat lokal dan nasional. Tantangan seperti disrupsi teknologi dan permasalahan infrastruktur juga harus diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

Upaya Pemerataan kualitas sarana prasarana kesehatan yang mampu beradaptasi pada transisi epidemiologi

Permasalahan kesehatan di daerah menjadi salah satu masalah yang masih vital untuk ditangani. Digitalisasi data pelayanan kesehatan atau telemedicine menjadi salah satu isu utama yang menunjukkan pergeseran menuju pemanfaatan teknologi dalam





penyediaan layanan kesehatan. Namun, tantangan terkait infrastruktur digital dan ketersediaan akses masih perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan implementasi.

Kesehatan lingkungan yang terkait dengan persampahan menjadi fokus lain, mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan sanitasi dan manajemen limbah guna mencegah potensi penyakit yang dapat terkait dengan lingkungan. Kasus kematian ibu melahirkan yang masih terjadi menjadi isu serius yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan keamanan dan kesehatan ibu selama proses persalinan.

Kecenderungan peningkatan penderita penyakit tidak menular, khususnya HIV, dan rendahnya penuntasan pengobatan TBC menjadi perhatian serius dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Kesiapan RSUD sebagai layanan rujukan terhadap penyakit tidak menular memerlukan perhatian lebih lanjut agar dapat memberikan pelayanan yang optimal.

Di tingkat nasional, permasalahan perilaku tidak sehat dan transisi epidemiologi menjadi fokus yang menggambarkan tantangan dalam mengelola berbagai macam penyakit. Jaminan kesehatan yang belum merata menegaskan pentingnya upaya nasional untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata.

Kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari akses dan kualitas layanan kesehatan hingga perubahan perilaku masyarakat. Penanganan permasalahan ini memerlukan kolaborasi lintas sektor dan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.


Jaminan sosial masyarakat rentan dengan ketepatan sasaran

Terdapat dua permasalahan sosial yang membutuhkan perhatian khusus di Kabupaten Banyuwangi. Pertama, ketidaktepatan sasaran bantuan sosial karena ketidaktepatan data merupakan isu yang berdampak pada efektivitas program bantuan sosial. Ketidakakuratan data dapat menyebabkan ketidakmaksimalan dalam menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan bantuan, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan dalam distribusi bantuan sosial.

Isu ini berkaitan dengan masalah nasional terkait manajemen data dan sistem informasi. Pentingnya integritas dan ketepatan data menjadi pusat perhatian dalam mendukung kebijakan nasional, terutama dalam program-program bantuan sosial yang dirancang untuk mengurangi disparitas ekonomi dan sosial di seluruh Indonesia.

Permasalahan kedua adalah terpenuhinya hak disabilitas. Meskipun terdapat undang-undang dan kebijakan nasional yang menjamin hak-hak disabilitas, terdapat





kebutuhan untuk memastikan bahwa hak-hak ini benar-benar terpenuhi di tingkat lokal, seperti di Kabupaten Banyuwangi. Tantangan melibatkan aksesibilitas fisik, akses pendidikan, dan pelibatan disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Secara nasional, hak disabilitas menjadi fokus penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif. Permasalahan ini mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam mendukung kebijakan nasional untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan yang setara bagi semua warga negara, tanpa terkecuali.

Dalam menanggapi permasalahan ini, Kabupaten Banyuwangi perlu meningkatkan keakuratan data untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang lebih canggih. Selain itu, perlunya peningkatan aksesibilitas dan dukungan untuk disabilitas di tingkat lokal memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua warganya.


Optimalisasi digitalisasi untuk layanan publik dan peningkatan ekonomi daya saing masyarakat

Optimalisasi digitalisasi untuk layanan publik dan peningkatan ekonomi daya saing masyarakat di Kabupaten Banyuwangi menyoroti dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing ekonomi masyarakatnya. Dalam konteks ini, implementasi berbagai solusi digital seperti pembangunan infrastruktur teknologi, platform pelayanan publik online, dan program pelatihan digital menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek inklusi digital agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari transformasi digital ini, sehingga tercipta masyarakat yang lebih terampil dan terhubung secara digital, yang pada gilirannya akan mengangkat daya saing ekonomi daerah secara keseluruhan.

Tumpang tindih regulasi menjadi isu yang mendalam khususnya dalam ranah nasional, menyusul kompleksitas hukum di Indonesia. Upaya nasional untuk menyederhanakan dan mengkoordinasikan regulasi, seperti yang diamanatkan dalam berbagai kebijakan pemerintah pusat, juga relevan untuk diimplementasikan di tingkat lokal seperti di Kabupaten Banyuwangi.

Adapun tata kelola yang lebih akuntabel menjadi fokus nasional dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat prinsip good governance.





Perbaikan dalam tata kelola di tingkat lokal, termasuk Kabupaten Banyuwangi, dapat memberikan kontribusi positif terhadap agenda nasional dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Kabupaten Banyuwangi perlu fokus pada harmonisasi dan penyederhanaan regulasi, serta memperkuat mekanisme akuntabilitas dalam pelayanan publik. Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini secara efektif dan memberikan dampak positif yang lebih luas di tingkat nasional.


Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan cepat mendukung pelayanan berbasis IT

Kondisi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat. Adanya ketidakmerataan kualitas infrastruktur konektivitas dan fasilitas publik menunjukkan perlunya distribusi yang lebih merata untuk memastikan akses masyarakat terhadap fasilitas yang memadai. Langkah-langkah ini seharusnya mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Pada ranah energi, Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi energi terbarukan yang dimiliki Banyuwangi, seperti *solar cell*, angin, dan *geothermal*, menawarkan peluang besar untuk pengembangan *smart building* dan efisiensi energi. Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dapat menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Selanjutnya, konsep *smart* infrastruktur layanan utilitas menunjukkan dorongan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dalam manajemen dan penyediaan layanan publik. Hal ini sejalan dengan perkembangan *smart city* yang dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat.

Pengembangan drainase yang terkoneksi antar wilayah merupakan langkah proaktif untuk mencegah genangan air. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya mitigasi risiko banjir dan pengelolaan air yang baik untuk melindungi lingkungan dan masyarakat. Aspek lain yang signifikan adalah ketahanan air untuk pertanian dan rumah tangga. Pembangunan embung di daerah hulu dengan kapasitas minimal 1 juta kubik air untuk menyuplai bendung dan sawah di daerah hilir menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Pola pikir terkait konservasi air, penggunaan air, dan kelestarian air perlu mengedepankan pendekatan holistik dalam mengelola sumber daya air.





Edukasi masyarakat mengenai kesadaran akan konservasi air dapat menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya tahan.

Kabupaten Banyuwangi bergerak maju dalam pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, memanfaatkan potensi alamnya dengan bijak, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Tantangan yang dihadapi perlu diatasi dengan kolaborasi antarstakeholder untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Terjaganya kepariwisataan alam berkelanjutan budaya dan kearifan lokal

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menunjukkan potensi besar sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Industri pariwisata dianggap menjadi pilar penting yang dapat menciptakan lapangan kerja baru, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan memberikan sumber pendapatan yang signifikan bagi negara. Upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata dapat menjadi strategi yang tepat untuk mempercepat pembangunan ekonomi lokal dan mengurangi tingkat pengangguran.

Meskipun demikian, keberlanjutan pariwisata di Banyuwangi terancam oleh kurangnya pemeliharaan lingkungan dan alam. Tidak terjaganya kelestarian alam dapat mengakibatkan penurunan kunjungan ke destinasi alam. Kondisi ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan konservasi lingkungan untuk memastikan daya tarik alam tetap utuh, menarik wisatawan, dan mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Selain itu, potensi ekonomi kreatif yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi perlu lebih dikembangkan. Pengembangan ekonomi kreatif dapat mencakup berbagai sektor, seperti seni, budaya, kuliner, dan kerajinan lokal. Pemanfaatan potensi ini dapat menambah nilai tambah pada destinasi pariwisata, menciptakan pengalaman yang unik bagi wisatawan, dan meningkatkan pendapatan lokal.

Dengan menyelaraskan upaya pengembangan pariwisata, pemeliharaan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi kreatif, Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi untuk menjadi destinasi pariwisata unggulan yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk bekerja sama dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan.





Optimalisasi kualitas keluarga dan peran gender dalam pembangunan

Pembangunan keluarga dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Banyuwangi mencerminkan sejumlah aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pertama, kerentanan kualitas keluarga dalam mereduksi perilaku menyimpang menandakan perlunya pendekatan holistik dalam memperkuat nilai-nilai dan kualitas hubungan dalam lingkup keluarga. Upaya pencegahan dan penanganan perilaku menyimpang perlu diperkuat melalui program-program pendidikan dan sosialisasi yang melibatkan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.

Fluktuasi pada *Trend Length of Periodic Precaution* (LPP) dari tahun 2018 hingga 2022 (0.45, 0.4, 0.91) dan Age-Specific Fertility Rate (ASFR) yang fluktuatif (23.84 pada tahun 2018 dan 21.97 pada tahun 2020) menunjukkan kompleksitas tantangan dalam pengelolaan kebijakan keluarga berencana. Diperlukan pemahaman mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi ini, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat.


Secara komprehensif, Kabupaten Banyuwangi dapat memperkuat program pemberdayaan keluarga dan perempuan dengan mengintegrasikan pendekatan kesehatan reproduksi, pendidikan keluarga, dan dukungan psikososial. Melibatkan masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan akan memastikan relevansi dan keberlanjutan program-program pemberdayaan keluarga di tingkat lokal.

Kualitas lingkungan hidup menurun berpengaruh terhadap meningkatnya resiko bencana

Kondisi kualitas lingkungan hidup yang menurun di Kabupaten Banyuwangi memberikan gambaran serius terhadap tantangan ekologis yang dihadapi oleh Banyuwangi. Peningkatan polusi udara yang disebabkan oleh berkurangnya kawasan hijau menciptakan risiko kesehatan yang signifikan bagi masyarakat. Reduksi kawasan hijau dapat mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca dan partikulat udara, yang pada gilirannya dapat berkontribusi terhadap masalah pernapasan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Ancaman banjir yang meningkat seiring naiknya permukaan air laut menjadi dampak langsung dari perubahan iklim dan perubahan ekosistem. Upaya untuk mengatasi risiko banjir memerlukan perencanaan dan investasi yang matang, termasuk peningkatan infrastruktur penanggulangan banjir dan pengelolaan tata air yang berkelanjutan.





Selain itu, adanya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menciptakan risiko serius terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pengelolaan limbah B3 yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara, serta mengancam keberlanjutan ekosistem lokal. Diperlukan penegakan peraturan yang ketat dan kesadaran masyarakat untuk memastikan penanganan limbah B3 dengan benar.

Timbulan sampah yang tidak terdaur ulang menunjukkan tantangan dalam manajemen limbah di Kabupaten Banyuwangi. Peningkatan kesadaran akan praktik daur ulang, pengurangan penggunaan plastik, dan pengelolaan sampah yang terintegrasi menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ini. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk menciptakan solusi berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Kabupaten Banyuwangi perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan hidup, termasuk peningkatan kawasan hijau, mitigasi risiko banjir, pengelolaan limbah B3 yang baik, dan peningkatan praktik daur ulang. Pendidikan lingkungan dan partisipasi masyarakat aktif menjadi elemen kunci dalam mengubah perilaku dan menciptakan kesadaran akan pentingnya melindungi lingkungan bagi keberlanjutan pembangunan.


Pemanfaatan teknologi, minat serta ancaman perubahan iklim pada sektor pertanian dan perikanan

Kondisi pembangunan sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Alih fungsi lahan pertanian menjadi isu yang kritis. Perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke pengembangan non-pertanian dapat mengancam keberlanjutan sektor ini. Diperlukan kebijakan yang tegas untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan memastikan bahwa lahan tersebut terus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan dan penghidupan petani.

Pada aspek pertanian lainnya, produktivitas pertanian yang masih rendah menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Upaya perbaikan produktivitas dapat melibatkan penerapan praktik pertanian modern, peningkatan kualitas bibit, dan pendekatan berbasis teknologi. Pelatihan dan pendampingan petani juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka terkait praktik pertanian yang efektif. Upaya tersebut sejalan dengan isu lainnya pada bidang ini yang terkait dengan minat masyarakat.

Minat rendah pada pertanian mencerminkan pergeseran preferensi pekerjaan masyarakat, terutama generasi muda, dari sektor pertanian. Pentingnya





membangkitkan minat generasi muda untuk terlibat dalam pertanian perlu diakui dan diperkuat melalui program-program pendidikan dan pelatihan yang menarik dan relevan.

Adopsi teknologi yang masih rendah menjadi hambatan dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas di sektor pertanian. Peningkatan akses petani terhadap teknologi modern, termasuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dapat meningkatkan daya saing sektor pertanian. Inovasi dalam penerapan teknologi juga dapat mendukung diversifikasi produk pertanian dan pemasaran yang lebih efektif.

Kabupaten Banyuwangi perlu mengimplementasikan kebijakan dan program yang mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan. Ini mencakup upaya menjaga lahan pertanian, meningkatkan produktivitas melalui adopsi teknologi, dan menggalakkan minat masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pertanian. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dapat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor ini di tingkat lokal.

Stabilitas ketentraman dan ketertiban serta penguatan demokrasi sebagai ruang partisipasi publik

Stabilitas ketentraman dan ketertiban serta penguatan demokrasi sebagai ruang partisipasi publik di Kabupaten Banyuwangi merupakan pilar penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warganya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban melalui berbagai kebijakan dan program yang proaktif, seperti patroli keamanan rutin, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kerjasama dengan berbagai komunitas lokal. Di sisi lain, penguatan demokrasi diwujudkan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik melalui forum-forum dialog, musyawarah desa, dan platform digital interaktif. Upaya ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan keterlibatan warga dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, Banyuwangi dapat terus berkembang menjadi daerah yang tidak hanya aman dan tertib, tetapi juga demokratis dan inklusif, di mana setiap warga memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara aktif dalam menentukan arah pembangunan masa depan.

Berikut merupakan penyandingan Isu strategis dari Isu Strategis Global, Nasional, Jawa Timur, KLHS RPJPD Kabupaten Banyuwangi dengan Isu Strategis Kabupaten Banyuwangi yang didapatkan dari dokumen RPJPN 2025 – 2045, RPJPD Provinsi Jawa



Timur Tahun 2025 – 2045, KLHS RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 – 2045 dan Simpulan Isu strategis dari RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 – 2045.

Tabel III. 4 **Penyandingan Isu Nasional, Jawa Timur, KLHS RPJPD Kabupaten Banyuwangi dengan Isu Strategis Kabupaten Banyuwangi dan Simpulan Isu strategis dari RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 – 2045**

Isu Nasional	Isu Provinsi Jawa Timur	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kabupaten Banyuwangi
Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal		Belum Optimalnya Pendidikan merata yang berkualitas yang berorientasi pada IT dan karakter.
		Pengendalian Kesehatan Masyarakat, Ibu dan Bayi serta Pemerataan SDM Kesehatan	Upaya Pemerataan kualitas sarana prasarana kesehatan yang mampu beradaptasi pada transisi epidemiologi
Ketimpangan antar Jawa dan Luar Jawa masih cukup tinggi	Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Hidup Masyarakat Rentan	Jaminan sosial masyarakat rentan dengan ketepatan sasaran
		Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Aksesibilitas Sanitasi	
			Pemanfaatan teknologi, minat serta ancaman perubahan iklim pada sektor pertanian dan perikanan
Tata kelola pemerintahan belum optimal	Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Affirmasi Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah	Optimalisasi digitalisasi untuk layanan publik dan peningkatan ekonomi daya saing masyarakat
		Optimasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
Kepastian dan penegakan		Ketentraman Sosial dan	Optimalisasi kualitas keluarga dan peran gender dalam pembangunan

Isu Nasional	Isu Provinsi Jawa Timur	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kabupaten Banyuwangi
hukum masih lemah		Kepeberpihakan pada Perempuan	
Demokratisasi belum optimal			Stabilitas ketentraman dan ketertiban serta penguatan demokrasi sebagai ruang partisipasi publik
Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal	Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, daya saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal	Menurunkan kualitas ketenagakerjaan dari sisi produktivitas dan Angka Pengangguran	Optimalisasi digitalisasi untuk layanan publik dan peningkatan ekonomi daya saing masyarakat
Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat			
Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah			
Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut			
Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi			
Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik			

Isu Nasional	Isu Provinsi Jawa Timur	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kabupaten Banyuwangi
sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas			
Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata			Terjaganya kepariwisataan alam berkelanjutan budaya dan kearifan lokal
Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan		Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan cepat mendukung pelayanan berbasis IT
Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Optimalisasi Pengendalian dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Kualitas lingkungan hidup menurun berpengaruh terhadap meningkatnya resiko bencana
		Mitigasi Resiko Bencana dan Kapasitas Kesiapsiagaan Bagi Wilayah Rawan Bencana	
		Pengendalian Pencemaran, Alih Fungsi Lahan dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

BAB IV

VISI DAN MISI

RPJPD Kabupaten Banyuwangi 2025-2045 adalah cita-cita besar untuk mewujudkan pembangunan generasi mendatang. Visi, Misi, Sasaran Pokok, dan indikator Utama Pembangunan, yang terdiri dari 1 visi, 8 misi, 12 Sasaran Pokok secara utuh mencerminkan semangat pembangunan Kabupaten Banyuwangi 18 Desember sebagai tanggal jadi Kabupaten Banyuwangi. Penyusunan RPJPD berlandaskan visi Indonesia Emas. Visi ini mempertimbangkan Modal dasar, Tren Global, perubahan iklim, daya tampung daya dukung serta capaian evaluasi pembangunan 20 tahun ke belakang.

Visi Kabupaten Banyuwangi dicerminkan ke dalam lima sasaran visi, yang di representasikan dalam pencapaian pembangunan visi kedepan. Untuk mencapai visi Kabupaten Banyuwangi ditetapkan 8 misi pembangunan. Bercermin dengan misi nasional yang mengubah pendekatan pembangunan. maka misi perlu diperkuat dengan transformasi tidak cukup dengan reformasi. Transformasi ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan, fokus utama transformasi meliputi aspek sosial, ekonomi dan tata kelola. Transformasi tidak dapat di topang tanpa stabilitas atau ketahanan, untuk mewujudkan transformasi memerlukan kerangka implementasi berupa pemenuhan infrastruktur.

4.1 Visi Daerah

Visi Kabupaten Banyuwangi mengacu pada pandangan atau cita-cita jangka panjang yang diinginkan di masa mendatang di Tahun 2045. Visi Kabupaten Banyuwangi mencerminkan gambaran ideal dari masa depan yang diinginkan oleh seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Banyuwangi terutama masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Perumusan Visi Banyuwangi menjawab isu strategis yang akan menjadi persoalan di masa depan. Perumusan visi Kabupaten Banyuwangi memperhatikan visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, serta juga memperhatikan visi Jawa Timur: Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan. Tujuan dari keselarasan dengan visi Nasional dan Provinsi untuk memperkokoh Tujuan NKRI. Cita cita Kabupaten Banyuwangi dengan mempertimbangkan tantangan kedepan, maka visi Kabupaten Banyuwangi 2025-2045 adalah sebagai berikut:



Gambar IV. 1 Visi Kabupaten Banyuwangi 2025-2045


Sumber: Data Diolah, 2024

Harmoni

Ditahun 2045 Banyuwangi akan mewujudkan cita cita harmoni yang memiliki arti berkeadilan, humanis dan harmonis. Pembangunan yang harmoni yaitu keberhasilan ekonomi berpadu harmonis dengan pengentasan kemiskinan, sehingga setiap individu memiliki akses yang sama terhadap peluang dan manfaat pembangunan. Pembangunan ini menjaga dan mengelola sumber daya alam dengan bijak, memastikan bahwa generasi-generasi mendatang dapat menikmati kekayaan alam yang sama seperti yang dinikmati saat ini. merayakan keanekaragaman budaya dan menganut prinsip penghargaan terhadap semua bentuk kehidupan. Harmoni mencakup suatu masyarakat yang merangkul perbedaan dan memajukan nilai-nilai inklusivitas serta saling pengertian. Dalam mencapai visi ini penting nya keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya agar tercipta masyarakat yang berkelanjutan, adil, dan sejahtera untuk semua. Ini adalah panggilan untuk menciptakan masa depan di mana pembangunan bukan hanya berarti pertumbuhan, tetapi juga pencapaian keseimbangan dan keselarasan yang abadi. Pembangunan harmony mencerminkan suatu pendekatan yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dan memprioritaskan kesejahteraan serta keadilan sosial dalam setiap aspek pembangunan.

Maju

Pada 2045 Banyuwangi menjadi daerah yang berdaya saing, kuat, progressif, dan inovatif, Pembangunan yang maju diwarnai oleh sikap yang inovatif, dengan penekanan



pada pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan berorientasi masa depan. Inovasi teknologi dan pelaku usaha mikro, pariwisata dan pertanian menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, serta hilirisasi industri pengolahan. Pembangunan ini tidak hanya melibatkan kemajuan ekonomi tetapi juga mempromosikan nilai-nilai inklusivitas, kesetaraan, dan keberlanjutan lingkungan.

Pembangunan infrastruktur yang canggih, seperti sistem transportasi dan teknologi informasi yang maju, turut mendukung konektivitas dan produktivitas ekonomi. Selain itu, pembangunan yang maju juga menciptakan kesetaraan sosial dengan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas, akses layanan kesehatan yang baik. Masyarakat yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan lokal dan memiliki akses yang merata terhadap peluang ekonomi, menciptakan iklim inklusif yang mendukung perkembangan ekonomi hijau.

Berkelanjutan

Banyuwangi dalam 2045 akan senantiasa berkomitmen dalam pembangunan berkelanjutan menekankan pengelolaan sumber daya alam dengan bijaksana, mempromosikan penggunaan energi terbarukan, dan menerapkan praktik-praktik yang tidak merugikan ekosistem. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlanjutan ekosistem yang mendukung kehidupan. Partisipasi masyarakat menjadi kunci, di mana mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dan diberdayakan untuk berkontribusi pada pembangunan lokal. Inovasi dan teknologi berkelanjutan menjadi sarana untuk mencapai efisiensi sumber daya dan meminimalkan dampak lingkungan. Ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam juga menjadi prioritas, dengan upaya untuk membangun masyarakat yang dapat beradaptasi dan bertahan di tengah ketidakpastian.

4.1.1 Sasaran Visi

Sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) Tahun 2025-2045, dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), maka visi RPJPD daerah harus selaras dengan Visi RPJPN. Mengacu pada gambar di atas diketahui bahwa telah terjadi keselarasan antara visi PJPD dengan Visi RPJPN. Bentuk



keselarasan sebagaimana dimaksud juga diwujudkan dengan pencapaian target Sasaran Utama Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Banyuwangi, Penentuan target oleh nasional di atas sebagai upaya untuk memperkuat dukungan capaian pembangunan daerah terhadap target pembangunan nasional jangka panjang.

Tabel IV. 1 Target Sasaran Utama Visi Pembangunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

Visi	Nilai Visi	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Definisi Operasional	Satuan	Baseline 2025	Target 2045
Banyuwangi Harmony, Maju, Berkelanjutan	Harmony	Kemiskinan menurun menuju dan ketimpangan berkurang	Rasio Gini	ukuran statistik yang digunakan untuk menilai distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi dan untuk menunjukkan ketimpangan ekonomi	Indeks	0,34 – 0,31	0,31 – 0,29
			Tingkat Kemiskinan	diukur dengan menghitung proporsi individu atau rumah tangga yang memiliki pendapatan atau konsumsi di bawah garis kemiskinan	%	6,67 – 6,05	0,5 – 0,15
	Maju	Pendapatan perkapita meningkat	PDRB Perkapita	ukuran nilai produk domestik regional bruto (PDRB) yang dibagi dengan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam periode tertentu	Rp	59,08 – 60,08	130,25 – 150,6
		Daya Saing Sumber Daya Manusia	IPM	ukuran komposit yang digunakan untuk menilai dan membandingkan pembangunan manusia di berbagai wilayah	Indeks	73,80 – 75,08	85,00 – 88,03
Berkelanjutan	Kelestarian Lingkungan	IKLH	ukuran komposit yang digunakan untuk menilai dan memantau kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah	Indeks	78,27	79,86	

Sumber: Data Diolah, 2024

Terwujudnya Banyuwangi yang Harmoni, Maju dan Berkelanjutan yaitu kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, PDRB perkapita meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, serta kelestarian lingkungan .

Sasaran Visi pertama, Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang semakin meningkatnya pendapatan masyarakat, sehingga kemiskinan menuju 0% dapat terwujud diikuti dengan penurunan ketimpangan masyarakat.

Sasaran visi kedua, pendapatan perkapita masyarakat meningkat artinya masyarakat banyuwangi semakin sejahtera dengan pendapatan yang semakin meningkat dan merata dengan lapangan kerja yang layak . Sasaran ketiga daya saing SDM meningkat yaitu meningkatnya kualitas sumberdaya manusia secara merata dengan akhlak yang mulia, dan dapat bersaing secara nasional dan internasional. Sasaran keempat , kelestarian lingkungan yaitu berkualitasnya lingkungan hidup yang mengedepankan air, udara, keanekaragaman hayati dan energi yang sehat untuk generasi mendatang.

4.2 Misi Daerah

Berdasarkan dari visi diatas, dan bercermin dari misi Nasional. Misi Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 8 misi yang terdiri atas: (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Stabilitas Ketentraman dan Demokrasi; (5) Ketahanan Sosial budaya; (6) Kualitas Keluarga dan kesetaraan Perempuan; (7) Ketahanan Ekologi; (8) Pemenuhan Infrastruktur. Maka Misi Kabupaten Banyuwangi adalah:



Gambar IV. 2 Misi Kabupaten Banyuwangi 2025-2045

Sumber : Data Diolah, 2024

Berikut merupakan penyandingan misi dalam RPJPN, RPJPD Provinsi Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 untuk melihat linieritasnya:

Tabel IV. 2 Linieritas Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

MISI RPJPN	MISI RPJPD PROV JAWA TIMUR	MISI RPJPD KABUPATEN BANYUWANGI
Transformasi Sosial	Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial yang unggul dan berkeadilan
Transformasi Ekonomi	transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berdaya saing
Transformasi Tata Kelola	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang bersih dan berdampak
Supremasi Hukum, Stabilitas, Dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Memantapkan Stabilitas ketentraman ketertiban dan demokrasi
Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> • Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya daerah • membangun kualitas keluarga dan kesetaraan gender • memantapkan Ketahanan ekologi untuk keseimbangan pembanguna
Pembangunan Kewilayahan Yang Merata & Berkeadilan	Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan	Pemenuhan Infrastruktur berkelanjutan dan berkesinambungan

MISI RPJPN	MISI RPJPD PROV JAWA TIMUR	MISI RPJPD KABUPATEN BANYUWANGI
Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas & Ramah Lingkungan	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas & Ramah Lingkungan	
Kesinambungan Pembangunan	Kesinambungan Pembangunan	

Sumber: Data Diolah, 2024

1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Unggul dan Berkeadilan


menciptakan suatu lingkungan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi tanpa adanya diskriminasi atau ketidaksetaraan. Transformasi sosial ini mencakup berbagai perbahan aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, Melalui penerapan kebijakan inklusif, distribusi sumber daya yang adil, dan pengembangan potensi manusia, misi ini bertujuan memberikan fondasi yang kokoh untuk masyarakat yang unggul dan berkeadilan dalam segala aspek.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berdaya saing

Meningkatkan struktur ekonomi daerah agar lebih produktif, inovatif, dan dapat bersaing di tingkat global. Transformasi ini umumnya melibatkan transformasi ekonomi bernilai tambah tinggi dalam berbagai sektor, berfokus pada pariwisata, pertanian, usaha mikro dan industri olahan. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing suatu perekonomian melalui pengembangan sektor potensial yang unggul, peningkatan produktivitas, investasi dalam riset dan pengembangan, serta penguatan sumber daya manusia. Dengan memperkuat fondasi ekonomi, menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, dan mendorong inovasi, misi ini berusaha menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis dan berdaya saing tinggi, memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang bersih dan Berdampak

Memperbaiki dan memperkuat sistem pengelolaan suatu organisasi, pemerintah, atau entitas lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi



masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Transformasi tata kelola ini mencakup peningkatan kualitas layanan publik, transparansi, akuntabilitas, berintegritas, bersih dan aparatur profesional dan adaptif. Misi ini berfokus pada penerapan praktik-praktik tata kelola yang baik, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas, serta pengembangan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan keadilan. Melalui transformasi tata kelola yang berdampak, organisasi atau pemerintah dapat memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan dan menghasilkan perubahan positif dalam masyarakat.

4. Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban dan demokrasi

Tujuan utama dari misi ini adalah untuk menjaga stabilitas politik dan sosial, menegakkan aturan hukum, serta mengembangkan sistem demokratis yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan lembaga-lembaga demokratis, pemeliharaan hak asasi manusia, dan pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, misi ini juga mencakup pembangunan kelembagaan untuk menjamin ketertiban dan keamanan, termasuk penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan cara ini, misi ini bertujuan untuk menciptakan landasan yang mendukung perkembangan demokrasi yang sehat, memberikan rasa aman kepada masyarakat, dan memastikan kesejahteraan bersama di tengah pluralitas dan perbedaan pandangan.


5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya Daerah

memperkuat dan melestarikan warisan budaya serta nilai-nilai sosial khususnya budaya yang diteguhkan oleh masyarakat. Melalui upaya ini, tujuan utama adalah menjaga keberagaman budaya, tradisi, dan adat istiadat yang memberikan identitas khusus. Misi ini mungkin melibatkan inisiatif untuk mendukung seni dan budaya lokal, mempromosikan pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap warisan budaya, serta membangun dan memperkuat solidaritas dan kebersamaan di antara beragam kelompok masyarakat. Dengan memantapkan ketahanan sosial budaya, sebuah daerah dapat menjaga kelestarian nilai-nilai budaya yang menjadi landasan kepribadian.

6. Membangun Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender

mempromosikan hubungan keluarga yang harmonis dan sehat, serta mendukung pengembangan pondasi setiap individu dalam keluarga. Misi ini juga untuk untuk mendorong kesetaraan gender dengan berdayanya perempuan secara ekonomi, sosial, dan politik.. Selain itu, mencakup perubahan norma sosial yang mendukung kesetaraan gender dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. Dengan membangun kualitas





keluarga dan mempromosikan kesetaraan perempuan, misi ini bertujuan untuk menciptakan landasan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

7. Memantapkan Ketahanan Ekologi untuk Keseimbangan Pembangunan

membangun kebijakan dan praktik pembangunan yang ramah lingkungan, mempertahankan keanekaragaman hayati, serta meminimalkan dampak negatif dari bencana atau perubahan iklim terhadap ekosistem. Upaya ini mungkin mencakup pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan perlindungan terhadap ekosistem rawan. Ketahanan ekologi bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, menciptakan masyarakat yang sejahtera tanpa mengorbankan keberlanjutan alam.

8. Pemenuhan Infrastruktur Berkelanjutan dan Berkesinambungan

pembangunan infrastruktur yang merata, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ini mencakup investasi dalam energi terbarukan, infrastruktur konektivitas, fasilitas publik, serta air dan sanitasi yang aman dan terjangkau. Selain itu, misi ini melibatkan penggunaan teknologi inovatif untuk meningkatkan efisiensi infrastruktur, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan proyek infrastruktur.







BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

Arah kebijakan menjadi landasan utama yang menggambarkan visi dan misi untuk mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk Arah kebijakan yang mencerminkan tema pembangunan. Arah kebijakan pembangunan sebagai tahapan pembangunan, sebagai kerangka empat periode pembangunan jangka menengah, dan sebagai pedoman penyusunan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Arah kebijakan merupakan tahapan pembangunan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Arah ini menunjukkan jalan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Dengan merinci setiap tahapan, pemerintah dapat mengevaluasi kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan menyesuaikan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan. Dalam konteks pembangunan jangka menengah, arah kebijakan daerah dibagi menjadi empat periode pembangunan. Setiap periode ini mencerminkan dinamika perubahan, serta memberikan pijakan bagi perencanaan jangka panjang. Dengan merinci empat periode yaitu periode I tahun 2025-2029, periode kedua tahun 2030-2034, Periode ketiga tahun 2035-2039, dan periode keempat tahun 2040-2044, pemerintah daerah dapat lebih terarah dalam menghadapi tantangan yang muncul dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan konteks waktu yang berubah.

Ketiga, arah kebijakan daerah menjadi pedoman esensial bagi penyusunan prioritas dalam RPJMD. Rencana ini menjadi instrumen utama dalam melaksanakan kebijakan pembangunan jangka menengah. Dengan memanfaatkan arah kebijakan sebagai panduan, pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas yang jelas, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Keempat, arah kebijakan terbagi atas dua yaitu arah kebijakan periodisasi yang mengartikulasikan tema arah kebijakan dari pembangunan daerah dan yang kedua



arah kebijakan tranformatif yang mempertimbangkan arah kebijakan dari nasional dan provinsi jawa timur. Arah kebijakan periodisasi memberikan gambaran tahapan per periode RPJMD yang nanti menjadi pedoman arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banyuwangi dan arah kebijakan periodisasi arah kebijakan transformatif lebih operasional yang mengarahkan untuk menjawab sasaran pokok Kabupaten Banyuwangi.


Tahapan pertama melalui penguatan ekosistem ke seluruh misi pembangunan. Tahapan kedua melalui percepatan transformasi untuk membangun aspek pembangunan yang siap menuju daya saing. Di tahapan ketiga Banyuwangi telah dapat bersaing pada level nasional maupun menjangkau upaya mendorong nasional dalam ekspansi global. Tahapan terakhir yaitu menciptakan banyuwangi yang harmon, maju dan berkelanjutan. Berikut merupakan pentahapan kebijakan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 yang dibagi kedalam 4 periode sebagai berikut.



Gambar V. 1 Tahapan Kebijakan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

Sumber: Data Diolah, 2024

Tahapan pertama (2025-2029) adalah Penguatan ekosistem transformasi pada tahap ini transformasi sosial dititiberatkan pada penguatan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan penuntasan kemiskinan. Transformasi ekonomi berfokus pada penguatan nilai tambah ekonomi tinggi pada sektor utama penyanggah ekonomi kabupaten banyuwangi dengan inovasi dan produktivitas. Transformasi tata kelola melanjutkan penguatan birokrasi berkualitas dan digitalisasi layanan publik. Selain itu juga perbaikan kelembagaan dan kualitas ASN, penerapan manajemen risiko serta perencanaan, pengendalian pembangunan. Stabilitas ketentraman ketertiban dan demokrasi difokuskan pada penguatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban, Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan. Ketahanan sosial dan budaya mengedepankan perkuatan pada sosial budaya sebagai identitas diri. Optimalisasi nilai agama dan budaya untuk ketangguhan pembangunan kabupaten banyuwangi.




Membangun kualitas keluarga dan kesetaraan gender berfokus pada peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia, dan perlindungan pada perempuan terutama keberdayaan perempuan kepala rumah tangga. Memantapkan ketahanan ekologi berfokus pada Memperkuat Ekosistem Lingkungan hidup terutama dalam penataan regulasi perlindungan lingkungan hidup dan penataan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pemenuhan infrastruktur berkelanjutan berfokus pada peningkatan pada wilayah potensi ekonomi tinggi, infrastruktur pendukung terutama ketangguhan bencana.

Tahapan kedua (2030-2034) adalah percepatan transformasi pada tahap ini transformasi sosial dititikberatkan pada pembangunan SDM yang semakin berkualitas. Transformasi ekonomi berfokus pada percepatan produktivitas secara massif yang disertai eksplorasi sumber ekonomi baru terutama pada ekonomi hijau dan ekonomi biru. Transformasi tata kelola yaitu terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, efisien, dan penyederhaan regulatif yang semakin adaptif. Stabilitas ketentraman ketertiban dan demokrasi difokuskan pada pemantapan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban, terutama integritas masyarakat yang cerdas dan berkarakter pancasila. Ketahanan sosial dan budaya mengedepankan perkuatan pada sosial budaya sebagai identitas diri. Optimalisasi nilai agama dan budaya sebagai ketangguhan daerah dalam mengantisipasi perubahan perkembangan yang lebih cepat. Membangun kualitas keluarga dan kesetaraan gender berfokus pada peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia, dan perlindungan pada perempuan terutama keberdayaan perempuan kepala rumah tangga. Memantapkan ketahanan ekologi berfokus pada Memperkuat Ekosistem Lingkungan hidup terutama dalam penataan regulasi perlindungan lingkungan hidup dan penataan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pemenuhan infrastruktur berkelanjutan berfokus pada peningkatan pada wilayah potensi ekonomi tinggi, infrastruktur pendukung terutama ketangguhan bencana.

Tahapan pertama (2035-2039) adalah Penguatan ekosistem transformasi pada tahap ini transformasi sosial dititikberatkan pada penguatan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing. Transformasi ekonomi berfokus pada daya saing tinggi secara nasional dan internasional dengan penekanan ekspansi barang dan jasa. Transformasi tata kelola melanjutkan penekanan pada kelembagaan yang adaptif dan pelayanan publik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Stabilitas ketentraman ketertiban dan demokrasi difokuskan pada pemantapan stabilitas rasa nyaman dan aman untuk tinggal di Kabupaten Banyuwangi serta kebebasan partisipasi aktif masyarakat sipil dan dalam pembangunan daerah. Ketahanan sosial dan budaya





menfokuskan pada terwujudnya masyarakat yang masih mempertahankan sosial budaya dan peran agama ditengah perubahan peradaban. Membangun kualitas keluarga dan kesetaraan gender berfokus terwujudnya keluarga mampu adaptif . Memantapkan ketahanan ekologi berfokus pada pengurangan pencemaran lingkungan, penerapan energi bersih dan penanganan limbah. Pemenuhan infrastruktur berkelanjutan pada terkelolanya infrastruktur yang berkualitas terutama infrastruktur untuk mendukung energi bersih, sistem pangan, air, dan bencana.

Tahapan pertama (2040-2045) adalah Penguatan ekosistem transformasi pada tahap ini transformasi sosial dititiberatkan terwujudnya masyarakat kabupaten banyuwangi yang unggul dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Transformasi ekonomi difokuskan pada peningkatan kapasitas pendapatan masyarakat tinggi dengan gini rasio semakin rendah. Transformasi tata kelola terwujudnya tata kelola yang berintegritas, berkualitas dan adaptif. Stabilitas ketentraman ketertiban dan demokrasi terwujudnya rasa nyaman dan aman kabaupaten Banyuwangi . Ketahanan sosial dan budaya mengedepankan penguatan ketahanan masyarakat dalam berbagai perubahan, memastikan individu tetap mempertahankan sosial dan budaya yang positif. Membangun kualitas keluarga dan kesetaraan gender mengedepankan keluarga yang sehat dan harmonis, untuk menurunkan individu yang hidup berkualitas. Memantapkan ketahanan ekologi berfokus pada penerapan ekonomi hijau dan biru, serta lingkungan hidup yang masih lestari. Pemenuhan infrastruktur berkelanjutan untuk fokus pada terwujudnya ketersediaan energi yang berkualitas dan berintegrasi.



Misi Pembangunan	Penguatan Ekosistem	Percepatan Transformasi	Penguatan Daya Saing	Banyuwangi yang Harmoni, Maju dan Berkelanjutan
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1 Mewujudkan Transformasi Sosial yang Unggul dan Berkeadilan	Penguatan Ekosistem Layanan Dasar yang Berkeadilan	Percepatan Transformasi SDM yang Berkualitas	Penguatan SDM yang Berdaya Saing	SDM Banyuwangi yang Unggul
2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan berdaya saing	Penguatan Nilai tambah ekonomi sektor unggulan	Percepatan Nilai tambah Ekonomi Unggulan, yang disertai Eksplorasi Sumber Ekonomi Baru	Penguatan nilai tambah ekonomi yang Mampu Berekspansi	Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Bersih dan Berdampak	Penguatan Ekosistem Birokrasi Berkualitas dan Digitalisasi Layanan Publik	Percepatan Birokrasi Kolaboratif, Efisien, Regulasi Adaptif dan ASN yang Berkualitas	Kelembagaan dan Layanan Publik yang adaptif	Tata kelola pemerintahan yang berdampak dan berkualitas
4 Memantapkan Stabilitas Ketentraman, Ketertiban dan demokrasi	Penguatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban, Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan	Memantapkan Stabilitas Ketentraman dan ketertiban, serta Pelibatan Ruang - Ruang Demokrasi di Masyarakat	Penguatan Rasa Aman dan Nyaman, serta Integritas Masyarakat yang Meningkatkan	Banyuwangi yang Aman dan Damai
5 Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya Daerah	Memperkuat Sosial Budaya sebagai Identitas Daerah	Memantapkan Sosial Budaya sebagai Pendorong Ketahanan Daerah	Penguatan Ketangguhan Sosial Budaya untuk Menghadapi Perubahan	Banyuwangi yang Berbudaya dan Bermartabat
6 Membangun Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Memperkuat Kualitas Keluarga dan Berdayanya Perempuan	Memantapkan Kualitas Keluarga yang Sehat dan Penjaminan Perempuan yang Berkualitas	Penguatan Ketangguhan Keluarga ditengah Perubahan Lingkungan	Kelurga yang Sehat dan Harmonis
7 Memantapkan Ketahanan Ekologi untuk Keseimbangan Pembangunan	Memperkuat Ekosistem Lingkungan hidup	Percepatan Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup secara kolaboratif	Penguatan Ketangguhan Lingkungan	Mewujudkan Banyuwangi yang Lestari
8 Pemenuhan Infrastruktur Berkelanjutan dan Berkesinambungan	pemenuhan infrastruktur yang merata	Percepatan infrastruktur yang berkualitas	Pemenuhan infrastruktur hijau	Mewujudkan Banyuwangi yang Lestari

Gambar V. 2 Tahapan Arah Kebijakan per Misi RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

Sumber : Data Diolah, 2024

5.1.1 Arah Kebijakan Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial yang Unggul dan Berkeadilan

Pembangunan kedepan dituntut dengan perubahan yang besar di tatanan masyarakat secara mendasar, termasuk perubahan demografi, perilaku masyarakat, teknologi, perubahan iklim dan pergeseran ekonomi. Secara mendasar pun akan terjadi pada tuntutan pembangunan pada transformasi sosial, maka dengan perubahan tersebut arah kebijakan transformasi sosial kabupaten banyuwangi diarahkan ke dalam tahapan pembangunan.




Gambar V. 3 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Misi 1

Sumber : Data Diolah, 2024

Tahun 2025 - 2029 Penguatan ekosistem layanan dasar berkeadilan

Pada periode 2025 hingga 2029, arahan pada periode I transformasi dalam penguatan ekosistem layanan dasar berkeadilan. Dengan munculnya teknologi yang semakin



canggih dan inklusif, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi lebih merata dan mudah dijangkau bagi semua lapisan masyarakat tujuan utama dalam perlindungan sosial yaitu pengentasan kemiskinan. program-program inovatif pendidikan, kesehatan dan program kemiskinan diterapkan untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam memperoleh hak-hak dasar mereka. fondasi yang lebih kuat untuk masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.

Tahun 2030 – 2034 Percepatan transformasi SDM yang berkualitas

Pada periode 2030 hingga 2034, percepatan yang signifikan dalam transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di berbagai sektor. Dengan penekanan yang lebih besar pada pendidikan yang berorientasi pada keahlian dan kemampuan, individu-individu memiliki akses yang lebih besar untuk mengoptimalkan potensi mereka. Selain itu, adopsi teknologi dalam pembelajaran dan pengembangan karir memungkinkan akses yang lebih luas dan fleksibilitas bagi para pekerja untuk terus meningkatkan keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang terus berubah.

Tahun 2035– 2039 Penguatan SDM yang berdaya saing

Pada periode 2030 hingga 2034, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing. Melalui investasi yang besar dalam pendidikan dan kesehatan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, Selain itu, adopsi teknologi yang cepat dan penekanan pada kreativitas serta kemampuan beradaptasi memungkinkan individu-individu untuk menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan kerja yang cepat. Dengan demikian, tercipta masyarakat untuk bersaing secara global, menghasilkan inovasi, dan mendorong SDM yang berkelanjutan serta inklusif.

Tahun 2040 – 2045 Perwujudan SDM yang unggul

Pada periode tahun 2040 hingga 2045, perwujudan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul yaitu tercapainya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing, kesehatan masyarakat semakin meningkat dengan usia harapan hidup meningkat, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin makmur dan berdaya.

Untuk mewujudkan arah kebijakan Mewujudkan Transformasi Sosial Dalam Menunjang Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkeadilan, diarahkan:



Tabel V. 1 Arah Kebijakan Transformatif Misi 1 RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Kebijakan Transformatif
Transformasi Sosial	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Serta pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat
	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi
	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas,
	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana
	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata.
	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, peningkatan literasi, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
	Harmonisasi kebijakan penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan

Transformasi	Arah Kebijakan Transformatif
	daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi
	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi
	Perluasan akses dan kesempatan masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).
	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama
	Memastikan keberlanjutan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga dan meningkatkan kualitas jamban menuju sanitasi aman
	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan
	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui upskilling maupun reskilling
	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat miskin
	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui pelatihan, pemberdayaan, dan peningkatan terhadap akses ekonomi

Sumber: Diolah, 2024

5.1.2 Arah Kebijakan Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berdaya Saing

Adanya potensi pergeseran ekonomi sehingga kedepan diperlukan persiapan transformasi ekonomi. Beberapa perubahan besar tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan perilaku masyarakat terhadap

daya beli. Perekonomian pada nasional diarahkan pada hilirasi dan mengubah model ekonomi yang cenderung efisien dan produktif.



Gambar V. 4 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Misi 2

Sumber : Data Diolah, 2024

Tahun 2025 - 2029 Penguatan Nilai tambah ekonomi sektor unggulan

Pada periode 2025 hingga 2029, diarahkan untuk penguatan yang signifikan dalam nilai tambah ekonomi sektor unggulan yang berfokus pada pariwisata, pertanian, dan UMKM di berbagai wilayah. Melalui strategi kolaboratif antara pemerintah, industri, dan lembaga riset, terjadi diversifikasi dan modernisasi yang berkelanjutan dalam sektor-sektor kunci seperti teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur canggih. Investasi besar dalam inovasi dan infrastruktur membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Selain itu, penekanan pada pengembangan sumber daya manusia yang terampil dan adaptif mendukung transformasi ekonomi yang inklusif, memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tahun 2030 - 2034 Percepatan produktivitas nilai tambah Ekonomi Unggulan, yang disertai Eksplorasi Sumber Ekonomi Baru

Pada periode 2030 hingga 2034, terjadi percepatan yang luar biasa dalam produktivitas nilai tambah ekonomi unggulan, seiring dengan eksplorasi sumber ekonomi baru yang menjanjikan. Dengan adopsi teknologi yang semakin canggih dan keberanian untuk mengambil risiko dalam berinovasi, sektor-sektor utama seperti teknologi informasi, keuangan, dan energi terbarukan mengalami lonjakan kinerja yang mengesankan. Sementara itu, upaya intensif untuk mengeksplorasi potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya dan mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal memberikan dorongan tambahan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga memainkan peran

kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung untuk inovasi dan investasi, membawa dampak positif bagi kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.

Tahun 2035 – 2039 Penguatan nilai tambah ekonomi yang mampu berekspansi

Pada periode tahun 2035 hingga 2039, terjadi penguatan yang berkelanjutan dalam nilai tambah ekonomi yang memiliki kemampuan untuk berekspansi secara luas. Melalui peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan, sektor-sektor kunci seperti teknologi, keuangan, dan infrastruktur mengalami pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Adopsi teknologi yang terus berkembang, seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things, mempercepat efisiensi dan inovasi di seluruh rantai nilai, menciptakan peluang baru untuk penetrasi pasar global. Selain itu, dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan memperluas akses ke pasar baru menggairahkan semangat wirausaha dan meningkatkan daya saing perusahaan lokal di pasar global, menjadikan ekonomi lebih dinamis dan resisten terhadap perubahan eksternal.

Tahun 2040 – 2045 Perwujudan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Pada periode 2040 hingga 2045, terjadi perwujudan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. pertumbuhan ekonomi mengakomodasi kebutuhan lapisan masyarakat menengah dan bawah tanpa meninggalkan siapa pun di belakang. Selain itu, keberlanjutan diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik bisnis, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dengan inklusi dan keberlanjutan sebagai landasan, masyarakat mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan lingkungan, menciptakan masa depan yang lebih adil dan lestari untuk semua.

Adapun untuk mewujudkan arah kebijakan Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berdaya saing , diarahkan untuk:

Tabel V. 2 Arah Kebijakan Transformatif Misi 2 RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Ekonomi	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>),
	Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang mendorong bertumbuhnya pusat ekonomi baru
	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan

Transformasi Arah Kebijakan

- Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta perlindungan HAKI untuk pengembangan DUDI yang berdaya saing
- Peningkatan produktivitas, Kualitas dan daya saing produk pertanian (Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan) yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan serta ketersediaan air berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi
- Perlindungan usaha yang mengalami kerugian akibat bencana
- Peningkatan pemasaran Produk daerah melalui digital marketplace/platform.
- Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
- Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
- Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
- Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.
- Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
- Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
- Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
- Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
- Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.
- Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.

Transformasi	Arah Kebijakan
	Industrialisasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi dalam rangka meningkatkan nilai tambah
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (pembiayaan dan pemasaran), kemitraan usaha dan perluasan akses ekosistem digital (ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis)
	Peningkatan produktivitas BUMD.
	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dan sustainable dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) di wilayah Ijen Geopark
	Peningkatan rantai nilai ekonomi melalui skema-skema kerja sama lokal, nasional dan global
	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.

Sumber: Diolah, 2024

5.1.3 Arah Kebijakan Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang bersih dan Berdampak

Tata Kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, akuntabel, didasarkan atas transparansi dan mematuhi regulasi yang telah diatur. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah daerah untuk berkerja yang dapat berkontribusi dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas.



Gambar V. 5 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Misi 3

Sumber : Data Diolah, 2024

Tahun 2025 - 2029 Penguatan Birokasi Berkualitas dan Digitalisasi Layanan Publik

Pada periode tahun 2025 hingga 2029, terjadi penguatan yang signifikan dalam birokrasi yang berkualitas dan digitalisasi layanan publik. Dengan fokus pada efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas, pemerintah mengimplementasikan reformasi birokrasi yang mendalam, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih. Proses administratif yang tadinya lambat dan rumit menjadi lebih cepat dan efektif, meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain itu, digitalisasi layanan publik memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat bagi warga, serta memperluas jangkauan layanan di wilayah yang terpencil atau terpinggirkan.

Tahun 2030 – 2034 Percepatan Birokrasi Kolaboratif-Efisien, Regulasi Adaptif

Pada periode 2030 hingga 2034, terjadi percepatan dalam transformasi menuju birokrasi yang kolaboratif, efisien, dan regulasi yang adaptif. Pemerintah lebih menekankan pendekatan baru yang mempromosikan kerja sama lintas sektor dan antarlembaga, memungkinkan berjalannya proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pasar. Selain itu, regulasi dirombak secara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tahun 2035 – 2039 Memantapkan Kelembagaan dan Layanan Publik yang adaptif

Pada periode ini terjadi proses konsolidasi yang kuat dalam memantapkan kelembagaan dan layanan publik yang adaptif terhadap dinamika zaman. Pemerintah mengarahkan upaya untuk meningkatkan responsivitas institusi publik terhadap perubahan lingkungan, baik itu melalui pengoptimalan struktur organisasi, pembaruan kebijakan, atau penerapan teknologi informasi terkini. Dengan pendekatan yang

berorientasi pada data dan partisipatif, masyarakat juga semakin terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Tahun 2040 – 2045 Tata kelola pemerintahan yang berdampak dan berkualitas

Pada rentang tahun 2040 hingga 2045, terjadi perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang menghasilkan dampak positif dan berkualitas. Melalui upaya berkelanjutan dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, pemerintahan mengalami transformasi menuju sistem yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, integrasi teknologi yang canggih dalam proses pengambilan keputusan dan penyediaan layanan publik meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, serta memperkuat ikatan antara pemerintah dan warga negara. Dengan penekanan yang kuat pada nilai-nilai inklusif dan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan menjadi lebih berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan yang holistik, membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

Adapun untuk mewujudkan arah kebijakan Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berdampak, diarahkan untuk:

Tabel V. 3 Arah Kebijakan Transformatif Misi 3 RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

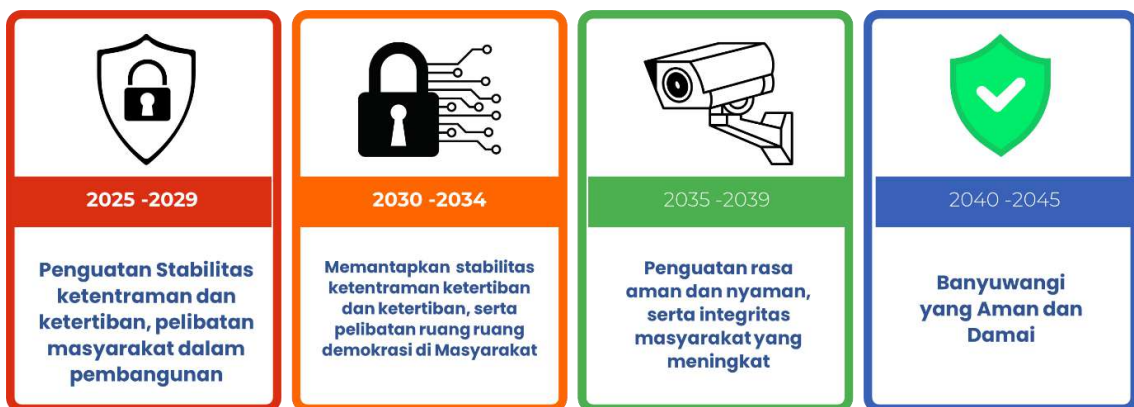
Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Tata Kelola	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN menuju penyelenggaraan pemerintah yang profesional dan bebas korupsi.
	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
	Sinergitas stakeholders dalam pengembangan pembiayaan dan manajemen tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan profesional
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.

Transformasi	Arah Kebijakan
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten Banyuwangi.
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
	peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan sumber pendapatan daerah
	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

Sumber: Diolah, 2024

5.1.4 Arah Kebijakan Misi 4: Memantapkan Stabilitas Ketentraman, Ketertiban Dan Demokrasi

Untuk menciptakan transformasi sosial dan ekonomi, perlu di dukung stabilitas ketentraman dan ketertiban di wilayah, dan dorongan demokrasi yang dewasa. Untuk mendukung visi dilakukan melalui arah kebijakan.




Gambar V. 6 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Misi 4

Sumber : Data Diolah, 2024

Tahun 2025 - 2029 Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban, Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan

Pada rentang tahun 2025 hingga 2029, terciptanya suasana stabil dan penuh ketentraman serta ketertiban, dengan masyarakat yang secara aktif terlibat dalam proses pembangunan. Partisipasi yang kuat dari masyarakat dalam merumuskan



kebijakan dan program-program pembangunan memastikan bahwa kebutuhan serta aspirasi mereka diakomodasi dengan baik, menciptakan lingkungan yang inklusif dan progresif bagi pertumbuhan bersama.

Tahun 2030 – 2034 Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban dan ketertiban, serta Pelibatan Ruang – Ruang Demokrasi di Masyarakat

Pada periode 2030 hingga 2034, fokus utama adalah memantapkan stabilitas, ketentraman, dan ketertiban dalam masyarakat, sekaligus meningkatkan partisipasi dalam ruang-ruang demokrasi. Melalui upaya yang berkelanjutan dalam memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dan keamanan, serta pendekatan proaktif dalam mencegah konflik dan menyelesaikan perselisihan, tercipta lingkungan yang aman dan kondusif bagi pembangunan. Di samping itu, masyarakat didorong untuk aktif terlibat dalam proses demokratis, baik melalui partisipasi dalam pemilihan umum, konsultasi publik, maupun organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka..

Tahun 2035 – 2039 Penguatan Rasa Aman dan Nyaman, serta Integritas Masyarakat yang Meningkatkan

Pada periode 2035 hingga 2039, terjadi penguatan yang signifikan dalam rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat, seiring dengan peningkatan integritas yang. Dengan pendekatan yang holistik, pemerintah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan komunitas untuk mengatasi berbagai tantangan keamanan, mulai dari kejahatan jalanan hingga ancaman keamanan siber. Di samping itu, upaya yang ditingkatkan dalam mempromosikan nilai-nilai etika, moral, dan tanggung jawab sosial membawa dampak positif pada integritas masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang lebih stabil, harmonis, dan saling percaya, memberikan pondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan di masa depan.

Tahun 2040 – 2045 Perwujudan Banyuwangi yang Aman dan Damai

Pada g tahun 2040 hingga 2045, Banyuwangi telah mengukuhkan posisinya sebagai destinasi yang dikenal karena keamanan dan kedamaian yang terpelihara. Dengan terus memperkuat sinergi antara stakeholder, langkah-langkah strategis diterapkan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban. kota ini mampu mempertahankan citranya sebagai tempat yang aman untuk hidup dan beraktivitas. Selain itu, semangat gotong royong dan solidaritas di antara warga terus ditanamkan, menjadikan Banyuwangi bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga rumah bagi keragaman budaya dan harmoni sosial yang berkelanjutan.



Adapun untuk mewujudkan arah kebijakan Memantapkan Stabilitas Ketentraman, Ketertiban dan demokrasi, diarahkan untuk:

Tabel V. 4 Arah Kebijakan Transformatif Misi 4 RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Kebijakan
Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil
	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial

Sumber: Diolah, 2024

5.1.5 Arah Kebijakan Misi 5: Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya Daerah

Ketahanan sosial budaya merujuk pada kemampuan suatu masyarakat untuk menjaga dan melindungi identitas, nilai-nilai, norma, dan warisan budaya mereka dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Penting untuk dicatat bahwa ketahanan sosial budaya adalah proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan berkembangnya waktu. Masyarakat perlu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik tanpa mengorbankan identitas dan nilai-nilai budaya mereka.




Gambar V. 7 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Misi 5

Sumber : Data Diolah, 2024

Tahun 2025 - 2029 Memperkuat Sosial Budaya sebagai Identitas Daerah

Pada periode 2025 hingga 2029, Banyuwangi memperkuat esensi sosial budayanya sebagai identitas yang membedakannya. Melalui program-program inklusif yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, warisan budaya lokal seperti tarian, musik, dan festival tradisional ditingkatkan nilai dan pemahamannya. Pemerintah setempat bekerja sama dengan pemangku kepentingan budaya untuk memperkuat infrastruktur seni dan kebudayaan, menjadikan Banyuwangi tujuan utama bagi



wisatawan yang mencari pengalaman budaya yang kaya dan autentik. Dengan memperkuat dan merayakan keberagaman budaya yang unik, Banyuwangi tidak hanya mempertahankan identitasnya, tetapi juga memperkuat ikatan antargenerasi, antar umata beragama, antar suku serta meningkatkan kebanggaan kolektif di antara penduduknya.

Tahun 2030 – 2034 Memantapkan Sosial Budaya sebagai Pendorong Ketahanan Daerah
Pada rentang tahun 2030 hingga 2034, Banyuwangi memantapkan posisinya sebagai pendorong ketahanan daerah melalui penguatan yang kokoh pada aspek sosial budayanya, serta keharmonisan antara suku dan agama. Dengan fokus pada pembangunan kapasitas masyarakat dalam melestarikan warisan budaya lokal, pemerintah setempat memberikan dukungan penuh untuk inisiatif-inisiatif yang mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan seni, festival, dan kegiatan budaya lainnya. Selain menjadi daya tarik pariwisata yang tak tertandingi, kekayaan budaya Banyuwangi juga menjadi fondasi yang kuat bagi ketahanan komunitas dalam menghadapi tantangan eksternal maupun internal. Melalui keterlibatan dan kebanggaan akan identitas budaya mereka, masyarakat Banyuwangi tidak hanya menjaga warisan nenek moyang mereka tetap hidup, tetapi juga mengukuhkan kedudukan kota sebagai pusat kebudayaan yang berdaya tahan dan inspiratif.

Tahun 2035 – 2039 Mewujudkan Ketangguhan Sosial Budaya untuk Menghadapi Perubahan

Pada periode 2030 hingga 2034, memasuki fase penting dalam mempersiapkan ketangguhan sosial budayanya untuk menghadapi perubahan yang dinamis. Melalui pendekatan yang berbasis pada kerukunan umat, partisipasi masyarakat, pemerintah dan kelompok budaya lokal bekerja sama dalam menggalang kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan budaya, sementara juga memperkuat keterlibatan generasi muda dalam upaya pelestarian. Dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan global, Banyuwangi menjadikan keberagaman budayanya sebagai sumber daya utama dalam menghadapi tantangan masa depan. Banyuwangi ini berhasil mewujudkan ketangguhan sosial budayanya melalui berbagai pemberdayaan komunitas, pendidikan budaya, dan promosi seni dan tradisi lokal. Dukungan yang terus-menerus dari pemerintah dan kolaborasi yang erat antara pemangku kepentingan budaya memperkuat identitas kultural Banyuwangi sebagai landasan yang kuat untuk menghadapi perubahan global dan memastikan warisan budaya yang kaya tetap hidup dan relevan untuk generasi mendatang.



Tahun 2040 – 2045 Banyuwangi yang Berbudaya dan Bermartabat

Pada periode tahun 2040 hingga 2045, Banyuwangi sebagai pusat budaya yang berwibawa dan bermartabat. Dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi kontemporer, Banyuwangi ini menjadi utama bagi para pecinta seni, budaya, dan sejarah. Melalui upaya berkelanjutan dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya, serta peningkatan aksesibilitas terhadap kesenian dan kegiatan budaya. Dukungan penuh dari pemerintah dan komunitas budaya lokal menjadikan Banyuwangi tidak hanya kota yang berbudaya, tetapi juga kota yang berdikari dan memiliki martabat yang tinggi dalam menginspirasi dan memperkaya kehidupan manusia.

Adapun untuk mewujudkan arah kebijakan Memantapkan Ketahanan Sosial dan Budaya, diarahkan untuk:

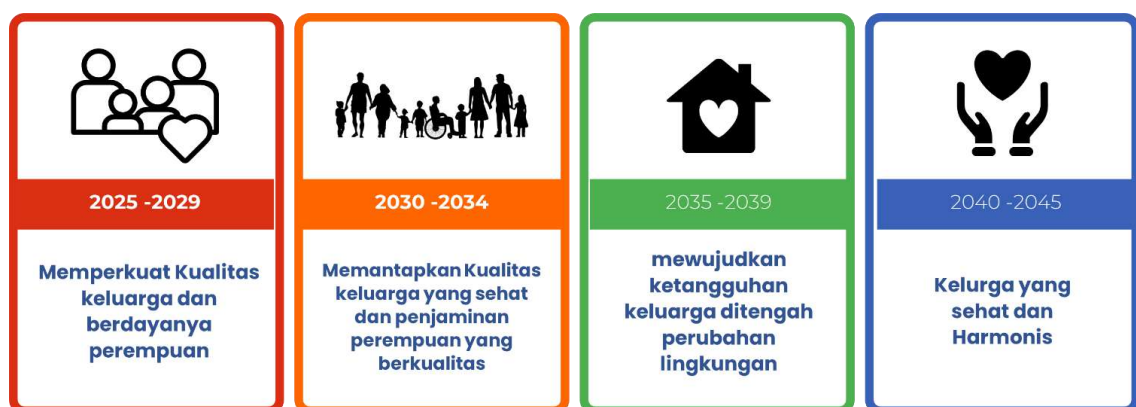
Tabel V. 5 Arah Kebijakan Transformatif Misi 5 RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Kebijakan
Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya lokal dalam bingkai NKRI
	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.

Sumber: Diolah, 2024

5.1.6 Arah Kebijakan Misi 6: Membangun Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender

Keluarga yang harmonis dan mendukung kesetaraan perempuan adalah lingkungan di mana semua anggota keluarga diperlakukan dengan adil, dihargai, dan memiliki kesempatan yang setara dalam segala hal. Keluarga yang harmonis menekankan komunikasi terbuka dan jujur antara semua anggota keluarga.




Gambar V. 8 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Misi 6

Sumber : Data Diolah, 2024

Tahun 2025 - 2029 Memperkuat Kualitas Keluarga dan Berdayanya Perempuan

Pada tahun 2025 hingga 2029, Banyuwangi memfokuskan upayanya untuk memperkuat kualitas keluarga dan memberdayakan perempuan. pemberdayaan perempuan dalam



berbagai bidang, termasuk politik dan ekonomi, membawa dampak positif bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan setara, Banyuwangi bukan hanya memperkuat kualitas hidup keluarga, tetapi juga menggali potensi penuh perempuan sebagai agen perubahan yang mendorong kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Tahun 2030 – 2034 Memantapkan Kualitas Keluarga yang sehat dan penjaminan perempuan yang berkualitas

Pada periode tahun 2030 hingga 2034, Banyuwangi memantapkan komitmen untuk meningkatkan kualitas keluarga dengan penekanan khusus pada kesehatan fisik, mental, dan emosional. setiap keluarga memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang diperlukan. Selain itu, penjaminan perempuan yang berkualitas menjadi fokus utama, dengan upaya untuk meningkatkan akses mereka terutama termasuk juga perlindungan perempuan.

Tahun 2035 – 2039 Mewujudkan Ketangguhan Keluarga ditengah Perubahan Lingkungan

Pada rentang tahun 2035 hingga 2039, Banyuwangi memfokuskan upayanya untuk mewujudkan ketangguhan keluarga di tengah tantangan perubahan lingkungan yang semakin kompleks. kesadaran akan pentingnya praktik-praktik berkelanjutan dan adaptif ditingkatkan, membantu keluarga untuk menyesuaikan diri dan bertahan di lingkungan yang dinamis. Dengan memperkuat hubungan antaranggota keluarga, membangun ketahanan psikologis, dan meningkatkan keterampilan tanggap darurat

Tahun 2040 – 2045 Keluarga yang Sehat dan Harmonis

Pada periode 2040 hingga 2045, Banyuwangi meraih pencapaian luar biasa dengan mewujudkan visi keluarga yang sehat dan harmonis. Banyuwangi meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional keluarga. Dukungan tersedia dalam bentuk akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan tentang kesehatan reproduksi, serta pelatihan dalam meningkatkan komunikasi dan keterampilan berkeluarga. Selain itu, nilai-nilai kebersamaan, saling pengertian, dan toleransi diperkuat melalui program-program yang mempromosikan keharmonisan dan solidaritas di antara anggota keluarga. Dengan demikian, Banyuwangi tidak hanya menjadi tempat tinggal yang nyaman dan aman, tetapi juga komunitas yang menumbuhkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi setiap keluarga yang menghuninya.

Adapun untuk mewujudkan arah kebijakan Membangun Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender, diarahkan untuk:



Tabel V. 6 Arah Kebijakan Transformatif Misi 6 RPJPD Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Kebijakan
Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan
	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.

Sumber: Diolah, 2024

5.1.7 Arah Kebijakan Misi 7: Memantapkan Ketahanan Ekologi Untuk Keseimbangan Pembangunan

Lingkungan hidup yang berkualitas adalah suatu kondisi di mana udara, air, dan tanah bersih dari polusi yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Lingkungan ini, sumber daya alam yang dikelola dengan bijaksana untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Akses yang memadai terhadap air bersih, sanitasi, dan energi terbarukan menjadi norma, sementara pengelolaan limbah dilakukan secara efisien. Kesesuaian lingkungan dengan kebutuhan manusia tercermin dalam adanya ruang terbuka hijau, fasilitas umum, dan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Lingkungan hidup yang berkualitas juga mencerminkan komitmen pada keadilan sosial dan inklusi, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaatnya tanpa adanya diskriminasi. Dalam lingkungan ini, prinsip-prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan menjadi panduan utama untuk menciptakan dunia yang seimbang dan lestari bagi generasi saat ini dan mendatang.



Gambar V. 9 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Misi 7

Sumber : Data Diolah, 2024

Tahun 2025 - 2029 Memperkuat Ekosistem Lingkungan hidup

Pada periode tahun 2025 hingga 2029, Banyuwangi menekankan pentingnya memperkuat ekosistem lingkungan hidup sebagai kerangka implemementasi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Melalui kebijakan yang progresif , langkah-langkah strategis diterapkan untuk menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi pencemaran lingkungan, dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pendidikan lingkungan yang ditingkatkan, infrastruktur pengelolaan sampah, program rehabilitasi ekosistem, dan promosi gaya hidup berkelanjutan menjadi fokus utama, memastikan bahwa Banyuwangi tetap menjadi tempat yang lestari dan tahan bencana.

Tahun 2030 - 2034 Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup

Pada periode 2030 hingga 2034, dengan percepatan pembangunan di sektor ekonomi tentunya berdampak pada lingkungan hidup maka perlu pengawasan pada pencemaran lingkungan hidup. Pemerintah Banyuwangi mendorong utamakan inovasi teknologi hijau, pengelolaan limbah yang efisien, dan edukasi lingkungan yang terus-menerus, pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk mengurangi jejak karbon dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Melalui kemitraan yang erat antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, Banyuwangi berhasil membangun lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan lestari untuk generasi mendatang.

Tahun 2035 - 2039 Mewujudkan Ketangguhan Lingkungan

Pada periode 2035 hingga 2039, bertujuan untuk mewujudkan ketangguhan lingkungan yang tidak hanya meningkatkan respons terhadap bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan komunitas terhadap ancaman lingkungan. Melalui pendekatan berbasis ekosistem dan partisipatif, pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam menyusun adaptasi yang komprehensif, termasuk pengelolaan risiko bencana, penanaman

kembali hutan, dan revitalisasi daerah rawan bencana. Dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti sistem peringatan dini dan infrastruktur ramah lingkungan.

Tahun 2040 – 2045 Mewujudkan Banyuwangi yang Lestari

Pada periode tahun 2040 hingga 2045, Banyuwangi berhasil mewujudkan visi menjadi kota yang lestari melalui upaya kolektif yang luar biasa dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan komitmen yang kokoh terhadap pelestarian alam, pemerintah dan masyarakat secara aktif terlibat dalam inisiatif-inisiatif berbasis lingkungan, mulai dari pengembangan energi terbarukan hingga rehabilitasi ekosistem yang terancam. Melalui investasi dalam teknologi hijau, praktik pertanian organik, dan kesadaran akan pentingnya konservasi sumber daya alam, Banyuwangi menjaga keberlanjutan lingkungannya sambil mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan berfokus pada kebijakan yang berkelanjutan dan partisipasi masyarakat yang aktif, Banyuwangi mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, menciptakan masa depan yang cerah dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Adapun untuk mewujudkan arah kebijakan Memantapkan Ketahanan Ekologi Untuk Keseimbangan Pembangunan, diarahkan untuk:

Tabel V. 7 Arah Kebijakan Transformatif Misi 7 RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

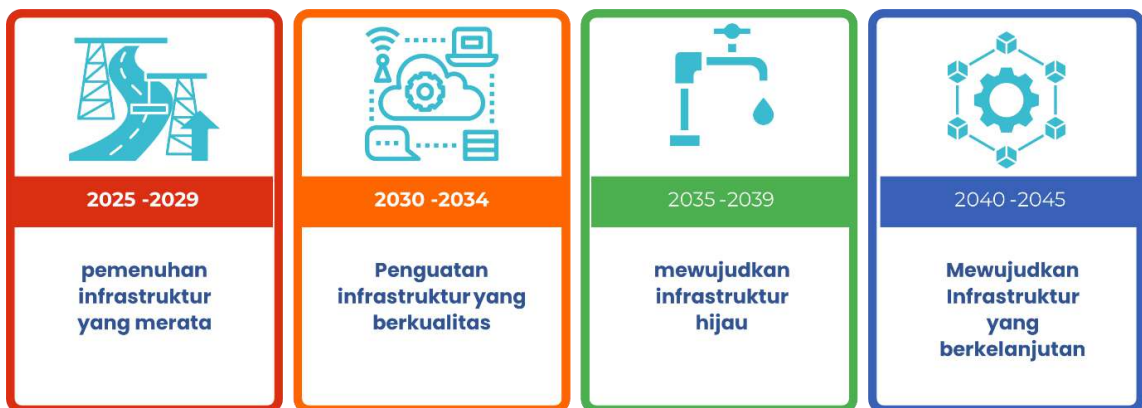
Transformasi	Arah Kebijakan
Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
	Perencanaan dan pengimplementasian tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim.

Transformasi	Arah Kebijakan
	Penerapan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.

Sumber: Diolah, 2024

5.2.8 Arah Kebijakan Misi 8: Pemenuhan Infrastruktur Berkelanjutan dan Berkesinambungan

Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan mencakup infrastruktur yang dirancang dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan berfokus pada keberlanjutan. Ini melibatkan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas yang memenuhi standar keamanan, efisiensi energi, dan manajemen limbah. Contoh sarana berkualitas dan ramah lingkungan termasuk bangunan hijau dengan desain energi-efisien, sistem transportasi berbasis energi terbarukan, dan instalasi sanitasi yang meminimalkan dampak pada sumber daya air. Selain itu, prasarana yang berkualitas juga mencakup pengelolaan taman kota, penanaman pohon, dan pelestarian ruang terbuka hijau untuk mendukung biodiversitas dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan binaan yang berkontribusi positif terhadap kesehatan manusia, mengurangi emisi karbon, dan mendukung keberlanjutan jangka panjang.




Gambar V. 10 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Misi 8

Sumber : Data Diolah, 2024

Tahun 2025 - 2029 Pemenuhan infrastruktur yang merata

Pada rentang tahun 2025 hingga 2029, langkah-langkah signifikan dalam pemenuhan infrastruktur yang merata di seluruh wilayahnya. Melalui komitmen pemerintah yang kuat dan investasi strategis, jaringan transportasi, diperluas dan diperbaharui untuk



memastikan akses yang lebih baik bagi penduduk pedesaan dan perkotaan. Selain itu, investasi dalam penyediaan perumahan layak, air bersih, sanitasi, dan pangan juga dipercepat, menjadikan layanan dasar ini tersedia bagi semua warga Banyuwangi dengan memperkuat infrastruktur secara merata.

Tahun 2030 – 2034 Penguatan infrastruktur yang berkualitas

Pada periode 2030 hingga 2034, Banyuwangi menitikberatkan pada penguatan infrastruktur yang berkualitas sebagai kerangka implementasi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dengan fokus pada inovasi teknologi dan efisiensi, pemerintah dan mitra sektor swasta berkolaborasi dalam mengembangkan infrastruktur yang tangguh dan adaptif, termasuk jaringan transportasi modern, sumber energi terbarukan, dan sistem telekomunikasi yang canggih. Melalui investasi yang berkelanjutan dalam pemeliharaan dan perawatan infrastruktur yang ada, Banyuwangi memastikan bahwa masyarakatnya dapat menikmati akses yang lebih baik terhadap layanan kunci seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi, air, pangan dan infrastruktur penanggulangan bencana.

Tahun 2035 – 2039 Mewujudkan Infrastruktur Hijau

Pada periode tahun 2035 hingga 2039, memprioritaskan untuk mewujudkan infrastruktur hijau sebagai langkah progresif dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. Dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan, bersama sama dalam mengimplementasikan inovasi teknologi dan praktik ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur. Melalui langkah-langkah ini, menjadi model kota yang berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan manfaat bagi penduduknya saat ini, tetapi juga mempertahankan keindahan dan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.

Tahun 2040 – 2045 Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan

Banyuwangi mewujudkan infrastruktur berkelanjutan yang menjadi tulang punggung bagi pembangunan yang lestari. Dengan mengintegrasikan teknologi terbaru dan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan, untuk mengembangkan infrastruktur yang ramah lingkungan dan efisien secara energi. Investasi dalam energi terbarukan, transportasi publik yang bersih, sistem pangan dan manajemen air yang berkelanjutan menjadi prioritas utama, memperkuat komitmen Banyuwangi untuk mengurangi jejak karbon dan melindungi lingkungan alam. Dengan langkah-langkah ini, Banyuwangi mengadopsi infrastruktur berkelanjutan, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih hijau, seimbang, dan berkualitas bagi semua warganya.



Adapun untuk mewujudkan arah Pemenuhan Infrastruktur Berkelanjutan, diarahkan untuk:

Tabel V. 8 Arah Kebijakan Transformatif Misi 8 RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Sosial	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau, penyediaan hunian vertikal, penataan kawasan kumuh, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay
Transformasi Ekonomi	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan
	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah , salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)
	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum.
	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi
	City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism dan wilayah kawasan pariwisata
	Pengembangan multi-infrastructure backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis
	Penguatan pengelolaan jalan daerah, jalan desa dan jalan lingkungan sebagai wujud mengurangi disparitas antar wilayah
	Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas sebagai upaya mengoptimalkan akses pariwisata dan potensi wilayah.
	Upaya dalam rangka mendukung: (1) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik, (2) Penyebarluasan informasi pengalih fungsian penggunaan cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan. (3) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas. (4) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi

Transformasi	Arah Kebijakan
	<p>Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.</p>
	<p>Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.</p>
	<p>Percepatan penyusunan rencana pengembangan daerah/wilayah meliputi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), dll</p>
	<p>Pengembangan sarana prasarana kereta api ,</p>
	<p>Peningkatan pelaksanaan Reformasi Agraria</p>
	<p>Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi</p>

Sumber: Diolah, 2024

5.2 Sasaran Pokok Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator utama pembangunan pada level impact dan bersifat progresif. Indikator yang ditetapkan memperhatikan 45 indikator nasional dan juga mempertimbangkan karakteristik daerah. Berikut merupakan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 yang disajikan berdasarkan misi, dijabarkan berdasarkan sasaran visi, serta disertai dengan target sasaran pokok dalam masing-masing periode pembangunan.



Gambar V. 11 Sasaran Visi, dan Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

Sumber : Data Diolah, 2024

Sasaran pokok merupakan rincinan pernyataan kinerja yang diturunkan dari misi pembangunan dan arah kebijakan serta menggambarkan pencapaian perwujudan visi daerah. Pada penentuan sasaran pokok memperhatikan sasaran visi dan arah pembangunan RPJPN tahun 2025-2045. Rumusan sasaran pokok dilengkapi dengan indikator indikator dan disertai dengan target – target yang harus dicapai sesuai dengan pentahapan arah kebijakan secara berkesinambungan. Berikut adalah Sasaran Pokok dan Indikator RPJPD Kabupaten Banyuwangi yang telah memperhatikan Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur:

Tabel V. 9 Sasaran Pokok dan Indikator RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Satuan	TARGET	
				TAHUN 2025	TAHUN 2045
Mewujudkan Transformasi Sosial yang Unggul dan Berkeadilan	Pendidikan berkualitas yang merata	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	8,01	9,73
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,14	13,34
		Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	80,57	90-95

MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Satuan	TARGET	
				TAHUN 2025	TAHUN 2045
		Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional		56,16	80-90
		Rerata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	73,49	80-90
		Rerata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional		53,21	80-90
		Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	8,83	10,67
	Kesehatan berkualitas untuk semua	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,26	79,34
		Angka Kematian Ibu	Jiwa per 100.000 Kelahiran hidup	134,76	21,74
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	16,91	4,77
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan	%	73	95
	perlindungan sosial yang adaptif	Tingkat Kemiskinan	%	6,67 – 6,05	0,5 – 0,15
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	26,39	83,52
		% Peserta Penyandang Disabilitas bekerja di Sektor Formal	%	10 – 20	50 – 70
		Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of undernourishmen(%	8,19	0,48

MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Satuan	TARGET	
				TAHUN 2025	TAHUN 2045
Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berdaya saing	Ekonomi Bernilai tambah (<i>value creation</i>) yang inklusif	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	13,12 - 14,72	20,19 - 20,77
		Rasio Kewirausahaan	Angka	3%	10%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,37 - 3,80	2,67 - 1,68
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	71,87	80,47
		Pembentukan Modal Tetap Bruto	(%)	31,67 - 31,72	31,78 - 34,59
	Produktivitas berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks daya Saing Daerah	Indeks	3,5	4,5 - 4,75
		Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara yang Menginap	Angka	70000	250000
		Realisasi Investasi	Triliun Rp	3,56	7,18
		ICOR		5,96	4,95
		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84	88,50
		Persentase Desa Mandiri (%)	%	26,46	54,50
		Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (%)	%	10	17
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,08 - 3,98	4,69 - 6,99
		Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Bersih dan Berdampak	Birokrasi yang bergerak cepat dan berdampak	Indeks Pelayanan Publik	Indeks
Nilai SPBE	Indeks			4,86	5
Memantapkan Stabilitas Ketentraman,	Terciptanya Rasa Aman Dan Ruang	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan	%	70,5 - 75	80,5 - 85

MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Satuan	TARGET	
				TAHUN 2025	TAHUN 2045
Ketertiban dan demokrasi	Demokrasi Bagi Masyarakat	sendirian di area tempat tinggalnya (%)			
		Indeks Demokrasi	Indeks	tinggi	Tinggi
Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya Daerah	Terjaganya indentitas sosial budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	63-65	80-85
		Indeks Toleransi (relasi antar manusia)	Indeks	80 - 90	90 - 95
Membangun Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	keluarga yang harmonis	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	55 - 56	60 - 70
	Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,212 - 0,211	0,10 - 0,09
Memantapkan Ketahanan Ekologi untuk Keseimbangan Pembangunan	Lingkungan hidup yang berkualitas dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	78,27	79,86
		Indeks Resiko Bencana	Indeks	134,67	114,69 - 97,54
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	-	92
		Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan penuh pengumpulan sampah	%	-	100
Pemenuhan Infrastruktur Berkelanjutan dan Berkesinambungan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan ramah lingkungan	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	-	94
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	-	100
		Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	81	100

Sumber: Diolah, 2024



BAB VI

PENUTUP

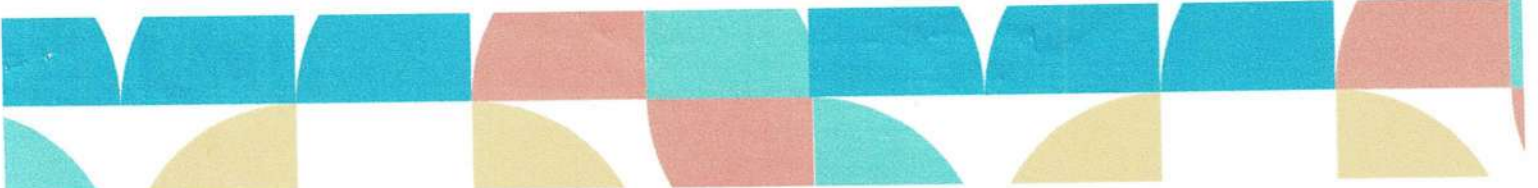
6.1 TRANSISI

Dokumen RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun 2025 hingga tahun 2045. Setelah berakhirnya RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045, perlu disusun RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dua puluh tahun berikutnya. Tahun 2045 merupakan masa transisi dimana pada tahun tersebut RPJPD di evaluasi dan kemudian disusun rancangan awal sesuai pedoman.

6.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan menjadi penting untuk memastikan seluruh arah kebijakan dan sasaran pembangunan dapat tercapai dan terlaksana. Beberapa kaidah pelaksanaan memuat substansi mulai dari pelaksanaan rencana turunan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta proses peninjauan kembali. Beberapa skema yang dimaksud dalam kaidah pelaksanaan ini termuat sebagai berikut:

1. Calon Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi wajib mempelajari dan memahami arah kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Banyuwangi khususnya pada periode dia saat mencalonkan;
2. Tahap setelah diterbitkannya dokumen RPJPD ini, maka Langkah berikutnya yaitu setiap arah kebijakan sampai dengan target pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan dalam wujud RPJMD, dokumen rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang bersifat tahunan harus mempertimbangkan target dalam dokumen ini. Disamping itu, setiap perangkat daerah dapat merumuskan berbagai dokumen perencanaan sektoral yang dapat mengacu pada Dokumen RPJPD ini;
3. Dokumen RPJPD ini juga dapat menjadi acuan penyelarasan terhadap dokumen perencanaan pembangunan spasial yang termuat dalam dokumen RTRW beserta turunannya. Hal ini dimaksudkan untuk keselarasan perwujudan ruang di masyarakat yang sesuai dengan target dan arah kebijakan RPJPD;
4. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2045;
5. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 dengan sebaik-baiknya;

- 
6. Monitoring harus dilakukan secara rutin dan berkala yaitu dalam kurun waktu tahunan, untuk melihat pencapaian target di masing-masing tahunnya;
 7. Evaluasi dan peninjauan kembali dapat dilakukan setiap periode 5 (lima) tahunan, untuk mengetahui pencapaian target pembangunan, serta apakah diperlukan melakukan perbaikan pada dokumen RPJPD ini;
 8. Pelaksanaan semua kebijakan sampai dengan kegiatan yang termuat dalam dokumen ini harus dilaksanakan dengan melibatkan multi-pihak baik pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, sektor bisnis, media massa, organisasi kemasyarakatan, sampai dengan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

6.3 PENUTUP

Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program prioritas, strategi, serta arah kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi.

RPJPD Kabupaten Banyuwangi 2025-2045 merupakan pedoman bagi institusi Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2045 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama dengan DPRD Kabupaten Banyuwangi bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 hingga tahun 2045 demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

BUPATI BANYUWANGI



Fiestiandani

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS